

SOSIOLOGI TOLERANSI

**Kontestasi, Akomodasi,
Harmoni**

Dr. H. Agus Ahmad Safei, M.Ag.



Sosiologi Toleransi
Kontestasi, Akomodasi, Harmoni

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. H. Agus Ahmad Safei, M.Ag.

Sosiologi Toleransi

Kontestasi, Akomodasi, Harmoni



**SOSIOLOGI TOLERANSI
KONTESTASI, AKOMODASI, HARMONI**

Agus Ahmad Safei

Desain Cover :
Priyo Wicaksono

Sumber :
<https://www.shutterstock.com/>

Tata Letak :
Gofur Dyah Ayu

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
xii, 189 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-1395-3

Cetakan Pertama :
Agustus 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id



KATA PENGANTAR

Setiap buku punya riwayatnya sendiri. Tak kecuali buku ini. Pada awalnya, buku ini adalah naskah disertasi ketika penulis menyelesaikan program doktor Sosiologi di Universitas Padjadjaran. Pemilihan topik utama kajian disertasi ini, yakni dinamika toleransi beragama, dilakukan di tengah-tengah merebaknya gejala kemunduran atas rasa dan semangat toleransi yang sedang dibangun. Berbagai tindakan kekerasan dan intoleransi atas nama agama terjadi di berbagai tempat dalam rentang waktu yang bersamaan dengan penggarapan disertasi ini.

Sebuah ungkapan dalam khazanah sosiologi menyebutkan, bahwa jika toleransi mati maka kekerasan terbeli. Dengan menggunakan ungkapan yang berbeda dapat dikatakan, berbagai oraktik intoleransi dan kekerasan bernuansa agama adalah tanda sempurna dari telah matinya toleransi. Padahal, sementara itu, toleransi hadir justru untuk saling menghargai agar realitas tetap eksis dengan segala warna-warninya. Demikian halnya dengan keberadaan sebuah bangsa atau masyarakat yang hadir di atas keragaman ras, suku, budaya dan agama. Ia akan semakin kukuh ketika keragaman itu bersinergi dalam rangkaian interaksi untuk saling mengisi dan melengkapi. Inilah substansi dari buku ini: Bagaimana dinamika toleransi yang terjadi dibedah dari sudut pandang sosiologi.

Dalam ikhtiar menghadirkan agama sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, salah satu yang bisa dikerjakan, menurut penulis, adalah dengan menghadirkan kesadaran toleransi beragama. Sebab, toleransi merupakan fundamen dalam beragama. Pada titik inilah, menurut hemat penulis, topik dinamika toleransi beragama sangat penting untuk diangkat ke permukaan. Lebih penting lagi, disertasi ini menunjukkan bahwa masih ada wilayah di Negara ini, yakni di Kota Bandung, di mana toleransi beragama masih dapat dipelihara dengan baik.

Naskah disertasi yang kini bersalin rupa menjadi buku ini memang ditulis dalam keheningan, tetapi dunia akademis tidak pernah sendirian. Karena itu, pada ruang ini, dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkenan membantu selama proses penelitian dan penulisan disertasi ini. Pertama, penulis sampaikan rasa terima kasih dan takzim yang amat dalam kepada almarhum Prof. H. Kusnaka Adimihardja, MA, Ph.D. selaku Ketua Tim Promotor atas kesabaran, ketekunan dan keramahannya selama membimbing penulis. Bahkan, menjelang saat-saat akhir hidupnya, masih sempat memberikan beberapa catatan untuk perbaikan disertasi ini. Dari beliau saya belajar tentang kesahajaan sikap, kerendahan hati, dan ketulusan bergaul. Semoga almarhum diberikan tempat yang lapang di sisi-Nya. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir selaku Anggota Tim Promotor sekaligus pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, tempat penulis mengabdikan diri. Penulis juga menyampaikan penghargaan yang sangat dalam kepada Prof. Dr. H. I. Syarief Hidayat, MS selaku Anggota Tim Promotor atas ketekunan, ketelitian, dan kesabarannya dalam membimbing, mengarahkan dan mengoreksi disertasi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Oponen: Prof. H.A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D., Prof. H. Judistira K. Garna, Ph.D., Prof. Dr. H. Haryo Martodirdjo, M.S., dan Dr. H. Yugo Sariyun, M.A., yang telah memberikan catatan revisi dan masukan yang amat konstruktif untuk perbaikan naskah disertasi ini. Terima kasih pula untuk Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, selaku representasi Guru Besar, yang juga telah memberikan catatan revisi amat penting untuk perbaikan naskah disertasi ini.

Secara khusus, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Padjadjaran, Direktur, Ketua Program Pascasarjana FISIP Unpad, Pimpinan, dosen dan karyawan pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, yang telah memberikan banyak hal yang memungkinkan penulis dapat memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu sekaligus menyelesaikannya pada program tersebut. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Rektor UIN Sunan Gunung Djati, tempat penulis mengabdikan diri, yang telah

memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada para responden penelitian ini, baik mereka yang diberi tahu maupun yang tidak diberi tahu bahwa dirinya dipilih oleh penulis sebagai sumber informasi, yang telah memberikan bantuan yang sangat berharga, yang tanpa mereka disertasi ini tidak akan terwujud seperti ini. Namun demikian, secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak H. Dada Rosada (Walikota Bandung), Bapak H. Taufik Rahman (Asisten Pembangunan Pemerintah Kota Bandung), Bapak H. Eddy Haryadi (Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kota Bandung), dan Bapak H. Djudju Syamsuddin (Kasubbag Bintel Pemerintah Kota Bandung). Terima kasih pula untuk Bapak Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl (Ketua MUI Kota Bandung), Prof. Dr. H. Asep S. Muhtadi, M.A. (MUI Kota Bandung, Guru Besar UIN SGD) Bapak H. Diding M. Hasan (Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung), Bapak Dr. H. Ahmad Suherman (Ketua FKUB Kota Bandung), Bapak Lia Noer Hambali (DPRD Kota Bandung), Ibu Hj. Aty Rahmiati (Bapeda Kota Bandung), K.H. Asep Ismail (Ketua FKPP Kota Bandung), Bapak H. Tjetje Soebrata (Ketua DKM Masjid Raya Bandung), Bapak K.H. Maftuh Kholil (Ketua PCNU Kota Bandung), Bapak H. Anwaruddin (Ketua Persis Kota Bandung), Bapak K.H. Cucu Sahrum (Ketua PC Muhammadiyah Kota Bandung), Bapak H. Ugas Koswara (Ketua FSOI Kota Bandung), Bapak Pendeta Jopie Rattu, Ph.D. (Ketua Umum PGPK Kota Bandung), Bapak I Made Dwiwana (Ketua Pembina Masyarakat Hindu Bandung), Bapak I Nyoman Mahendra, Bapak Soekotjo S. Bambang (Ketua Majelis Agama Kong Hu Chu Kota Bandung), Bapak Uskup David Mihardja (Keuskupan Bandung), Bapak Eko Supeno (Kepala Bimas Budha Jawa Barat), Pastor Agus Sugiharto (Keuskupan Bandung), Pastor Abu Kasman (Keuskupan Bandung), Romo Leo van Brandeun (Keuskupan Bandung), dan Wawan Gunawan (Jaka Tarub, Jaringan Kerja Antarumat Beragama Kota Bandung).

Tidak lupa, penulis sampaikan terima kasih pula kepada banyak pihak yang telah memberikan waktu dan antusiasme mereka dalam membantu menyelesaikan disertasi ini: kawan-kawan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, keluarga besar

M2KQ Jawa Barat, keluarga besar LPTQ Jawa Barat, teman-teman di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (khususnya di Biro Yansos dan Badan Kepegawaian Daerah), keluarga besar Masjid Raya Bandung, dan, tentu saja, teman-teman seangkatan pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

Rasa hormat dan doa tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua, ayahanda Nurhasan (almarhum) dan ibunda Ratminah, yang mengajarkan bagaimana sebaiknya sebuah cita-cita diperjuangkan, betapa pun beratnya. Terima kasih yang istimewa untuk istri penulis, Emma Himayaturohmah Abubakar, yang telah menjadi faktor pemungkin bagi datangnya begitu banyak rahmat, kesempatan dan keluasan yang diberikan Tuhan. Kepada anak-anak: Haidar Ainurrahman, Meidina Ainurrahmah, dan Ahmad Aulia Rahman, terima kasih telah menjadi guru sejati dan sumber inspirasi yang tidak ada habis-habisnya.

Sampai tahap ini saja, penulis wajib bersyukur atas anugerah Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan yang luar biasa besar dan menantang ini. Akhirul kalam, baik buruknya karya ini, biarlah sejarah saja yang akan menjadi hakimnya. Semoga jalan dilapangkan Tuhan.

Bandung, Juni 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
KORPUS PEMBUKA:	
TOLERANSI MATI, KEKERASAN TERBELI	1
BAGIAN 1 MENGHADIRKAN AGAMA SEBAGAI RAHMAT KEHIDUPAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Alasan	11
BAGIAN 2 TOLERANSI DAN INTOLERANSI: SEBUAH KERANGKA DASAR.....	14
A. Studi Terdahulu	14
B. Toleransi	19
C. Intoleransi.....	23
D. Mayoritas Minoritas.....	26
E. Akseptasi.....	28
F. Dialog Lintas Agama	31
G. Pluralitas Agama	33
H. Akomodasi	37
BAGIAN 3 PENDEKATAN DAN PENGALAMAN RISET.....	40
A. Pendekatan Riset	40
B. Pengalaman Riset	45
BAGIAN 4 BANDUNG: RUMAH BERSAMA SEMUA UMAT BERAGAMA	48
A. Fenomena Kota Bandung.....	48

	B.	Potensi Keagamaan	51
	C.	Kota Jasa	55
BAGIAN 5		BANDUNG IN HARMONY	60
	A.	Bandung Bermartabat.....	60
	B.	Bandung Agamais	65
	C.	Tenteram dalam Keragaman.....	72
	D.	Jasmara Agama	76
	E.	Bandung Maksiat Watch [BMW]	79
BAGIAN 6		DINAMIKA TOLERANSI.....	83
	A.	Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS).....	83
	B.	Natal: Harmoni dan Toleransi.....	89
	C.	Grup Rebana di Gereja	93
	D.	Sekuntum Mawar Toleransi.....	95
	E.	Buka Puasa Lintas Agama	99
	F.	Toleransi dalam Peringatan Nabi Kong Zi	100
	G.	Toleransi Tumbuh dalam Bencana.....	102
	H.	Dinamika Relasi Umat Lintas Agama.....	105
BAGIAN 7		DINAMIKA INTOLERANSI.....	113
	A.	Intoleransi di “Rumah Suci”	113
	B.	Intoleransi Terhadap Film tentang Toleransi	118
	C.	Intoleransi dalam Bentuk Intimidasi	122
	D.	Intoleransi sebagai Penghambat Toleransi	125
BAGIAN 8		DINAMIKA AKOMODASI.....	129
	A.	Forum Kerukunan Umat Beragama	129
	B.	Dialog dan Kerja Sama Lintas Agama	139
	C.	Deklarasi “Al-Ukhuwah”	145
	D.	Deklarasi “Gedung Sate”	148
	E.	Deklarasi “Forum Bandung Plural”	151
	F.	Kembali ke Regulasi	154
BAGIAN 9		DARI KONTESTASI, MELALUI AKOMODASI, MENUJU HARMONI.....	159

KORPUS PENUTUP:

TOLERANSI TERJADI, HARMONI TERBELI.....	167
DAFTAR PUSTAKA	172
DAFTAR SINGKATAN	186
TENTANG PENULIS	188



KORPUS PEMBUKA: TOLERANSI MATI, KEKERASAN TERBELI

Adanya tarik ulur di antara kehendak mewujudkan toleransi beragama dengan kecenderungan praktik intoleransi beragama di sisi lain telah menghadirkan dinamika sosial yang menarik untuk dikaji. Inilah inti buku Sosiologi Toleransi ini. Bagaimana kontestasi yang terjadi kemudian dijumpai melalui berbagai upaya akomodasi untuk kemudian melahirkan harmoni. Secara khusus, buku ini ingin memotret dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam konteks ikhtiar mewujudkan toleransi beragama.

Secara historis, agama tidak hanya tampil sebagai modal spiritual di tengah masyarakat, tetapi juga dapat muncul menjadi modal sosial untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Pandangan ini relevan dengan apa yang dinyatakan oleh sosiolog José Casanova (1994), yang menyebut bahwa agama dapat melakukan transformasi sosial dengan melakukan deprivatisasi agama, yakni proses di mana agama meninggalkan ruang privat dan memasuki ruang publik guna mengambil peran dan memainkan fungsi sosialnya. Terjadinya kontestasi dan kompetisi antarkelompok keagamaan merupakan sifat dasar manusia. Akomodasi diperlukan untuk mewartakan kepentingan yang berbeda di kalangan umat lintas agama untuk meredakan pertentangan sekaligus menjembatani berbagai perbedaan kepentingan untuk kemudian melahirkan harmoni dalam kehidupan sosial.

Kehadiran program “Bandung Kota Agamais”, relatif merupakan solusi terbaik dalam mengikat keragaman asal-usul, etnis, budaya, dan agama. Dalam konteks membangun toleransi beragama, program “Bandung Kota Agamais” telah menjadi benang homogen atau *common platform* (atau *kalimatun sawa’* dalam terminologi Islam) yang mengikat berbagai pemeluk agama yang berbeda untuk berintegrasi secara sosial. Dalam konteks membangun toleransi beragama, kehadiran program “Bandung Kota Agamais” menjadi bentuk akomodasi tersendiri untuk mewadahi dan melindungi umat beragama di mana mereka merasa diakui, diayomi dan diperlakukan setara.

Dalam beberapa tahun terakhir, dapat disaksikan munculnya gejala kemunduran atas rasa dan semangat toleransi yang sedang dibangun. Berbagai tindakan kekerasan dan intoleransi atas nama agama terjadi di berbagai tempat dalam rentang waktu yang bersamaan dengan penggarapan kajian ini. Peristiwa penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik Banten, dan kemudian disusul dengan peristiwa perusakan gereja di Temanggung Jawa Tengah, adalah rangkaian peristiwa yang menodai kehidupan toleransi beragama di Indonesia. Berbagai peristiwa itu mengindikasikan bagaimana praktik intoleransi kian menebal yang ditandai dengan meningkatnya rasa saling curiga di antara sesama anak bangsa. Kualitas, visi, dan filosofi mulai digeser oleh intimidasi dan provokasi. Intoleransi muncul akibat hilangnya komitmen untuk menjadikan toleransi sebagai jalan keluar mengatasi berbagai persoalan yang membuat bangsa terpuruk.

Dalam konteks ini, benar kata sebuah ungkapan, bahwa jika toleransi mati maka kekerasan terbeli. Tindakan kekerasan dan intoleransi yang terjadi di masyarakat merupakan akibat matinya toleransi. Padahal, toleransi hadir untuk saling menghargai agar realitas tetap eksis dengan segala warna-warninya. Begitupun eksistensi sebuah bangsa yang hadir di atas keragaman ras, suku, budaya dan agama. Ia akan semakin kukuh ketika keragaman itu bersinergi dalam rangkaian interaksi untuk saling mengisi dan melengkapi. Harmoni bukan hegemoni yang menafikan kompetensi. Ia justru menjadi ajang bagi terjadinya kontestasi beragam kebaikan (*fastabiqul khairat*) yang dihadirkan oleh para pemeluk agama yang berbeda.

Buku ini berangkat dari hasil riset yang dilakukan di Kota Bandung yang relatif plural, baik dari sisi etnik maupun keyakinan. Dinamika kehidupan beragama di Kota Bandung semakin meningkat seiring dengan lahirnya program “Bandung Kota Agamais” sejak tahun 2004 lalu, yang dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan toleransi beragama. Buku ini fokus pada masalah “dinamika sosial dalam mewujudkan toleransi beragama di Kota Bandung.” Konsep dinamika sosial dalam penelitian ini merujuk kepada suatu keadaan yang terus bergerak (dinamik) yang salah satunya diakibatkan oleh adanya relasi umat lintas agama. Dinamika sosial yang terjadi tidak hanya berorientasi *progress* (arah kemajuan) semata, tetapi ke arah *regress* (kemunduran). Dengan demikian, dinamika kehidupan umat lintas agama mungkin saja mewujudkan dalam hubungan yang positif dan penuh toleransi atau mungkin juga dalam bentuk hubungan yang intoleran dan penuh konflik.

Secara konseptual, istilah “toleransi” merujuk pada suatu sikap menghargai, menenggang berbagai keyakinan, kebiasaan, kepercayaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bahkan bertentangan secara diametral dengan pandangan atau pendirian sendiri. Dalam konteks sosial budaya, istilah toleransi merujuk pada situasi kompromi atas berbagai kekuatan yang saling berhadapan atau berkonfrontasi untuk kemudian saling bergandeng tangan membela kepentingan bersama yang lebih luas dan tinggi. Adapun pengertian toleransi beragama dalam penelitian ini memiliki makna sikap saling mengakui dan menerima adanya keragaman keyakinan dan kebebasan berekspresi. Secara demikian, lahirnya kesadaran toleransi beragama akan mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati dan dapat saling membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya.

Secara lebih jauh, buku ini ingin mengungkapkan dan menganalisis fenomena-fenomena toleransi beragama yang terjadi di antara umat lintas agama, serta sikap-sikap sosial dalam situasi keragaman beragama sebagai upaya mewujudkan toleransi beragama di Kota Bandung. Melalui itu, buku ini bertujuan untuk menghasilkan konsep terkait bagaimana mengimplementasikan toleransi beragama yang berbasis pada realitas lapangan menurut pandangan pihak-pihak yang terlibat secara empirik dalam proses itu. Konsep yang dihasilkan ini kemudian dirumuskan secara

induktif dari realitas kehidupan yang dialami para pelaku, bukan pandangan para pakar yang menyandarkan pendapatnya pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

Secara akademik, buku ini diharapkan memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan yang bersifat akademik dan kegunaan yang bersifat praktis. Secara akademik, buku ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi agama, khususnya berkaitan dengan konsep toleransi sebagai landasan hidup bersama umat beragama. Melalui pendekatan sosiometrik, buku ini juga diharapkan memberikan eksplorasi yang memadai tentang dinamika pola relasi antarumat beragama, baik pola relasi yang bersifat konfrontatif maupun akomodatif. Dalam konteks ke depan, buku ini diharapkan memberikan khazanah pemahaman kepada para ilmuwan dan pemerhati masalah-masalah sosial, tentang dinamika sosial yang terjadi di kalangan umat lintas agama di saat potensi konflik antarumat beragama semakin hari semakin meningkat. Di samping itu, buku ini diharapkan berguna bagi kalangan dosen dan atau tenaga edukatif lainnya sebagai bahan ajar perkuliahan, khususnya menyangkut model dan dinamika relasi umat lintas agama.

Secara praktis, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa kalangan terkait, yaitu: *Pertama*, buku ini diharapkan berguna bagi, khususnya, Pemerintah Daerah, sebagai masukan yang berharga untuk dijadikan bahan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan pembinaan kehidupan umat beragama, serta kebijakan dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana keagamaan kepada umat beragama yang ada di Kota Bandung.

Kedua, Kementerian Agama Republik Indonesia. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Kementerian Agama, baik pusat maupun daerah sebagai referensi dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama, sehingga kehidupan umat beragama yang toleran tetap berjalan baik.

Ketiga, pemuka dan umat beragama. Buku ini diharapkan dapat memberikan masukan yang solutif kepada pemuka dan umat beragama, bahwa toleransi beragama akan terus berjalan normal dan kondusif, apabila di antara umat beragama membangun komunikasi yang sehat, memiliki kedewasaan dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam

hubungannya dengan umat agama lain. Oleh karena itu, pemuka dan umat beragama dapat terus memelihara sikap empati, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dan meninggalkan sikap fanatisme berlebihan, etnosentrisme, diskriminasi serta sikap dan perilaku negatif lainnya, sehingga toleransi beragama dapat terjaga dengan baik.

Keempat, organisasi keagamaan dan organisasi politik. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif kepada para aktivis organisasi keagamaan dan organisasi politik, bahwa toleransi beragama akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh gerakan politik dan keagamaan yang santun dan terpuji. Oleh karena itu, aktivis organisasi keagamaan dan politik dapat terus membantu memelihara suasana kehidupan keagamaan yang nirkonflik, apresiatif, dan toleran melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial yang bermanfaat bagi warga Kota Bandung.



BAGIAN 1

MENGHADIRKAN AGAMA SEBAGAI RAHMAT KEHIDUPAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks menghadirkan agama sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, salah satu dasarnya, toleransi beragama merupakan perwujudan dari ajaran agama. Terwujudnya toleransi beragama dapat dipandang sebagai indikator paling penting keadaban sebuah bangsa. Rumus dasarnya, sebagaimana dikatakan oleh Walzer (1997), makin toleran sebuah bangsa makin tinggi tingkat keadaban bangsa yang bersangkutan. Secara demikian, toleransi merupakan sebuah keniscayaan yang harus hadir di ruang publik. Karena salah satu tujuan dari toleransi beragama adalah membangun kehidupan dunia yang harmonis dan damai di antara berbagai kelompok manusia yang begitu beragam dalam berbagai aspek.

Berdasarkan paparan sekilas tadi, kesadaran akan toleransi beragama harus melahirkan berbagai kemungkinan sikap, seperti menerima dan mengakui adanya perbedaan, mengakui hak dan eksistensi orang lain, mendukung dan antusias atas keragaman ciptaan Tuhan. Kendati demikian, diakui bahwa tugas untuk membangun kehidupan beragama yang toleran dan damai masih menjadi pekerjaan rumah yang

belum selesai, bahkan mungkin masih jauh dari kata itu. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Moderate Muslim Society (Misrawi, 2010) mengabarkan bahwa Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki problem intoleransi yang tidak sederhana, bahkan menduduki urutan pertama di Indonesia sebagai provinsi yang paling intoleran. Dengan kata lain, Jawa Barat memiliki masalah besar dalam hal perwujudan toleransi beragama di tengah-tengah masyarakat.

Mengiringi dinamika kehidupan beragama dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi menurunnya tingkat toleransi di kalangan umat beragama. Dalam konteks ini, terdapat indikasi yang menyebutkan bahwa hubungan antarumat beragama, terutama hubungan Islam dan Kristen mengalami penurunan, karena toleransi tidak lagi menjadi pandangan hidup umat beragama. Penurunan toleransi terkait dengan perubahan budaya masyarakat dari model gotong royong ke model kompetisi. Dari kota sampai ke desa, semua orang terindividualisasi, terkotak dalam mayoritas-minoritas. Namun, dilihat dari segi jalinan komunikasi antartokoh umat beragama, kondisinya sekarang lebih baik. Tokoh Kristen bisa berkomunikasi dan saling mengunjungi dengan tokoh Islam, begitu juga sebaliknya. Mereka secara bersama-sama bisa pergi ke pesantren, ke sekolah Islam, dan sebaliknya tokoh Islam bisa berkunjung ke lembaga Kristen. Akan tetapi, suasana kompetisi mengubah tabiat pemeluk agama, masuk pada perangkap prasangka dan curiga dengan pemeluk agama lain.

Dalam masyarakat yang multikultural seperti halnya Kota Bandung yang menjadi jantung provinsi Jawa Barat, konflik dan integrasi merupakan pasangan dialektis. Ketegangan, atau dalam bahasa teknis sosiologis adalah konflik, merupakan satu kesatuan dengan pluralisme (kemajemukan). Tidak ada pluralisme tanpa ketegangan, kecuali bila direayasa sedemikian rupa sehingga konflik bisa ditutupi. Ketika masyarakat yang berbeda agama berinteraksi, pada saat itu kemungkinan terjadinya ketegangan menjadi sangat terbuka.

Ketegangan antarumat beragama bisa terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, karena faktor di luar agama itu sendiri, seperti faktor sosial, ekonomi menyangkut kesenjangan, kemiskinan, dan kecemburuan karena tidak terwujudnya keadilan sosial. Pada satu tempat, ternyata tingkat ekonomi komunitas minoritas suatu agama lebih baik lalu menimbulkan

kecemburuan. Kondisi ini lantas diperparah dengan perlakuan tidak adil dari penguasa setempat terhadap warga menurut kategori kelompok agama.

Kedua, faktor dalam. Tidak dapat ditolak bahwa agama, di dalam dirinya sendirinya mengandung potensi konflik yang tidak kecil. Ada teks-teks suci yang kerap dijadikan sebagai alat justifikasi untuk melakukan tindak kekerasan dan intoleran terhadap pihak atau kelompok agama lain. Secara demikian, konflik dapat terjadi secara natural sebagai konsekuensi logis atas adanya perbedaan tadi, meskipun dalam banyak kasus bisa juga karena direkayasa. Sementara itu, di tengah perbedaan keyakinan itu, setiap pemeluk dituntut berkompetisi menjalankan kebaikan, yang dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah “*fastabiqul khairat*”. Secara ideal, tokoh dan umat semua agama dapat mengajak untuk saling berkomunikasi, berelasi dan berkomunikasi dalam konteks tugas-tugas kemanusiaan yang lebih luas dan menuntut keterlibatan semua manusia dengan tidak memandang perbedaan agama yang dianut.

Secara faktual, terdapat persoalan tentang bagaimana hubungan umat lintas agama di tengah pluralitas agama. Dalam konteks ini, ada indikasi bahwa pluralitas agama belumlah berkorelasi secara positif dengan terbangunnya toleransi beragama. Kenyataan tidak jarang malah memberi indikasi sebaliknya: pluralitas agama seringkali menjadi pemicu konflik sosial dan sentimen keagamaan. Padahal, kalangan elite –baik elite intelektual, elite birokrasi, maupun elite agama- sedang aktif mengusung wacana toleransi, inklusivisme, dan bahkan pluralisme. Jadi, tampaknya terjadi keterputusan wacana secara kontradiktif yang jika tidak dijumpatani, akan semakin mengarah pada terjadinya “jurang wacana” antara kalangan elite dengan masyarakatnya di level akar rumput.

Sejauh ini, isu tentang toleransi beragama, inklusivisme dan pluralisme memang cenderung menjadi wacana yang hanya dikenal di lapisan elite. Ia “tercipta” dan “bergerak” hanya pada tahap elite intelektual, birokrasi, agama, dan elite masyarakat lainnya tanpa mengakar pada masyarakat bawah. Proses penciptaan, pematangan, dan penyebaran wacana pun, lebih banyak bergerak di sekitar lingkaran elite tadi. Karena itu, mensosialisasikan wacana itu hanya sebatas di kalangan elite, tidak saja mengakibatkan wacana itu terlalu “elitik”, tetapi juga menjadikan

wacana itu mengalami ketidaknyambungan dengan problem keumatan di tingkat akar rumput.

Diakui, keragaman etnik dan agama, di satu sisi, dapat menjadi modal berharga bagi terbangunnya toleransi yang kuat, namun di sisi lain memiliki potensi konflik yang luar biasa. Potensi konflik antarkelompok etnik dan agama di masyarakat saat ini masih cukup terbuka. Kenyataan demikian kemudian menimbulkan problem baru berupa relasi dialektis dan kadang problematis antarumat beragama. Masalah itu memang menjadi ganjalan yang cukup panjang, terutama di masyarakat yang multikultural seperti halnya masyarakat Kota Bandung.

Kenyataan ini telah menarik kalangan pemerintah untuk secara serius berperan dalam membangun kehidupan keagamaan yang lebih toleran, bebas konflik, dan saling mengapresiasi. Terlepas dari berbagai motif yang melatarinya, peran aktif pihak pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama warganya menarik untuk dicermati. Bagaimanapun, secara realitas, kehidupan beragam di Indonesia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari Negara. Sekalipun Indonesia dikenal sebagai bukan Negara agama, tetapi Indonesia dihuni oleh warga yang diwajibkan memeluk agama. Maka dalam kaitan demikian, kemudian lahir berbagai regulasi yang mengatur kehidupan Beragama di Indonesia. Tentu saja, berbagai regulasi yang ada pada umumnya dimaksudkan untuk mengatur kehidupan umat beragama. Dalam konteks relasi lintas agama, regulasi itu dimaksudkan untuk melakukan “upaya pendamaian” terhadap perselisihan antarumat beragama, terutama yang menyangkut penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Semua itu diorientasikan pada satu upaya untuk membangun integrasi yang bersifat lintas agama. Komitmen keagamaan semacam itu tampak ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang menjadikan pembangunan bidang agama sebagai salah satu dari tujuh agenda prioritas Pemerintah Kota Bandung, melalui perwujudan “Bandung Kota Agamais”.

Hal menarik untuk dicermati lebih jauh adalah penggunaan istilah “agamais” dan bukan penggunaan kata lain, misalnya “Islami”, yang selama ini menjadi kecenderungan dominan yang terjadi di sejumlah daerah. Berbeda dengan Kota Bandung yang menggunakan istilah “agamais”, beberapa kabupaten dan kota di Indonesia menggunakan istilah

“Syariat Islam” dalam program pembangunan daerahnya. Di seluruh Indonesia, tidak kurang dari 78 Kabupaten dan Kota yang telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) bernuansa agama Islam (Perda Syariah).

Lahirnya program “Bandung Kota Agamais” dilatari oleh situasi dan fakta bahwa warga masyarakat kota Bandung Kota Bandung memiliki keyakinan dan level ketaatan yang tinggi terhadap ajaran agama yang mereka anut. Hal ini menjadi potensi besar yang bisa digali dan dikembangkan sebagai saran dan kekuatan untuk membangun kota Bandung. Selain itu, maka dasar dari agamais sendiri dalam *tagline* Bandung Agamais adalah terbangunnya sikap toleransi beragama yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Secara demikian, tujuan akhir yang hendak dicapai dengan lahirnya program Bandung Agamais ini adalah terwujudnya kehidupan beragama yang toleran, terbuka, saling menghargai dan mengakui serta menghormati adanya berbagai perbedaan, termasuk perbedaan dalam hal agama. Secara teknis, penggunaan istilah “agamais” dalam program unggulan Kota Bandung ini dianggap tepat karena dipandang akan sanggup meminimalkan berbagai potensi ketegangan yang mungkin tercipta di tengah-tengah masyarakat. Dengan istilah ini, pro-kontra atau setuju tidak setuju tidak lagi menemukan relevansinya karena istilah “agamais” konotasinya cenderung lebih bersifat di tengah-tengah yang bisa diterima oleh semua pemeluk agama. Dalam konsep besar Bandung Agamais, semua agama diakui eksistensinya dan diberi ruang untuk berekspresi.

Mengamati fenomena kehidupan umat beragama di Kota Bandung memang menarik, apalagi hal ini terkait dengan pola hubungan sosial antarkomunitas yang berbeda secara agama. Untuk menguatkan jalinan toleransi umat lintas agama ini, tampaknya masih diperlukan berbagai pendekatan untuk saling mengapresiasi.

Diakui bahwa untuk mampu hidup nyaman dalam ruang multiagama dan budaya, masyarakat masih perlu melakukan berbagai pendekatan untuk saling mengapresiasi, sehingga tumbuh toleransi yang dinamik dengan tetap memelihara identitas individual masing-masing. Setiap anggota masyarakat, baik minoritas maupun mayoritas, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Melalui perlakuan yang sama ini, komunikasi sosial di antara warga juga berlangsung cair.

Secara faktual, terbangunnya toleransi beragama di Kota Bandung tersebut, dapat diindikasikan pada sikap dan perilaku sosial umat beragama selama terutama dalam tujuh tahun terakhir ini. Kehadiran program Bandung Kota Agamis, dalam batas tertentu, telah menjadi pemicu dan pemacu tumbuhnya kehidupan beragama yang lebih toleran dan dinamik di Kota Bandung.

Pada satu sisi, dinamika toleransi beragama memperlihatkan kecenderungan yang relatif baik dan positif. Sementara itu, pada sisi yang lain, praktik intoleransi juga masih terus berlangsung meskipun dalam skala yang relatif rendah. Tarik ulur di antara kehendak untuk mewujudkan toleransi beragama di satu sisi dengan kecenderungan praktik intoleransi beragama di sisi lain telah menghadirkan dinamika sosial yang menarik untuk dikaji lebih jauh dan dilaporkan hasilnya dalam bentuk disertasi.

B. Alasan

Terdapat beberapa alasan mengapa topik ini dipilih sebagai objek riset. *Pertama*, secara sosiologis, kota ini memiliki keragaman etnik dan agama yang sangat kaya, sekalipun tetap suku Sunda dan agam Islam menjadi elemen utamanya. Kenyataan ini secara asumptif melahirkan dinamika relasi antarpemeluk agama yang berbeda. Bagaimanapun, bergumuhnya beragama agama dan keyakinan, juga etnis di ruang sosial yang relatif sempit sangat dimungkinkan munculnya berbagai ketegangan dialektis, termasuk ketegangan yang mungkin terjadi di antara para pemeluk agama yang berbeda, atau bahkan dalam satu agama yang sama sekalipun. Dalam perspektif sosiometrik, fakta ini menjadi bahan kajian menarik, khususnya menyangkut pola relasi antarkelompok keagamaan. Pada gilirannya, kajian ini akan memberikan sumbangan yang berharga, khususnya pada sisi pengayaan kajian sosiologi agama.

Kedua, secara administratif, posisi sebagai ibukota provinsi Jawa Barat menempatkan Kota Bandung berada dalam sorotan luas, termasuk dinamika kehidupan beragamanya. Selain itu, Kota Bandung merupakan daerah terbuka, dekat ke ibukota negara, dan menjadi salah satu tempat paling strategis untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas keagamaan.

Ketiga, ketika sejumlah lembaga riset menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat praktik intoleransi beragama paling tinggi di Indonesia, Kota Bandung justru memperlihatkan fenomena yang sebaliknya, yakni sebagai kota yang relatif kondusif dan toleran, meskipun bukannya tanpa friksi sama sekali.

Keempat, terdapat kecenderungan semakin menguatnya peran pemerintah dalam mengatur dan menjaga relasi antarumat beragama. Pemerintah memberikan porsi dan perhatian cukup besar dalam soal tersebut, terbukti dengan keluarnya berbagai regulasi yang bernuansa agama. Ketika dalam satu dekade terakhir muncul gejala penerapan Perda Syariat yang cenderung eksklusif, Kota Bandung memperlihatkan fenomena yang sebaliknya dengan menerapkan satu kebijakan yang dianggap lebih inklusif, yakni program Bandung Kota Agamais.

Kelima, dalam konteks membangun toleransi beragama, Kota Bandung yang sedang mengembangkan konsep pluralisme bermartabat dapat menjadi suatu model tentang bagaimana menjadikan toleransi sebagai basis nilai dalam membangun kehidupan bersama semua umat beragama.

Buku ini fokus pada masalah “dinamika sosial dalam mewujudkan toleransi beragama di Kota Bandung.” Konsep dinamika sosial dalam penelitian ini merujuk kepada suatu keadaan yang terus bergerak (dinamik) yang salah satunya diakibatkan oleh adanya relasi umat lintas agama. Dinamika sosial yang terjadi tidak hanya berorientasi *progress* (arah kemajuan) semata, tetapi ke arah *regress* (kemunduran). Dengan demikian, dinamika kehidupan umat lintas agama mungkin saja mewujud dalam hubungan yang positif dan penuh toleransi atau mungkin juga dalam bentuk hubungan yang intoleran dan penuh konflik.

Secara konseptual, istilah “toleransi” merujuk pada suatu sikap menghargai, menenggang berbagai keyakinan, kebiasaan, kepercayaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bahkan bertentangan secara diametral dengan pandangan atau pendirian sendiri. Dalam konteks sosial budaya, istilah toleransi merujuk pada situasi kompromi atas berbagai kekuatan yang saling berhadapan atau berkonfrontasi untuk kemudian saling bergandeng tangan membela kepentingan bersama yang lebih luas dan tinggi. Adapun pengertian toleransi beragama dalam buku ini memiliki

makna sikap saling mengakui dan menerima adanya keragaman keyakinan dan kebebasan berekspresi. Secara demikian, lahirnya kesadaran toleransi beragama akan mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati dan dapat saling membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya.



BAGIAN 2

TOLERANSI DAN INTOLERANSI: SEBUAH KERANGKA DASAR

A. Studi Terdahulu

Dalam kurun waktu lama, agama dengan seluruh bentuk ekspresinya di ruang publik telah menjadi bahan penelitian para ahli. Secara historis, agama merupakan salah satu bentuk legitimasi paling efektif. Dalam konteks kajian sosiologi, agama tidak didefinisikan sebagai perangkat ajaran yang bersifat mutlak yang datang dari Tuhan sebagaimana sering dipahami oleh ahli-ahli agama. Dalam kajian sosiologi, agama lebih dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Tujuan penggunaan batasan agama sebagai bagian dari kebudayaan adalah untuk kepentingan analisis agama dalam kaitannya dengan bagian lain dalam kebudayaan masyarakat, sehingga tampak dinamikanya dalam mewujudkan harmoni dan toleransi atau pun disharmoni dan intoleransi dalam masyarakat.

Terdapat banyak kajian tentang agama, baik kaitannya dengan kekuasaan maupun dengan aspek-aspek lain yang menyangkut kehidupan publik, termasuk integrasi dan toleransi beragama. *Pertama*, penelitian Ahmad Suherman tentang “Universalisasi Nilai-nilai Komunikasi Bahasa dalam Kerukunan Umat Beragama di Kota Bandung” (Disertasi di Universitas Pendidikan Indonesia, 2010). Penelitian ini dilatari oleh suatu kenyataan bahwa Kota Bandung memiliki tingkat kerawanan yang tinggi

dalam kerukunan umat beragama, sebab penduduknya sangat plural yang terdiri atas berbagai etnik dan agama. Setiap ada letupan kecil yang memungkinkan terjadinya disharmoni dalam masyarakat dapat diatasi dengan menciptakan saling pengertian di antara umat beragama. Secara spesifik, disertasi ini menelusuri berbagai peristilahan agama yang dapat mempererat kerukunan hidup antarumat beragama.

Penelitian ini sedikitnya menemukan sembilan diksi atau pilihan kata yang memiliki nilai universal yang bisa diterima oleh semua umat beragama. Sembilan diksi tersebut adalah adil, alhamdulillah, amin, assalamualaikum, ikhlas, islah, musyawarah, rahmat, dan silaturahmi. Menurut penelitian ini, masyarakat terbentuk melalui proses interaksi antarindividu melalui kegiatan komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi menjadi semacam alat perekat yang dapat membangun kontak untuk membangun saling pengertian antaranggota dalam komunitas. Diakui, bahasa dapat menjembatani proses komunikasi terutama untuk membangun kesamaan pandangan. Aspek rujukan dan pengalaman dapat diekspresikan secara verbal melalui bahasa.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kota Bandung merupakan lahan subur berkembangnya diksi suatu bahasa di kalangan umat beragama. Sebab, masyarakat Bandung tergolong masyarakat urban, terbuka dan heterogen secara etnis maupun agama. Heterogenitas ini muncul akibat laju urbanisasi, tersedianya layanan pendidikan, pekerjaan, ditambah masuknya berbagai etnis. Dalam hal menciptakan kerukunan, penelitian ini mengibaratkan rumah, yang setiap umat beragama bebas tinggal di kamarnya masing-masing. Antara satu umat beragama tidak perlu tinggal di ruang atau kamar saudaranya yang lain. Antara satu agama dengan agama yang lain tidak boleh saling memasuki. Hal yang bisa dibangun adalah saling menghargai, saling memberi manfaat, bahkan kalau perlu saling memberikan kesejahteraan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin Maliki (“Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan elite Penguasa”, Disertasi di Universitas Airlangga, 2003). Zainuddin Maliki memfokuskan penelitiannya pada konstruk dan perilaku penguasa lokal, dalam konteks negara di tangan penguasa politik berbasis sosial “sekuler”. Dalam konteks ini, Zainuddin

Maliki secara lebih fokus mengkaji soal bagaimana para elite lokal mengekspresikan konstruksinya atas agama yang dipahaminya.

Penelitian ini membuktikan bahwa pemakaian simbol-simbol agama dalam ranah kekuasaan bukanlah fenomena tunggal, melainkan plural. Di kalangan santri, pengenalan simbol-simbol keagamaan lebih dipandang sebagai refleksi dari kesadaran religiositas mereka. Empati terhadap praktik keagamaan lebih bisa dilihat, misalnya, dalam agenda kegiatan keagamaan, pembangunan sarana ibadah, hubungan dengan tokoh atau pemimpin agama. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika digunakan di tengah ruang publik dan ketika berusaha menjinakkan kelompok kritis, pengenalan simbol-simbol agama tersebut bermakna sebagai sarana meneguhkan kuasa wibawa mereka di tengah komunitas yang distruktur oleh nilai-nilai agama (Islam). Misalnya, mereka akan mendekati tokoh, organisasi atau partai berbasis agama, ketika menghadapi resistensi dari masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Endang Soetari (“Implementasi Kebijakan Pembangunan Keagamaan dalam Lingkup Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung”, Disertasi di Universitas Padjadjaran, 2003). Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada implementasi dari kebijakan pembangunan keagamaan yang menggunakan prinsip dekonsentrasi, sedangkan kebijakan otonomi daerah sendiri lebih bertumpu pada prinsip desentralisasi. Lebih jauh, penelitian ini mengkaji substansi kebijakan, kondisi birokrasi kelembagaan, sumber daya, komunikasi, koordinasi, dan lingkungan, untuk mengetahui kinerja dan menganalisis solusi dari implementasi kebijakan pembangunan keagamaan dalam lingkup otonomi daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa substansi kebijakan pembangunan keagamaan masih merupakan kewenangan pusat berdasar prinsip dekonsentrasi. Padahal, kebijakan otonomi daerah lebih bertumpu pada prinsip desentralisasi, sehingga di daerah masih dihadapkan pada kesulitan dan kesenjangan pengelolaan bidang keagamaan. Secara kelembagaan birokrasi pengelolaan urusan keagamaan di daerah belum berubah. Sumber daya penunjang, seperti personal, pembiayaan, dan perlengkapan tidak memadai. Sekalipun demikian, komunikasi dan koordinasi senantiasa dilibatkan, yakni dalam peran pelengkap. Padahal,

dukungan terhadap desentralisasi urusan keagamaan cukup tinggi, yang berasal dari masyarakat, pemerintah dan pers. Kinerja baru terbatas pada tahap persiapan untuk melakukan penyesuaian dengan prinsip dan arah otonomi daerah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ujang Saefullah (“Dinamika Komunikasi dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Berbeda Agama di Kota Sukabumi, Disertasi di Universitas Padjadjaran, 2010). Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika komunikasi antarumat beragama selalu mengalami pasang surut dari satu waktu ke waktu yang lain, ada kalanya berjalan normal dan positif, ada waktunya juga timbul ketegangan dan konflik.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan komunikasi yang terjadi secara internal dan eksternal dalam proses mewujudkan kerukunan umat berbeda agama. Hambatan internal berupa sikap fanatisme beragama yang berlebihan, etnosentrisme, prasangka sosial dan diskriminatif. Sedangkan hambatan eksternal karena adanya isu penyebaran agama tertentu dan provokator dari luar. Adapun manajemen komunikasi pemuka agama, menurut penelitian ini, bertujuan agar mendapatkan kesan yang positif dari lawan bicaranya. Sementara, persaingan antarkelompok keagamaan terjadi dalam empat hal, yaitu persaingan dalam penyebaran agama, bidang pendidikan, masalah politik dan masalah ekonomi. Persaingan penyebaran agama terjadi antara Islam dengan Kristen Protestan dan Katolik, Protestan versus Katolik, serta antara Protestan dan Katolik versus Saksi Yehuwa. Persaingan dalam bidang pendidikan terjadi dalam hal berlomba-lomba mendirikan sekolah antara Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Sedangkan persaingan masalah politik antara umat Islam dengan Kristen Protestan terjadi ketika pemilu legislatif dan pilkada Kota Bandung. Kemudian persaingan dalam bidang ekonomi antara etnis Sunda Muslim dengan etnis China yang beragama Kristen Protestan, Katolik dan Budha atau Kong Hu Cu.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Eva Ruvaidah (“Perkembangan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Muslim Perkotaan Bandung”, Universitas Gadjah Mada, 2003). Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan fokus penelitian pada aspek bagaimana Islam sebagai agama universal direpresentasikan oleh masyarakat perkotaan pada

paruh pertama abad ke-20. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi beragama pada masyarakat muslim perkotaan menunjukkan bentuk dan karakter yang berbeda dengan ekspresi masyarakat muslim pedesaan. Santri kota memiliki karakter urban, dinamis dan reformis. Bentuk-bentuk ekspresinya mengadaptasi institusi modern yaitu sekolah, organisasi, dan pers. Menurut penelitian ini, madrasah merupakan bentuk adaptasi terhadap institusi pendidikan, dan organisasi massa keagamaan menunjukkan bentuk solidaritas sosial baru. Pers Islam adalah ekspresi komunikasi modern melalui penerbitan majalah dan surat kabar. Karakter kekotaan tampak pula pada respons terhadap isu yang muncul di tengah masyarakat yang makin modern.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Dadang Kahmad (2000). Menurut Dadang Kahmad (2000: 175), konsep kerukunan antarumat beragama pernah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintahan Orde Baru dengan melibatkan semua tokoh agama-agama (Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha) yang ada di Indonesia. Selama masa Orba, relatif tidak ada konflik antarumat beragama. Mungkin orang mengira bahwa itu merupakan keberhasilan dalam menerapkan konsep kerukunan.” Namun ketika di Poso, Sambas, Sampit, Kupang dan Ambon terjadi kerusuhan dan kekerasan yang bernuansa agama, maka konsep kerukunan antarumat beragama kembali dipertanyakan.

Apakah penerapan konsep kerukunan hidup antarumat beragama selama ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketulusan para tokoh dan pemeluk agama masing-masing atau hanya kamufase yang dipaksakan? Terdapat dugaan bahwa kerukunan hidup antarumat beragama di masa Orde Baru seolah-olah direkayasa oleh para pemimpin dan penguasa pada saat itu, sehingga terkesan dipaksakan dan berbau sangat politis. Karena pemerintahan Orde baru saat itu selalu mengedepankan pendekatan keamanan (*security approach*) dan represif dalam melaksanakan pembangunan nasional, termasuk pembangunan bidang keagamaan. Padahal pendekatan seperti itu akan menjadi bom waktu, pada suatu saat akan muncul kembali, kalau penerapan konsep kerukunan tidak menembus akar masalah yang dihadapi oleh agama-agama tersebut.

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian ini lebih fokus mengkaji

masalah dinamika sosial yang muncul sebagai implikasi dari diterapkannya sebuah kebijakan oleh Pemerintah Kota Bandung yang berkenaan dengan, khususnya, usaha mewujudkan toleransi beragama. Berbeda dengan sejumlah daerah lain di Indonesia yang menerapkan kebijakan pengaturan kehidupan beragama yang cenderung eksklusif, Pemerintah Kota Bandung lebih memilih menerapkan sebuah kebijakan yang inklusif dan berangkat dari adanya kesadaran dan penghargaan terhadap fakta adanya keragaman keyakinan. Pada satu sisi, adanya keragaman keyakinan menjadi aset sangat penting dalam mewujudkan toleransi beragama, tetapi pada sisi lainnya memiliki kemungkinan dan potensi konflik yang bisa menyulut munculnya sikap dan tindakan intoleran. Tarik menarik dari dua situasi demikian yang pada gilirannya melahirkan dinamika sosial dalam kehidupan beragama yang menarik untuk dikaji secara lebih jauh.

Sejauh yang diketahui penulis, sampai saat ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang dinamika toleransi, intoleransi, dan akomodasi sebagai konsekuensi adanya kontestasi di antara umat beragama, terkait dengan diterapkannya program “Bandung Kota Agamis” oleh Pemerintah Kota Bandung.

B. Toleransi

Secara konseptual, istilah “toleransi” bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan berbagai konsep lain, seperti intoleransi, akseptasi, mayoritas-minoritas, dialog lintas agama, serta pluralisme agama yang semuanya merupakan bagian integral yang ada dalam dinamika sosial umat lintas agama.

Secara bahasa, term “toleransi” berasal dari bahasa Latin, *tolerare*, yang memiliki makna membiarkan pihak lain yang memiliki pandangan atau sikap lain tanpa dihalang-halangi. Dalam konteks ilmu biologi, term “toleransi” dipakai untuk membiarkan berkembangnya sebuah kelainan biologis yang terjadi pada tubuh seseorang, seperti kutil. Kutil yang tumbuh di tubuh seseorang mestinya dihilangkan namun dibiarkan tetap ada dan tumbuh karena dianggap tidak membahayakan tubuh orang yang memilikinya. Secara demikian, keberadaan kutil itu sangat tergantung dari kemauan dan kerelaan orang yang bersangkutan. Pada dunia kedokteran,

istilah ini dipergunakan untuk mengacu kepada bahan-bahan yang diizinkan untuk pengobatan. Misalnya, di dalam pengobatan penyakit tertentu digunakan zat yang mengandung narkotika atau zat adiktif lainnya sampai pada batas toleransi tertentu. Sementara, dalam ilmu tumbuh-tumbuhan, istilah ini merujuk pada kemampuan suatu organisme menolak pengaruh suatu parasit virus atau dari faktor lingkungan.

Tentu saja, toleransi sama sekali tidak bermakna bahwa seseorang harus melepaskan keyakinan agamanya demi bisa bergaul dan berinteraksi dengan umat agama lain yang berbeda. Toleransi berarti mengizinkan perbedaan itu tetap ada dan tidak memaksa yang berbeda menjadi sama. Toleransi semacam ini akan menjadi pembuka jalan bagi terwujudnya kebebasan dalam beragama. Secara demikian, setiap pemeluk agama akan mengekspresikan kebebasannya secara bertanggung jawab. Toleransi sama sekali tidak dapat dimaknai sebagai sebuah sikap yang pasif yang menerima apa adanya.

Karena itu, toleransi tidak membenarkan seseorang untuk merelatifkan keyakinan-keyakinannya, apalagi sampai terjebak pada relativisme. Dalam konteks ini, toleransi memberi ruang kepada seseorang untuk belajar tentang kepercayaan-kepercayaan lain, mendengarkannya dengan terbuka, tanpa harus memeluk kepercayaan itu. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, yang kemudian secara teknis disebut dengan istilah “toleransi beragama”, berarti suatu sikap menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan, agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang.

Dalam perspektif sosiologi, pengertian toleransi sering dimaknai sebagai bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal. Ada kalanya, toleransi muncul tanpa disadari dan juga tanpa direncanakan, karena adanya watak perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan (Walzer, 1997). Secara historis, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang amat toleran yang sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan. Bahkan, seringkali perselisihan dijadikan sebagai hal yang paling dihindari. Bangsa Indonesia bangsa yang sangat cinta damai, dan mereka menjadikan toleransi sebagai jalan hidup mereka.

Pada proses berikutnya kemudian terjadi apa yang disebut sebagai asimilasi. Terkait asimilasi ini, Nelson (1987: 27) mengatakan,

Proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun kadang-kadang bersifat emosional, bertujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit untuk mencapai suatu integrasi dalam organisasi, pikiran dan tindakan. Proses asimilasi timbul bila ada: (1) kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya; (2) orang perorangan sebagai warga kelompok-kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama; sehingga (3) kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

Secara kategori, toleransi terbagi ke dalam dua bagian besar. *Pertama*, toleransi pasif, yaitu setiap pemeluk agama membiarkan tanpa menghalang-halangi pemeluk agama lain menyatakan dan mengekspresikan keimanannya. *Kedua*, toleransi aktif, yaitu suatu sikap membantu pemeluk agama yang berbeda untuk melaksanakan keyakinan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Dalam paradigma lama kehidupan beragama, kegiatan dakwah atau misi agama-agama kerap kali diwarnai dengan prasangka teologis sepihak dengan klaim-klaim sepihak dan memosisikan orang yang berbeda keyakinan sebagai musuh yang harus ditaklukan. Dalam paradigma baru, sikap yang ditumbuhkan adalah *mutual respect*, saling mengakui eksistensi (*mutual recognition*), berpikir dan bersikap positif (Misrawi, 2009).

Dalam paradigma lama, kontestasi misi agama dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan mendominasi pasar sendiri dan orang lain secara tidak *fair* dan sering melampaui batas kepatutan, dalam paradigma baru kontestasi berjalan secara *fair* dan berjalan di atas koridor hukum yang disepakati bersama. Setiap pemeluk agama, di tengah perbedaan yang ada, dituntut untuk berlomba dalam kebaikan. Dalam paradigma baru orientasinya bersifat ke dalam, yakni ke komunitas agamanya sendiri dan tidak berekspansi untuk menaklukan komunitas agama yang berbeda. Dalam paradigma baru ini, kontak alami manusiawi adalah prasyarat terpenting bagi terwujudnya kehidupan beragama yang toleran dan damai. Tidak ada situasi yang membuat seorang pemeluk agama menjadi terpaksa.

Hal dimaksud tentu saja bukan toleransi negatif (*negatif tolerance*) sebagaimana yang dulu pernah dijalankan oleh Orde Baru yang sedang berkuasa, tetapi toleransi positif (*positive tolerance*). Sikap toleransi negatif adalah sikap yang penuh kepura-puraan, tidak asli, semu, dan menampakkan hal yang tidak sejati. Toleransi semacam ini mendorong orang untuk tidak menonjolkan agamanya di hadapan pemeluk agama lain. Jika Anda Kristen, maka jangan menonjol-nonjolkan kekristenan Anda di hadapan orang Muslim, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, toleransi positif adalah toleransi yang sebenarnya, yang mendorong setiap umat beragama untuk jujur mengakui dan mengekspresikan keberagamaannya tanpa ditutup-tutupi, apa adanya. Secara demikian, identitas masing-masing umat beragama tidak tereliminasi, bahkan masing-masing agama dengan bebas dapat mengembangkan dan mengekspresikannya. Inilah toleransi yang dulu pernah dianjurkan oleh mendiang sejarawan Kuntowijoyo (Antoni, 2002: 239-249).

Secara hakikat, toleransi adalah manifestasi hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman yang ada. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan toleransi beragama mengalami dinamika, pasang surut, naik turun, yang seringkali diwarnai oleh pemahaman *distingtif* yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”, “mayoritas” dan “minoritas”. Dalam kategori yang nyaris sama, Yewanggoe (2009), menyebut dua jenis toleransi, yakni toleransi formal dan toleransi material. Lebih jauh, Yewanggoe (2009: 81) mengatakan,

Toleransi formal berarti membiarkan saja pandangan-pandangan dan praktik-praktik politik atau agama yang tidak sesuai dengan pandangan kita sejauh itu tidak mengganggu. Sementara toleransi material bermakna suatu pengakuan terhadap nilai-nilai positif yang mungkin terkandung dalam pemahaman yang berbeda itu.

Dalam konteks ini, menurut Yewanggoe (2009), agama-agama yang dipandang politeistik sering lebih supel dan ramah daripada agama-agama monoteistik yang sangat eksklusif dan kurang terbuka. Agama-agama profetis, disebabkan oleh pretensinya yang absolut, acapkali menjadi intoleran. Sementara itu, agama-agama mistik justru memperlihatkan hal yang kebalikannya: toleransi yang tinggi.

Dalam kaitan dengan relasi umat beragama di Indonesia, daripada “toleransi”, Yewanggoe lebih memilih untuk memakai istilah “kerukunan”. Menurut Yewanggoe (2009: 82), istilah “kerukunan” lebih dinamik, kreatif, dan positif. Dalam pemakaian istilah “kerukunan” ditemukan watak autentik bangsa Indonesia yang memang dari sananya sudah senang berinteraksi dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.

C. Intoleransi

Jika dibuat ibarat, demokrasi dan toleransi adalah seperti dua sisi berbeda dari keping uang yang sama. Satu sama lain saling melengkapi dan menggenapkan. Jika salah satu dari keduanya tiada, maka lenyap pula kekuatan yang satunya. Demokrasi tanpa toleransi akan memunculkan situasi yang barbar dan otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan toleransi semu yang rentan memunculkan konflik-konflik.

Dalam hal demikian, dibutuhkan barometer atau tolok ukur untuk melihat sampai mana toleransi dan intoleransi dipraktikkan dalam kehidupan sebuah Negara. Untuk melihat toleransi, menurut Misrawi (2009), ada sejumlah level toleransi dari yang paling bawah sampai tingkatan toleransi yang paling tinggi. *Pertama*, hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati satu sama lain (*co-existence*). Ini adalah level toleransi yang paling bawah, di mana masing-masing pihak dapat hidup secara damai meskipun di antara mereka tidak saling mengenal.

Kedua, hadirnya kesadaran dan keterbukaan untuk melihat pemeluk agama berbeda sebagai sesama warga negara dan makhluk Tuhan yang mempunyai kesempatan sama di depan hukum (*awarness*). Keterbukaan dan kesadaran semacam ini merupakan konsekuensi logis dari tumbuhnya kesadaran perihal pentingnya toleransi Level ini dipandang lebih baik dari koeksistensi, karena telah menumbuhkan keterbukaan terhadap kelompok lain yang berbeda.

Ketiga, pengenalan terhadap pemeluk agama yang berbeda sambil melakukan dialog konstruktif (*mutual learning*). Pada praktiknya, pengenalan dapat dipandang sebagai fase amat penting dalam mewujudkan

toleransi, hal itu tidak lain karena toleransi pada tahap awalnya dimulai dengan pengenalan yang bersifat holistik terhadap pihak atau kelompok yang berbeda.

Keempat, pemahaman atas kelompok lain (*understanding*). Langkah ini juga merupakan salah satu tahapan dalam toleransi, karena tidak mungkin kehidupan yang damai dan toleran terbangun tanpa pemahaman terhadap kelompok lain. Institusi pendidikan dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat memiliki tanggung jawab dan peran yang besar untuk membangun kesepahaman, sehingga tercipta kesepahaman di antara berbagai kelompok.

Kelima, penghormatan dan pengakuan terhadap kelompok lain (*respect*). Terkait toleransi, apresiasi dan penghormatan terhadap grup atau kelompok lain yang berbeda dipandang sebagai barometer untuk melihat sejauh mana setiap warga bisa memahami pentingnya kehidupan bersama yang damai, toleran dan saling menghormati.

Keenam, penghargaan pada persamaan dan perbedaan, serta merayakan kemajemukan (*value and celebration*). Dalam masyarakat yang plural seperti halnya di Indonesia, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dihindarkan. Hanya saja, di antara berbagai kelompok yang berbeda tersebut menyimpan persamaan yang dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik dan terhormat. Secara demikian, toleransi mengandaikan adanya penghargaan terhadap perbedaan dan persamaan.

Untuk melihat realitas intoleransi dalam sebuah masyarakat, juga menggunakan enam barometer (Misrawi, 2009): *Pertama*, penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok lain yang berbeda. *Kedua*, pandangan dan sikap yang menganggap kelompok lain lebih rendah dari diri atau kelompoknya (*de-humanization*). Secara demikian, dapat dikatakan bahwa dehumanisasi pada dasarnya merupakan sebuah bentuk intoleransi beragama yang sangat serius, karena salah satu nilai terpenting dalam toleransi yakni kesetaraan menjadi terabaikan.

Ketiga, pengabaian hak-hak sipil, politik, dan ekonomi (*opression*). Pemerintahan atau rezim yang represif atau otoritarianistik cenderung melakukan tindakan yang mengabaikan atau bahkan mencederai hak-hak sipil. *Keempat*, penyerangan dan melakukan pembunuhan. Sudah sangat

jelas, penyerangan adalah sebuah tindakan intoleransi yang sangat serius, karena dapat menimbulkan korban yang sangat banyak dari pihak-pihak yang seharusnya dihormati dan dilindungi. *Kelima*, pengorganisasian pembunuhan massal (*mass-violence*). Dapat dikatakan bahwa salah satu bentuk pembunuhan massal yang populer untuk konteks zaman sekarang adalah munculnya fenomena terorisme.

Keenam, pembasmian atas dasar identitas (*genocide*). Apa yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap kalangan Yahudi di Jerman merupakan salah satu bentuk pembasmian terhadap identitas tertentu.

Pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, biasanya netralitas negara bukanlah sesuatu yang *taken for granted*. Ia harus senantiasa diupayakan terus-menerus. Pada titik itulah dibutuhkan *civil religion* atau agama sipil. *Civil religion* merupakan sekumpulan nilai dan norma yang dihasilkan dari agama-agama yang ada untuk menjamin suatu kehidupan bersama yang lestari dalam suasana masyarakat yang plural, semacam kontak sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara atau politik dengan agama berperan sebagai kekuatan perekat bagi pertanggungjawaban hati nurani masyarakat. Karena itu, setiap agama yang ada dalam sebuah negara dapat memenuhi fungsi yang sama.

Dalam konteks Indonesia, telah ada sumber *civil religion* yang kukuh, yaitu sila pertama dari Pancasila. Tetapi, gaungnya masih belum nyaring, senyaring wacana penegakan syariat Islam. Tampak ironis bahwa kebangkitan agama yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini hanyalah kebangkitan simbolisme dan formalisme agama dan kurang menyentuh tatanan moral-etis agama. Karena itu, kebangkitan agama, hanya dimaknai sebatas zikir dan pengajian-pengajian rutin di televisi, radio, dan ruang-ruang publik lainnya, tetapi belum (tidak?) memiliki implikasi sosial dalam menyumbangkan perannya bagi konflik antaragama dan antaretnik, korupsi yang merajalela, peningkatan angka kejahatan dan kekerasan, diskriminasi minoritas, dan kesenjangan sosial.

Padahal, sebagaimana ditunjukkan Jose Casonova dalam *Public Religion in the Modern World* (1994), bahwa agama sesungguhnya dapat memainkan peran di ruang publik. Turunannya, gerakan serta berbagai institusi berlabel agama dapat mengisi ruang-ruang publik dengan al-hal yang konstruktif untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis.

Hal itu hanya dapat dilakukan dengan melakukan deprivatisasi agama di dunia modern. Agama tetap berada di wilayah privat, tetapi juga ia dapat berperan di ranah publik. Artinya, sebagai iman personal, setiap penganut agama memiliki kebebasan untuk meyakini agama tertentu beserta seluruh perangkat doktrin teologis dan ritualnya. Yang lebih penting, mengganggu kenyamanan beribadah dan pemaksaan untuk memeluk sebuah agama dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks ranah publik, umat beragama, gerakan-gerakan, maupun organisasi-organisasi keagamaan (*civil religion*) tidak hanya relevan, tetapi juga dapat memainkan fungsi kritisnya dan dapat menggalang pemberdayaan masyarakat dalam menyikapi persoalan-persoalan modernitas, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan, diskriminasi minoritas, penegakan HAM, dan proses demokratisasi lebih lanjut.

D. Mayoritas Minoritas

Secara praktis, persoalan toleransi sering dikaitkan dengan keberadaan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat. Problem mayoritas minoritas di Indonesia sampai sekarang menjadi persoalan yang belum sepenuhnya selesai. Satu pihak berharap agar isu dualisme ini di akhir dan menyarankan untuk memasuki perdebatan yang lebih substansial. Sementara di pihak lain, ada segmen masyarakat yang tetap memandang pentingnya mempertahankan cara pandang mayoritas minoritas di mana kaum mayoritas harus diberi porsi lebih ketimbang kelompok minoritas, sebab kaum mayoritas dalam banyak hal memberikan kontribusi lebih daripada kaum minoritas.

Masalah mayoritas-minoritas, menurut July Qodir (2009), sampai saat ini masih menjadi kotak Pandora. dalam rentangan sejarah republik ini, kelompok mayoritas berada pada posisi yang secara politik lebih diuntungkan tetapi anehnya mereka kerap kali mereka merasa dikalahkan oleh warga minoritas. Akibatnya, secara politik kaum minoritas selalu merasa didiskriminasi oleh kebijakan rezim politik tertentu yang dikuasai oleh kaum mayoritas. Dalam konteks relasi sosial umat lintas agama, secara umum selalu ditemukan hambatan-hambatan, antara lain berbentuk etnosentrisme, stereotip, prasangka sosial, perbedaan kepentingan dan

diskriminasi. *Pertama*, etnosentrisme. Istilah etnosentrisme merujuk pada kecenderungan menghakimi nilai, adat istiadat, perilaku atau aspek-aspek budaya lain “menggunakan kelompok kita sendiri dan adat istiadat sendiri sebagai standar bagi semua penilaian (Stewart dan Sylvia, 1996: 254).

Dalam konteks sosial, hubungan antara penganut agama yang satu dengan penganut agama lain yang berbeda, bila menonjolkan sikap etnosentrisme, maka akan mengganggu hubungan sosial di antara mereka. Misalnya, kalau kaum Kristiani menganggap dirinya lebih hebat, lebih rasional, lebih pantas, dan lebih berhak masuk surga dibandingkan agama lain. Sebaliknya, bila umat Islam memandang agamanya paling bagus, paling bermoral dan paling rasional, dibandingkan dengan agama-agama lain, ini pun akan mengganggu hubungan sosial dengan penganut agama lain. Bahkan akan mengalami ketegangan di antara penganut agama, yang akhirnya menimbulkan konflik.

Kedua, stereotip. Istilah ini merujuk pada konsepsi mengenai nilai suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat (KBBI, 1994: 963). Stereotip tidak memadai karena *stereotip* adalah generalisasi berdasarkan pengalaman orang terbatas. Tentu saja, sumber informasi mengenai orang-orang dari budaya-budaya yang berbeda sering tidak cermat.

Ketiga, perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain adalah sesuatu yang alamiah dan “*sunatullah*”. Kelompok-kelompok itu sangat beragam, mulai dari kelompok berdasarkan perbedaan negara, bangsa, kelas sosial, etnik dan agama. Misalnya, kelompok negara-negara maju memiliki kepentingan yang berbeda dengan kelompok negara-negara berkembang. Bangsa Indonesia memiliki kepentingan untuk mempertahankan kepulauan Ambalat dan Sipadan, dan bangsa Malaysia memiliki kepentingan untuk menguasai kepulauan tersebut karena memiliki sumber daya alam yang sangat banyak.

Kepentingan lain dari agama-agama tersebut, yang bersifat politik dan ekonomi, juga seringkali muncul ke permukaan. Secara politis, semua agama ingin diakui eksistensinya, ingin dihormati, ingin diperlakukan secara adil hak-haknya, ingin mendapatkan perlindungan. Kemudian secara ekonomi, semua agama juga menginginkan harkat dan martabat

para penganutnya menjadi lebih baik. Mereka menginginkan pendidikan yang tinggi, hidup yang layak, mempunyai pekerjaan dan lain-lain. Namun, dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masing-masing agama itu akan selalu bersentuhan dan bersinggungan dengan kepentingan agama lain. Bila dalam persentuhan itu, masing-masing penganut agama itu saling menghormati dan saling menghargai atas kepentingannya masing-masing, maka akan tercipta toleransi beragama dengan baik. Tetapi, sebaliknya, apabila satu sama lain saling menonjolkan egonya masing-masing, bahkan saling memusuhi dan mendiskreditkan, maka toleransi dan beragama akan terancam.

Keempat, prasangka sosial. Istilah ini sering digunakan untuk menyatakan sikap-sikap yang apriori, suatu pernyataan sikap yang buruk atau negatif terhadap individu atau kelompok lain. Dengan demikian, prasangka merupakan sikap yang tidak baik dan dapat dipandang sebagai suatu predisposisi untuk memersepsi, berpikir, merasa dan bertindak dengan cara-cara yang menentang atau menjauhi dan bukan menyokong atau mendukung.

Kelima, diskriminasi. Pada dasarnya, diskriminasi terjadi akibat adanya perbedaan perlakuan karena; Pertama, alasan sejarah, seperti halnya kebanggaan atas kedigdayaan suatu etnik atau suku di masa silam; Kedua, tata nilai atau sistem nilai yang tidak sama antara satu etnik dengan etnik lainnya, antara pihak mayoritas dengan minoritas; Ketiga, pola kerja sama; Keempat, pola dan sistem pemukiman yang berbeda, seperti daerah Jawa luar Jawa, antara kelompok miskin dan kaya, antara perkotaan dan pedesaan; Kelima, faktor sosial dan budaya; ekonomi, agama yang meniscayakan ketidaksamaan perlakuan; dan (6) prestise suatu kelompok.

E. Akseptasi

Menurut Gufran Ali Ibrahim (2004: 7), dalam paradigma multikultural, konflik sosial menjadi pertanda bahwa toleransi saja tidak cukup kuat untuk menjadi “peranti” kohesi sosial lintas-komunitas. Toleransi memang dapat menggerakkan kebersediaan mengakui komunitas atau warga lain, tetapi ia tetap menempatkan warga lain itu dalam posisi “orang luar”. Dengan begitu, tetap saja ada jarak psikososial. Sementara itu, pembudidayaan akseptasi, yaitu mekanisme penerimaan komunitas

lain dalam kesadaran koeksistensi, mendorong proses dan pembelajaran mengenai dasar-dasar hidup-bersama. Lebih jauh, Gufran Ali Ibrahim (2004: 7) mengatakan,

Dengan akseptasi, orang-orang luar (*out-group* dalam terminologi sosiologi), orang-orang yang berbeda dalam realitas pluralis, “ditarik masuk” ke dalam kosmopolit kesadaran “kelompok dalam” (*in-group*), sementara dalam toleransi setiap warga tetap “menempatkan” orang luar sebagai yang terpisah dari kesadaran kelompok dalam. Dengan begitu, bila ada faktor pemicu lain bagi kemungkinan terberainya ikatan-ikatan sosial, proses penempatan orang luar sebagai ciri toleransi, dengan mudahnya masyarakat yang beragam itu terceraiakan. Faktor pemicu konflik komunal yang kemudian menguatkan kembali solidaritas mekanik (*mechanical solidarity*) —meminjam istilah Emile Durkheim— setiap komunitas yang diikat oleh nilai kebersamaan, keyakinan, pengalaman, dan nasib, bangunan sosial yang berciri pluralisme itu dengan gampangnyanya terkoyak. Akan tetapi, bila proses akseptasi telah menjadi bagian dari pembudidayaan pluralisme dan dalam etos pertetanggaan (*neighborhood*), hubungan antarwarga yang berbeda komunitas tetap dapat dipertahankan.

Dengan begitu, untuk membangun masyarakat Indonesia dengan semangat pemeliharaan pluralisme, bangunan sosial budaya paling mendasar dan pertama yang perlu dibangun adalah pembudidayaan akseptasi, penerimaan, dan bukan saja toleransi. Toleransi akan terbangun bila ada sebuah proses pelatihan dan pembelajaran akseptasi, di mana setiap warga dalam lintas komunitas mengembangkan suatu sikap individu dan sikap sosial mengenai saling-menerima. Saling-terima dapat tumbuh dengan baik bila penghargaan atas hak-hak, penyesuaian dan pengakuan, perlakuan dan pelayanan sosial yang setara, keterwakilan politik, dan akses ekonomi yang berjalan secara adil dan seimbang. Ikhtiar ini akan mendorong tingginya partisipasi dan partisipasi itu mendorong toleransi karena semua merasa mendapatkan akses dan mobilitas yang adil. Dengan begitu, penegakan semangat pluralisme, termasuk pluralisme budaya dapat diwujudkan.

Merujuk pada pandangan Gufran Ali Ibrahim (2004), terdapat empat strategi budaya dalam mengembangkan akseptasi: (1) memboboti kualitas perjumpaan lintas-komunitas, (2) membudidayakan semangat bertetangga,

(3) selalu memelihara nurani dan akal sehat, dan (4) membangun sumber daya sosial (*social resources*) yang tangguh. Satu siasat pluralisme ini bisa jadi secara serta-merta melahirkan siasat yang lain.

Perjumpaan adalah mekanisme interaksi sosial untuk saling paham, mengenal dan dikenal. Dengan strategi melintasi (*passing over*) dan kembali ke diri sendiri (*coming back*) akan menghadirkan penghargaan atas orang lain, tetapi tanpa diri sendiri menjadi lebur. Perjumpaan tidak saja membuat kita dapat memahami orang lain, tetapi juga sekaligus membuat kita semakin memahami secara lebih mendalam watak kita sendiri dalam bercermin pada watak dan budaya orang lain. Perjumpaan dapat dilakukan secara alamiah atau berdasarkan sebuah rekayasa budaya. Perjumpaan alamiah berlangsung berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kita dalam mengenal dan memahami orang lain, sedangkan “perjumpaan yang direkayasa” adalah perjumpaan yang dimotori oleh sekelompok orang mulai dari merancang gagasan, meramu pembelajaran massal, rencana lapang, hingga pengamalan atasnya di lapangan nyata. Satu dari sekian banyak perjumpaan dengan rekayasa adalah membuat gerakan apresiasi pluralisme yang dipelopori oleh kaum terdidik, tokoh yang kredibel, dan sekolah.

Perjumpaan itu akan melahirkan semangat bertetangga dalam arti luas. Semangat bertetangga “itu akan mendekonstruksi kesadaran baru dalam sebuah watak konvergensi dengan tetap memelihara kehadiran kelompok dan komunitas sendiri dalam bingkai kelompok lain. Dengan begitu, pengagungan kelompok atau komunitas sendiri tidak dilakukan secara berlebihan tetapi proporsional karena ditegakkan dalam pembudidayaan nurani dan akal sehat. Perjumpaan akan melahirkan tradisi baru bertetangga yang terus mengelola nurani dan akal sehat sebagai sarana kemanusiaan semesta yang diboboti oleh cinta dan penghargaan.

Memboboti kualitas perjumpaan, membudidayakan semangat bertetangga, dan selalu memelihara nurani dan akal sehat adalah sumber daya sosial yang penting dalam cara membudidayakan akseptasi. Gagasan mengenai empat strategi budaya dalam membudidayakan akseptasi ini memang masih berada pada aras ide yang abstrak. Untuk mewujudkannya secara konkret, gagasan ini perlu terus digodok, dikoreksi, dan diperdebatkan sehingga melahirkan sebuah skema kebudayaan bagi, tidak

saja peleraian konflik komunal, tetapi juga memberikan kerangka pembelajaran bagi cara-cara berkehidupan dalam pluralisme yang niscaya itu.

Dalam konteks ini, Gufran Ali Ibrahim (2004) menawarkan sebuah skema pembobotan akseptasi dalam praktik nyata seperti mendorong pembelajaran mengenai pluralisme di lembaga-lembaga pendidikan, pembacaan kembali teks-teks agama mengenai pluralisme, dan mengeksplorasi kearifan lokal (*local wisdom*) yang berkaitan dengan harmoni dan cinta lingkungan. Ini semakin relevan karena sekarang sekolah mulai membelajarkan diri dengan mendorong konsep pendidikan berbasis luas (*broad base education*). *Pertama*, pembelajaran mengenai pluralisme ini perlu agar anak tidak akan bergerak dewasa dengan komunitas sendiri, tetapi secara afektif telah membelajarkan diri dalam hubungan-hubungan penerimaan mengenai pluralisme.

Kedua, teks-teks agama mengenai cinta damai, harga sesama, yang selama ini terbenamkan oleh tema pokok mengenai klaim kebenaran dan klaim keselamatan, perlu dibaca kembali, dimaknai kembali. Dengan demikian, keberagamaan tidak hanya merupakan proses pencapaian prestasi spiritual keilahian, tetapi juga sekaligus sebagai sarana pencerahan sosial. Langkah ketiga yang perlu dibelajarkan adalah membaca kembali kearifan lokal pada setiap maujud budaya di Indonesia dan kearifan lokal mengenai cinta sesama, harmoni, dan cinta lingkungan. Ini hendaknya disalurkan melalui media sehingga berlangsung proses perjumpaan dan pemahaman lintas-budaya secara masif.

F. Dialog Lintas Agama

Dialog lintas agama yang dimaksud, meminjam pengertian yang diberikan oleh Sumanto Al-Qurtubi (2009: 187), tentu bukan hanya percakapan hadap muka *di ruang* diskusi, seminar konferensi, atau forum-forum debat publik yang melibatkan berbagai elemen yang beragam secara keyakinan. Melainkan sebuah proses komunikasi yang tiada henti untuk mengerti dan memahami pemikiran, ajaran, budaya, pemahaman, sistem keyakinan komunitas agama lain yang berbeda. Pada konsep yang paling dasar dan sederhana, arti dialog lintas agama (baik dalam konteks dialog antaragama atau dialog intraagama) adalah sederhana di mana masing-

masing pribadi dan kelompok yang berbeda secara keyakinan atau mazhab bertemu dan berhadapan dalam suatu ruang untuk melakukan suatu pembicaraan tertentu.

Dalam pengertian yang lebih substantif, dialog agama dapat diartikan sebagai bukan hanya terbatas pada percakapan melainkan juga perbuatan, misalnya tindakan antarkelompok agama untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan untuk secara bersama-sama mengatasi konflik, kekerasan, kelaparan, bencana alam, dan wabah. Pola dialog lintas agama ini dalam kajian sosiologi sering disebut sebagai pola atau model kemanusiaan atau *humanity model*. Atau Leo Swidler seorang sarjana dan praktisi dialog agama dari Temple University menamainya dengan sebutan model praktis atau *practice model* (Smock, ed., 2002).

Dalam hal ini, dialog membuka kesempatan pada setiap pemeluk agama untuk bersikap terbuka. Dengan demikian, ia bukan saja menjalin dan menjaga toleransi atau kerukunan dengan seluruh konsekuensinya, tetapi ia juga mendorong lahirnya situasi yang menarah pada terjadinya dialog lintas agama. Dialog lintas agama ini tidak semata-mata sebagai konsesi yang harus diterima oleh pihak atau kelompok lain, tetapi juga dialog ini dapat menyumbangkan manfaat yang besar bagi terbangunnya kehidupan bersama yang rukun dan saling menghormati.

Pertanyaan yang masih tersisa berhubungan dengan dialog lintas agama ini adalah mengapa relasi antarumat beragama di Indonesia masih juga diwarnai berbagai ketegangan atau konflik yang tidak jarang kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang intoleran, padahal sementara itu lembaga-lembaga keagamaan atau grup-grup kajian keagamaan menjamur di mana-mana, tersebar di berbagai daerah, tidak hanya ada di kota-kota besar melainkan bahkan sudah ada di pelosok-pelosok. Bahkan dalam konteks yang lebih besar dan formal, sudah pula dibentuk sebuah lembaga yang secara khusus berkomitmen terhadap terpeliharanya toleransi dan kerukunan yang bernama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)?

Tentu saja, pertanyaan ini amat relevan dan penting untuk dimunculkan ke permukaan menimbang bahwa Indonesia adalah Negara muslim terbesar di dunia dan berada dalam situasi yang mengkhawatirkan terkait masih adanya berbagai kasus kekerasan berbasis agama yang terjadi

di berbagai wilayah pascaberakhirnya kekuasaan Orde Baru (lihat, misalnya, dalam Sidel 2006; Aragon 2001; Nordholt dan van Klinken 2007). Term kekerasan agama atau kekerasan berbasis agama (*religious-based violence*) ini tidak semata-mata merujuk pada kekerasan yang bersifat fisik, tetapi juga *cultural violence* atau *symbolic violence* berupa pelecehan, stigmatisasi, penghinaan, atau penyesatan terhadap kelompok atau grup yang dipandang berbeda dari yang ada. Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia banyak dialami oleh kelompok Ahmadiyah, Syi'ah, Islam Jama'ah, kaum Syi'ah di Madura, dan beberapa sekte agama lokal tentu saja sangat mengkhawatirkan masa depan hubungan agama-agama, *interfaith* dialog dan *religious peacebuilding* di negeri ini (Smock, ed. 2002).

Menurut Sumanto Al-Qurtubi (2009), banyak aktivis dialog lintas agama yang melihat dan memperlakukan perbedaan-perbedaan agama (*religious differences*) tadi sebagai hal yang tidak layak untuk diangkat ke permukaan dan karenanya ia menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Sikap-sikap semacam ini tentu saja akan menghambat terjadinya relasi dan komunikasi lintas agama yang cair dan positif. Para aktivis dialog lintas agama yang berpandangan semacam ini memendam rapa-rapat berbagai perbedaan yang ada dan menempatkannya di ruang yang tidak perlu untuk ditengok apalagi didiskusikan. Pada saat yang bersamaan, mereka cenderung lebih mengapresiasi sisi persamaan-persamaan keagamaan (*religious commonalities*) karena menganggap bahwa hal ini bisa menjadi perekat, dasar, dan fondasi untuk membangun hubungan antarumat beragama yang harmonis dan *peaceful*. Dialog agama semacam ini oleh Al-Qurtubi (2009) disebut sebagai "*harmony model*", karena tujuan melakukan dialog agama jenis ini, pada dasarnya, hanya untuk menciptakan harmoni antar-agama. Dialog agama "*model harmoni*" ini menghindari sekuat tenaga ajaran, teks, tradisi dan wacana keagamaan yang berpotensi memunculkan konflik, disharmoni, dan kekerasan agama.

G. Pluralitas Agama

Dalam perspektif sosiologis, pluralitas agama dipandang sebagai suatu fakta bahwa setiap pribadi, setiap orang, berbeda-beda, beragama dan plural dalam hal beragama. Ini adalah kenyataan sosial, sebuah

keniscayaan yang tidak bisa ditolak dan dihalangi. Pengakuan terhadap adanya pluralisme agama secara sosiologis ini boleh dikatakan sebagai pluralisme yang paling simpel, karena pengakuan ini tidak serta merta berarti memberikan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau bahkan etika dari agama lain.

Pengakuan pluralisme agama secara sosiologis ini juga dikemukakan oleh Mukti Ali. Dalam kaitan ini, Mukti Ali (1970: 55) menyatakan,

“Orang Islam melakukan penghargaan yang tinggi terhadap Mariam dan Jesus. Hal itu merupakan bagian keimanan orang Islam. Orang Islam sungguh tidak dapat mempercayai (mengimani) ketuhanan Jesus Kristus tetapi mempercayai kenabiannya sebagaimana Nabi Muhammad. Kemudian, orang Islam juga tidak hanya memandang Al-Qur’an tetapi juga Torah dan Injil sebagai Kitab Suci (*Kitabullah*). Yang menjadi persoalan, apakah Kitab Bibel yang ada sekarang ini autentik atau tidak, dan apakah seluruhnya merupakan wahyu Tuhan. Hal ini bukan berarti bahwa orang Islam selalu menolak Wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Musa, Isa atau rasul-rasul lain, meskipun orang Islam tidak bisa mengakui bahwa Bibel sebagaimana sebelum mereka hari ini terdiri dari Kalam Tuhan seluruhnya. Namun demikian, orang Islam percaya bahwa Bibel mengandung Kalam Tuhan”.

Tampaknya, Mukti Ali ingin mengatakan bahwa masing-masing agama memiliki keyakinan teologis yang tidak dapat dinegosiasikan. Islam mempunyai sistem keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai bagian-bagian yang diyakini oleh umat agama lain, misalnya konsep tentang Nabi Isa. Demikian halnya Kristen memiliki sistem keimanan sendiri, juga termasuk mengenai wilayah-wilayah yang diyakini oleh Islam, misalnya konsep tentang Nabi Muhammad. Dengan demikian, pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama. Terkait hal ini, Mukti Ali (1992) menjelaskan,

“Beberapa pemikiran untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. *Pertama*, sinkretisme, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. *Kedua*, *reconception*, yaitu

menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. *Ketiga*, sintesis, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. *Keempat*, penggantian, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. *Kelima*, *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan” (Mukti Ali, 1992: 227-229).

Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan “*agree in disagreement*” atau setuju dalam ketidaksetujuan. Dia memahami bahwa jalan inilah yang seharusnya dipilih dan dilakukan untuk membangun kehidupan beragama yang rukun dan damai. Para pemeluk agama yang berbeda harus meyakini bahwa agama atau keyakinan yang mereka peluk adalah agama dan keyakinan yang paling baik dan paling benar, sambil pada saat yang bersamaan mempersilakan pihak lain juga untuk memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap ajaran agama yang dipeluknya. Inilah prinsip dasar setuju dalam ketidaksetujuan.

Dalam kaitan ini, wacana pluralisme agama Djohan Effendi berbeda dengan Mukti Ali di atas. Lebih jauh tentang hal ini, Dhohan Efendi (1978: 16) menyatakan,

Agama –terutama yang bersumber pada wahyu, diyakini sebagai bersifat *ilahiyyah*. Agama memiliki nilai mutlak. Namun, ketika agama itu dipahami oleh manusia, maka kebenaran agama itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap dan dijangkau oleh manusia, karena manusia sendiri bersifat nisbi. Oleh karena itu, kebenaran apapun yang dikemukakan oleh manusia –termasuk kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia—bersifat nisbi, tidak absolut. Yang absolut adalah kebenaran agama itu sendiri, sementara kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia itu nisbi. Kebenaran absolut itu hanya bisa diketahui oleh ilmu Tuhan.

Dengan bahasa lain, Greg Barton (1999: 237) menyebut bahwa Djohan Effendi menolak absolutisme agama dan mengakui pluralisme agama. Djohan mengemukakan,

“Sebagai makhluk yang bersifat nisbi, pengertian dan pengetahuan manusia tidak mungkin mampu menjangkau dan menangkap agama sebagai doktrin kebenaran secara tepat dan menyeluruh. Hal itu hanya ada dalam ilmu Tuhan. Dengan demikian apabila seorang penganut mengatakan perkataan agama, yang ada dalam pikirannya bukan hanya agama sendiri, akan tetapi juga aliran yang dianutnya, bahkan pengertian dan pemahamannya sendiri. Oleh karena itu, pengertian dan pemahamannya tentang agama jelas bukan agama itu sendiri dan karena itu tidak ada alasan untuk secara mutlak dan apriori menyalahkan pengertian dan pemahaman orang lain.” (Barton, 1999: 239)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nurcholish Madjid. Ia mengemukakan ketidaksetujuannya dengan absolutisme, karena absolutisme adalah pangkal dari segala permusuhan. Ia mengatakan (Andito, 1998: 259):

“Petunjuk konkret lain untuk memelihara ukhuwah adalah tidak dibenarkannya sama sekali suatu kelompok dari kalangan orang-orang beriman untuk memandang rendah atau kurang menghargai kelompok lainnya, sebab siapa tahu mereka yang dipandang rendah itu lebih baik daripada mereka yang memandang rendah. Ini mengajarkan kita –dalam pergaulan dengan sesama manusia, khususnya sesama kalangan yang percaya kepada Tuhan—tidak melakukan absolutisme, suatu pangkal dari segala permusuhan.”

Nurcholish Madjid menegaskan betapa pentingnya kehidupan beragama. Ia tidak menjelaskan secara tegas apakah yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam saja. Artinya, agama yang dimaksud adalah agama secara umum. Namun, dengan bahasa yang dialektis, ia melakukan otokritik terhadap pemeluk agama. Ia mengakui bahwa dalam agama-agama, lebih tepatnya, dalam lingkungan para penganut agama-agama, selalu ada potensi kenegatifan dan perusakan yang amat berbahaya.

Menurut Nurcholish Madjid, pandangan-pandangan inklusivitas amat relevan untuk dikembangkan pada zaman sekarang, yaitu zaman globalisasi berkat teknologi informasi dan transportasi, yang membuat

umat manusia hidup dalam sebuah “desa buana” (*global village*). Nurcholish Madjid (1993) menegaskan:

“Dalam desa buana itu, seperti telah disinggung, manusia akan semakin intim dan mendalam mengenal satu sama lain, tetapi sekaligus juga lebih mudah terbawa kepada penghadapan dan konfrontasi langsung. Karena itu sangat diperlukan sikap-sikap saling mengerti dan paham, dengan kemungkinan mencari dan menemukan titik kesamaan atau *kalimatun sawa*’ seperti diperintahkan Allah dalam Al-Qur’an. Dengan tegas Al-Qur’an melarang pemaksaan suatu agama kepada orang atau komunitas lain, betapapun benarnya agama itu, karena akhirnya hanya Allah yang bakal mampu memberi petunjuk kepada seseorang, secara pribadi. Namun, demi kebahagiaannya sendiri, manusia harus terbuka kepada setiap ajaran atau pandangan, kemudian bersedia mengikuti mana yang terbaik. Itulah pertanda adanya hidayah Allah kepada mereka. Dan patut kita camkan benar-benar pendapat Sayyid Muhammad Rasyid Ridla sebagaimana dikutip oleh ‘Abdul Hamid Hakim bahwa pengertian sebagai *Ahl al-kitab* tidak terbatas hanya kepada kaum Yahudi dan Kristen seperti tersebut dengan jelas dalam Al-Qur’an serta kaum Majusi (pengikut Zoroaster) seperti tersebut dalam sebuah hadis, tetapi juga mencakup agama-agama lain yang mempunyai suatu bentuk kitab suci.”

Selain itu, Nurcholish Madjid juga menyinggung tentang bagaimana sikap keberagaman yang benar. Ia menegaskan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah ialah *al-hanîfiyyah al-samḥah*, agama yang memiliki semangat kebenaran yang lapang dan terbuka.

H. Akomodasi

Teori akomodasi dimaknai sebagai kemampuan dalam menyesuaikan, memodifikasi atau mengatur perilaku seseorang dalam responsnya terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Proses akomodasi ini pada umumnya dilakukan secara tidak sadar (West dan Lynn Turner, 2007: 217). Teori akomodasi menyatakan bahwa setiap orang dalam melakukan interaksi dengan orang lain memiliki pilihan dan akan berupaya sekerasnya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi.

Hal mendasar dari akomodasi ialah proses kerja sama dan toleransi yang memperlihatkan warga masyarakat dengan tidak menghilangkan atau menyembunyikan identitas masing-masing. Umumnya, setiap orang ataupun kelompok dalam suatu masyarakat bertindak atau melakukan sesuatu digerakkan dan dirangsang oleh apa yang menjadi kepentingan atau tujuan yang ingin mereka capai. Dalam memenuhi setiap kepentingan baik individu maupun kelompok dapat melahirkan dua kemungkinan, yakni adanya kerja sama antar individu maupun antar kelompok dan adanya persaingan dalam memenuhi kepentingan mereka masing-masing.

Para teoretisi akomodasi telah sampai pada kesimpulan bahwa akomodasi menjadi hal penting dalam relasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Ia dapat membawa kepada identitas sosial dan dapat mengikat ketidaksetujuan dan jarak sosial dalam masyarakat. Dalam pemaknaan yang umum, akomodasi biasa disebut dengan penyesuaian, yaitu suatu keadaan atau proses manakala kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lainnya sepakat guna menghentikan pertentangan melalui suatu interaksi (Garna, 1996: 153). Secara demikian, dengan menggunakan ungkapan yang bereda dapat dikatakan bahwa akomodasi adalah suatu proses penyesuaian untuk meredakan pertentangan dan perbedaan yang tumbuh melalui proses penyesuaian diri (adaptasi). Akomodasi adalah wadah yang tersedia untuk menampung berbagai perbedaan yang muncul dan meletakkannya dalam situasi yang aman.

Akomodasi merupakan kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri sering melahirkan perilaku yang khas. Persaingan yang didasarkan atas ego (baik ego pribadi maupun ego kelompok), keserakahan, ambisi, haus akan kekuasaan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan pertentangan, baik antar individu maupun antar kelompok. Pertentangan antar individu maupun antar kelompok merupakan sumber potensial bagi tercetusnya suatu konflik. Dalam situasi persaingan, jika individu maupun kelompok sudah memasuki wilayah tujuan, maka individu atau kelompok yang lain tidak akan bisa mencapai wilayah tujuan mereka masing-masing. Dalam kondisi demikian, ada kecenderungan antarindividu atau antarkelompok akan saling menghambat dalam pencapaian tujuan mereka. Sedangkan dalam situasi kerja sama, individu atau kelompok akan saling menunjang dengan individu atau

kelompok lainnya dalam upaya mencapai tujuan mereka. Anggota dalam kelompok kerja sama akan lebih banyak saling menolong daripada anggota kelompok persaingan. Penyesuaian (adaptasi) lebih dapat terjadi dalam situasi kerja sama daripada dalam situasi persaingan.

Dalam konteks relasi antarpemeluk agama di Indonesia, interaksi antarumat berbeda agama didasari oleh adanya suasana kontestasi kepentingan di antara mereka. Interaksi antarumat beragama dalam sejarahnya telah ditandai oleh suasana persaingan dan kontestasi ini. Kontestasi ini tidak jarang menimbulkan riak-riak di permukaan, tetapi kadang pula menghadirkan gelombang besar dalam bentuk konflik bernuansa agama dalam skala yang tidak kecil.



BAGIAN 3

PENDEKATAN DAN PENGALAMAN RISET

A. Pendekatan Riset

Objek riset ini berkenaan dengan dinamika sosial dalam mewujudkan toleransi beragama, daya hambat toleransi beragama, serta strategi mewujudkan toleransi beragama di Kota Bandung. Objek penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: (1) dinamika sosial yang berlangsung dalam relasi umat lintas agama, (2) hal-hal yang dapat mengganjal terwujudnya toleransi beragama; (3) strategi dalam mengelola kontestasi antarkelompok keagamaan sebagai upaya mewujudkan toleransi beragama.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam urusan kehidupan umat beragama. Subjek tersebut, terdiri atas: (1) pemuka agama dari keenam agama yang berada di Kota Bandung, seperti Kiai, Ustaz, Mubalig (Islam), Pendeta (Protestan), Pastor, (Katolik), Pandita dan Bhiku (Budha), Pemangku (Hindu), dan Penatua (Kong Hu Chu); (2) beberapa orang masyarakat biasa atau penganut agama dari keenam agama tersebut; (3) pejabat pemerintah setempat yang terkait langsung dengan urusan umat beragama, seperti pejabat Kesra Pemerintah Kota Bandung, dan beberapa orang pejabat Kantor Kementerian Agama Kota Bandung; (4) pengurus organisasi-organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama

(NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan Persatuan Umat Islam (PUI) Kota Bandung, serta (5) beberapa orang pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung.

Penentuan subjek penelitian ini berdasarkan teknik purposif, karena tidak ada kerangka sampling dari seluruh populasi yang terdapat dalam penelitian ini. Subjek dipilih secara purposif disesuaikan dengan keperluan, karena yang digali dalam penelitian ini adalah kedalaman informasi, bukan kuantitas informasi. Dari situ melalui ucapan, tulisan, atau perilaku mereka, dapat diamati sebagai bagian dari individu, kelompok atau masyarakat dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Dengan melihat karakteristik masalah penelitian itu, penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian deskriptif. Secara deskriptif penelitian ini mengungkap fakta yang berkenaan dengan upaya mewujudkan toleransi beragama di Kota Bandung. Studi deskriptif ini menjelaskan apa yang terjadi secara rinci. Gejala tersebut dijelaskan secara spesifik mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dengan cara demikian, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang lengkap, khususnya berkenaan dengan aspek dinamika sosial dalam mewujudkan toleransi beragama di Kota Bandung.

Layaknya tradisi studi kasus, kriteria informan yang baik adalah orang yang terlibat langsung dalam urusan hubungan umat lintas agama, baik secara individu, kelompok maupun organisasi. Dengan kata lain, yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman langsung dalam bidang dan garapannya masing-masing. Wawancara dilakukan pada para tokoh lintas agama yang mengetahui peta hubungan antaragama di Kota Bandung. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan objektif, wawancara dilakukan dengan beberapa langkah dan pendekatan: identifikasi, persuasi, dan partisipasi, khususnya untuk mengambil data dari tokoh yang sudah terkenal yang umumnya agak sulit ditemui. Adapun terhadap tokoh agama lain, peneliti menggunakan teknik rekomendasi tokoh untuk memudahkan peneliti mewawancarai mereka. Memang sebagian sudah dikenal oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada kesulitan sama sekali untuk berkomunikasi, namun ada juga tokoh agama lain yang belum dikenal sehingga peneliti harus mencari seorang tokoh pengantar.

Ketika mencari data tentang eksistensi, pola relasi dan aktivitas umat beragama di Kota Bandung, informan yang dipilih adalah pemuka-pemuka agama dari keenam agama tersebut yaitu: Ketua MUI Kota Bandung, Ketua Bidang kajian MUI Kota Bandung, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Ketua FKUB Kota Bandung, Anggota Komisi E DPRD Kota Bandung, Staf Bappeda Kota Bandung, Ketua FKPP Kota Bandung, Ketua DKM Masjid Raya Bandung, Ketua PCNU Kota Bandung, Ketua Persis Kota Bandung, Ketua PC Muhammadiyah Kota Bandung, Ketua FSOI Kota Bandung, Ketua Umum PGPK Kota Bandung, Ketua Pembina Masyarakat Hindu Bandung, tokoh masyarakat Hindu Kota Bandung, Ketua Majelis Agama Kong Hu Chu Kota Bandung, Pastor di Keuskupan Bandung, Kepala Bimas Budha Jawa Barat, Komisi Hubungan Antaragama Keuskupan Bandung, Ketua Pastoral Keuskupan Bandung, dan aktivis Jaringan Kerja Antarumat Beragama Kota Bandung. Demikian pula ketika mencari data tentang peran dan fungsi FKUB dalam membangun toleransi beragama, maka informan yang dipilih adalah pengurus inti FKUB, yakni Ketua Umum.

Kemudian ketika mencari informasi tentang program “Bandung Kota Agamis”, maka informan yang dipilih adalah Wali Kota Bandung, Asisten Daerah (ASDA), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), serta Kepala Sub-Bagian Pembinaan Mental.

Pemilihan para tokoh tadi untuk diwawancara karena mereka dianggap mempunyai pengalaman langsung, tidak hanya sebagai individu, tetapi terkait juga ia sebagai pemuka agama, organisasi keagamaan, maupun tokoh pemerintahan. Karena individu-individu tersebut, dipandang mampu mengartikulasikan pengalaman dan pandangannya secara mendalam ketika diwawancarai oleh peneliti, tentang berbagai isu yang berkenaan dengan fenomena-fenomena sosial umat lintas agama.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik bola salju, yaitu menentukan informan berdasarkan informan pangkal lalu akan bergulir ke informan berikutnya berdasarkan informan sebelumnya siapa orang yang memiliki informasi lebih tentang topik yang ditanyakan. Wawancara akan dihentikan setelah data dirasa jenuh dan informasi yang didapat telah mencukupi sesuai dengan tujuan penelitian, serta informasi dirasakan telah berulang-ulang. Informan yang lebih menguasai masalah dan memiliki informasi lebih banyak dianggap informan kunci.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan berperan-serta (observasi partisipatif), dan analisis dokumen (metode historis). Dalam penelitian kualitatif, ketiga metode pengumpulan data ini bersifat fundamental dan digunakan secara bersama-sama. Teknik wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber yang dipandang relevan, kompeten dan otoritatif atas data yang dibutuhkan oleh penelitian. Sementara, pengamatan berperan-serta atau pengamatan terlibat dilakukan terhadap kondisi dan situasi sosial keagamaan di Kota Bandung. Adapun analisis dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan literer serta dokumen-dokumen yang berkenaan dengan segala ikhtiar mewujudkan integrasi umat lintas agama di Kota Bandung.

Pertama, observasi Partisipatoris. Observasi yang dilakukan dengan cara observasi langsung dan observasi partisipatoris ke lapangan selama dua tahun yaitu sejak akhir tahun 2009 sampai tahun 2011. Observasi partisipatoris dilakukan setiap ada pertemuan pemuka agama, seperti pertemuan setiap tiga bulan sekali melalui FKUB, kegiatan dialog dan seminar lintas iman, serta pada waktu hari-hari besar kelima agama tersebut, seperti kegiatan halal bihalal pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah untuk agama Islam. Kegiatan Natal bersama dan Tahun Baru Masehi bagi agama Kristen, kegiatan Hari Raya Nyepi untuk agama Hindu, dan kegiatan Hari Raya Waisak bagi agama Budha, dan Tahun Baru Imlek untuk umat Budha dan Kong Hu Cu.

Selain itu, observasi dilakukan pada setiap kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI tanggal tujuh belas agustus, dan hari jadi Kota Bandung. Bahkan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan unsur lintas agama, seperti bakti sosial, pembagian sembako, khitanan massal dan donor darah bersama menjadi bagian penting yang diobservasi.

Kedua, wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara terbuka (tidak terstruktur) dan mendalam (*in-depth interview*) kepada beberapa informan yang telah dipilih sebelumnya. Wawancara menggunakan pedoman wawancara, buku catatan, *tape recorder* dan kamera. Wawancara diciptakan dalam suasana yang santai, rileks dan bersahabat, agar tidak terkesan formalistik dan tidak kaku. Untuk menciptakan suasana tersebut, peneliti menyerahkan sepenuhnya kepada informan yang akan diwawancarai mengenai waktu dan tempat wawancara.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan komprehensif mengenai berbagai fenomena kehidupan umat beragama Kota Bandung, mulai dari upacara-upacara keagamaan dari keenam agama tersebut, sosial internal umat beragama, sosial umat lintas agama, sikap dan perilaku sosial umat beragama sampai kepada kegiatan ekonomi, politik dan pendidikan umat beragama. Dengan demikian wawancara dibangun dengan suasana kekeluargaan agar hubungan antara peneliti dengan informan lebih dekat dan akrab. Wawancara juga dilakukan untuk menggali informasi mengenai keberadaan dan perkembangan agama-agama di Kota Bandung, karena informasi ini sangat membantu dalam konstruksi sosial dalam toleransi beragama di Kota Bandung.

Ketiga, studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data tertulis berupa buku-buku, dokumen-dokumen atau transkrip-transkrip, majalah, koran, buletin, foto-foto dan catatan-catatan penting lainnya yang berkenaan dengan kegiatan keagamaan masing-masing agama. Termasuk juga dokumen-dokumen resmi pemerintah kota atau kementerian agama mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan umat beragama. Di samping itu, peneliti juga membuka akses melalui internet, mencari website-website yang berkenaan dengan doktrin, perkembangan kehidupan agama-agama, baik di Indonesia maupun di Bandung sendiri. Data tersebut sangat penting diperlukan dalam penelitian ini, karena dalam penelitian kualitatif menjadi bahan berharga yang tak terpisahkan dari data-data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara. Karena data-data tersebut, referensi pengetahuan, opini atau pendapat, serta pencerminan sikap dan perilaku umat beragama. Oleh karena itu, dokumen-dokumen tersebut, menjadi penting dan sangat membantu dalam mengeksplorasi pemberian makna terhadap realitas sosial kehidupan umat lintas agama di Kota Bandung.

Data yang sudah dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara harus diuji keabsahannya, dengan maksud data yang dianalisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uji keabsahan data itulah yang dimaksud dengan istilah triangulasi. Teknik ini dilakukan untuk memeriksa keabsahan data sekaligus memanfaatkan sesuatu yang lain di

luar data yang sudah diperoleh untuk keperluan membandingkan dan mengecek data yang sudah ada. Langkah ini sering dilakukan dengan cara memeriksa sumber data yang lain dari yang sudah ada.

Proses mengecek atau membandingkan data dengan menggunakan sumber lain dilakukan untuk memeriksa derajat kepercayaan suatu informasi atau data yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Secara demikian, teknik triangulasi dilakukan sebagai langkah untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan ungkapan yang berbeda dapat dikatakan bahwa triangulasi adalah langkah *me-recheck* temuan dengan cara membandingkan dengan sumber, metode atau teri lain. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dalam varian yang berbeda lalu mengeceknya dengan sumber lain yang berbeda pula agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

B. Pengalaman Riset

Bertemu dan menggali informasi dari subjek penelitian, dalam hal ini para tokoh lintas agama yang ada di Kota Bandung, tidaklah selalu mudah. Terlebih mereka menyebar di banyak tempat yang tidak jarang masih asing bagi penulis. Tetapi, sesulit apa pun untuk bisa sampai ke tempat yang dijanjikan, bertemu dan berdiskusi dengan para tokoh lintas agama selalu saja merupakan peristiwa penting dan layak dikenang. Terdapat banyak pengalaman lapangan yang diperoleh selama penulis menghimpun informasi dari para informan.

Pertama, penulis menemukan keakraban lintas iman ketika bertemu dan mewawancarai para tokoh dari berbagai agama yang berbeda. Mereka begitu terbuka menerima kedatangan penulis di waktu dan tempat yang sudah disepakati sebelumnya: kadang di rumah kediaman, di rumah ibadah, atau di tempat kerja mereka. Kadang-kadang penulis harus menaklukan ‘petugas penjaga’ terlebih dahulu di kediaman informan yang hendak diwawancarai. Tetapi tuan rumah kemudian menghadiahi penulis dengan keramahan dan sajian beragam informasi amat berharga yang dibutuhkan oleh penelitian ini.

Kedua, penulis menemukan beragam tipe narasumber yang menarik dan unik, baik karena latar belakang profesi yang memang berbeda maupun karena perbedaan karakter personal mereka sendiri. Seorang pastor di Katedral Santo Petrus Bandung bahkan ada yang hanya mau melanjutkan wawancara kalau penulis berhasil menjawab teka-teki yang disediakannya. Pastor keturunan Belanda itu memperkenalkan diri sebagai WNS, dan itulah teka-tekinya. Untunglah istri penulis yang ikut menemani wawancara berhasil menjawab teka-teki itu, dengan mengatakan bahwa WNS itu tidak lain singkatan dari Warga Negara Surga. Wawancara pun kemudian dilanjutkan dengan penuh kegembiraan, tapi tetap dapat mencerap sejumlah informasi penting yang dibutuhkan penelitian ini. Penulis juga bertemu dan mewawancarai seorang tokoh muda Kong Hu Chu yang juga adalah seorang direktur sebuah perusahaan yang bergerak dalam dunia teknologi. Wataknya yang sangat terbuka membuat ia berkali-kali menyebut istilah “*off the record*” untuk sejumlah informasi yang dipandang sangat sensitif dan masih harus diuji kebenarannya. Sementara itu, penulis juga berhadapan dengan situasi betapa sulitnya menemui seorang tokoh sepuh agama Budha, yang juga seorang dosen senior di Universitas Padjadjaran. Berulang kali menghubungi kediamannya di Jalan Banda maupun Wihara tempatnya mengabdikan di Jalan Juanda 5 Bandung, tidak pernah juga dapat bertemu. Akhirnya, penulis mendatangi dan mewawancarai tokoh Budha lain yang bekerja sebagai Kepala Pembina Masyarakat Budha di Kementerian Agama Jawa Barat.

Ketiga, tampaknya program Bandung Kota Agamais telah cukup membuat sekat di antara para tokoh lintas agama mencair. Hampir semua informan yang ditemui mengakui kalau program dari Pemerintah Kota Bandung ini telah berhasil meruntuhkan rasa curiga, kebekuan, kekakuan, sekaligus meluluhkan tembok psikologis yang selama ini menjadi hambatan terbesar yang dirasakan para tokoh lintas agama ketika mereka saling bertemu satu sama lain. Implikasinya, penulis dapat menggali berbagai informasi yang diperlukan dengan relatif mudah. Beberapa tokoh lintas agama bahkan menawarkan penulis sejumlah kerja sama lanjutan yang diharapkan dapat memperkuat relasi lintas agama di Kota Bandung.

Keempat, ketika bertemu dengan informan yang berasal dari kalangan internal Islam, penulis memperoleh sejumlah pengalaman

menarik. Salah satunya adalah ketika bertemu dan mewawancarai seorang tokoh yang berposisi sebagai pimpinan organisasi keagamaan Islam yang selama ini dipandang berhaluan konvensional. Menariknya adalah sekalipun ia seorang tokoh dari ormas keagamaan Islam yang dipandang tradisional, tetapi dalam hal menjalin relasi lintas agama, ia dipandang sangat liberal. Ia dianggap lebih dekat dengan para tokoh di luar Islam daripada dengan tokoh Islam sendiri. Inilah yang kemudian memicu sejumlah protes dari kalangan ormas keagamaan yang dipimpinnya. Dari perspektif sosiometrik, hal ini menjadi bahan kajian yang menarik untuk melihat sejauh mana kedekatan atau kerenggangan relasi sosial yang terjalin di internal suatu kelompok maupun antarkelompok keagamaan yang ada.

Kelima, berbekal relasi baik yang sudah terjalin sebelumnya, baik dengan tokoh lintas agama maupun tokoh yang ada di pemerintahan, penulis memperoleh akses yang memadai untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Mereka tidak canggung untuk mengeluarkan berbagai informasi dan data yang diperlukan, sekalipun menyangkut hal yang dipandang sensitif dan sakral. Meski kadang-kadang disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS, *Short Message Service*), seperti yang berkali-kali dilakukan oleh seorang Romo di Santo Aloysius Bandung.



BAGIAN 4

BANDUNG:

RUMAH BERSAMA SEMUA UMAT BERAGAMA

A. Fenomena Kota Bandung

Bila ada waktu, sesekali, cobalah berdiri sambil berkacak pinggang di ketinggian bukit Dago yang eksotis dan menantang. Lantas, tebarkan pandang menatap panorama alam endah parahyangan di sekeliling. Maka, akan tampaklah rangkaian bukit dan gunung, hijau membiru di kejauhan. Tak putus-putus berjajar mengepung Bandung. Ya, itulah Kota Bandung yang pada penghujung September 2016 ini, tengah merayakan hari kelahirannya yang ke-206.

Beberapa tahun lalu, sebuah harian terkemuka ibukota memuat sebuah laporan yang amat menarik, di mana Kota Bandung ditempatkan sebagai kota yang menduduki urutan pertama sebagai kota ternyaman dengan kualitas hidup terbaik di Indonesia, jauh meninggalkan Jakarta dengan segala kemewahannya yang berada di urutan ketujuh. Sementara 24 kota lainnya yang berada di bawah Kota Bandung adalah Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Makassar Palembang, Jakarta, Semarang, Bogor, Medan, Padang, Cirebon, Samarinda, Manado, Tangerang, Jambi, Bekasi, Batam, Balikpapan, Pontianak, Bandar Lampung, Mataram, Pekanbaru, Banjarmasin, Cilegon dan Jayapura.

Dalam survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga internasional, Mercer, Bandung menjadi kota paling nyaman dengan kualitas hidup terbaik, sedangkan Jayapura berada di urutan ke-25 dan menjadi kota paling tidak nyaman di Indonesia. Riset dan survei Mercer ini mengacu pada perkiraan dan evaluasi dari beberapa faktor penting penentu kualitas hidup, seperti lingkungan politik dan sosial, ekonomi, lingkungan sosial-kultural, medis dan kesehatan, layanan umum dan transportasi, rekreasi, barang-barang kebutuhan, tempat tinggal dan lingkungan alam.

Fenomena Kota Bandung adalah fenomena keragaman etnik, suku bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan status sosial. Dilihat dari sudut etnik dan kebudayaan, penduduk Kota Bandung merepresentasikan seluruh etnik dan kebudayaan yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Kota Bandung memang laksana bumi yang mengerut. Dengan bergumuhnya keragaman etnik dalam suatu wilayah yang relatif sempit, sangat dimungkinkan terjadinya sentimen-sentimen bernuansa kesukuan, kedaerahan atau bahkan agama. Sekalipun demikian, di Kota Bandung, para pemeluk agama dan keyakinan yang berlainan relatif dapat hidup berdampingan secara tenteram, penuh toleransi dan harmoni.

Fenomena Kota Bandung adalah fenomena keragaman etnik, warna kulit, suku bangsa, bahasa, dan agama. Di Kota Bandung ini akan ditemukan keragaman yang belum tentu ditemukan di provinsi lain. Kota Bandung memang sering diibaratkan sebagai bumi yang mengerut. Dilihat dari sudut etnik dan kebudayaan, penduduk Kota Bandung merepresentasikan seluruh etnik dan kebudayaan yang ada di Indonesia seperti Jawa, Padang, Medan, Batak dan sebagainya. Namun etnik, kebudayaan dan bahasanya adalah Sunda. Bahkan kesundaan inilah yang menjadi basis dan identitas kebudayaan Kota Bandung. Dalam kesundaan, selain terdapat bahasa, juga terdapat nilai dan norma-norma sosial yang seharusnya menjadi ciri dan karakter lembaga, pranata, dan setiap individu masyarakat Kota Bandung. Kota Bandung dihuni oleh mayoritas suku Sunda, di samping suku-suku yang lain, seperti, Jawa, Padang, Batak, Madura, Bugis, Cina, Arab, India, dan lain-lain. Bandung ini memang dapat dikatakan sebagai kota kosmopolitan. Banyak pendatang yang memenuhi kota ini.

Secara geografis, posisi Kota Bandung cukup dekat dengan ibukota negara, Jakarta. Jarak Bandung sekitar 180 km arah timur dari Jakarta. Saat ini dunia sedang dilanda demam globalisasi. Kota Bandung, sebagai bagian dari Indonesia, juga merupakan daerah yang terbuka, paling dekat ke Ibu Kota Negara, akan menjadi salah satu tempat paling strategis untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, pendidikan, dan lain-lainnya. Konsekuensinya, Bandung akan menjadi kota yang mendapat imbas migrasi kultural yang sangat dahsyat. Di Kota Bandung juga terdapat warga dari negara-negara lain, bahkan, tidak terlepas dari bagian pasar global yang mendatangkan gaya, watak, selera dan produk dari negara-negara di berbagai belahan dunia, terutama dari negara-negara Barat. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Bandung merupakan bagian dari kebudayaan global yang di antaranya bercirikan modern, pragmatik, ilmiah, berbasis informasi dan teknologi.

Dengan bergumuhnya keragaman etnik dalam suatu wilayah yang relatif sempit, sangat dimungkinkan terjadinya sentimen-sentimen kesukuan, kedaerahan atau agama. Oleh karena itu, berbagai pertimbangan yang mendalam dan hati-hati pada tingkat filosofis, strategis maupun praksis haruslah dilakukan oleh setiap unsur budaya dan etnik dalam upaya untuk menghindari berbagai konflik kultural di masyarakat (Safei & Millie, 2016).

Mengiringi dinamika kehidupan beragama di tanah air dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi menurunnya tingkat toleransi di kalangan umat beragama. Sebuah sinyalemen yang dihembuskan oleh pakar etika, Franz Magnis Soeseno (*Pikiran Rakyat*, edisi 26/12/2010), menyebutkan bahwa saat ini tengah terjadi pergeseran dari toleransi ke kompetisi. Dalam konteks ini, terdapat indikasi yang menyebutkan bahwa hubungan antarumat beragama, terutama hubungan Islam dan Kristen, mengalami penurunan, karena toleransi tidak lagi menjadi pandangan hidup umat beragama. Menurut Magnis Soeseno, penurunan toleransi terkait dengan perubahan budaya masyarakat dari model gotong royong ke model kompetisi. Dari kota sampai ke desa, semua orang terindividualisasi, terkotak dalam mayoritas-minoritas. Namun, dilihat dari segi jalinan komunikasi antartokoh umat beragama, kondisinya sekarang lebih baik. Tokoh Kristen bisa berkomunikasi dan saling mengunjungi

dengan tokoh NU, Muhammadiyah. Mereka secara bersama-sama bisa pergi ke pesantren, ke sekolah Muhammadiyah, dan sebaliknya tokoh Islam bisa berkunjung ke lembaga Kristen. Akan tetapi, menurut Soeseno, suasana kompetisi mengubah tabiat pemeluk agama, masuk pada perangkap-prasangka dan curiga dengan pemeluk agama lain.

Dalam masyarakat yang majemuk seperti Kota Bandung, konflik dan integrasi merupakan pasangan dialektis. Ketegangan, atau dalam bahasa teknis sosiologis adalah konflik, merupakan satu kesatuan dengan pluralisme (kemajemukan). Tidak ada pluralisme tanpa ketegangan, kecuali bila direayasa sedemikian rupa sehingga konflik bisa ditutupi. Ketika masyarakat yang berbeda agama berinteraksi, pada saat itu kemungkinan terjadinya ketegangan menjadi sangat terbuka (Safei, 2002).

B. Potensi Keagamaan

Sebagai kota yang terbuka dan majemuk, Bandung dihuni oleh beragam pemeluk agama yang berbeda-beda. Di Kota Bandung, para pemeluk agama dan keyakinan yang berlainan, seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Kong Hu Chu, bahkan agama Baha'i dan Sikh dapat hidup berdampingan secara tenteram. Dua agama terakhir, yakni Baha'i dan Sikh, karena komunitasnya yang masih sangat kecil serta tidak diakui, tidak dimasukkan sebagai unit penelitian ini. Pemeluk agama Islam, dengan persentase yang hampir mencapai 89 persen, menjadi penghuni mayoritas di Kota Bandung. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan komposisi penduduk Kota Bandung berdasarkan afiliasi agama dan keyakinan:

Tabel 1 Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Orang)
1.	Islam	1.673.723
2.	Kristen	101.481
3.	Katolik	49.667
4.	Hindu	5.094
5.	Budha	12.317
6.	Lain-lain	1.837

Sumber: Bagian Kesra Kota Bandung, 2010

Untuk mendukung pengamalan peribadatan para pemeluk berbagai agama, di Kota Bandung juga berdiri banyak sekali rumah-rumah ibadat sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Sarana Keagamaan di Kota Bandung

No	Sarana Agama	Jumlah (Buah)
1.	Mesjid	2192
2.	Langgar	1577
3.	Musala	365
4.	Pondok Pesantren	102
5.	Gereja Protestan	107
6.	Gereja Katolik	24
7.	Pura	3
8.	Wihara	22

Sumber: Bagian Kesra Kota Bandung, 2010

Sejak diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006, perkembangan jumlah sarana ibadah non-Islam, khususnya gereja, mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Bahkan, menurut Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), perkembangan jumlah gereja di Kota Bandung terhitung paling tinggi dibandingkan kabupaten dan kota lain di seluruh Indonesia (Wawancara, 23 Januari 2011). Sejumlah warga kota yang ditanya berkenaan dengan semakin bertambahnya jumlah rumah ibadah kalangan nonmuslim ini menuturkan, bahwa hal itu merupakan bukti bahwa kehidupan beragama di Kota Bandung sangat kondusif karena sikap warganya yang toleran. Sementara warga lain menyatakan bahwa melonjaknya jumlah sarana ibadah umat nonmuslim menunjukkan bahwa umat Islam di Kota Bandung sudah sampai pada toleransi yang berlebihan. Atas nama toleransi beragama, umat Islam tidak berani menolak pendirian rumah ibadah agama lain (Wawancara, 30 Januari 2011). Sehingga, akibat akhirnya, adalah melonjaknya jumlah rumah ibadah nonmuslim yang ada di Kota Bandung.

Selain itu, di Kota Bandung juga tumbuh dan berdiri berbagai organisasi kemasyarakatan bercorak keagamaan yang memiliki komitmen yang sama untuk bersama-sama membangun Kota Bandung. Dari hasil

penelusuran penulis, organisasi massa keagamaan yang turut mewarnai dinamika kehidupan beragama di Kota Bandung di antaranya adalah:

1. AGAP (Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan)
2. AKUR (Aliansi Kerukunan Antarumat Beragama)
3. API (Aliansi Pergerakan Islam)
4. BANSER (Barisan Serbaguna)
5. BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
6. BMW (Bandung Maksiat Watch)
7. CMB (Corps Mubaligh Bandung)
8. DMI (Dewan Masjid Indonesia)
9. FBP (Forum Bandung Plural)
10. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)
11. FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren)
12. FKWMK (Forum Komunikasi Warga Muslim Karasak)
13. FLADS (Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang)
14. FPI (Front Pembela Islam)
15. FSUB (Forum Silaturahmi Umat Beragama)
16. FSOI (Forum Silaturahmi Ormas Islam)
17. FUUI (Forum Ulama Umat Islam)
18. GARIS (Gerakan Reformis Islam)
19. GERAM (Gerakan Anti Maksiat)
20. GKI (Gereja Kristen Indonesia)
21. GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)
22. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
23. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
24. INCRES (Institute for Culture and Religion Studies)
25. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama)
26. IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah)
27. ISKA (Ikatan Sarjana Katolik Indonesia)
28. JAKATARUB (Jaringan Kerja Antarumat Beragama)
29. KCBI (Keluarga Cendekiawan Budhis Indonesia)
30. KMLA-KB (Kaum Muda Lintas Agama Kota Bandung)
31. LA (Laskar Ababil)
32. LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)
33. LM (Laskar Mujahidin)

34. LPI (Laskar Pembela Islam)
35. LS (Laskar Sabilillah)
36. MAKIN (Majelis Agama Kong Hu Chu Indonesia)
37. MAWI (Majelis Agung Waligereja Indonesia)
38. MDI (Majelis Dakwah Islamiyah)
39. MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Kong Hu Chu Indonesia)
40. PAKUAN (Paguyuban Aksi untuk Agama, Adat dan Kepercayaan)
41. PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)
42. PGI (Persekutuan Gereja-gereja Seluruh Indonesia)
43. PHDI (Parisada Hindu Darma Indonesia)
44. PIKI (Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia)
45. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
46. PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia)
47. SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia)
48. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)
49. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)
50. WALUBI (Perwalian Umat Budha Indonesia)

Pada wilayah kehidupan keagamaan, menurut Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), Kota Bandung dihadapkan pada kompleksitas persoalan yang secara garis besar dapat dipetakan ke dalam lima kelompok, yaitu:

Pertama, masih kurangnya dukungan lingkungan terhadap keberlangsungan dalam pengamalan kehidupan beragama di masyarakat kota Bandung. Isu peningkatan dukungan lingkungan merupakan isu utama dalam keberlangsungan pengamalan kehidupan beragama di masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih maraknya pornografi, tayangan media massa yang bertentangan dengan moral keagamaan, hiruk pikuk kehidupan yang dapat mengganggu jalannya kehidupan beragama di masyarakat.

Kedua, masih belum memadainya kualitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Terutama pada jenjang madrasah ibtidaiah swasta, masih rendahnya kualitas lulusan madrasah, serta masih kurangnya jam pelajaran pendidikan agama pada sekolah-sekolah formal, merupakan salah satu sebab terjadinya kenakalan remaja serta munculnya aktivitas siswa yang tidak terpuji.

Ketiga, masih belum memadainya sarana prasarana penyelenggaraan kegiatan keagamaan, maupun pendidikan keagamaan. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana peribadatan serta kualitas sarana prasarana pendidikan keagamaan dapat dilihat dari kualitas tempat ibadah di mal serta hotel yang seadanya juga dapat menjadikan salah satu alasan rendahnya kualitas kegiatan keagamaan.

Keempat, masih relatif rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan. Isu rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan, merupakan tuntutan yang harus diupayakan pemecahannya sehingga dapat memacu semangat untuk meningkatkan kualitas kinerjanya (Wawancara, 21 Januari 2011).

C. Kota Jasa

Kota Bandung mengidentifikasi dirinya sebagai kota jasa “Bermartabat”, sesuai dengan rumusan Visi Kota Bandung sekarang yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung (Nomor 06 Tahun 2004) yaitu “Meningkatkan peran Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat”. Rumusan dari visi tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat Pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Bandung, setelah melalui telaahan filosofis dan kajian empirik tentang struktur kehidupan masyarakat Kota Bandung yang memiliki harga diri, martabat sebagai manusia yang sejahtera dengan memperhatikan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan lingkungan manusia lainnya serta hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Secara harfiah, Kota Bermartabat dapat diartikan sebagai kota yang mempunyai harga diri dapat dibanggakan oleh seluruh warganya dan kota yang mempunyai kehormatan melalui pelayanan prima yang diberikan kepada seluruh warganya tanpa membedakan status. Tekanan dan makna yang dikandung kalimat visi di atas, memiliki konsekuensi yaitu bagaimana memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memiliki layanan sebagai pusat pertumbuhan dengan keterkaitan global maupun nasional di berbagai lapangan usaha yang berkaitan dengan jasa serta mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelayanan jasa untuk lingkup Kota Bandung sendiri maupun lingkup wilayah pengaruhnya di luar Kota Bandung, baik yang disediakan oleh institusi pemerintah

maupun swasta. Tidak mudah memfungsikan suatu kota metropolitan seperti Bandung untuk mampu menempatkan dirinya sebagai kota jasa dengan moto juang bersih, makmur, taat, bersahabat yang benar-benar berfungsi efektif (Osada, 2009).

Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi pemenuhan kondisi lingkungan kegiatan ekonomi dan sosial yang dinamis dan bermartabat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta ditunjang oleh berkembangnya sektor ekonomi yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas sehingga kemakmuran ekonomi dapat dinikmati oleh semua warganya.

Selain itu, Kota Jasa Bermartabat juga memiliki dimensi pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia, baik dan tidak tercela yang dapat membentuk kesadaran yang tinggi dalam peri kehidupan kota yang majemuk. Terbentuknya akhlak yang baik akan terciptanya ketaatan akan aturan pemerintah, aturan agama, aturan keluarga, aturan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, Kota Jasa Bermartabat juga memiliki dimensi pemenuhan pelayanan publik dan pelayanan umum lainnya, pelayanan pembangunan, pelayanan sosial dalam lingkungan kota serta budaya yang ramah dan menarik sehingga terbentuk kota ramah, sehat, bersahabat dan nyaman. Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis di antara fungsi-fungsi ruang kota yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan hidup dalam mengendalikan tumbuhnya sektor-sektor jasa yang memberi kehidupan bagi masyarakat Kota Bandung. Apa yang dibangun pada dasarnya terpusat pada pembentukan karakter masyarakat Kota Bandung yang teratur dan berhati nurani, menciptakan tatanan yang tepat dalam penataan fungsi ruang kota mewujudkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, baik dan tidak tercela (*akhlak karimah, akhlak khasanah, akhlak madzmumah*), disiplin, saling menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat sehingga tercipta suatu keteraturan dalam kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, politik, hukum dan religius.

Dalam perspektif jangka panjang, perhatian secara konsisten harus tetap terpusat pada pengembangan sumber daya manusia, pengembangan

ekonomi kota, pengembangan sosial budaya kota, penataan kota, pengembangan pemerintahan kota (*good governance*), pengembangan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Berangkat dari pemikiran di atas, untuk memantapkan Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat perlu ada langkah-langkah sistematis, bertahap, kontinyu dan berjangka panjang melalui proses konsolidasi, pemantapan, akselerasi menuju Kota Bandung sebagai kota metropolitan yang berdaya saing (Suherman, 2009: 44-51).

Salah satu komitmen untuk menjaga martabat Kota Bandung adalah penghormatan yang besar terhadap keragaman. Keberagaman adalah fitrah, karena ketika manusia dilahirkan tidak mempunyai pilihan berkulit kuning, coklat, atau putih. Ia kemudian hanya berhak menentukan kepercayaan, pilihan politik, dan jalan hidup termasuk pilihan beragama. Namun yang jelas semuanya memiliki kesamaan tujuan, yakni meraih kesejahteraan fisik material dan mental spiritual. Benar pula gagasan para pendiri negeri ini, ketika sepakat membangun Indonesia atas dasar bhineka tunggal ika. Tidak ada dikotomi penduduk asli atau pendatang, Islam atau nonmuslim, bermata sipit atau biasa. Semuanya memiliki hak dan kewajiban sama, yang diikat dalam semangat persatuan dan kesatuan.

Kondisi ini pula yang diakui Walikota menginspirasi pembangunan Kota Bandung, yakni membangun kota berdasarkan konsep kemakmuran, demokrasi, dan keadilan. Masyarakat diharapkan merasa aman dan nyaman, karena potensi konflik dapat diminimalkan. Begitu pula mayoritas tidak menekan minoritas, dan minoritas tidak eksklusif atau merasa lebih segalanya dibanding mayoritas (Rosada, 2011).

Terlebih lagi Kota Bandung memiliki catatan sejarah yang membanggakan khususnya ketika seluruh komponen masyarakat tanpa melihat asal usul dan etnik secara bersama-sama berjuang membumihanguskan tempat tinggalnya agar tidak kembali dikuasai kaum kolonial tahun 1946. Sembilan tahun kemudian atau tepatnya tahun 1955 memberi andil suksesnya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA), sekaligus mendeklarasikan “Dasasila Bandung” sebagai bentuk perjuangan menentang diskriminasi dan ketidakadilan.

Memelihara momentum ini tentu tidaklah mudah karena cukup banyak faktor yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu,

kebijakan yang sangat realistis adalah mempererat kesamaan langkah untuk meraih tujuan melalui penetapan visi: “Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat”. Visi ini tentu bukan sekadar berdimensi ekonomi, tetapi menyangkut cita-cita mewujudkan masyarakat yang memiliki kehormatan, kebanggaan, dan jati diri. Singkatnya, visi ini antara lain berorientasi kepada pemeliharaan pluralisme yang bermartabat.

Menuju pluralisme yang bermartabat, menurut Walikota Bandung, diawali dengan penguatan SDM yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara emosional, sehat fisik sehat mental, makmur sosial makmur ekonomi, santun kepada lingkungan, menjunjung tinggi nilai-nilai seni budaya, berprestasi di bidang olah raga, dan tentu saja menjadikan nilai-nilai ajaran agama sebagai ruh atau jiwa dari setiap aktivitas warga Kota. Dengan kata lain pluralisme yang bermartabat dikuatkan dengan pembangunan pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga dan agama atau yang lebih dikenal sebagai tujuh agenda prioritas pembangunan Kota Bandung.

Pembangunan bidang agama diharapkan menciptakan harmoni hubungan umat beragama, antar umat beragama, serta antara umat beragama dengan pemerintah, sekaligus menjadikan Kota Bandung sebagai rumah bersama di mana setiap perbedaan mendapat tempat untuk tumbuh, dipelihara, dan berkembang dalam semangat kekeluargaan. Langkah ke arah itu ternyata mendapat dukungan para tokoh lintas agama, yang kemudian melahirkan “Deklarasi Sancang”, 10 Nopember 2007. Deklarasi ini berisi pernyataan para tokoh agama dan umat yang berdiri di belakangnya untuk menciptakan suasana Kota Bandung yang kondusif. Boleh jadi, agama tidak memiliki kekuatan politik memaksakan tumbuhnya semangat kebersamaan, tetapi pengalaman membuktikan kebersamaan untuk beragama bisa menjadi kekuatan besar untuk mendorong perubahan, khususnya memelihara pluralisme yang bermartabat.

Keragaman etnik, budaya, dan agama merupakan pelengkap identitas Kota Bandung, karena masing-masing unsur dapat saling melengkapi, dan memperkaya khazanah budaya yang telah ada. Kalaupun cukup banyak organisasi keagamaan, institusi tersebut tidak mencerminkan komunitas yang menjaga jarak dengan warga lain, tetapi

merupakan wadah untuk menampung serta menyalurkan aspirasi anggota untuk membangun Kota. Itu pula sebabnya agenda tahun 2011 adalah bagaimana memantapkan pluralisme dengan membuang jauh perbedaan perlakuan antarsesama. Diskriminasi, apa pun bentuknya, adalah kegagalan sosial yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlawanan terhadap tindakan tersebut, tidak selamanya harus dengan kekerasan tetapi melalui program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat yang majemuk.

Memantapkan visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat merupakan solusi terbaik dalam mengikat keragaman asal-usul, etnik, budaya, dan agama. Setidaknya, upaya ini mampu memperpendek jarak antara satu komunitas dengan komunitas lain, karena mereka memiliki persepsi serupa, bahwa Kota Bandung adalah tempat tinggal bersama yang harus dijaga bersama-sama pula. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan Kota Bandung, program yang dilakukan berpijak pada program yang telah dilakukan serta disesuaikan dengan kondisi dan tantangan ke depan melalui pendekatan rasional dan dinamis. Berikut adalah tujuh program prioritas Kota Bandung (Suherman, 2009: 48):

1. Program Bandung Cerdas (Membangun Masyarakat Informasi Kreatif, Cerdas dan Berdaya Saing).
2. Program Bandung Sehat (Membangun Masyarakat Sehat dan Produktif).
3. Program Bandung Makmur (Membangun Masyarakat Adil, Sejahtera dan Memiliki Harga Diri).
4. Program Bandung Ramah Lingkungan (Membangun Kota Nyaman dan Sehat).
5. Program Seni Budaya (Membangun Masyarakat Kota Bandung Cinta akan Budaya dan Jati Dirinya).
6. Program Bandung Berprestasi (Membangun Masyarakat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Berdaya Saing).
7. Bandung Kota Agamais (Membangun Masyarakat yang Berakhlak Tinggi dan Toleran).



BAGIAN 5

BANDUNG IN HARMONY

A. Bandung Bermartabat

Kota Bandung mengidentifikasi dirinya sebagai kota jasa “Bermartabat”, sesuai dengan rumusan Visi Kota Bandung sekarang yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung (Nomor 06 Tahun 2004) yaitu “Meningkatkan peran Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat”. Rumusan dari visi tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat Pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Bandung, setelah melalui telaahan filosofis dan kajian empirik tentang struktur kehidupan masyarakat Kota Bandung yang memiliki harga diri, martabat sebagai manusia yang sejahtera dengan memperhatikan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan lingkungan manusia lainnya serta hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Secara harfiah, Kota Bermartabat dapat diartikan sebagai kota yang mempunyai harga diri dapat dibanggakan oleh seluruh warganya dan kota yang mempunyai kehormatan melalui pelayanan prima yang diberikan kepada seluruh warganya tanpa membeda-bedakan status. Tekanan dan makna yang dikandung kalimat visi di atas, memiliki konsekuensi yaitu bagaimana memerankan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memiliki layanan sebagai pusat pertumbuhan dengan keterkaitan global maupun nasional di berbagai lapangan usaha yang berkaitan dengan

jasa serta mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelayanan jasa untuk lingkup Kota Bandung sendiri maupun lingkup wilayah pengaruhnya di luar Kota Bandung, baik yang disediakan oleh institusi pemerintah maupun swasta. Tidak mudah memfungsikan suatu kota metropolitan seperti Bandung untuk mampu menempatkan dirinya sebagai kota jasa dengan moto juang bersih, makmur, taat, bersahabat yang benar-benar berfungsi efektif (Rosada, 2009 –Pengantar).

Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi pemenuhan kondisi lingkungan kegiatan ekonomi dan sosial yang dinamis dan bermartabat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta ditunjang oleh berkembangnya sektor ekonomi yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas sehingga kemakmuran ekonomi dapat dinikmati oleh semua warganya.

Selain itu, Kota Jasa Bermartabat juga memiliki dimensi pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia, baik dan tidak tercela yang dapat membentuk kesadaran yang tinggi dalam peri kehidupan kota yang majemuk. Terbentuknya akhlak yang baik akan terciptanya ketaatan akan aturan pemerintah, aturan agama, aturan keluarga, aturan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, Kota Jasa Bermartabat juga memiliki dimensi pemenuhan pelayanan publik dan pelayanan umum lainnya, pelayanan pembangunan, pelayanan sosial dalam lingkungan kota serta budaya yang ramah dan menarik sehingga terbentuk kota ramah, sehat, bersahabat dan nyaman. Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis di antara fungsi-fungsi ruang kota yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan hidup dalam mengendalikan tumbuhnya sektor-sektor jasa yang memberi kehidupan bagi masyarakat Kota Bandung. Apa yang dibangun pada dasarnya terpusat pada pembentukan karakter masyarakat Kota Bandung yang teratur dan berhati nurani, menciptakan tatanan yang tepat dalam penataan fungsi ruang kota mewujudkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, baik dan tidak tercela (*akhlak karimah, akhlak khasanah, akhlak madzmumah*), disiplin, saling menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang

bermartabat sehingga tercipta suatu keteraturan dalam kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, politik, hukum dan religius.

Berangkat dari pemikiran di atas, untuk memantapkan Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat perlu ada langkah-langkah sistematis, bertahap, kontinyu dan berjangka panjang melalui proses konsolidasi, pemantapan, akselerasi menuju Kota Bandung sebagai kota metropolitan yang berdaya saing (Suherman, 2009: 44-51).

Salah satu komitmen untuk menjaga martabat Kota Bandung adalah penghormatan yang besar terhadap keragaman. Keberagaman adalah fitrah, karena ketika manusia dilahirkan tidak mempunyai pilihan berkulit kuning, coklat, atau putih. Ia kemudian hanya berhak menentukan kepercayaan, pilihan politik, dan jalan hidup termasuk pilihan beragama. Namun yang jelas semuanya memiliki kesamaan tujuan, yakni meraih kesejahteraan fisik material dan mental spiritual. Benar pula gagasan para pendiri negeri ini, ketika sepakat membangun Indonesia atas dasar bhineka tunggal ika. Tidak ada dikotomi penduduk asli atau pendatang, Islam atau nonmuslim, bermata sipit atau biasa. Semuanya memiliki hak dan kewajiban sama, yang diikat dalam semangat persatuan dan kesatuan.

Kondisi ini pula yang diakui Walikota menginspirasi pembangunan Kota Bandung, yakni membangun kota berdasarkan konsep kemakmuran, demokrasi, dan keadilan. Masyarakat diharapkan merasa aman dan nyaman, karena potensi konflik dapat diminimalkan. Begitu pula mayoritas tidak menekan minoritas, dan minoritas tidak eksklusif atau merasa lebih segalanya dibanding mayoritas (Rosada, 2011).

Terlebih lagi Kota Bandung memiliki catatan sejarah yang membanggakan, khususnya ketika seluruh komponen masyarakat tanpa melihat asal usul dan etnik secara bersama-sama berjuang membumihanguskan tempat tinggalnya agar tidak kembali dikuasai kaum kolonial tahun 1946. Sembilan tahun kemudian, atau tepatnya tahun 1955, Kota Bandung memberi andil suksesnya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA), sekaligus mendeklarasikan “Dasasila Bandung” sebagai bentuk perjuangan menentang diskriminasi dan ketidakadilan.

Memelihara momentum ini tentu tidaklah mudah karena cukup banyak faktor yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, kebijakan yang sangat realistis adalah mempererat kesamaan langkah

untuk meraih tujuan melalui penetapan visi: “Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat”. Visi ini tentu bukan sekadar berdimensi ekonomi, tetapi menyangkut cita-cita mewujudkan masyarakat yang memiliki kehormatan, kebanggaan, dan jati diri. Singkatnya, visi ini antara lain berorientasi kepada pemeliharaan pluralisme yang bermartabat.

Mewujudkan pluralisme bermartabat, menurut Walikota Bandung, diawali dengan penguatan SDM yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara emosional, sehat fisik sehat mental, makmur sosial makmur ekonomi, santun kepada lingkungan, menjunjung tinggi nilai-nilai seni budaya, berprestasi di bidang olah raga, dan tentu saja menjadikan nilai-nilai ajaran agama sebagai ruh atau jiwa dari setiap aktivitas warga Kota. Dengan kata lain pluralisme yang bermartabat dikuatkan dengan pembangunan pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga dan agama atau yang lebih dikenal sebagai tujuh agenda prioritas pembangunan Kota Bandung.

Pembangunan bidang agama diharapkan menciptakan harmoni hubungan umat beragama, antar umat beragama, serta antara umat beragama dengan pemerintah, sekaligus menjadikan Kota Bandung sebagai rumah bersama di mana setiap perbedaan mendapat tempat untuk tumbuh, dipelihara, dan berkembang dalam semangat kekeluargaan. Langkah ke arah itu ternyata mendapat dukungan para tokoh lintas agama, yang kemudian melahirkan “Deklarasi Sancang”, 10 Nopember 2007. Deklarasi ini berisi pernyataan para tokoh agama dan umat yang berdiri di belakangnya untuk menciptakan suasana Kota Bandung yang kondusif. Boleh jadi, agama tidak memiliki kekuatan politik memaksakan tumbuhnya semangat kebersamaan, tetapi pengalaman membuktikan kebersamaan untuk beragama bisa menjadi kekuatan besar untuk mendorong perubahan, khususnya memelihara pluralisme yang bermartabat.

Keragaman etnik, budaya, dan agama merupakan pelengkap identitas Kota Bandung, karena masing-masing unsur dapat saling melengkapi, dan memperkaya khazanah budaya yang telah ada. Kalaupun cukup banyak organisasi keagamaan, institusi tersebut tidak mencerminkan komunitas yang menjaga jarak dengan warga lain, tetapi merupakan wadah untuk menampung serta menyalurkan aspirasi anggota

untuk membangun Kota. Itu pula sebabnya agenda tahun 2011 adalah bagaimana memantapkan pluralisme dengan membuang jauh perbedaan perlakuan antarsesama. Diskriminasi, apa pun bentuknya, adalah kegagalan sosial yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlawanan terhadap tindakan tersebut, tidak selamanya harus dengan kekerasan tetapi melalui program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat yang majemuk.

Memantapkan visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat merupakan solusi terbaik dalam mengikat keragaman asal-usul, etnik, budaya, dan agama. Setidaknya, upaya ini mampu memperpendek jarak antara satu komunitas dengan komunitas lain, karena mereka memiliki persepsi serupa, bahwa Kota Bandung adalah tempat tinggal bersama yang harus dijaga bersama-sama pula. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan Kota Bandung, program yang dilakukan berpijak pada program yang telah dilakukan serta disesuaikan dengan kondisi dan tantangan ke depan melalui pendekatan rasional dan dinamis. Berikut adalah tujuh program prioritas Kota Bandung (Suherman, 2009: 48):

1. Program Bandung Cerdas (Membangun Masyarakat Informasi Kreatif, Cerdas dan Berdaya Saing).
2. Program Bandung Sehat (Membangun Masyarakat Sehat dan Produktif).
3. Program Bandung Makmur (Membangun Masyarakat Adil, Sejahtera dan Memiliki Harga Diri).
4. Program Bandung Ramah Lingkungan (Membangun Kota Nyaman dan Sehat).
5. Program Seni Budaya (Membangun Masyarakat Kota Bandung Cinta akan Budaya dan Jati Dirinya).
6. Program Bandung Berprestasi (Membangun Masyarakat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Berdaya Saing).
7. Bandung Kota Agamais (Membangun Masyarakat yang Berakhlak Tinggi dan Toleran).

B. Bandung Agamais

Sejak tahun 2004, di bawah kepemimpinan Walikota Dada Rosada, Kota Bandung memperkenalkan sebuah program yang populer dinamakan sebagai “Bandung Kota Agamais”. Program “Bandung Agamais” merupakan salah satu dari tujuh program prioritas yang diusung Pemerintah Kota Bandung. Pada dasarnya, program “Bandung Agamais” merupakan implementasi dari visi kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan bersahabat). Dari taat ini kemudian diturunkan menjadi agamais. Hal ini relevan dengan kondisi penduduk Kota Bandung yang dikenal religius.

Dalam salah satu maknanya yang paling dasar, Bandung Agamais berarti adalah bagaimana menjadikan Bandung sebagai ‘rumah bersama’ yang nyaman, damai, dan tenteram bagi semua pemeluk agama. Bandung sebagai rumah bersama adalah proyek sejarah besar yang jika ia berhasil diupayakan, akan menjadi sumbangan yang sangat berharga bagi generasi mendatang. Untuk menemukan rumusan yang lebih kongkret, pada 19-20 Nopember 2008 lalu, diselenggarakan Semiloka Pemantapan Bandung Agamais. Semiloka diikuti 300 peserta, terdiri dari unsur birokrasi, ulama, pimpinan pondok pesantren, para tokoh agama baik Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu maupun Budha, serta berbagai ormas Islam, di antaranya NU, Muhammadiyah dan Persis. Sebelumnya, MUI Kota Bandung sudah menyelenggarakan hal serupa untuk menemukan rumusan yang lebih kongkret dan operasional tentang apa yang disebut sebagai Bandung Agamais.

Hanya saja, gagasan besar tentang Bandung Agamais ini, masih memerlukan penjabaran secara lebih konseptual, sekaligus operasional. Di sinilah pentingnya hal ini dikaji dan disosialisasikan secara luas, yang diharapkan menjadi landasan konseptual sekaligus rujukan operasional bagi pelaksanaan gagasan besar ini. Satu hal yang harus ditegaskan di sini adalah bahwa gagasan besar Bandung Agamais bukan semata-mata milik Walikota dan seluruh jajarannya, program ini adalah kehendak bersama sekaligus tanggung jawab semua warga yang merasa memiliki dan mencintai Kota Bandung. Satu hal lagi, ikhtiar mewujudkan Bandung Agamais sesungguhnya adalah *unfinished agenda*, agenda yang tidak mengenal kata berhenti. Karena, ikhtiar mewujudkan nilai-nilai agama

dalam praktik kehidupan adalah kewajiban seumur hidup semua umat beragama.

Gagasan menjadikan Bandung sebagai Kota Agamais merupakan ikhtiar untuk menjadikan kota ini sebagai kawasan damai, nyaman dan tenteram tempat semua orang dapat mengekspresikan hidupnya sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Dalam konteks sosiologis, cita-cita bersama mewujudkan Bandung Agamais ini mencerminkan proses transformasi masyarakat menuju *civil society* seperti pernah diisyaratkan sejarah. Secara faktual, agenda ini akan menjadi identitas tersendiri sejalan dengan kenyataan warga Kota Bandung yang seluruhnya beragama, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena itu, kota agamais dengan watak plural seperti ini akan mendorong sikap toleran dan mandiri sesuai dengan watak *civil society* yang pernah dirintis Nabi.

Bandung Agamais dicitakan sebagai sebuah komunitas yang religiositas masyarakatnya sangat tinggi, menjadikan seluruh kehidupannya sebagai ibadah. Membangun masyarakat yang berorientasi ibadah, tentu saja, membutuhkan persyaratan-persyaratan, di antaranya tersedianya kelembagaan untuk dapat mengembangkan wawasan dan kemampuan di bidang agama, budaya yang terjaga dengan baik, serta lingkungan yang baik dan toleran bagi ekspresi para pemeluk agama sesuai syariatnya masing-masing.

Melalui program Bandung Agamais, Pemerintah Kota Bandung memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat kota untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsa dalam rangka pembangunan daerahnya, melalui Jaring Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Agama, atau Jasmara Agama.

Kota Bandung yang agamais meniscayakan semua pendirian dari semua pemeluk agama, tidak terkotak-kotak. Secara umum, potret keagamaan di Kota Bandung kini sudah sangat menentramkan. Keberadaan agama telah mampu memfasilitasi masyarakat dalam pemenuhan ilmu dan praktik keagamaan, sekaligus mendorong peran masyarakat dalam memajukan kehidupan.

Cita-cita menjadikan Bandung sebagai Kota Agamais terbit dari sebuah keniscayaan bahwa agama dengan seluruh ajarannya adalah sesuatu yang supraempiris. Dan, karena itu, ia diyakini memiliki dasar

legitimasi yang kukuh, autentik, dan meyakinkan. Di sini, yang supraempiris hendak dijadikan sumber acuan dan medan kesadaran dalam berpikir dan bertindak masyarakat Kota Bandung yang, paling tidak, dapat menjelma dalam sejumlah peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Pada wilayah yang paling mendasar, gagasan untuk menjadikan Bandung sebagai Kota Agamais adalah bagaimana ia bisa menjadi “rumah bersama” yang nyaman bagi seluruh pemeluk agama yang menghuninya dan kemudian diteladani oleh siapa pun yang pernah mengunjunginya. Secara demikian, menjadikan Bandung sebagai rumah bersama yang nyaman artinya bagaimana seluruh elemen warga kota yang beragam memiliki kesamaan pandangan untuk memahami kehidupan bersama sebagai usaha untuk merealisasikan kebaikan.

Menurut Ganjar Kurnia (2008), selama kebajikan masih di bibir, nilai agama belum jadi internal nilai diri, Bandung belum bisa dikatakan agamais. Jadi, untuk mewujudkan Bandung Agamais, perlu merumuskan dulu indikatornya, landasan-landasannya, membuat program-program yang terstruktur, apa ukuran-ukuran keberhasilannya, juga strateginya yang implementatif. Bandung sudah dicanangkan sebagai kota agamais. Hal menarik dari cita-cita tersebut tentu saja adalah tekanan pada kata “agama”-nya. Dengan itu, secara mudah bisa disimpulkan bahwa seluruh pola pikir dan pola tindakan masyarakat yang berada di Kota Bandung mesti merujuk pada norma atau pun aturan yang datang dari agama.

Menyertakan agama sebagai pola acuan dalam berpikir dan bertindak pada masyarakat luas dan beragam dari sisi ideologi dan keyakinan, seperti Kota Bandung, bukanlah perkara mudah. Belajar dari Peraturan Daerah (Perda) tentang syariat Islam yang diberlakukan di sejumlah daerah di Jawa Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa Perda itu telah merosot menjadi sekadar pamflet yang menghiasi jalan-jalan atau papan reklame dan slogan kosong yang sama sekali tidak memiliki gema dan pengaruh mujarab untuk mengubah watak dan tingkah laku masyarakat menjadi lebih berakhlak dan bermartabat.

Seperti dikatakan di awal, cita-cita menjadikan Bandung sebagai Kota Agamais terbit dari sebuah keniscayaan bahwa agama dengan seluruh ajarannya adalah sesuatu yang supraempiris. Dan, karena itu, ia diyakini memiliki dasar legitimasi yang kukuh, autentik, dan meyakinkan.

Secara praksis operasional, Bandung yang agamais tidak hanya diwujudkan dari banyaknya tempat ibadah, tapi lebih difokuskan pada perubahan perilaku warganya dalam menghadapi tantangan yang cukup berat. Terutama untuk mengantisipasi kebangkitan Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan masa depan. Baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, agama akan dituntut untuk tampil sebagai faktor penyeimbang dan pendorong kemajuan. Karena nilai-nilai spiritualitas yang diajarkannya bukan semata-mata berorientasi kepada kehidupan akhirat, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial, ekonomi, politik, seni budaya dan berbagai bidang kehidupan lainnya.

Secara substansial, Bandung Kota Agamais terwujud manakala nilai-nilai ajaran agama bisa menjadi pendorong semangat perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik lagi yang dicirikan dengan pola perilaku yang menghargai nilai-nilai etika dan norma hukum. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan indikasi dan sasaran dari terwujudnya Program Bandung Agamais.

Tabel 3 Sasaran dan Indikator Program Bandung Agamais

No	Sasaran	Indikator
1	Terwujudnya aparat yang profesional, bersih dan takwa (dimensi struktural)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pembinaan kerohanian bagi setiap unit kerja pada pemerintah kota Bandung. 2. Menurunnya pelanggaran disiplin PNS 3. Bagi pemeluk agama Islam diwajibkan sertifikasi baca Al-Qur'an serta mendukung penyelenggaraan wajib belajar diniyah 4. Terwujudnya kebebasan karyawan melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya 5. Terselenggaranya pembinaan akhlak melalui pendidikan keagamaan
2	Terwujudnya masyarakat yang disiplin, dan patuh terhadap aturan (dimensi kultural)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya penyakit sosial (judi, prostitusi, porno aksi, miras, narkoba dst) 2. Menurunnya kenakalan remaja 3. Terlaksananya peraturan perundang undangan yang berlaku dalam pendirian tempat ibadah

No	Sasaran	Indikator
		4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan ibadah 5. Terselenggaranya pembinaan akhlak melalui pendidikan keagamaan
3	Terwujudnya suasana kehidupan yang bersih, nyaman, aman, indah, makmur dan memancarkan ruh agama (dimensi lingkungan)	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana peribadatan yang representatif di tempat-tempat umum 2. Terbentuknya koperasi di tempat ibadat dalam rangka memberdayakan ekonomi umat 3. Terwujudnya sarana dan prasarana peribadatan 4. Terwujudnya toleransi inter dan antarumat beragama 5. Tersedianya perpustakaan keagamaan

Sumber: Suherman (2009)

Secara faktual, munculnya program Bandung Agamais dapat dimaknai bahwa dinamika kehidupan beragama di Indonesia selalu meniscayakan keterlibatan dan intervensi negara (baca: pemerintah). *Pertama*, fakta ini semakin menguatkan pandangan bahwa pemerintah cenderung mengintervensi terhadap semua realitas, termasuk realitas agama. Bisa dikatakan, hal itu merupakan bentuk hegemoni pemerintah terhadap agama. “Mati hidupnya” agama terserah pemerintah.

Kedua, intervensi itu dapat dimaknai sebuah keharusan logis dari adanya pemerintah untuk menunjukkan kekuatannya. Sebuah pemerintah yang kuat harus mampu mengatasi semua hal yang dianggap dapat mengganggu wibawanya, dan komunitas agama adalah kelompok yang dianggap paling potensial untuk mengganggu kewibawaan pemerintah.

Ketiga, meskipun demikian, watak intervensionis pemerintah tersebut juga sangat tergantung kepada siapa penguasa pemerintah itu atau “*man behind the gun*”. Watak itu akan berkembang subur jika pengelola pemerintah mempunyai watak otoriter. Penguasa yang otoriter biasanya bersikap “sangat kritis” terhadap apa saja yang dapat mengancam kekuasaannya. Namun pemimpin yang berwatak demokratis akan cenderung melemah intervensinya terhadap agama asal pemeluk agama tidak berupaya untuk menjadikannya sebagai aturan publik. Contoh yang paling nyata adalah membandingkan antara sikap mantan presiden

Soeharto dan presiden K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur, *almarhum*) terhadap komunitas agama. Jika Soeharto yang berwatak otoriter begitu bernafsu untuk menundukkan agama di hadapan negara, bahkan berani menilai ketidakabsahan sebuah agama seperti Konghucu, melarang perayaan Imlek dan sebagainya, sementara Gus Dur yang berwatak demokratis lebih bersikap terbuka terhadap semua agama. Negara tidak punya hak untuk mencampuri kehidupan beragama masyarakat, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa wawasan beragama dan watak demokrasi seorang penguasa akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh kehidupan keberagamaan di negara tersebut.

Keempat, pemerintah tidak mempunyai hak untuk mencampuri intern keagamaan, mengingat agama adalah masalah keyakinan yang sifatnya sangat pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah, seperti halnya program Bandung Kota Agamais ini, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dalam konteks hubungan antaragama, ada sebagian peraturan itu yang dimaksudkan untuk melakukan “upaya pendamaian” terhadap perselisihan antarumat beragama, terutama yang menyangkut toleransi beragama. Semua itu diorientasikan pada usaha untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. *Kedua*, dalam konteks hubungan agama dan negara hal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk “intervensi” negara terhadap komunitas beragama. Meski demikian, hal ini bisa dipahami karena salah satu fungsi adanya negara adalah mengakomodasi beragam kepentingan yang ada dalam berbagai kelompok keagamaan.

Berbeda dengan Kota Bandung yang menggunakan istilah “agamais”, beberapa kabupaten dan kota di Indonesia menggunakan istilah “Syariat Islam” dalam program pembangunan daerahnya. Dalam hitungan Robin Bush (2008), saat ini di seluruh Indonesia, tidak kurang dari 78 Kabupaten dan Kota yang telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) bernuansa agama Islam (Perda Syariah).

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan program “Bandung Kota Agamais” dimaksudkan sebagai semacam benang homogen yang secara fungsional dapat mengintegrasikan pemeluk berbagai agama ke dalam satu kehidupan sosial yang kondusif.

Masyarakat Kota Bandung tergolong masyarakat urban, terbuka, dan heterogen secara etnik, kultur maupun agama. Mengamati fenomena kehidupan umat beragama di Kota Bandung memang menarik, apalagi hal ini terkait dengan pola hubungan sosial antarkomunitas yang berbeda secara agama. Untuk menguatkan jalinan toleransi umat lintas agama ini, tampaknya masih diperlukan berbagai pendekatan untuk saling mengapresiasi.

Diakui bahwa untuk mampu hidup nyaman dalam ruang multiagama dan budaya, masyarakat masih perlu kerendahan hati untuk melakukan berbagai pendekatan untuk saling mengapresiasi, sehingga tumbuh toleransi yang dinamis dengan tetap memelihara identitas individual masing-masing. Setiap anggota masyarakat, baik minoritas maupun mayoritas, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Melalui perlakuan yang sama ini, komunikasi sosial di antara warga juga berlangsung cair.

Menyertakan agama sebagai pola acuan dalam berpikir dan bertindak pada wilayah yang lebih luas (masyarakat) dan beragam dari sisi ideologi dan keyakinan, seperti Kota Bandung, bukanlah perkara mudah. Belajar dari Peraturan Daerah (Perda) tentang syariat Islam yang diberlakukan di sejumlah daerah di Jawa Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa Perda itu telah merosot menjadi sekadar pamflet yang menghiasi jalan-jalan atau papan reklame dan slogan kosong yang sama sekali tidak memiliki gema dan pengaruh mujarab untuk mengubah watak dan tingkah laku masyarakat menjadi lebih berakhlak dan bermartabat.

Dalam rentang sejarah kemanusiaan, agama adalah salah satu magnet yang telah menyedot begitu banyak perhatian. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan tak pernah surut untuk tidak dibicarakan. Sebagai sebuah magnet kehidupan, tak bisa dimungkiri agama pernah mengalami pasang surut. Ada masanya agama menjadi sosok hero yang menyelamatkan kehidupan, tetapi ada masanya pula agama dicaci dan ditahbiskan sebagai biang dari segala kericuhan yang berperan besar dalam sejumlah pertumpahan darah.

Terlepas dari sejarah kegemilangan agama untuk menyelamatkan masyarakat atau pun sejarah kelamnya yang memberangus kebebasan dan penyokong terorisme, agama tetap menjadi inspirasi dan pusran hasrat manusia dari masa ke masa. Menurut Thomas F 'Odea (1983: 34)), hal ini

bisa dimengerti karena agama adalah sistem legitimasi yang berbeda dengan sistem legitimasi lainnya. Menurut dia, dalam usaha mewujudkan sistem legitimasinya, agama menggunakan kerangka acuan yang supraempiris. Cita-cita menjadikan Bandung sebagai Kota Agamais terbit dari sebuah keniscayaan bahwa agama dengan seluruh ajarannya adalah sesuatu yang supraempiris. Dan, karena itu, ia diyakini memiliki dasar legitimasi yang kukuh, autentik, dan meyakinkan.

Program “Bandung Agamais” menunjukkan bahwa secara substantif, nilai-nilai agama dapat dibawa ke tengah-tengah ruang publik tanpa harus terjebak pada labelisasi syariat Islam secara formal seperti pandangan kaum integralis, dan tidak juga memisahkan agama dari urusan Negara sebagaimana pendapat kaum sekularis.

C. Tenteram dalam Keragaman

Situasi demikian hanya mungkin terjadi kalau di tengah-tengah masyarakat tumbuh kesadaran akan adanya keragaman. Bahwa siapa pun tidak pernah bisa hidup secara sendirian. Sekalipun hampir 90 persen penduduk Kota Bandung beragama Islam, tetapi Islam tidak pernah menghabiskan ruang publik secara sendirian. Menyadari bahwa mereka tidaklah sendirian, bahwa di luar mereka ada orang lain, ada agama lain, maka, sekalipun mereka mayoritas, di Kota Bandung, Islam tetap lebih memilih untuk rendah hati. Mereka, warga dan pemerintah kotanya, tidak pernah menggembar-gemborkan Islam sebagai satu-satunya panji. Itulah cara beragama yang rendah hati. Islam yang rendah hati adalah Islam yang tidak suka menghegemoni, mengintimidasi, atau menyubordinasi. Ia senang berbagi ruang, dan tak suka mentang-mentang. Dan, umat Islam yang rendah hati, seperti dikatakan oleh Ulil Abshar Abdalla ketika memberikan sambutan pada Perayaan Natal tahun 2010 di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf Bandung, bukanlah kaum yang semena-mena dan mengira punya kuasa untuk mengatur Republik ini sendirian. Itulah artikulasi Islam yang rendah hati, yang umatnya punya kesediaan untuk berbagi dan kesadaran akan adanya keragaman.

Tentu saja, tujuan utama pengakuan atas keragaman agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan itu sendiri bukan sekadar melahirkan sikap toleran terhadap orang lain, lebih dari itu adalah suatu upaya proaktif

menuju saling memahami. Menerima serta mengakui perbedaan dan keragaman tidak sama dengan mengakui relativisme --apalagi nihilisme. Orang beragama atau beriman yang sejati adalah mereka yang setia atas identitas dan sistem kepercayaannya sendiri, dan pada saat yang sama mempunyai kesediaan untuk memahami dan mengakui keragaman di luar dirinya.

Dalam konteks ini, benar kata sebuah ungkapan, bahwa jika toleransi mati maka kekerasan terbeli. Tindakan kekerasan dan intoleransi yang terjadi di masyarakat merupakan akibat matinya toleransi. Padahal, toleransi hadir untuk saling menghargai agar realitas tetap eksis dengan segala warna-warninya. Begitupun eksistensi sebuah masyarakat yang hadir di atas keragaman ras, suku, budaya dan agama. Ia akan semakin kukuh ketika keragaman itu bersinergi dalam rangkaian interaksi untuk saling mengisi dan melengkapi. Harmoni bukan hegemoni yang menafikan kompetisi. Ia justru menjadi ajang bagi terjadinya kontestasi beragam kebaikan (*fastabiq al-khairat*) yang dihadirkan oleh para pemeluk agama yang berbeda.

Mewujudkan fungsi agama sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dapat dilakukan dengan menghadirkan kesadaran toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan salah satu ukuran maksimal keadaban dan peradaban sebuah bangsa. Semakin toleran sebuah bangsa, tingkat keadaban publik dan peradabannya akan maksimal. Michael Walzer (1994) memandang toleransi sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai (*peaceful co-exsistance*) di antara pelbagai kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan keyakinan, latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Dengan demikian, toleransi harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan keyakinan dan keragaman ciptaan Tuhan.

Kesadaran atas adanya keragaman akan membuka jalan bagi umat beragama untuk mengakui keragaman di luar dirinya. Hal itu berarti, seorang pemeluk agama harus melihat orang lain secara apa adanya,

menurut sejatinya, sehingga kehidupan ini dipandang sebagai sebuah rajutan kompleks dari berbagai aktor, agen, kepentingan, agama dan kepercayaan, nilai dan ide, yang melaluinya toleransi dan harmoni dapat disulam satu sama lain. Dalam konteks Kota Bandung, kesadaran akan adanya keragaman, khususnya dalam hal keyakinan, diwujudkan dengan diterapkannya sebuah kebijakan yang populer disebut sebagai “Bandung Agamais”. Sebagaimana yang berulang kali ditegaskan oleh Walikota Bandung, Dada Rosada, gagasan asali dari program ini adalah bagaimana menjadikan Kota Bandung sebagai ‘rumah bersama’ yang nyaman, damai, dan tenteram bagi semua pemeluk agama.

Tentu saja, hal menarik untuk dicermati lebih jauh adalah penggunaan istilah “agamais” dan bukan istilah lain, misalnya, “Islami”, yang selama ini menjadi kecenderungan dominan yang terjadi di sejumlah daerah. Secara teknis, penggunaan istilah “agamais” dalam salah satu program prioritas Kota Bandung ini dianggap cerdas dan tepat karena akan mampu meminimalisir lahirnya pro-kontra di masyarakat. Dengan istilah ini, pro-kontra tidak lagi menemukan relevansinya karena istilah “agamais” konotasinya cenderung lebih bersifat netral dan bisa diterima oleh semua penganut agama. Dalam konsep Bandung Agamais, semua agama diakui eksistensinya. Dan Islam, sekalipun sebagai agama mayoritas, tampil dengan penuh kerendahan hati.

Berbeda dengan Kota Bandung yang menggunakan istilah “agamais”, beberapa kabupaten dan kota di Indonesia menggunakan istilah “Syariat Islam” dalam program pembangunan daerahnya. Dalam hitungan Robin Bush (2008), saat ini di seluruh Indonesia, tidak kurang dari 78 Kabupaten dan Kota yang telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) bernuansa agama Islam (Perda Syariah).

Menyertakan agama sebagai pola acuan dalam berpikir dan bertindak pada wilayah yang lebih luas (masyarakat) dan beragam dari sisi ideologi dan keyakinan, seperti Kota Bandung, bukanlah perkara mudah. Belajar dari Peraturan Daerah (Perda) tentang syariat Islam yang diberlakukan di sejumlah daerah di Jawa Barat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perda itu telah merosot menjadi sekadar pamflet yang menghiasi jalan-jalan atau papan reklame dan slogan kosong yang sama sekali tidak memiliki gema dan pengaruh mujarab untuk mengubah watak dan tingkah laku masyarakat menjadi lebih bermartabat.

Menurut Durkheim (1858-1917), agama merupakan representasi kolektif (*collective representation*) sebuah masyarakat. Baginya, agama merupakan elemen integratif yang berperan menguatkan kohesivitas sosial. Oleh karena itu, ketika terjadi fragmentasi sosial, menguatnya individualitas, dan semakin rapuhnya *sense of community* dalam masyarakat modern, maka peran agama dalam ruang publik pun akan memudar.

Lepas dari sejarah kegemilangan agama untuk menyelamatkan masyarakat atau pun sejarah kelamnya yang memberangus kebebasan dan penyokong terorisme, agama tetap menjadi inspirasi dan pusran hasrat manusia dari masa ke masa. Menurut Thomas F 'Odea (1983: 34)), hal ini bisa dimengerti karena agama adalah sistem legitimasi yang berbeda dengan sistem legitimasi lainnya. Menurut dia, dalam usaha mewujudkan sistem legitimasinya, agama menggunakan kerangka acuan yang supraempiris. Cita-cita menjadikan Bandung sebagai Kota Agamais terbit dari sebuah keniscayaan bahwa agama dengan seluruh ajarannya adalah sesuatu yang supraempiris. Dan, karena itu, ia diyakini memiliki dasar legitimasi yang kukuh, autentik, dan meyakinkan.

Untuk merealisasikan “Bandung Agamais”, menurut Suherman (2009), dapat dilakukan melalui penancangan suatu iklim yang bermartabat melalui *akur jeung dulur nu saagama, teu parasea jeung batur nu beda agama* (toleransi intraumat beragama dan antarumat yang berbeda agama). Bila ini sudah tercapai maka komunitas warga Bandung dapat hidup rukun, *rame gawe* (gotong royong), *tibra sare* (tenang, tidak ada rasa takut).

Keindahan Islam, salah satunya, barangkali dapat dilihat dari wataknya yang santun dan rendah hati. Apalagi ketika watak itu tampil di ruang publik dalam posisi sebagai mayoritas. Islam yang rendah hati adalah Islam yang tidak suka menghegemoni, mengintimidasi, menyubordinasi, apalagi mengakuisisi. Ia senang berbagi ruang, dan tak suka mentang-mentang. Dan, umat Islam yang rendah hati, seperti dikatakan oleh Ulil Abshar Abdalla ketika memberikan sambutan pada Perayaan Natal tahun 2010 di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Maulana Yusuf Bandung, bukanlah kaum yang semena-mena dan mengira punya kuasa untuk mengatur Republik ini sendirian. Itulah artikulasi Islam yang rendah hati, yang umatnya punya kesediaan untuk berbagi.

Lalu, di manakah model artikulasi Islam yang rendah hati itu bisa ditemukan? Salah satunya di Kota Bandung. Ya, di Kota Bandung. Sekalipun hampir 90 persen penduduk Kota Bandung beragama Islam, tetapi Islam tidak pernah menghabiskan ruang publik secara sendirian. Menyadari bahwa mereka tidaklah sendirian, bahwa di luar mereka ada orang lain, ada agama lain, maka, sekalipun mereka mayoritas, di Kota Bandung Islam tetap lebih memilih untuk berendah hati. Mereka, warga dan pemerintah kotanya, tidak pernah menggembar-gemborkan Islam sebagai panji, yang bikin orang lain jadi keki.

Inilah barangkali yang disebut kesadaran atas keragaman. Kesadaran atas adanya keragaman akan membuka jalan bagi umat beragama untuk mengakui keragaman di luar dirinya. Hal itu berarti, seorang pemeluk agama harus melihat orang lain secara apa adanya, menurut sejatinya, sehingga kehidupan ini dipandang sebagai sebuah rajutan kompleks dari berbagai aktor, agen, kepentingan, agama dan kepercayaan, nilai dan ide, yang melaluinya toleransi dan harmoni dapat disulam satu sama lain. Tentu saja, tujuan utama pengakuan atas keragaman agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan itu sendiri bukan sekadar melahirkan sikap toleran terhadap orang lain, lebih dari itu adalah suatu upaya proaktif menuju saling memahami. Menerima serta mengakui perbedaan dan keragaman tidak sama dengan mengakui relativisme --apalagi nihilisme. Orang beragama atau beriman yang sejati adalah mereka yang setia atas identitas dan sistem kepercayaannya sendiri, dan pada saat yang sama mempunyai kesediaan untuk memahami dan mengakui keragaman di luar dirinya.

D. Jasmara Agama

Pemerintah Kota Bandung memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsa dalam rangka pembangunan daerahnya, melalui Jaring Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Agama, atau Jasmara Agama. Sebagai upaya mewujudkan peran aktif masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, maka penyelenggaraan Jasmara Agama, dilaksanakan oleh organisasi masyarakat keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Nahdatul

Ulama, Persatuan Islam, Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.

Program Jaring Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat atau disingkat Jasmara adalah salah satu program yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka menampung segala bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat. Jika dilihat sepintas dari akronimnya, Jasmara dikembangkan untuk meraup aspirasi (keinginan) masyarakat terhadap pemerintah. Melalui kegiatan ini, segera diketahui persoalan apa saja yang mendesak dan harus menjadi prioritas Pemerintah Kota berkenaan dengan pencanangan program Bandung Agamais. Hasil dari Jasmara Agama ini dapat menjadi sebuah *mapping* (pemetaan) positif yang benar-benar berangkat dari akar rumput, dikelola untuk kemudian ditindaklanjuti untuk akar rumput juga. Tentu saja, Jasmara Agama berbeda dengan jasmara-jasmara yang lainnya, salah satu perbedaannya adalah struktur kepanitiaannya adalah semua pimpinan ormas keagamaan, dengan dukungan dan bantuan optimal dari Pemerintah Kota Bandung.

Program Jasmara Agama lebih menekankan pada keterlibatan langsung masyarakat dalam memahami, merencanakan, melaksanakan pembangunan dan secara partisipatif mendukung 7 Program Prioritas Pemerintah Kota Bandung. Salah satu cara mewujudkan Kota Bandung Bermartabat adalah melalui pemberdayaan masyarakat bermartabat. Hal ini bisa dimulai dari diri sendiri yang bermartabat, kemudian warga masyarakat bermartabat, dan lingkungan bermartabat. Komunitas yang memiliki martabat tentu akan dengan mudah membentuk perilaku yang bermartabat pula. Kondisi inilah yang merupakan tujuan Bandung Kota Jasa Bermartabat, yaitu memiliki lingkungan yang bersih, masyarakat yang makmur, warga yang taat dan bersahabat, dibingkai dengan nilai-nilai agamais. Melalui Jasmara Agama ini pula, terhimpun berbagai masukan, sebagai wujud partisipasi masyarakat, untuk dijadikan acuan atau konsep dalam rangka menuju Bandung Agamais

Adapun kegiatan Jasmara Agama putaran pertama dilaksanakan pada Senin (19 Nopember 2007) bertempat di Kantor PD Muhammadiyah Antapani Kota Bandung dengan peserta sebanyak kurang lebih 1000 orang, yang terdiri dari unsur-unsur: Majelis Pendidikan Kader & SDI, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, PD Aisyiyah Kota Bandung, PC

Muhammadiyah se-Kota Bandung, PD Nasyyiatul Aisyiyah, PD Pemuda Muhammadiyah, PD Ikatan Remaja Muhammadiyah, dan PD IMM. Penyelenggaranya sendiri adalah Muhammadiyah Kota Bandung, dengan hasil tidak kurang dari 35 butir rekomendasi berkenaan dengan upaya mewujudkan Bandung Agamais.

Sementara itu, Jasmara Agama putaran kedua di lingkungan NU dilaksanakan pada 26 Nopember 2007, di Pesantren Cijawura Kota Bandung dengan peserta sebanyak kurang lebih 1000 orang yang terdiri dari unsur-unsur: Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Bandung, Muslimat, Fatayat, IPPNU, Ansor, IPNU, PMII, Pagarnusa, MWC Nahdatul Ulama se-Kota Bandung. Dari Jasmara Agama putaran kedua di lingkungan NU ini dihasilkan 31 butir rekomendasi.

Kegiatan Jasmara agama putaran ketiga dilaksanakan pada Hari Sabtu (1 Desember 2007) di Pesantren Persis Pajagalan Kota Bandung dengan peserta kurang lebih sebanyak 1000 orang, yang terdiri dari unsur-unsur: PPD. Persis Kota Bandung, PPC. Persis se-Kota Bandung, PPJ. Persis se-Kota Bandung, serta Banom Persis Kota Bandung. Dari Jasmara Agama putaran ketiga di lingkungan Persis ini dihasilkan tidak kurang dari 79 rekomendasi berkenaan dengan ikhtiar untuk mewujudkan Bandung Agamais.

Kegiatan Jasmara Agama putaran keempat di lingkungan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dilaksanakan pada Hari Senin (3 Desember 2007) di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Cijerah Kota Bandung dengan peserta kurang lebih sebanyak 1000 orang. Tidak kurang dari 482 kiai, ajengan, Asatidz, dan 116 Kiai pimpinan pondok pesantren yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Adapun unsur-unsur yang hadir adalah: Pengurus FKPP Kota Bandung, Pimpinan Pondok Pesantren se-Kota Bandung, Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren se-Kota Bandung, Ibu-ibu Pengajian Majelis Taklim se-Kota Bandung, dan DKM se-Kota Bandung. Dari kegiatan Jasmara Agama di lingkungan FKPP ini dihasilkan 17 rekomendasi berkaitan dengan upaya mewujudkan Bandung Kota Agamais.

Kegiatan Jasmara Agama putaran terakhir di lingkungan MUI dilaksanakan pada Hari Rabu, 5 Desember 2007 bertempat di Pusat Dakwah Islam Kota Bandung dengan peserta kurang lebih sebanyak 1000

orang yang terdiri dari unsur-unsur: Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, Anggota Dewan Pertimbangan, Anggota Dewan Pakar, Pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bandung, Lembaga-lembaga Keagamaan [Dewan Masjid Indonesia, Persatuan Umat Islam, Syarikat Islam, Mathlaul Anwar, Al-Irsyad, PERTI, PERMUSI, Al-Wasliyah, Gemuis, Front Pembela Islam, Perwakilan Khotib Kota Bandung, serta Mass Media Islam yang diterbitkan lembaga-lembaga Keagamaan]. Dari jasmara Agama putaran terakhir ini dihasilkan 13 rekomendasi, melengkapi rekomendasi lain yang telah lebih dahulu dihasilkan Jasmara Agama putaran sebelumnya.

Alhasil, Jasmara Agama yang dilaksanakan sebanyak lima putaran dapat menjadi salah satu bukti keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai daya dukung terhadap penyelenggaraan berbagai program pembangunan khususnya bidang keagamaan. Keseluruhan rekomendasi yang dihasilkan melalui Jasmara Agama ini kemudian dihimpun, diinventarisir, dibuat kategorisasi untuk kemudian dijadikan sebagai program aksi dari Program Bandung Agamais. Secara keseluruhan, Jasmara Agama memberikan dinamika dan warna tersendiri terhadap perjalanan pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung, khususnya dalam mewujudkan program Bandung Kota Agamais.

E. Bandung Maksiat Watch [BMW]

Menandai semakin seriusnya tekad Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung sebagai Kota Agamais, bertempat di Masjid Raya Bandung, 7 April 2007, dideklarasikan Bandung Maksiat Watch (BMW), yang disusul kemudian dengan dialog publik “Menggagas Bandung Bebas dari Maksiat”. Disaksikan oleh Walikota Bandung, deklarasi BMW dilakukan dengan penandatanganan berita acara oleh para pembina BMW seperti H. Zulkarnaen, H. Sodik Mudjahid, H. Rizal Fadillah, H. Arifin Syambas, K.H. Olih Komarudin, dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal itu, Walikota Bandung meminta kaum Muslimin yang jumlahnya mayoritas di Kota Bandung tidak boleh kalah oleh kelompok kecil yang menentang upaya penutupan lokalisasi Saritem. Harus buktikan, sebagai kelompok mayoritas [dan berada di pihak yang

benar], bisa mengalahkan kelompok kecil [yang nyata-nyata berada di pihak yang keliru]. Umat Islam harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga tampil sebagai pemenang.

Dalam konteks serupa, Ketua DPRD Kota Husni Muttaqin Bandung mengatakan, bahwa Kota Bandung ingin mewujudkan sebagai Kota Agamais. Menurut Husni Muttaqin (2009),

Visi dan misi Kota Bandung sudah bagus apalagi ingin menjadi kota agamais yang bersih, baik bersih dari perbuatan tercela, penyakit masyarakat, maupun KKN. Hanya saja, penerapan aturan hukum seperti Perda kerap terganjal masalah sosialisasi dan penegakannya di lapangan. Selain pemberantasan kemaksiatan, Pemkot Bandung bersama elemen masyarakat seperti BMW juga perlu menyentuh ekonomi masyarakat. Karena kemiskinan dekat dengan kekufuran.”

Jenis kemaksiatan yang paling disorot BMW adalah perjudian, narkoba, minuman keras, prostitusi, pornografi, dan pornoaksi. Ketua Umum BMW mengaku tengah melakukan investigasi atas laporan masyarakat mengenai keberadaan berbagai lokasi tempat beragam praktik maksiat terselenggarakan. Di Bandung masih banyak tempat-tempat judi. Cara yang dilakukan BMW memberantas maksiat lebih mengutamakan metode persuasif. Menurut Ketua BMW, metode pemberantasan akan lebih menitikberatkan pada upaya edukasi, pembimbingan dan lebih bersifat advokasi. BMW sudah menyiapkan mujahid untuk melakukan bimbingan dan advokasi. BMW tampaknya memang sengaja dihadirkan untuk semakin memperjelas wajah Bandung sebagai Kota Agamais, sekaligus sebagai bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam turut memperelok wajah kota yang ramah dan nyaman.

Berkenaan dengan tekad menjadikan Bandung sebagai Kota Agamais yang jauh dari berbagai penyakit masyarakat, menurut Afif Muhammad (2008), membutuhkan komitmen bersama dari seluruh warga kota. Kemaksiatan dibasmi mungkin sulit, tapi dipersulit bisa. Tetapi, menurut Afif Muhammad, orang baik juga tentu tidak baik semua. Pasti ada bagian tertentu yang tidak baik, tapi kebajikannya lebih banyak dari ketidakbajikannya. Bandung sebagai kota agamais juga begitu. Kemaksiatan tidak mungkin lenyap sama sekali dari kota ini. Tetapi bagaimana kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan kota ini lebih banyak lagi dibanding dengan ketidakbajikannya.

Sebagai bagian dari ikhtiar total untuk mewujudkan Bandung Agamais, terhitung sejak 18 April 2007, Walikota Bandung secara resmi menutup Saritem, kawasan zona merah sekaligus lokalisasi paling legendaris di negeri ini. Penutupan Saritem yang telah ratusan tahun beroperasi, boleh jadi, merupakan penanda awal yang paling jelas dari tekad Pemerintah Kota untuk menyukseskan program Bandung Agamais. Pekerjaan menutup lokalisasi ini bukan perkara mudah, dibutuhkan keberanian, dukungan total, serta desain yang matang dan berkelanjutan.

Walikota Bandung berani untuk menutup kawasan lokalisasi Saritem karena dirinya merasa diperintah para ulama yang mendukung sepenuhnya langkah penutupan kawasan merah itu secara permanen. Menurut Walikota Bandung, tugas ulama adalah melakukan *amar makruf*, sementara tugas dirinya sebagai pemerintah adalah melaksanakan *nahy munkar*. Karenanya, penutupan Saritem yang dilakukannya merupakan jawaban total atas permintaan para ulama (Millie & Safei, 2010).

Tak lama setelah ditutup, warga Saritem meminta ijin untuk membuka praktik panti pijat, tetapi kontan ditolak Walikota. Bagi Walikota Bandung, kalau permintaan ijin untuk membuka praktik panti pijat dikeluarkan, sama dengan kembali mengizinkan praktik prostitusi. Hampir bersamaan dengan penutupan Saritem, kawasan merah serupa di daerah Regol, di Jalan Dewi Sartika, juga ditutup pemerintah. Persoalannya, setelah Saritem ditutup pelacuran terjadi di mana-mana. Tapi, dengan desain yang dimilikinya, nanti juga secara alamiah akan berhenti dengan tempat dan situasi yang tidak memungkinkan.

Disadari bahwa penutupan ini bukannya tanpa risiko. Hanya saja, penutupan seperti ini tidak semudah dibayangkan. Banyak pihak, terutama yang selama ini paling diuntungkan dengan usaha haram ini menghambat. Tahun lalu, dua hari menjelang penutupan, ratusan warga Saritem bahkan digerakkan unjuk rasa di Jalan Gardujati.

Penutupan kawasan Saritem selain harus permanen, menurut Ketua MUI Kota Bandung, juga harus dilakukan secara baik dan terpuji. Termasuk mencarikan solusi ekonomi yang baik bagi wanita penjaja cinta dan muncikarinya. Untuk itu, menurut Ketua MUI Kota Bandung (Wawancara 21 Februari 2011),

“Semua kalangan tentunya perlu bersikap sabar dan saling pengertian. Karena meski penutupan kawasan ini keputusannya sudah ada, namun dampak dari kebijakan ini, tidak sedikit juga warga setempat yang kehilangan mata pencahariannya. Jadi, memang perlu dicarikan solusi untuk pengganti pekerjaannya yang lebih baik dan layak.”

Diakui, jatuh banggunya kehidupan Saritem memang tidak pernah jauh dari gemerincing rupiah. Sejak awal pertumbuhannya pada masa kolonial, kebutuhan syahwat berkaitan dengan persoalan kehidupan ekonomi di permukiman padat di dekat stasiun Kota Bandung tersebut.

Sementara itu, untuk langkah jangka panjang, sejalan dengan pernyataan kesediaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu penanganan Saritem, akan disiapkan desain perubahan fungsi dalam bentuk konsepnya secara menyeluruh, sesuai arahan Gubernur. Dengan penutupan Saritem, Bandung sebagai Kota Agamais akan lebih terasa bermartabat. Sebagai bagian dari tindak lanjut setelah penutupan kawasan Saritem itu, Pemerintah Kota Bandung kemudian membeli tanah di sana, mendirikan pesantren (Darut Taubah), dan di sana juga didirikan Sekretariat Utama Kantor Ormas Islam, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Saritem dari kawasan prostitusi menjadi kawasan yang lebih positif. Dalam APBD Kota Bandung tahun 2009, Bagian Pengelolaan Aset mengalokasikan anggaran untuk membeli 11 rumah warga Saritem di Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir. Saat ini sudah 16 rumah warga di kawasan Saritem yang dibebaskan oleh Pemkot dari 75 rumah yang akan dibebaskan. Kawasan ini dialokasikan untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan pusat studi Islam. Proses pembelian lahan dan rumah warga oleh Pemkot tidak selalu mulus. Kendala utamanya adalah harga yang ditawarkan warga terlalu tinggi. Pemerintah Kota Bandung juga berencana akan membangun kompleks kantor Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan sejumlah tempat dakwah, termasuk menata Saritem menjadi kawasan wisata, dari wisata kuliner hingga ke wisata religi. Melalui itu semua, Walikota Bandung bertekad untuk mengubah *image* Saritem dari lingkungan hitam menjadi kawasan yang religius sesuai dengan semangat program Bandung Kota Agamais yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota.



BAGIAN 6

DINAMIKA TOLERANSI

A. Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS)

Kehendak untuk mewujudkan toleransi beragama tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Niat untuk membangun toleransi beragama berlangsung dalam situasi yang terus berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Hal inilah yang mendorong terjadinya dinamika toleransi beragama.

Secara faktual, Kota Bandung dihuni oleh beragam pemeluk agama yang berbeda-beda. Semua agama diakui eksistensinya. Hal ini, sesuai dengan kondisi penduduk Kota Bandung yang dikenal sangat religius. Sebuah kota dikatakan beradab apabila semua elemen warga kotanya menjunjung tinggi persamaan, damai, dan bersatu, bukan memperuncing suasana dengan menonjolkan perbedaan. Bahkan, dalam Islam, perbedaan adalah rahmat. Siapa pun pasti sangat mengecam mereka yang senantiasa menyebarkan benih-benih kebencian (perbedaan) dan bukan mengutamakan persamaan.

Lazimnya, sebuah praktik hidup bersama, friksi dan gesekan antar pemeluk agama sesekali terjadi juga. Untuk menjaga Bandung menjadi rumah yang nyaman bagi semua pemeluk agama, pada 10 Nopember 2007, dalam acara “Halal Bihalal” di Kantor PCNU Jalan Sancang, seluruh pemimpin enam agama (Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan

Khonghucu) dan tujuh belas pemuka agama berembuk sekaligus menandatangani sebuah deklarasi bersama yang populer disebut sebagai “Deklarasi Sancang.” Nama itu diambil dari tempat di mana deklarasi itu dikeluarkan. Naskah “Deklarasi Sancang” itu dibacakan oleh KH R Imam Shonhaji, salah seorang ulama sepuh di Kota Bandung.

Ide untuk menggelar halal bihalal, yang kemudian melahirkan Deklarasi Sancang ini tercetus setelah warga NU kota Bandung mendatangi sejumlah gereja dan memberikan rangkaian bunga kepada umat Kristiani tahun 2006 lalu. Dari situ kemudian digagaslah sebuah acara yang dapat menghimpun dan mempersatukan para tokoh lintas agama yang ada di Kota Bandung. Para pemuka lintas agama Kota Bandung berkumpul untuk menyatukan komitmen, berjuang mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kerukunan hidup demi mencapai kebahagiaan bersama, secara khusus bagi masyarakat Kota Bandung.

Dalam acara itu hadir, antara lain, tokoh NU seperti Ketua PB NU Said Agil Siradj, Zannuba Arifah Chafsoh Rahman, atau Yenni Wahid, dan sejumlah pengurus NU di Jawa Barat. Dari pihak Pemerintah Kota Bandung, hadir Walikota Bandung dan Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Umat Islam sebagai mayoritas harus melindungi warga negara dari agama lain yang menjadi minoritas. Dalam politik, agama kerap dijadikan alat untuk menaikkan harga politik seseorang. Akibatnya, pemahaman terhadap agama menjadi dangkal. Sehingga ada penyempitan pemahaman terhadap agama. Padahal, persoalan yang mendera masyarakat Indonesia sekarang ini tidak bisa diselesaikan oleh satu agama. Umat Islam harus menolong saudaranya yang Kristiani atau Kong Hu Cu, dan lainnya, begitu pula sebaliknya.

Lahirnya “Deklarasi Sancang” dapat menjadi modal sosial yang sangat besar bagi proses terwujudnya gagasan mewujudkan “Bandung Kota Agamais.” Seperti yang selalu dikatakan oleh Walikota Bandung, Agamais bukan hanya “Islami.” Dalam Bandung Kota Agamais semua agama diakui eksistensinya.

Secara sosiologik, kelahiran Deklarasi Sancang telah menjadi salah satu tonggak penting bagi perjalanan kehidupan keagamaan di Kota Bandung. Terlebih kemudian dari momen itu lahir sebuah forum lintas agama yang disebut Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS). Ia

merupakan salah satu media tempat para tokoh lintas agama berkumpul dan berdiskusi tentang berbagai hal berkenaan dengan berbagai hal yang ada di kota Bandung, tidak hanya menyangkut kehidupan keagamaan, melainkan juga aspek kehidupan lainnya.

Untuk tetap memelihara pesan utama dari Deklarasi Sancang, yakni semangat kebersamaan di antara semua elemen umat beragama di Kota Bandung, setiap tanggal 10 Nopember diselenggarakan peringatan lahirnya deklarasi yang diakui sangat diinspirasi Piagam Madinah itu. Pada hari Selasa, 10 Nopember 2009, misalnya, diselenggarakan peringatan dua tahun Deklarasi Sancang yang mengambil tempat di GKI Jalan Maulana Yusuf, Bandung. Perayaan “Dua Tahun Deklarasi Sancang” ini dihadiri sekitar 500 orang dari berbagai agama di Kota Bandung yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Pada kesempatan itu, hadir Wali Kota Bandung Dada Rosada, Maftuh Kholil dan beberapa pemuka agama lainnya yang menjadi deklarator Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang.

Peringatan itu dilakukan dalam rangka menjaga dan memelihara Kota Bandung sebagai Kota Agamais. Menurut Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang, para tokoh lintas agama sepakat untuk menjaga keutuhan Bandung dan hidup dalam kebersamaan. Gerakan ini tak hanya lokal Bandung namun juga akan dikembangkan di forum yang lebih luas di tingkat regional dan nasional.

Dalam konteks itu, Ketua PCNU Kota Bandung mengatakan, “Agama merupakan solusi bagi permasalahan, bukan sebaliknya. Ketika umat dan pemimpin agama menyambut keberagaman agama dengan sikap yang positif dan konstruktif, relasi antar umat beragama bisa menjadi faktor pendorong majunya peradaban.” (Wawancara, 29 Januari 2011).

Menurut Ketua PCNU Kota Bandung, Forum LADS dibentuk oleh tokoh lintas agama di Kota Bandung atas kesadaran bahwa relasi dan bahkan persaudaraan yang terjalin baik antarumat beragama akan memberikan kontribusi bagi terciptanya keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan bangsa. Forum LADS bertujuan agar umat beragama di Kota Bandung mampu menjadi teladan bagi umat lain di kota-kota lain di Indonesia tentang bagaimana hidup damai, harmonis dan persaudaraan lintas agama bahkan lintas suku bangsa.

Pendirian Forum LADS yang bertepatan dengan hari Pahlawan, 10 November 2007, menurut Ketua PCNU Kota Bandung, diharapkan berdasarkan spirit para pahlawan itu. Forum LADS mencita-citakan Bandung tak hanya sebagai kota kembang tapi jadi kota bhineka. Bandung adalah kota bagi semua orang dan rumah bersama semua umat beragama.

Sementara itu, Wali Kota Bandung mengatakan, bahwa semangat Forum LADS selaras dengan misi Kota Bandung sebagai Kota Agamais, tak hanya menjaga keutuhan Bandung juga dengan kepedulian antarumat beragama diharapkan terlibat dalam berbagai program penyelamatan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan warga kota ini. Forum LADS diharapkan menjadi spirit kebersamaan yang bisa menjaga keutuhan dan kerukunan beragama di Kota Bandung. Lebih jauh, Walikota Bandung menyampaikan kegembiraannya dengan adanya deklarasi ini dan hasil yang telah dicapainya, apalagi hal tersebut sesuai dengan salah satu agenda prioritas Kota Bandung, yaitu Bandung Kota Agamais. Walikota Bandung mengajak untuk dapat melakukan gerakan di bidang lingkungan hidup, seperti menanam pohon, minimal satu rumah satu pohon, karena hal ini merupakan salah satu hal konkret dari Deklarasi Sancang. Dia juga berharap, kondusifitas kehidupan beragama di Kota Bandung dapat terus dijaga sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak terganggu akibat timbulnya konflik antaragama.

Menurut Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang, peringatan dua tahun deklarasi itu dilakukan dengan sederhana. Yang terpenting, isi Deklarasi Sancang bisa diaplikasikan dalam kehidupan beragama warga Kota Bandung. Apalagi, Walikota Bandung telah menetapkan Bandung sebagai Kota Agamais. Selain itu, peringatan Deklarasi Sancang juga diisi dengan penanaman pohon. Akhir tahun 2009, 12.000 pohon yang ditiptkan di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung mulai ditanam.

Keberadaan Deklarasi Sancang, menurut Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS), dirasakan cukup banyak manfaatnya, dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Bandung. Keberagaman agama yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, jangan dijadikan sebagai bahan konflik, tetapi harus dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang juga berharap spirit Deklarasi Sancang ini terus berlanjut, dan dapat bergulir ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Lebih jauh, Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang mengatakan, bahwa para tokoh lintas agama sepakat untuk menjaga keutuhan Kota Bandung dan hidup secara berdampingan dengan aman dan damai, dan berharap spirit dari deklarasi ini dapat berkembang di tingkat yang lebih tinggi lagi.

Kemunculan Deklarasi Sancang dapat terjadi karena melihat berbagai fenomena yang terjadi, seperti suatu agama jika sudah menjadi mayoritas maka akan timbul rasa arogan dari agama tersebut, fenomena timbulnya konflik antarumat beragama di Indonesia, dan program Wali Kota Bandung, yaitu Bandung Agamais. Fenomena tersebut muncul sebagai dasar terciptanya Deklarasi Sancang. Menurut Ketua PCNU Kota Bandung, bahwa dua tahun Deklarasi Sancang telah menimbulkan berbagai hal yang positif di Kota Bandung, seperti rasa nyaman ketika beribadah, karena tidak ada gangguan dari pihak atau agama lain, dan kerja sama yang terjadi di antara umat beragama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang ada.

Berdasarkan beberapa deskripsi tadi, tampaknya kelahiran Deklarasi Sancang dapat disebut telah mengilhami berbagai kegiatan lintas agama serta dirujuk dan dikutip dalam mendorong pembangunan sikap saling menghargai dan menghormati di dalam masyarakat. Dalam hal ini, Deklarasi Sancang telah memungkinkan hadirnya suatu ruang dialog umat lintas agama dalam menyikapi masalah-masalah bersama. Deklarasi Sancang telah memungkinkan terbangunnya hubungan personal dan institusional antarumat lintas agama. Ada perluasan relasi antaraumat beragama yang sebelumnya tidak saling mengenal, apalagi saling peduli. Ada pertumbuhan relasi yang signifikan melalui upaya sengaja saling mengenal, saling memahami, saling menghargai, saling menghormati, dan mempererat persaudaraan sebagai warga kota dan anak-anak bangsa. Dalam beberapa kesempatan, sejauh pengamatan penulis, komunikasi yang terjalin bahkan terasa meningkat sampai berlanjut ke berbagai bentuk kerja sama (kooperasi) yang melibatkan umat lintas agama.

Sementara, peringatan tahun ketiga lahirnya Deklarasi Sancang, dilaksanakan di aula Universitas Parahyangan, Rabu (10 Nopember 2010).

Peringatan itu dihadiri oleh Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung, Sekda Kota Bandung, Para Deklarator Sancang dan sejumlah tokoh Agama. Dalam kesempatan tersebut juga di kukuhkan 50 pemuda kader penggerak perdamaian lintas iman yang telah di beri pelatihan selama 2 hari. Hal menarik adalah tampilnya Ketua Dewan Syuro FPI Kota Bandung, Hilman Firdaus, sebagai pembicara kunci dalam peringatan tahun ketiga lahirnya Deklarasi Sancang ini.

Secara sosiologik, menarik melihat munculnya fenomena Ketua Dewan Syuro FPI tampil sebagai pembicara kunci dalam peringatan tiga tahun lahirnya Deklarasi Sancang. Selama ini, FPI dicitrakan sebagai sebuah ormas yang lebih mengedepankan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sebuah persoalan daripada dialog. Fakta ini juga menunjukkan bahwa siapa pun dapat duduk bersama dalam suasana damai dan penuh toleransi. Menyusul kemunculan ketua Dewan Syuro FPI Kota Bandung yang tampil sebagai pembicara, dalam beberapa kesempatan diskusi yang diselenggarakan oleh kalangan Kristiani, ditampilkan pula sejumlah narasumber yang berasal dari kalangan Ormas yang dianggap berhaluan keras, seperti Garis (Gerakan Reformasi Islam) pimpinan Cep Hernawan.

Peringatan HUT FLADS tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Bandung, dan disaksikan para tokoh lintas agama, kemudian potongan tumpeng tersebut diserahkan kepada Rektor Universitas Parahyangan, Profesor Cecilia Lauw sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan, dan juga penggalangan dana untuk korban Wasior, Merapi serta Mentawai.

Menurut Ketua Panitia HUT Deklarasi, tema peringatan kali ini adalah “Silaturahmi Doa untuk Bangsa: 3 Tahun Deklarasi Sancang Mengharmonikan Kebhinekaan dalam Menggerakkan Empati bagi Negeri.” Tema tersebut dipilih mengingat kondisi Indonesia saat ini, di mana bencana datang silih berganti terutama di Wasior, Merapi dan Mentawai. Tentang ini, Ketua Panitia HUT Deklarasi mengatakan,

“Kami pun mengundang banyak pihak pada peringatan kali ini agar keterlibatan mereka dapat lebih membumikan isi dari Deklarasi Sancang. Apabila ingin merasakan kedamaian antarumat beragama maka datanglah ke Bandung. Hal tersebut bukanlah merupakan

impian, karena hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya kerusuhan antarumat beragama di Kota Bandung. Kedamaian akan datang apabila ada rasa kasih sayang di antara manusia, dan saya percaya masyarakat Bandung penuh dengan kasih sayang.” (Wawancara, 9 Februari 2011)

Senada dengan Ketua Panitia HUT Deklarasi, salah satu deklarator Sancang mengungkapkan Kota Bandung adalah Kota yang aman dari konflik antarumat beragama. Hal itu terjadi karena faktor kepemimpinan Walikotanya dengan 7 Agenda Prioritasnya terutama bidang Agama, yakni Bandung sebagai Kota Agamais. Deklarasi yang dulu dicetuskan itu bukan hanya diucapkan saja, tetapi juga teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, atas jasa dan berbagai terobosannya dalam menciptakan kehidupan beragama yang kondusif di Kota Bandung, termasuk dengan gagasannya dalam mewujudkan “Bandung Agamais”, Walikota Bandung dianugerahi “MUI Award” dari MUI Kota Bandung. Penghargaan diserahkan oleh Ketua MUI Kota Bandung pada acara Silaturahmi Akbar Ulama Se-kota Bandung, di Hotel Poster, Jumat (15 April 2011).

B. Natal: Harmoni dan Toleransi

Puluhan pemuda yang berasal dari berbagai agama yang berbeda, mewarnai kemeriahan suasana Natal di Kota Bandung, dengan pawai obor perdamaian. Mereka mengarak obor dari depan Masjid Al-Ukhuwah ke Gereja Katedral Santo Petrus, Kamis 24 Desember 2010, sebelum misa Natal dimulai. Para pemuda yang tergabung dalam Kaum Muda Lintas Agama ini antara lain berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDHI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jaringan Kerja Antarumat Beragama (Jaka Tarub), Sorban, Incres, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, Banser, dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPNU).

Sambil memberi ucapan natal, para pemuda itu membawa bunga berwarna putih yang kemudian dibagikan kepada sejumlah perwakilan gereja. Bunga ini berwarna putih sebagai lambang persaudaraan yang suci. Mereka juga datang dengan membawa lilin dan obor sambil menyanyikan

lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Syukur, dan Halo-halo Bandung. Salah seorang aktivis Kaum Muda Lintas Agama Kota Bandung, mengungkapkan, “Pawai obor itu sebagai bentuk persatuan dari umat beragama yang ada di Indonesia. Semoga ini bisa menjadi bentuk persaudaraan dalam Natal kali ini.” (Wawancara, 15 Januari 2011).

Begitu tiba di Gereja Katedral Bandung, rombongan Kaum Muda Lintas Agama ini diterima oleh Pastor Leo Van Beurden. Pastor Leo Van Beurden, yang mewakili Gereja Katedral mengatakan sangat mengapresiasi kedatangan para pemuda ini. Pastor Leo van Beurden mengungkapkan, perayaan Natal di Gereja Katedral Bandung tahun ini mengangkat tema solidaritas antarmanusia. Menurut dia, tema itu cocok dengan kondisi masyarakat yang kurang peka terhadap permasalahan kelompok masyarakat lain. Kepada rombongan Kaum Muda Lintas Agama, Ketua Paroki Gereja Katedral Bandung mengatakan,

“Saya merasa ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Kita adalah saudara satu sama lain untuk membangun negara kita yang semakin makmur, sejahtera dan bersatu. Saya berharap, pertemuan dan kerja sama dengan para pemuda lintas agama ini tidak hanya sesaat tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.” (Wawancara, 21 Januari 2011).

Dari penelusuran penulis, tampaknya aksi pawai obor dan membagi bunga ini bukan yang pertama kali. Pada natal tahun-tahun sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan oleh sekitar warga Bandung yang membagikan seribu tangkai bunga kepada umat Kristiani yang sedang melaksanakan perayaan Natal di Gereja Katedral Jalan Maulana Yusuf dan Jalan Merdeka.

Sejak tahun 2006, tradisi memberikan bunga kepada jamaah yang sedang merayakan Natal sudah dimulai. Sekitar 150 umat Islam dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung membagikan bunga mawar kepada umat Kristiani yang tengah mengikuti Misa Natal 2006 di Gereja Katedral Kota Bandung.

Pemberian bunga mawar itu dilakukan sejak pagi hingga siang hari kepada umat Kristiani yang memasuki gereja tertua di Kota Bandung itu. Aksi yang juga melibatkan elemen dari MUI dan Nahdlatul Ulama Kota Bandung itu disambut dengan antusias oleh umat Kristiani dan panitia

perayaan Natal 2006 di gereja tersebut. Koordinator Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung mengatakan, bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan toleransi dan meningkatkan rasa persaudaraan di kalangan umat beragama. Lebih jauh ia mengatakan,

“Kami umat beragama Kota Bandung mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi di daerah lain (Poso) yakni terjadi konflik yang berkepanjangan, dengan aksi ini kami menjaga Kota Bandung agar tetap aman dan damai dalam satu ikatan persaudaraan antar umat beragama yang erat.” (Wawancara, 19 Januari 2011)

Menjelang hari Natal, keramaian tampak di beberapa ruas jalan yang lokasinya berdekatan dengan gereja, seperti Jalan Maulana Yusuf dan Jalan Merdeka Bandung. Akan tetapi, hal itu tidak sampai menimbulkan kemacetan parah. Dibandingkan dengan pelayanan pada hari biasa, banyak gereja di Kota Bandung menambah jumlah pelayanan kebaktian untuk mengakomodasi meningkatnya jumlah umat yang ingin menghadiri ibadah di gereja.

Sementara itu, sejumlah gereja di Kota Bandung pun mengusung tema Natal yang berbeda-beda. Namun, pada intinya, esensi pesan yang disampaikan adalah sama, yakni umat Kristen diminta selalu mengembangkan nilai-nilai kasih yang diajarkan Tuhan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Sebagai contoh, di Gereja Katedral Santo Petrus, Bandung, tema kebaktian Natal adalah solidaritas antarumat manusia. Menurut Ketua Paroki Gereja Katedral Bandung, “Tema tersebut beresonansi dengan keadaan masyarakat saat ini yang kurang peka terhadap keadaan sesamanya yang secara ekonomi kurang beruntung” (Wawancara, 21 Januari 2011).

Dalam perayaan Natal yang berlangsung setiap tahun, selalu berlangsung tenteram dan damai. Menarik dicatat, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kenyataan luar biasa di mana organisasi massa Islam turut serta mengamankan Natal. Pengamanan itu dilakukan di gereja, di tempat ibadah Natal berlangsung. Sebuah inisiatif yang ditunjukkan saudara-saudara muslim untuk melindungi saudara-saudara sebangsa yang merayakan Natal. Contohnya, Gereja Katedral di Bandung dijaga anggota Banser Gerakan Pemuda Ansor. Masih di Bandung, NU dan Forum

Komunikasi Umat Beragama juga membagikan seribu mawar kepada umat kristiani di sejumlah gereja.

Selain itu, elemen lain seperti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) juga menyediakan dirinya untuk menjaga kelancaran perayaan Natal yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya sebagai implementasi dari toleransi antarumat beragama. PMII selaku organisasi kepemudaan Islam berupaya untuk mewujudkan toleransi antarumat beragama, khususnya pada saat perayaan Natal.

Dari pengamatan penulis, sejumlah petugas Polwiltabes Bandung dan Polresta Bandung Tengah dilengkapi mobil penjinak bom, menjaga dan mengawasi ketat misa Natal di Gereja Katedral Santo Petrus, Jalan Merdeka, Bandung, Kamis (24 Desember 2010). Bahkan beberapa jam sebelum kebaktian perdana untuk anak-anak, yang diselenggarakan pukul 15.00 WIB, sekitar 20 petugas Gegana Brimob Polda Jawa Barat sempat menyisir gereja tersebut dengan alat deteksi bom. Semua sudut gereja, kolong meja, bangku duduk dan di balik gorden, termasuk altar, disisir dengan teliti berulang kali, sekitar 20 menit menjelang kebaktian.

Penjagaan ketat menggunakan metal detektor dilakukan petugas kepada setiap orang yang keluar masuk gereja, baik jemaat yang akan mengikuti misa, maupun petugas yang tengah menata *sound system* dan perlengkapan ibadat. Ketika misa dimulai, penjagaan ketat terus dilakukan di bagian luar gereja. Namun, penjagaan ketat tersebut tidak mengganggu para jemaat yang melakukan kebaktian tahunan tersebut. Beberapa jemaat yang menghadiri misa kedua pukul 18.00 WIB tampak dengan tenang dan hidmat mengikuti misa dan mendengarkan khotbah pastor dari Keuskupan Bandung.

Koordinator Keamanan Gereja Santo Petrus Bandung, menyebutkan bahwa jemaat tidak merasa terganggu dengan ketatnya pengamanan dari petugas. Tentang ini, Koordinator Keamanan Gereja Santo Petrus Bandung mengatakan,

“Malahan jemaat bisa mengikuti misa dengan tenang dan khusyuk, karena merasa dikawal petugas, gereja juga mendapat bantuan keamanan dari anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser), ormas pemuda Nahdlatul Ulama (NU), salah satu ormas Islam terbesar di tanah air. Pada misa ketiga malam Natal, sejumlah elemen pemuda

lintas agama berkunjung ke Gereja Katedral Santo Petrus untuk mendeklarasikan kerukunan antarumat beragama.” (Wawancara, 12 Februari 2011).

C. Grup Rebana di Gereja

Sesuatu yang tak lazim, terjadi dalam perayaan Natal di Gereja Kristen Indonesia (GKI), Jalan Maulana Yusuf, Bandung. Pada tanggal 25 Desember 2010, Sesudah Fariz Rustam Moenaf menyanyikan lagu “Mari Pulihkan Dunia” dan “Aku Mau Bilang Padamu” di dalam ibadah Natal GKI Maulana Yusuf, sesuatu yang tak lazim itu muncul. Yakni tampilnya grup kasidah Ar-Rahman di hadapan para jemaah gereja yang sedang merayakan Natal. Grup kasidah Ar-Rahman tampil membawakan lagu-lagu selawat Nabi. Dengan alat musik kendang dan rebab grup Ar-Rahman tampil penuh percaya diri di hadapan para jemaah gereja. Sesuatu yang sangat mengejutkan kemudian terjadi, yakni ketika jemaat Kristen GKI Maulana Yusuf memberi aplaus panjang se usai grup rebana Ar-Rahman mengumandangkan Selawat Nabi. Setelah itu, giliran Yanti Kerlip, seorang tokoh pendidik lintas agama, perempuan berjilbab, pegiat kemanusiaan yang teguh, tampil menyapa jemaat gereja.

Acara kemudian dilanjutkan sapaan Natal dari tokoh yang dikenal sebagai ketua Jaringan Islam Liberal (JIL), jauh melampaui sebagian kaum muslimin yang masih enggan dan ragu untuk mengucapkan selamat Natal. Dalam sambutannya, tokoh JIL itu meyakinkan umat Kristen bahwa umat Islam bukan kaum barbarik yang semena-mena dan mengira punya kuasa untuk mengatur Republik ini sendirian. Saat banyak kaum muslimin masih ragu untuk mengucapkan selamat Natal kepada masyarakat Kristen, Ulil melakukannya.

Tokoh muda ini mengaku, bahwa ini adalah ibadah Natal yang pertama dia ikuti sepanjang hidupnya sebagai manusia. Biasanya, kalau pun dia hadir, sebatas datang dalam bagian perayaan se usai ibadah. Dengan mengutip Kiai Tantowi Jauhari (pimpinan pondok pesantren Al-Wasilah Garut) tokoh muda NU ini mengatakan,

“Saya berkepentingan untuk orang Kristen, orang Katolik menjadi saleh. Karena kalau orang Kristen itu saleh, masyarakat semua diuntungkan, bukan hanya Kristen. Begitu juga kalau orang Islam

menjadi saleh, yang diuntungkan bukan hanya orang Islam saja, tapi juga seluruh masyarakat. Menurut saya ini bagus sekali. Kita berkepentingan semua agama itu menjadikan umatnya, umat yang saleh. Karena kalau masing-masing umat beragama itu menjadi saleh, maka yang diuntungkan bukan hanya umat agama yang bersangkutan, tapi seluruhnya. Jadi kita mendukung dakwah semua agama. Itu perlu dikatakan kepada masyarakat kalau semua orang Kristen baik, semua orang akan diuntungkan, kalau orang Islam baik semua orang diuntungkan. Jadi jangan kita khawatir kalau orang lain beribadah. Beribadah itu berusaha menjadi orang saleh. Kalau orang menjadi saleh, itu semua orang diuntungkan, karena dia tidak akan korupsi, dia tidak akan maling, dia tidak akan merampok, dia tidak akan menyakiti orang lain. Jadi menurut saya, orang Islam justru harus mendorong, mendukung misi orang Kristen. Dalam pengertian, mendorong itu kita dukung. Karena kita diuntungkan oleh hasil dari misi itu. Begitu juga orang Kristen, perlu mendorong dakwah orang Islam, karena kalau orang Islam baik, orang Kristen juga diuntungkan. Ini menurut saya visi yang bagus.” (Wawancara, 17 Januari 2011).

Berkaitan dengan perayaan Natal 2010 di GKI Maulana yang dihadiri salah seorang tokoh Islam, menurut seorang Muslimah yang juga menjadi salah seorang pengisi acara di GKI Maulana Yusuf, dapat menjadi preseden yang bagus bagi kehidupan umat beragama ke depan sekalipun tidak semua orang setuju dengan itu. Tentang hal ini, lebih jauh ia mengatakan,

“Kalau para ahli teologi mengecam ibadah Natal kemarin, itu berarti mereka sama sekali tidak peka kepada kebutuhan umatnya. Mereka membutakan mata bahwa di antara para jemaat ada yang memiliki dilema seperti ibu saya; pasti ada dari antara mereka yang berayah-ibu Islam, atau berkakek-nenek Islam dan selama ini terus dihantui ketakutan tidak bertemu dengan mereka lagi di surga nanti. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 2010 kemarin telah menyatukan kita semua. Nanti, di surga, suasananya sama seperti di GKI Maulana Yusuf kemarin: orang Kristen, Islam, Hindu, Budha, Kejawen, Tao, Konghucu, Sinto, berdiam di satu rumah, memuji dan menyembah Allah Yang Satu. Lebih daripada segalanya, ibadah Natal GKI Maulana Yusuf kemarin telah menghadirkan prototipe surga kepada kita.

Saya hidup di negara yang menetapkan *Bhinneka Tunggal Ika*, sebagai semboyan yang menghidupi masyarakatnya. Ketika kemudian menjadi musikawan, nilai-nilai itu muncul di setiap karya musik yang saya persembahkan. Saya menolak untuk dikotak-kotakkan ke dalam warna musik tertentu, parpol tertentu, bahkan agama tertentu. Saya milik semua golongan, itu cara yang saya pilih untuk bersetia kepada Republik tercinta ini.” (Wawancara, 17 Januari 2011).

Sepulang dari menghadiri acara di Gereja Kristen Maulana Yusuf itu, ia mengaku menjadi rajin salat. Setiap jam 4 pagi ia bangun dan berjalan kaki ke masjid. Di sana ia berdoa bagi segenap manusia. Sementara itu, sebagian warga jemaat GKI Maulana Yusuf mengaku baru saja menghadiri ibadah Natal yang paling mengesankan dalam hidupnya. (Wawancara, 17 Januari 2011).

D. Sekuntum Mawar Toleransi

“Katakanlah dengan bunga,” begitu mungkin kalimat yang layak dan tepat untuk mendeskripsikan suasana “kampanye” toleransi beragama yang digelar Komunitas Lintas Agama di halaman Gereja Katedral, Jalan Merdeka Bandung, Selasa 25 Desember 2007. Pada saat itu, seorang anggota Komunitas Lintas Agama memberikan mawar putih kepada jemaat Gereja Katedral yang baru melaksanakan misa Natal, disaksikan Romo Leo Van Beurden di halaman Gereja Katedral Santo Petrus, Bandung. Saat itu, di sela-sela perayaan hari Natal 2007, lebih dari seratus pemuda-pemudi yang tergabung dalam berbagai organisasi pemuda Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dan Protestan membagikan 100 kuntum bunga mawar putih kepada jemaat yang telah melakukan Misa Natal di Gereja Katedral, Jalan. Merdeka No. 1, Kota Bandung.

Organisasi pemuda yang terlibat dalam aksi tersebut adalah PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, KMHDI, Sorban, Jakatarub, GMNU, Incres, Lesbumi, GP Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, dan Fatayat NU. Kampanye bertajuk “Bersatu dalam Damai” itu adalah kelanjutan dari Deklarasi Sancang yang dideklarasikan dalam halal bihalal lintas agama, 10 November 2007. Deklarasi tersebut bertekad membangun toleransi dan kerukunan hidup umat beragama. Rombongan yang berasal dari berbagai

agama itu, datang bersama para tokoh lintas agama didampingi Kapolwiltabes Bandung. Keterlibatan kaum muda dalam mengkampanyekan toleransi dan kerukunan umat beragama baru berjalan mulai tahun 2006 lalu.

Menurut seorang tokoh Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang, bahwa maksud kegiatan ini tak lain untuk berkomitmen tentang kerukunan beragama. Tokoh Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang lebih jauh mengatakan,

“Kami berkomitmen untuk hidup rukun dan damai serta bekerja sama guna menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa sehingga semakin membangun kesadaran pentingnya pilar kerukunan beragama. Saya bangga karena forum itu mampu menggalang kekuatan generasi muda dalam membangun pilar kerukunan beragama untuk membangun bangsa.” (Wawancara, 15 Februari 2011).

Sementara itu, Pembimas Hindu mengatakan bahwa dalam setiap agama selalu diajarkan tentang kerukunan dan perdamaian sehingga sudah menjadi keharusan menjaga hubungan baik dalam masyarakat (Wawancara, 21 Januari 2011).

Para jemaat yang baru selesai mengikuti misa terkejut ketika mereka mendapat bunga dari pemuda-pemudi lintas agama. Salah seorang jemaat, mengaku terharu dan bangga. Kedua bola matanya tampak berkaca-kaca. Sekuntum bunga mawar putih dipegangnya erat-erat. Ia berharap, kegiatan ini tidak hanya simbol melainkan diteruskan di masa datang dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula seorang jemaah lain yang tampak tertegun ketika melihat aksi bagi-bagi bunga di halaman gereja. Mereka berharap, kebebasan menjalankan agama masing-masing bisa lebih terjamin lagi di masa datang.

Bersama jemaat, para pemuda itu menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa”, “Padamu Negeri”, dan “Halo-halo Bandung”. Suara mereka menggema di halaman gereja di tengah cuaca yang cerah. Keharuan juga diungkapkan Ketua Paroki Katedral Santo Petrus pada perayaan Natal tahun ini. Menurutnya,

“Manusia tidak perlu takut kekurangan dalam menjalani hidup ini atau diperbudak nafsu karena Allah menyayangi semua umat

manusia. Pesan Natal tahun ini yang ingin saya sampaikan adalah kita sangat terharu terhadap cinta Allah terhadap manusia. Hanya kesombongan manusia di dunia ini yang melahirkan penindasan, kebodohan, pembunuhan, korupsi. Padahal manusia tidak perlu serakah, khawatir, atau takut jika percaya Tuhan sayang pada kita.” (Wawancara, 12 Februari 2011).

Dari penelusuran penulis, diketahui bahwa kegiatan serupa juga dilakukan tahun lalu di Gereja Katedral oleh Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung dengan tajuk “Islam: Rahmat bagi Semua”. Pada perayaan Natal tahun 2006, Ketua Cabang Nahdhatul Ulama Kota Bandung, memimpin pemberian bunga mawar kepada umat Kristiani yang sedang merayakan Natal di Gereja GKI di Jl. Maulana Yusuf. Saat itu keluarga besar NU Kota Bandung membagikan 1000 kuntum Mawar kepada umat Kristiani.

Pembagian Mawar yang dipimpin Ketua PCNU Kota Bandung juga dilakukan di Gereja Katedral. Ketua PCNU Kota Bandung juga mengalungkan Melati kepada sejumlah agamawan di dua gereja itu. Aksi Ketua PCNU Kota Bandung dan keluarga besar NU membuat umat Kristiani itu terharu. Bahkan ada yang menitikkan air mata. Sejumlah media massa nasional dan internasional melansir peristiwa Natal itu. Aksi Ketua PCNU Kota Bandung dinilai fenomenal di tengah ancaman konflik antaragama yang kian menghantui. Ketua PCNU Kota Bandung sendiri mengatakan, niatnya hanya ingin mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Lebih jauh, Ketua PCNU Kota Bandung mengatakan,

“Bunga itu simbol kerukunan umat beragama. Ini pesan damai dari umat Islam kepada umat Kristiani yang sedang merayakan Natal. Saya juga menyadari adanya pro-kontra pembagian bunga itu. Itu wajar. Tidak ada maksud lain, kecuali menunjukkan pada umat lain bahwa Islam cinta damai.” (Wawancara, 19 Januari 2011).

Aksi itu, menurutnya, dilandasi beberapa alasan. Alasan itu antara lain,

“Di Kota Bandung banyak penganut non-Islam. Saya tidak ingin seperti Ambon dan Poso. Kalau itu terjadi di Bandung, hancurlah kota ini. Dari lahiriahnya, konflik di dua daerah itu bermula dari

masalah di luar agama. Pelakunya menyeret nama Islam dan Kristen, sehingga konflik kian membesar.” (Wawancara, 19 Januari 2011).

Tak ingin tragedi itu terulang, Ketua PCNU Kota Bandung ini berharap aksi damaiya diikuti kota-kota lain. Dia mengatakan,

“Kami ingin Bandung menjadi inspirasi toleransi umat beragama di Indonesia. Efek aksinya, umat non-Islam Kota Bandung tidak canggung lagi bergaul dengan umat Islam, terutama NU. Hubungan antar agama di Kota Bandung menjadi lebih baik” (Wawancara, 19 Januari 2011)

Menurut Ketua PCNU Kota Bandung, aksi damai itu adalah tindakan antisipatif menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Tentang hal ini, Ketua PCNU Kota Bandung mengatakan, “Kita tidak reaktif, tapi antisipatif. Bukan seperti pemadam kebakaran, yang memadamkan kerusakan jika sudah berkobar.” (Wawancara, 19 Januari 2011).

Dalam konteks ini, Ketua PCNU Kota Bandung mengisahkan, bahwa aksi pembagian bunga itu didukung Rais Syuriah PCNU Kota Bandung KH. Imam Sonhaji dan MWC-MWC NU. Bahkan KH. Sonhaji meminta PCNU mengadakan *bahtsul masa'il* (forum pengkajian masalah) sebelum aksi itu digelar. Agar kalau ada ormas lain yang menghujat, sudah punya dalilnya. Sayangnya, *bahtsul masa'il* batal karena pelaksananya sakit. Kepastian aksi itu pun mengambang, sementara Natal tinggal tiga hari. Ketua PCNU Kota Bandung segera menemui KH. Sonhaji. “Beliau meminta kita tetap melanjutkan rencana. Bahkan beliau memberikan dalilnya,” kata Ketua PCNU Kota Bandung. Salah satunya, terdapat dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*. Kitab ini memaparkan, seorang muslim wajib melindungi nonmuslim *dzimmi* (yang berdamai). Ketua PCNU Kota Bandung mengatakan, “Kita wajib melindungi minoritas. Karena Islam itu agama yang damai terhadap agama apa pun.”

Pengasuh Ponpes al-Ikhwan Cigadung Bandung ini juga menyayangkan sering tampilnya kelompok Islam garang di Bandung di media massa. Menurut dia, aksi pemberian bunga mawar kepada para jemaah gereja yang sedang merayakan kebaktian dilakukan sebagai

pengimbang bahwa wajah Islam sebenarnya tidak seperti itu. “Kami mengedepankan wajah Islam *rahmatan lil ‘alamin*,” katanya.

Berkenaan dengan sikapnya yang lebih ingin menonjolkan wajah Islam yang lebih sejuk, damai, dan toleran, tokoh NU ini mengakui terinspirasi oleh Gus Dur, yang saat itu Ketua Umum PBNU. Ketika memberi *tausyiah* di PWNU Jawa Barat, dia datang bersama seorang pendeta. Inspirasi juga datang dari ayahnya. Dia mempunyai teman *jogging* seorang nonmuslim. “Si teman sering datang pagi-pagi menjemput ayah. Ketika ia memberi salam, ayah saya membalasnya,” kenangannya. Melihat itu, ia menggugat bahwa umat Islam haram mengucapkan salam kepada nonmuslim. “Jawaban ayah saya singkat: dalam lagi ilmu agamamu!” imbuhnya.

E. Buka Puasa Lintas Agama

Momentum Buka Bersama dan Silaturahmi Idul Fitri dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi media yang sangat efektif untuk mempererat hubungan di antara para tokoh lintas agama di Kota Bandung. Seperti yang terjadi pada Senin, 30 Agustus 2010, jam 16-19.00 di Golden Flower Hotel, Jl. Asia Afrika No. 15-17 Bandung diselenggarakan Silaturahmi Buka Puasa bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat dan budayawan Kota Bandung.

Sejak jam 16.00 menyambut kedatangan para tamu, Orkes Keroncong “Jempol Jentik” mengalunkan lagu-lagu merdu mendayu-dayu, terdengar juga alunan nyanyian “Bengawan Solo”. Acara Silaturahmi Buka Puasa dipandu oleh M. Ipong sebagai MC, diawali dengan berbagai sambutan. Pastor Abu Kasman, OSC, selaku Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAK) menyampaikan terima kasih kepada para tamu yang memenuhi undangan Panitia.

Semua yang diundang sejumlah 101 seperti tercantum dalam buku tamu menyampaikan harapan semoga pertemuan ini menjadi wahana untuk saling berinteraksi, guna meminimalkan hambatan toleransi dalam mewujudkan kota Bandung sebagai rumah bersama, agar setiap perbedaan memperoleh hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam semangat kekeluargaan. Sementara, Ketua FKUB Kota Bandung

menyampaikan tanggapan positif terhadap acara silaturahmi lintas agama tersebut.

Sebelum Buka Puasa masih disampaikan siraman rohani tentang makna silaturahmi oleh Ketua PCNU Kota Bandung, dan beberapa sambutan dari tamu undangan, termasuk dari Dr. Parwati Supangat, perwakilan agama Budha. Perjamuan bersama merupakan perwujudan dari hubungan persaudaraan di antara para tamu. Semoga tali silaturahmi semakin meluas, dan menjangkau saudari-saudara yang lain.

Sementara itu, pada petang yang sama, Senin (30 Agustus 2010), di aula Katedral Bandung, diadakan pula acara buka puasa bersama dengan para pemulung. Selain itu, Kerabat Kerja Ibu Teresa Bandung pada Rabu (1 September 2010) juga mengadakan acara buka bersama dengan saudari-saudara yang kurang beruntung.

Dalam beberapa tahun terakhir, datangnya perayaan Idul Fitri tampaknya telah menjadi media bagi para tokoh lintas agama untuk saling bertemu, menyapa, dan saling mengucapkan selamat. Budaya halal bihalal, kini tampaknya mengalami perluasan peserta, dari semula hanya diikuti oleh umat Islam, kini mulai juga melibatkan para tokoh agama lain. Ini menandakan bagaimana toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Kota Bandung semakin terjalin kuat. Seperti yang dilakukan oleh para tokoh agama dari Keuskupan Bandung yang berkeliling menemui para tokoh pemerintah dan agamawan Islam yang ada di Kota Bandung, dengan menjumpai Gubernur Jawa Barat dan Wakilnya, Pangdam Siliwangi, Walikota Bandung dan Wakilnya, mantan Gubernur Jabar Solihin GP, serta Pengurus Pusdai Jawa Barat Dedem Ruchlia.

F. Toleransi dalam Peringatan Nabi Kong Zi

Pada 5 Nopember 2010 lalu, dilangsungkan peringatan kelahiran Nabi Kong Zi oleh umat Kong Hu Chu di Kota Bandung. Berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan hadir untuk ikut bersama dalam perayaan tersebut. Walikota Bandung serta sejumlah tokoh umat lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung juga hadir. Berkumpulnya para tokoh lintas agama dan pemerintahan itu menandakan betapa toleransi sebagai sesuatu yang ada dan hidup di Kota Bandung. Sejak diperkenalkannya program “Bandung

Kota Agamais” oleh Pemerintah Kota, hubungan yang terjadi di kalangan tokoh lintas agama tampak semakin erat. Salah satu media yang biasa dipakai untuk bertemu adalah peringatan hari-hari besar agama, seperti halnya peringatan kelahiran Nabi Kong Zi.

Dari Kepala Sub-Bagian Bina Mental Pemerintah Kota Bandung diperoleh penjelasan bahwa untuk setiap momen-momen keagamaan, unsur Pemerintah Kota Bandung selalu menyempatkan diri untuk hadir. Hal ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Bandung dalam membangun kehidupan beragama yang toleran dan harmonis. Kepala Sub-Bagian Bina Mental Pemerintah Kota Bandung lebih jauh mengatakan,

Unsur Pemerintah Kota Bandung terlibat aktif mengikuti berbagai peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan berbagai agama di kota Bandung. Ini sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan Bandung sebagai rumah bersama bagi umat semua agama. Karena itu, dalam peringatan hari lahir Nabi Kong Zi dalam agama Kong Hu Chu, misalnya, unsur pimpinan Kota Bandung, bahkan Walikota Bandung sendiri, ikut datang menghadiri. (Wawancara, 17 Januari 2011).

Hal yang sama ditegaskan oleh Ketua FKUB Kota Bandung. Sebagai motor dari organisasi yang bersifat lintas agama, dirinya dan para pengurus FKUB yang lain selalu memprioritaskan untuk menghadiri acara-acara hari besar keagamaan yang diselenggarakan oleh berbagai agama. Menurutnya,

“Dengan kita hadir secara fisik di tengah-tengah mereka, seperti halnya dalam peringatan kelahiran Nabi Kong Zi ini, kita menunjukkan bahwa kita adalah satu saudara, meski keyakinan kita berbeda. Dengan bersilaturahmi secara fisik dan hati, maka hal itu akan lebih menimbulkan kedekatan dan rasa saling membutuhkan untuk secara bersama-sama membangun Kota Bandung tempat kita berada.” (Wawancara, 19 Januari 2011).

Salah satu hal yang menarik dari agama Kong Hu Chu ini adalah tempat ibadahnya yang masih menggunakan tempat yang sama dengan pemeluk agama lain, dalam hal ini Budha dan Tao. Kelenteng, sebagai rumah ibadahnya kaum Kong Hu Chu, juga adalah tempat beribadahnya umat agama Budha dan Tao.

Berbeda dengan tempat ibadah agama-agama misionaris, Kelenteng punya karakteristik tersendiri yang unik. Dalam sejarahnya, Kelenteng merupakan tempat ibadah bersama warga Tiongkok yang beragama Tao, Kong Hu Cu, dan Budha. Di Indonesia, tempat ini juga populer dengan sebutan *Kelenteng Tri Dharma*, untuk menggambarkan adanya “kolaborasi” tiga agama tersebut. Dikarenakan pengaruh dari ketiga ajaran itu, antara Kelenteng yang satu dengan lainnya memiliki “patung pemujaan” yang berbeda-beda pula. Wihara ini, seperti Wihara Tian Djin Kupoh di Karawang Barat, selain menjadi tempat sembahyang juga sudah menjadi aset bersejarah atau cagar budaya yang tetap dijaga dan dilestarikan. Di dalam Wihara, patung-patung pemujaan tetap dipelihara dan dirawat sedemikian rupa.

Tapi jangan dibayangkan bahwa mereka yang beribadah di dalam Kelenteng adalah penyembah patung-patung. Menurut seorang pengurus Kelenteng, patung-patung tersebut tidak lain hanyalah simbolisasi manusia untuk mencapai Tuhan yang memang tidak terdefiniskan, sebagaimana salat dalam tradisi Islam yang menghadap ke Kabah (*kiblat*) tidak dimaksudkan untuk menyembah bangunan yang terletak di kota Mekah itu.

G. Toleransi Tumbuh dalam Bencana

Toleransi beragama bisa tumbuh dan terjalin di tempat dan hal yang tidak terduga. Hubungan beku, abai tanpa interaksi dalam perbedaan seperti menjadi kelaziman. Dialog-dialog terbuka untuk bertukar pikiran tentang perbedaan agama atau saling membantu dalam pembangunan rumah ibadah adalah keindahan masa lalu yang kini sudah semakin sulit untuk dijumpai. Kalaupun ada fenomena elok seperti itu, skalanya mungkin kecil serta insidental. Apakah ruang toleransi antara mayoritas dan kaum minoritas benar-benar sudah punah? Sulit untuk merekam kemesraan dalam perbedaan atau kehidupan berdampingan yang harmonis antarumat beragama pada kondisi normal sehari-hari, apalagi di kota-kota besar.

Namun, ada hikmah dari berbagai cobaan bencana yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dalam situasi sulit seperti bencana, toleransi mendapatkan ruang begitu luas untuk mengikis jurang perbedaan. Atas

dasar nilai kemanusiaan, mayoritas dan minoritas bisa saling membaur untuk membantu sesama manusia yang kesusahan. Contoh kecil terjadi dalam bencana tahunan berupa banjir yang menimpa warga Kampung Cieunteung, Bandung. Ketika bencana banjir itu terjadi, warga Cieunteung yang hampir semua Muslim berhubungan baik dengan berbagai relawan dan donatur yang berbeda agama. Secara terbuka, mereka dari Katolik, Kristen (Protestan), Budha, datang menawarkan berbagai bantuan dan aksi kemanusiaan yang memang sangat dibutuhkan warga korban banjir, tanpa embel-embel lain. Warga korban banjir tidak menolaknya hanya karena perbedaan agama, apalagi bantuan dari pemerintah minim. Selama tidak berusaha memengaruhi akidah yang mereka yakini, warga juga menerima bantuan dan berhubungan baik dengan mereka.

Para relawan dari berbagai agama mengakui bahwa aksi kemanusiaan digalang tanpa niat menghilangkan perbedaan. Dia orang Papua, berbeda agama, tapi begitu rajin membantu bersama teman-temannya, bahkan sampai berenang dalam lumpur membagikan nasi bungkus ke daerah-daerah yang tidak terjangkau perahu. Mereka juga yang aktif menggiring sekolah-sekolah nonmuslim untuk mengarahkan bantuan ke warga Cieunteung.

Meski selalu diawali pengenalan identitas sebagai pemeluk agama yang berbeda, semua dilakukan dengan dasar solidaritas dan selalu diawali dengan keterbukaan. Jika bantuan datang dari sesama manusia, tidak hanya kepada warga Cieunteung, tetapi juga beberapa warga korban banjir di wilayah lain, seperti di Desa Bojongsoang. Apa pun bentuk bencananya (banjir, longsor, gunung meletus, konflik, peperangan antarsuku) pemberian bantuan (makanan, minuman, selimut, pakaian) selalu dinilai negatif oleh sebagian masyarakat. Apalagi uluran bantuannya dari nonmuslim untuk korban atas kelaliman manusia. Sebutan proses Kristenisasi, Katolikisasi, Hindunisasi, Budhasisasi, Konghucuisasi dan pemurtadan pun kerap menimpa pada mereka yang menyediakan perbagai kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal ini diakui oleh salah seorang pastor dari Gereja Katedral santo Petrus. Menurutnya,

“Kerikil ada saja. Ada beberapa orang yang mencoba menghasut warga agar menolak bantuan dari pengobatan karena takut jadi ajang pemurtadan. Tapi, sering pula hasutan itu ditentang warga lainnya.

Tetapi, untuk menjauhkan fitnah dan kecurigaan, bantuan biasanya disampaikan melalui pemerintah setempat.” (Wawancara, 12 Februari 2011).

Tidak hanya dari sesama Muslim, tapi banyak juga dari Katolik, Kristen, Budha, Hindu dan Kong Hu Chu yang memberikan bantuan atau pengobatan gratis untuk korban banjir. Meski berbeda, tujuan bantuan sama, yakni membantu meringankan beban sesama manusia. Jadi, sangat naif kalau menolak bantuan kemanusiaan hanya karena berbeda suku atau agama, apalagi bantuan dari pemerintah juga terbatas.

Hal ini diakui oleh pihak Pemerintah Kota Bandung. Menurut Kepala Subbag Bina Mental,

“Pemerintah sangat terbantu dengan adanya berbagai bantuan yang disalurkan melalui berbagai organisasi keagamaan yang berbeda-beda yang ada di Kota Bandung. Dalam hal penyaluran bantuan terhadap para korban bencana, pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan yang mungkin timbul dari pihak penerima bantuan. Di mana bantuan yang disumbangkan, misalnya untuk bencana alam, baik banjir atau longsor, misalnya, mereka tidak menyerahkan langsung kepada pihak korban, tetapi melalui tangan pemerintah. Hal ini, dimaksudkan untuk menghilangkan kecurigaan yang mungkin timbul di kalangan masyarakat, kalau-kalau memberi itu ada apa-panya. Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada masalah. Semua tersalurkan dengan baik. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada gesekan. Termasuk kepedulian dari sebuah organisasi keagamaan Budha yang dipimpin oleh Ibu Aida, di mana pada hari raya idul fitri kemarin, mereka memberikan hampir 1500 bingkisan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini merupakan wujud kepedulian dan toleransi lintas agama yang sangat baik di Kota Bandung.” (Wawancara, 19 Januari 2011).

Ketika berkunjung ke Katedral Santo Petrus Bandung, 26 Desember 2010, penulis menjumpai beberapa orang petugas gereja yang mengedarkan kotak sumbangan kepada para jamaah. Ketika ditanya, petugas itu menyatakan bahwa hasil dari kotak itu akan disumbangkan kepada beberapa daerah yang sedang dilanda bencana, seperti banjir atau tanah longsor. Dalam kesusahan seperti bencana, toleransi tumbuh berbalut solidaritas antarmanusia. Tentu diharapkan tidak hanya karena

kejadian insidental seperti bencana atau rutinitas pengamanan bersama hari raya saja kemesraan antarumat beragama itu tampak. Setelah digerogeti banyak konflik dan bencana alam, bangsa bineka ini rindu keindahan perdamaian, dalam perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sikap toleransi tidak hadir semata karena ada bencana, peringatan natal dan tahun baru, tapi mesti hadir dalam sanubari kita setiap waktu.

Bahkan, aksi sosial yang dilakukan oleh para pemeluk agama yang berbeda ini tidak hanya ditujukan untuk para korban bencana alam saja, tetapi juga mereka menggalang dana solidaritas untuk membantu rakyat sipil Palestina korban agresi militer Israel di kawasan Gaza, seperti yang dilakukan oleh jemaat Gereja Protestan bagian Barat Jemaat Bethel Bandung. Mereka mengumpulkan dana solidaritas itu pada kebaktian malam Tahun Baru dan hari pertama Tahun Baru 2011. Hasil pengumpulan dana solidaritas itu selanjutnya akan dikirimkan untuk membantu rakyat Palestina.

H. Dinamika Relasi Umat Lintas Agama

Relasi sosial yang terjalin di antara umat lintas agama tidak pernah berjalan dalam satu keadaan yang tetap, melainkan berlangsung dalam situasi yang terus berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Hal ini sejalan dengan kecenderungan manusia itu sendiri yang selalu berubah-ubah. Di satu sisi, kadang-kadang manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang baik dan kadang-kadang ingin melakukan tindakan yang jahat. Dalam konteks ini, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa manusia memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan *otonomi* dan *homonomi*. Kecenderungan ke arah *otonomi* merupakan ekspansi yang dilakukan oleh organisme dengan jalan mengasimilasikan dan mengurus lingkungan. Kondisi ini serupa dengan dorongan egoistik di mana orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mengembangkan kepentingan-kepentingan dengan cara menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.

Sementara itu, kecenderungan ke arah *homonomi* dinyatakan dengan sejumlah saluran khusus, misalnya keinginan akan superioritas, akuisisi atau penguasaan, eksplorasi, dan prestasi. Kecenderungan ke arah

homonomi mendorong orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta berbagi hasil dan berpartisipasi dalam sesuatu yang lebih luas daripada individu itu sendiri.

Menurut perspektif teori pertukaran sosial, kecenderungan relasi sosial lintas agama yang cenderung terus berubah tadi sebagai fenomena biasa dalam kehidupan umat beragama yang selalu fluktuatif, karena di antara umat beragama setiap saat selalu bersentuhan, bergaul dan melakukan interaksi sosial satu sama lain. Melalui interaksi antarumat beragama, satu sama lain saling memberikan makna terhadap sikap dan perilaku sosial umat beragama secara dialektik. Umat beragama secara aktif dan kreatif berinteraksi saling memberikan respons satu sama lain.

Dengan demikian, lingkungan sosial yang terdiri dari simbol verbal, simbol nonverbal dan lingkungan fisik sangat mempengaruhi bagaimana umat beragama berinteraksi secara lintas agama. Fluktuasi interaksi antarumat beragama terjadi karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial tersebut. Ketika lingkungan sosial bernuansa positif, maka interaksi antarumat beragama berlangsung efektif, damai, toleran dan terbuka. Sebaliknya, ketika lingkungan sosial tidak kondusif, maka hubungan antarumat beragama mengalami kemacetan. Karena tindakan seorang individu berdasarkan interpretasi yang diberikan terhadap lingkungan sosialnya, yang mempengaruhi dirinya. Dalam perspektif teori pertukaran sosial, umat beragama bersikap toleran dan terbuka karena ia juga berharap mendapatkan hal yang sama.

Dinamika kehidupan beragama di Kota Bandung mengalami fase pasang terutama dalam sekitar tujuh tahun terakhir, pasca diluncurkannya program “Bandung Kota Agamais” oleh Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Walikota Dada Rosada. Sejak kurun 2004 sampai penelitian ini dilakukan, intensitas interaksi antarumat beragama mengalami kenaikan yang signifikan. Sekalipun baru berlangsung pada level elite agama di Kota Bandung, interaksi dan komunikasi yang lebih cair dan terbuka semakin sering dilakukan. Program “Bandung Kota Agamais” telah menjadi jalan bagi berlangsungnya suasana interaksi sosial yang lebih terbuka dan dinamis di kalangan tokoh lintas agama. Berbagai momen peringatan hari besar agama, termasuk acara buka puasa bersama, kini telah berubah menjadi media sosial tempat para tokoh lintas agama berkumpul dan berinteraksi.

Suasana kehidupan beragama yang relatif harmonis itu, pada tahun 2007 sedikit terganggu dengan munculnya isu peledakan bom yang melanda sejumlah gereja di Kota Bandung, khususnya di Gereja Katedral Santo Petrus. Tetapi, berkat jalinan relasi dan komunikasi yang baik di antara para tokoh lintas agama yang ada di Kota Bandung, isu yang dapat mengancam keharmonisan hubungan antarumat beragama itu dapat dihadapi secara bersama-sama.

Meskipun demikian, kemunculan isu bom yang akan meledak pada saat perayaan Natal di Kota Bandung telah menimbulkan kekhawatiran dan persepsi yang negatif di kalangan umat lintas agama. Masing-masing umat beragama memaknai peledakan bom tersebut, yang secara umum dibagi ke dalam tiga kategori simbol. *Pertama*, sebagai simbol kebencian dari salah satu kelompok agama tertentu kepada kelompok agama lain, sehingga menimbulkan saling curiga antara umat beragama satu dengan yang lainnya. *Kedua*, simbol kecemburuan, karena sebagian komunitas etnik dan agama memandang bahwa salah satu komunitas etnik dan agama tertentu secara ekonomis lebih maju, sehingga menimbulkan kecemburuan social. *Ketiga*, simbol adu domba, artinya yang melemparkan isu peledakan bom tersebut, belum tentu dilakukan oleh komunitas etnik dan agama tertentu yang berasal dari Kota Bandung, tetapi bisa jadi dari orang luar yang bertujuan mencari keuntungan pribadi, baik secara politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, ia sengaja membikin suasana Kota Bandung menjadi kacau balau, sehingga di antara umat beragama saling curiga yang pada gilirannya saling bermusuhan dan ujung-ujungnya terjadi konflik sosial antarumat beragama.

Secara teoretis, lingkungan sosial yang tidak kondusif sangat mengganggu hubungan antarumat beragama. Interaksi antarumat beragama dengan sendirinya akan mengalami kemunduran yang sangat rendah, sehingga menimbulkan suasana yang disharmoni, bahkan melahirkan kecurigaan satu sama lain. Berkenaan dengan hal itu, Blumer (2004: 160) menjelaskan, bahwa makna yang diberikan individu umat beragama berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya.

Pasca merebaknya isu peledakan bom di sejumlah gereja di Kota Bandung yang ternyata tidak terbukti itu, para tokoh lintas agama yang

tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS) dan Pemerintah Kota Bandung melakukan berbagai upaya meredakan suasana dengan cara dialog intensif, membangun kesepahaman dan kerja sama yang lebih bersifat lintas agama. Bahkan, setiap menjelang datangnya perayaan Natal, para tokoh lintas agama selalu mengadakan pertemuan dengan pihak otoritas keamanan Kota Bandung (Polwiltabes) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertemuan biasanya dilakukan di Gereja Katedral Santo Petrus. Upaya tersebut dapat dipandang sebagai simbol keseriusan pemerintah dan pemuka agama untuk menciptakan suasana yang kondusif, agar umat beragama tetap toleran, damai dan tenteram. Melalui berbagai medium dialog dan pertemuan yang rutin dan intensif, di bawah payung Program “Bandung Kota Agamais”, maka dalam beberapa tahun terakhir hubungan antarumat beragama mengalami babak baru yaitu hubungan yang semakin toleran, harmonis dan kondusif. Hal ini sebagaimana diakui oleh salah seorang tokoh Protestan yang ada di Kota Bandung, Pendeta Joppi Ratu. Menurutnya, jasa terbesar dari adanya program Bandung Kota Agamais adalah bahwa ia telah membuka kran komunikasi yang selama ini macet. Sehingga, dengannya, para tokoh lintas agama yang ada di Kota Bandung memiliki media untuk berkumpul, berkomunikasi dan berinteraksi.

Umat beragama menyadari betul betapa pentingnya hidup rukun dan damai, sehingga umat beragama selalu mengedepankan sikap-sikap yang positif, antara lain: memiliki perasaan yang sama sebagai anak bangsa, saling menghargai dan menghormati, saling mengucapkan salam, dan saling berbagi dalam peringatan hari-hari besar agama, serta menghadiri upacara keagamaan masing-masing.

Dinamika toleransi beragama di Kota Bandung diwarnai dengan berdirinya banyak forum dialog yang bersifat lintas agama. Pendirian forum-forum dialog seperti ini tidak hanya difasilitasi oleh para akademisi dan praktisi lintas agama, tetapi juga oleh pemerintah Kota Bandung melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini berfungsi sebagai wadah tempat para tokoh lintas agama berkumpul dan mendialogkan berbagai persoalan, khususnya menyangkut masalah-masalah sosial-keagamaan. Forum atau perkumpulan yang memiliki

komitmen pada penumbuhan spirit toleransi dan keterbukaan terhadap keragaman itu, di antaranya, adalah Kaum Muda Lintas Agama Kota Bandung, Jaka Tarub (Jaringan Kerja Antarumat Beragama), Forum Bandung Plural, dan yang paling fenomenal adalah Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS).

Pertanyaan yang berkaitan dengan diskursus dialog agama ini adalah mengapa hubungan antaragama dan kepercayaan di Kota Bandung kadang masih diselimuti ketegangan dan kecurigaan, padahal lembaga-lembaga dialog antar-iman (*interfaith dialogue*) atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang *cross-cultural studies* berdiri di mana-mana. Bahkan, pemerintah Kota Bandung juga sudah memprakarsai pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)? Adakah sesuatu yang salah dalam desain dialog agama selama ini?

Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan hal mana banyak praktisi dialog agama yang menganggap perbedaan agama (*religious differences*) sebagai sesuatu yang tabu dan haram untuk diungkap ke permukaan karena menganggap hal, ini bisa menghambat proses relasi antar-agama. Sebaliknya, mereka lebih mengapresiasi sisi persamaan-persamaan keagamaan (*religious commonalities*) karena beranggapan hal ini bisa menjadi perekat, dasar, dan fondasi untuk membangun hubungan antarumat beragama yang harmonis dan *peaceful*. Sumanto Al-Qurtubi (2009) menyebut model dialog semacam ini sebagai “*harmony model*”, karena tujuan melakukan dialog agama jenis ini, pada dasarnya, hanya untuk menciptakan harmoni antar-agama. Dialog agama “*model harmoni*” ini menghindari sekuat tenaga ajaran, teks, tradisi dan wacana keagamaan yang berpotensi memunculkan konflik, disharmoni, dan kekerasan agama.

Sebagaimana disinggung di bagian terdahulu naskah ini, definisi dialog agama bukan hanya terbatas pada perkataan melainkan juga perbuatan, misalnya tindakan antarkelompok agama untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan, seperti kerja sama mengatasi kemiskinan, konflik lintas-agama, kekerasan, bencana alam, dan pengungsian. Salah satu contoh model dialog seperti ini adalah Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS).

Model dialog agama seperti FLADS ini oleh Mohamed Abu-Nimer disebut sebagai *humanity model*. Dialog agama seperti FLADS ini mampu

mentransformasi para pengikut agama yang semula sangat keras fanatik, konservatif, *inward-looking*, *close-minded*, *ethnocentric*, dan militan kemudian menjadi lunak, terbuka, *open-minded*, *outward looking*, toleran, dan berwatak pluralis. Mereka yang semula saling membenci, mencurigai, memusuhi, dan antipati bisa berubah saling menghargai, mencintai, dan empati satu sama lain. Mereka sadar bahwa jalan kekerasan dan watak konservatisme yang mereka tempuh hanyalah membuahkan sikap permusuhan, malapetaka, dan bencana kemanusiaan belaka.

Secara umum, sejauh yang bisa diamati, format dialog agama di Kota Bandung mulai menunjukkan perubahan berarti, yang salah satunya ditunjukkan dengan kehadiran FLADS. Kelompok-kelompok keagamaan yang selama ini diidentikkan sebagai kelompok militan-konservatif mulai terlibat dalam forum-forum dialog. Hanya saja, sejauh ini belum banyak upaya dilakukan apa yang disebut dialog agama dalam pengertian yang sesungguhnya seperti yang dipaparkan di atas dengan melibatkan “*the others*” atau “*out-groups*” yang berbeda visi, ideologi, *interest*, dan tujuan. Akibatnya, masing-masing kelompok agama seperti berada pada dua kutub ekstrem yang berlawanan: “moderat-progresif” vs “militan-konservatif.” Dua gerbong kelompok keagamaan ini berjalan dalam rel mereka sendiri dengan agenda, strategi, taktik, cara, motivasi, kepentingan, dan tujuan sendiri-sendiri. Masing-masing kelompok ini juga mengapresiasi teks, wacana, ajaran, tradisi, dan simbol-simbol keagamaan yang berlainan untuk mendukung gerakan dan aksi-aksi keagamaan yang mereka lakukan.

Dalam konteks ini, lahirnya Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS), serta berbagai forum lintas agama lainnya, dapat dipandang sebagai usaha untuk menciptakan kultur inklusif di Kota Bandung. Keterbukaan menjadi kata kunci sekaligus pra-syarat dialog lintas agama yang sehat dan dinamis serta jalan terciptanya perdamaian antar umat beragama.

Secara umum, kemunculan berbagai forum dialog lintas agama menjadikan spirit “Bandung Kota Agamais” yang sangat menghargai keragaman sebagai landasan. Mereka memandang bahwa perbedaan itu suatu yang alamiah dan tidak perlu dipermasalahkan, tetapi harus menjadi kekayaan untuk saling melengkapi kekurangan dan kelemahan masing-

masing. Sebab, walaupun manusia berbeda-beda, tetapi pada dasarnya manusia adalah sama sebagai makhluk Tuhan. Sikap yang dimiliki umat beragama seperti ini, dipengaruhi objek-objek yang menerpanya ketika berkomunikasi sesama umat beragama. Objek-objek tersebut, menurut Blumer (2006: 249) terdiri atas objek fisik (rumah ibadah), objek sosial (pejabat pemerintah, pemuka dan umat beragama, pengurus FKUB, pengurus FLADS) dan objek abstrak, seperti nilai-nilai, hak dan peraturan. Khusus yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama masing-masing sangat berpengaruh dalam membentuk karakter umat beragama yang toleran dan terbuka.

Sikap saling menghargai dan saling menghormati antarsesama warga Kota Bandung tampak dalam kehidupan sehari-hari. Di antara mereka sudah terbiasa saling menghargai dan saling menghormati posisi masing-masing. Karena pada dasarnya, dalam teori pertukaran sosial, bahwa setiap manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Penghargaan dan penghormatan antarkelompok keagamaan merupakan pengakuan nyata tentang keberadaan suatu komunitas. Oleh karena itu, komunitas tersebut, dapat melakukan aktivitas dan kreativitasnya dengan tenang, tanpa dibayang-bayangi rasa takut dari komunitas lain yang berbeda. Sehingga perbedaan di antara umat beragama bukanlah masalah yang harus ditakuti. Tetapi menjadi potensi yang kuat untuk membangun kebersamaan antarwarga masyarakat secara damai dan tenteram.

Dengan demikian, sikap saling menghargai dan menghormati yang ditunjukkan oleh umat beragama di Kota Bandung, dapat dipandang sebagai perubahan mendasar yang dimiliki oleh sebagian umat beragama, yang sebelumnya mereka memiliki, seperti sikap: prasangka sosial, stereotip, etnosentrisme, dan diskriminatif terhadap penganut agama yang berbeda.

Sementara itu, sikap dan tradisi saling mengucapkan salam atau selamat antarumat beragama ketika merayakan hari-hari besar keagamaannya, telah menjadi kebiasaan yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat Kota Bandung. Baik umat Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, maupun Kong Hu Chu sudah terbiasa saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Natal, selamat Tahun Baru Imlek, selamat Hari Waisyak, Selamat kelahiran Nabi Kong Zi, dan

lain-lain. Walaupun sesungguhnya di kalangan sebagian umat beragama terdapat pandangan yang berbeda tentang tradisi mengucapkan selamat tersebut. Keterlibatan seseorang dalam interaksi yang lebih luas didasarkan karena hasratnya untuk bersatu dengan manusia-manusia yang lain di sekitarnya. Karena naluri manusia itu ingin hidup bersama atas kehendak dan kepentingan yang tidak terbatas. Karena itu, dalam usaha untuk memenuhi kehendak dan kepentingan tersebut, tidak dapat dilakukan sendirian melainkan harus dilakukan secara bersama-sama.

Kebiasaan baik yang terjalin di kalangan umat lintas agama di Kota Bandung tidak hanya berhenti pada kebiasaan saling mengucapkan selamat pada saat datangnya hari besar agama, melainkan juga melangkah lebih jauh dengan saling memberi dan mengapresiasi, termasuk menyantuni mereka yang kurang beruntung atau yang sedang tertimpa musibah.



BAGIAN 7

DINAMIKA INTOLERANSI

A. Intoleransi di “Rumah Suci”

Berbagai upaya yang dilakukan untuk membangun toleransi seringkali terhambat dengan terjadinya praktik intoleransi. Tarik-menarik antara kehendak untuk mewujudkan toleransi dengan terjadinya praktik intoleransi telah menimbulkan dinamika kehidupan beragama yang menarik untuk dicermati. Berikut adalah deskripsi dari beberapa praktik intoleransi beragama yang berhasil diamati.

Dalam konteks Kota Bandung, meskipun dalam skala dan intensitas yang rendah, persoalan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah ini masih menjadi persoalan tersendiri yang sebelumnya sepenuhnya tuntas ditangani. Dari penelusuran di lapangan, tampak ada persoalan nyata berkaitan dengan pendirian rumah ibadah (gereja) ini.

Pada hari Minggu, 7 Nopember 2010, sekitar 50 orang mendatangi dua rumah ibadah di Jalan Soekarno-Hatta RW 06 Kelurahan Karasak, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung. Mereka menyatakan menolak adanya kegiatan gereja di daerah sini karena tidak memiliki izin dari warga setempat. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Muslim Karasak, Front Umat Islam (FUI), dan Gerakan Reformasi Islam (Garis) membawa sejumlah poster.

Dari beberapa narasumber diketahui bahwa massa berorasi di lokasi sejak pukul 09.30 hingga 10.40 WIB. Di tengah-tengah aksi, sesekali massa berteriak 'Allahuakbar'. Namun aksi hanya berlangsung hingga pukul 10.45 WIB. Massa pun langsung membubarkan diri. Aksi berlangsung damai. Sementara kegiatan kegerejaan di dua rumah ibadah tidak terganggu.

Dua minggu kemudian, tepatnya pada 21 Nopember 2010, Sekitar 150 orang yang tergabung dalam Gerakan Reformis Islam (GARIS) Kota Bandung kembali melakukan aksi Demonstrasi di depan Gereja Rehoboth Jl. Soekarno Hatta, Astana Anyar Bandung. Mereka menolak keberadaan Gereja Rehoboth, karena sebagian warga Kelurahan Karasak Astana Anyar menolak keberadaan Gereja tersebut. Para pengunjung rasa menyalahkan sikap aparat Kecamatan Astana Anyar yang telah membuat rekomendasi persetujuan sepihak sehingga meminta Gereja tersebut ditutup dan dihentikan aktivitasnya. Aksi tersebut sempat bersitegang dengan aparat Kepolisian yang menjaganya, ketika para pengunjung rasa melempari Gereja dengan Aqua gelas. Namun tidak berlangsung lama, ketegangan mereda dan pengunjung rasa membubarkan diri pukul 12.00 WIB.

Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis ke berbagai pihak terkait, diperoleh informasi bahwa aksi protes warga ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan. Misalnya, pada hari Jumat (7 Mei 2010) sekitar 20 warga dari RW 06 Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, mendatangi sebuah rumah makan (rukan) yang sedang direnovasi di Jalan Soekarno Hatta No. 405 Bandung. Bangunan tersebut diduga dijadikan gereja tapi tak berizin.

Menurut informasi yang di lapangan, sebelum direncanakan pindah di rumah makan tersebut, aktivitas kegerejaan sebenarnya sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu di dua rumah di RW 06. Namun, sebagian warga muslim di lingkungan tersebut merasa keberatan dengan adanya aktivitas itu karena tidak memiliki izin peruntukannya. Menurut seorang warga, selama aktivitas itu berlangsung pihak tempat ibadat tidak berusaha memproses izin bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan ibadat. Warga menolak segala aktivitas kegerejaan di lingkungan mereka. Apalagi ini merupakan gereja tanpa izin. Menurut seorang sumber, warga setempat tetap *keukeuh* agar tidak ada lagi kegiatan peribadatan di lokasi tempat

tinggal mereka. Ia mengaku, segala upaya untuk menyelesaikan masalah ini sudah sering dilakukan. Namun tidak ditemukan jalan keluar. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa warga yang menolak memang sering bertemu dengan pihak RW, kelurahan hingga kecamatan untuk membicarakan masalah ini. Tetapi tetap saja belum ada hasilnya. Bahkan, saat meminta untuk duduk bersama dengan pihak gereja, tidak pernah terlaksana.

Para warga yang datang kemudian memasang spanduk yang dipasang di pagar yang tertutup seng di rumah makan itu. Spanduk bernada protes ukuran 4x2 meter itu bertuliskan: '*Mayoritas Muslim Karasak RW 06 Menolak Kegiatan Kegerejaan di Wilayah Kami*'.

Sementara itu, dari pihak pemerintah, khususnya dari pihak Camat Astanaanyar diperoleh keterangan, bahwa soal bangunan rumah makan yang juga dimanfaatkan sebagai gereja itu sedang menunggu proses izin keluar. Dirinya pun mengaku heran dengan protes warga tersebut. Menurut Camat, pemanfaatan tempat ibadah seperti di kantor atau rumah sudah ada dalam aturannya. Dia pun tetap berpegang pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 8 dan 9 Tahun 2006. Lebih jauh, ia mengatakan, bahwa memang aktivitas kegerejaan sebelumnya di dua rumah di RW 06. Namun nanti pindah di rukan yang sedang direnovasi ini. Sementara izin pemanfaatan bangunan untuk tempat ibadah sedang tahap proses. Jadi izinnya belum keluar. Pihak gereja sudah menyampaikannya enam bulan lalu. Warga yang merasa keberatan dan pihak gereja sudah dipertemukan. Saat itu sudah dimusyawarahkan. Dan tidak ada masalah di kedua belah pihak.

Sementara itu, ketika terjadi gesekan akibat adanya pembangunan rumah ibadah di Kelurahan Karasak 2010 itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung bertindak cepat dengan melakukan pertemuan dengan berbagai elemen terkait di kantor Kecamatan Astanaanyar, termasuk pihak-pihak yang bersengketa. Mereka yang menolak pembangunan rumah ibadah meminta agar warga yang memberikan tanda tangan harus dikonfirmasi dan diklarifikasi. Apakah betul-betul murni atau tidak. Menanggapi permintaan itu, FKUB, Kementerian Agama Kota Bandung, dan dari pihak Kecamatan Astanaanyar membentuk sebuah tim untuk mengklarifikasi kepada masyarakat penanda tangan. Ternyata, hasilnya adalah murni itu

tandangan mereka. Jika ada demo-demo kecil, itu sebenarnya lebih kepada kesalahpahaman dan miskomunikasi. Setelah ditangani, semua dapat berjalan dengan baik, tidak ada masalah.

Hal senada dikemukakan oleh Kepala Sub-Bintal Pemerintah Kota Bandung. Apabila terjadi konflik antarumat beragama, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah, selalu dimusyawarahkan dengan masyarakat melalui RT, RW, kelurahan, kementerian agama, FKUB, pimpinan pondok pesantren dan lain-lain. Lebih jauh, ia mengatakan,

“Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di kawasan jalan Karasak Kota Bandung. Sebetulnya, semua prosedur formal sudah dilalui. Dan memang tidak ada masalah. Hanya ada sebagian kecil oknum yang tidak puas. Dan ketika mereka diajak bertemu untuk mendiskusikan persoalan, mereka tidak datang.” (Wawancara, 19 Januari 2011).

Seorang deklarator FLADS yang juga tergabung dalam FKUB Kota Bandung meminta warga tidak melarang pembangunan gereja di Kelurahan Karasak, Kota Bandung. Ketua PCNU Kota Bandung lebih jauh mengatakan,

“Apapun agamanya yang membangun tempat ibadah itu bukan orang jahat. Kenapa harus dihalangi. Saya sangat menyayangkan hal itu. Semua sudah ada aturannya, jadi pemerintah wajib melindungi pengguna tempat ibadah yang membangun di situ. Kepala Daerah diharapkan dapat mensosialisasikan Peraturan 2 Menteri tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pembangunan Rumah Ibadah.” (Wawancara, 29 Januari 2011).

Menurut Ketua PCNU Kota Bandung, aturan Menteri soal pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pembangunan rumah ibadah, salah satunya mewajibkan pemerintah melindungi hak masyarakat untuk beribadah. Pada dasarnya, problem tempat ibadah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan gereja seperti di kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung ini, merupakan problem klasik yang sering memicu ketegangan antarumat beragama. Problem ini sering muncul dalam bentuk konflik menyangkut pendirian rumah ibadah, kemudian terkait perizinan, dan yang tidak kalah banyak adalah konflik dalam bentuk penyerangan atau perusakan rumah ibadah (gereja) oleh

umat agama lain. Dalam konteks pendirian gereja di kelurahan Karasak, para pengunjung rasa yang tidak setuju dengan keberadaan gereja di sana melempari gereja yang mereka protes dengan gelas-gelas yang berisikan air mineral. Hingga saat ini, masalah tersebut tampaknya belum benar-benar selesai. Sebaliknya, hal ini terus menjadi konflik laten yang setiap saat bisa muncul sebagai akibat dari ketidakpahaman terhadap tradisi agama lain.

Aturan ini pun kemudian selalu dijadikan pedoman oleh aparat pemerintah daerah. Hal yang sama juga dilakukan pihak pemerintah Kota Bandung dalam menengahi persoalan antaragama di wilayahnya, seperti ketika mereka menghadapi persoalan penolakan warga terhadap keberadaan gereja di Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanaannya. Persoalannya, setiap produk hukum ataupun peraturan yang dibuat pemerintah niscaya tidak boleh mengabaikan aspek-aspek sosio-kultural yang berkembang pada suatu komunitas tertentu pada masyarakat di mana peraturan itu akan diberlakukan, terlebih lagi menyangkut isu yang sensitif seperti pendirian tempat ibadah. Sosialisasi yang lebih gencar mengenai aturan baru ini semestinya dapat mencegah munculnya beragam interpretasi, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Oleh karena itu, bercermin pada berbagai konflik yang masih muncul, terutama terkait tempat ibadah, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, sudah saatnya pemerintah dan juga masyarakat duduk bersama membicarakan hal ini secara lebih komprehensif. Hal ini menjadi penting untuk menghindari berbagai kesalahpahaman dan misinterpretasi yang bias melahirkan situasi dan keadaan yang tidak diinginkan.

Pada sisi yang lain, rangkaian fakta tentang sulitnya mendirikan rumah ibadah di atas dapat dimaknai bahwa masih ada masalah berkenaan dengan praktik toleransi beragama di Kota Bandung. Tetapi, meskipun tingkat toleransi dan pluralisme muslim di Kota Bandung masih ada masalah, tidak berarti tingkat kekerasan terhadap nonmuslim berada di level yang sama. Tetap harus dibedakan mana yang sikap pribadi dan mana yang sudah berwujud ekspresi publik. Sebagai contoh, ada responden yang bergaul baik dengan nonmuslim atau tinggal berdekatan. Mereka juga tidak ikut serta dalam pengerahan massa menolak keberadaan rumah ibadah nonmuslim. Keberatan mereka tetap berada di wilayah

pribadi dan baru muncul ketika ditanya. Jadi masih butuh tahapan sebelum sikap pribadi itu berubah jadi ekspresi publik. Variabelnya bisa kehadiran pemimpin yang karismatis, organisasi massa, dan lain-lain.

Tingkat intoleransi itu meningkat terutama karena negara memberi angin kepada kelompok-kelompok garis keras. Saat ini semakin sulit mendirikan gereja, sebagaimana diakui oleh seorang informan yang juga adalah seorang pastor di Kota Bandung. Sepanjang tahun ini, di Jawa Barat saja ada 16 gereja yang pendiriannya dipermasalahkan. Salah satunya yang menimpa gereja di kelurahan Karasak Kota Bandung. Kenyataan sulitnya mendirikan gereja ini bahkan melahirkan gejala baru, yakni munculnya oknum makelar izin yang memungut uang pelicin untuk memperlancar pendirian gereja.

Salah satu solusi meningkatkan toleransi antarumat beragama, akan banyak berpulang pada penegakan hukum, karena intoleransi itu erat kaitannya dengan kondisi politik. Karena intoleransi agama itu banyak sangkut-pautnya dengan politik, maka hukum harus ditegakkan. Kalau hukum itu *fair*, keberagaman akan lebih terjamin.

Sementara itu, pada sisi yang lain, pendekatan legalistik-formalistik dalam pendirian rumah ibadah masih mengandung resistensi tinggi di masyarakat. Karena itu, dalam masalah pendirian rumah ibadah diperlukan pendekatan yang lebih persuasif, kompromistik, dan humanistik untuk menjelaskan misi dan tujuan pendirian rumah ibadah secara jujur kepada masyarakat.

B. Intoleransi Terhadap Film tentang Toleransi

Mengiringi dinamika toleransi beragama di Kota Bandung, pada hari Selasa, 10 Mei 2011, sekitar 100 orang dari Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kantor Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani. Mereka meminta Film “?” (baca: Tanda Tanya) karya Hanung Bramantyo ditarik peredarannya dari bioskop-bioskop di Kota Bandung, karena dianggap mengampanyekan pluralisme. Menurut para pengunjung rasa dari FPI, pihaknya menolak secara tegas diputarnya film “?” di bioskop-bioskop yang tersebar di Kota Bandung. Sebab, menurut mereka, film tersebut seolah menyebarkan ajaran pluralisme yang difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Para pengunjung rasa kemudian mengalihkan area aksi mereka ke Bandung Super Mal, Jalan Gatot Subroto, di mana di situ terdapat bioskop yang memutar film “?” yang mereka tolak itu. Dalam aksi tersebut, massa FPI menyatakan tiga sikap, yakni:

1. Film “?” adalah film sesat dan menyesatkan yang haram ditonton oleh umat Islam.
2. Lembaga Sensor Film (LSF) telah melakukan kesalahan fatal dengan meloloskan film yang dinilai mereka menyerang ajaran Islam.
3. Republika yang jadi salah satu sponsor atau pendukung film “?” telah mengkhianati umat Islam.

Dari pengamatan penulis yang melihat langsung aksi unjuk rasa di kawasan Bandung Super Mall, tampak para pengunjung rasa membawa sejumlah poster bernada kecaman yang antara lain berbunyi:

'Film “?” Mengancam NKRI',

'Film “?” Menodai Umat Islam'

'Ganyang Hanung Bramantyo'.

Pada kesempatan itu, para pengunjung rasa juga meminta Pemerintah Kota Bandung menarik peredaran film “?” karena dinilai menyebarkan paham pluralisme dan mengandung unsur penodaan agama. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bandung, Himpunan Industri Pariwisata dan Hiburan Indonesia (Hiphii) Kota Bandung, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lebih dari lima anggota Front Pembela Islam (FPI) Jabar mengadakan rapat membahas film “?” (baca: tanda tanya).

Permintaan para pengunjung rasa tampaknya direspons dengan cepat oleh pihak Pemerintah Kota Bandung. Wakil Walikota Bandung, pun meminta agar film “?” (baca: tanda tanya) ditarik dari bioskop-bioskop di Kota Bandung. Hal itu sesuai permintaan Front Pembela Islam (FPI) yang berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung.

Dalam konteks dinamika toleransi beragama, aksi yang menuntut penarikan film “?” yang berkisah tentang toleransi beragama ini menjadi menarik. Setara Institute, sebuah lembaga yang sangat peduli terhadap isu-isu pluralisme dan toleransi beragama, mengecam sikap Wakil Walikota

Bandung yang meminta para pengusaha bioskop di Kota Bandung untuk menarik film “?”. Wakil Walikota Bandung dinilai telah tunduk pada tekanan kelompok tertentu. Dengan tindakannya itu, menurut ketua Setara Institute, Hendardi, Wakil Walikota Bandung telah tunduk terhadap tekanan sekelompok massa FPI. Seharusnya Wakil Walikota berpedoman pada aturan yang ada, di mana sebuah produksi film yang akan beredar di masyarakat telah melalui proses ketat di Lembaga Sensor Film (LSF).

Menurut penulis, film “?” telah memberi gambaran kondisi sosial di masyarakat dengan realitas yang ada dengan tujuan mendidik untuk menerima segala perbedaan. Tujuan sebuah karya seni sesungguhnya tidak hanya sebatas hiburan namun juga sebagai media pendidikan. Persoalan di masyarakat yang dimunculkan dalam film “?” tidak seharusnya disikapi dengan argumentasi-argumentasi sempit, apalagi dengan aksi penolakan. Film “?” dapat memberikan warna lain, bahwa toleransi beragama masih tersimpan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Bandung.

Dari penelusuran penulis, jauh sebelum FPI di Kota Bandung mendemo film “?” (baca: tanda tanya), MUI telah membentuk tim investigasi untuk mengkaji film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo tersebut. Namun hingga kini belum ada rekomendasi dari tim tersebut ataupun Lembaga Sensor Film. Karena itu, produser film “?” menolak menarik film yang dibintangi Revalina S Temat dan Rio Dewanto itu dari bioskop di Bandung. Film “?” sendiri mulai beredar sejak 7 April 2011 lalu. Memang, pada awal peredarannya, sempat ada respons kontra dari MUI dan Gerakan Pemuda Ansor. Namun setelah dilakukan dialog bersama Hanung Bramantyo sebagai sutradara film, mereka tidak merekomendasikan untuk menarik bahkan melarang film tersebut.

Menurut pengamatan penulis, dengan menyaksikan sendiri film tersebut, film ini memang menceritakan tentang toleransi dan dinamika kehidupan beragama. Film ini tampaknya diinspirasi oleh banyak kisah nyata tentang pasang surut kehidupan beragama.

Film ini mengajak penontonnya untuk lebih taat kepada agama dan keyakinan masing-masing. Film ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya agama merupakan refleksi dari proses sosial yang sangat mendasar yang dibahasakan dalam gambar oleh perpindahan agama tokoh Rika dan Hendra. Film ini juga tampaknya bermaksud mengajak masyarakat yang

plural ini untuk masuk ke dalam sebuah 'wilayah' bernama 'toleransi'. Bahwa film ini kemudian memancing kritikan pedas atau pro-kontra, termasuk unjuk rasa dari FPI, tampaknya itu merupakan akibat dari perbedaan penafsiran dan pemahaman bahasa gambar yang ingin disampaikan oleh sutradara. Menurut penulis, secara normatif film “?” menegaskan fitrah manusia yang cenderung membutuhkan agama.

Dalam banyak bagian, film ini ingin memberikan perspektif baru tentang apa itu toleransi antarumat beragama. Tidak usah jauh-jauh dengan tetangga yang berbeda agama, dengan kerabat atau teman dekat saja. Kedekatan emosi itu kadang membuat toleransi jadi jauh lebih sulit. Namun sesulit apa pun pasti bisa karena secara naluriah sikap toleransi itu ada pada setiap manusia. Ketidaktoleranan yang nyata hadir seringkali lebih karena masalah lain, bukan semata agama. Masalah lain inilah yang harus dihilangkan dan dipecahkan. Contohnya, antara Soleh-Hendra, antara Islam-Kong Hu Chu, yang ternyata lebih karena cemburu. Atau saat Soleh dan kawan-kawan menyerang restoran Tan Kat Sun yang lebih bermotif ekonomi daripada konflik agama.

Secara keseluruhan, film ini menampilkan dinamika toleransi dan keragaman kehidupan beragama sebagai sesuatu yang benar-benar nyata dan hidup di tengah masyarakat. Tema film ini dapat disebut sensitif, karena jarang yang berani mengangkat jamak ditemui dalam kehidupan masyarakat luas. Dalam beberapa bagian, film ini memperlihatkan adegan yang relatif sensitif, seperti konversi agama, atau sejumlah adegan lain yang dapat dipandang sebagai menebar 'virus' pluralisme beragama. Hal ini pula tampaknya yang menyebabkan FPI berunjuk rasa dan meminta Pemerintah Kota Bandung menghentikan peredaran film ini karena dianggap mengampanyekan pluralisme.

Munculnya aksi penolakan atas beredarnya film “?” yang mengisahkan tentang pluralisme dan toleransi beragama, setidaknya-tidaknya dapat dilihat dalam beberapa perspektif. *Pertama*, sebagian kelompok keislaman tertentu di Kota Bandung merasa terancam dengan paham pluralisme yang mereka baca sebagai penegasian kebenaran agama Islam. Dengan demikian, secara tidak langsung, aksi penolakan mereka sesungguhnya berarti juga merupakan bentuk penolakan terhadap agenda

pluralisme bermartabat yang sedang dijalankan oleh pihak pemerintah Kota Bandung.

Kedua, munculnya aksi ini tampaknya juga didasari oleh munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pluralisme. Dalam fatwa MUI tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama bernomor 7/Munas VII/MUI/11/2005 ada penjelasan tentang perspektif MUI tentang pluralisme agama sebagai berikut:

“Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua agama akan masuk dan berdampingan di surga.”

Ketiga, aksi ini menunjukkan adanya semacam gejala “salah baca” (*misreading*) dan salah pengertian (*misunderstanding*) terhadap konsep dan paham pluralisme, yang didefinisikan sebagai sikap atau cara pandang untuk merespons fakta pluralitas (*diversity*). Sampai hari ini, kenyataannya pluralisme masih menjadi wacana yang relatif kontroversial bagi kebanyakan kalangan agamawan. Bahkan menurut Budhy Munawar-Rahman (2010), pluralisme sudah merupakan salah satu masalah yang telah menyulut perdebatan abadi sepanjang masa. Agama tidak memiliki otoritas untuk mengadili kenyataan pluralisme. Agama dan pluralisme bukan merupakan dua realitas yang mesti didudukkan secara *vis a vis*. Sehingga, bagi setiap agama kenyataan pluralisme adalah sebuah berkah Tuhan. Pada gilirannya, pluralisme akan bernilai kontributif bagi dinamika kehidupan dan keselamatan umat manusia, segenap pemeluk agama di dunia dan di akhirat.

C. Intoleransi dalam Bentuk Intimidasi

Praktik intoleransi terhadap kalangan minoritas umat beragama di Kota Bandung, salah satunya terjadi dalam masalah pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Perlakuan intoleran ini menimpa kalangan agama Kong Hu Chu dan Ahmadiyah. Seorang jemaah Ahmadiyah Kota Bandung, melalui salah seorang pengurusnya, pada 11 Juni 2010 lalu, mempertanyakan pelarangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KPT)

terhadap jemaahnya oleh kelompok organisasi masyarakat (ormas) Islam. Menurut pengurus Ahmadiyah Kota Bandung, selama pemerintah tidak melarang, mengapa pembuatan KTP jemaah Ahmadiyah harus dipersoalkan. Pihak Ahmadiyah mempertanyakan larangan itu, karena keputusan itu datang sepihak dan tidak ada pernyataan dari pemerintah.

Pengurus Ahmadiyah ini mempertanyakan hal itu berkenaan dengan pernyataan 48 ormas Islam Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Umat Muslim Indonesia (Alumi) Jabar di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persis Jabar. Mereka meminta pemerintah melarang jemaah Ahmadiyah membuat KTP sebelum kembali ke Islam. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada jemaah Ahmadiyah agar tidak resah dan tetap datang ke instansi terkait jika ingin membuat KTP. Itu juga dilakukan untuk membuktikan apakah aparat pemerintah daerah mempersulit pembuatan KTP atau tidak.

Perlakuan intoleransi yang berkaitan dengan masalah pengurusan KTP ini juga menimpa sejumlah pemeluk agama Kong Hu Chu. Majelis Agama Kong Hu Chu Indonesia (Makin) Kota Bandung meminta agar pemerintah kabupaten/kota mencantumkan agama Kong Hu Chu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sampai saat ini pemerintah kabupaten/kota memasukkan penganut Kong Hu Chu dalam agama lain seperti Budha. Seorang pengurus Makin Jawa Barat mengatakan,

“Kalau ditanya berapa jumlah umat Kong Hu Cu di Jawa Barat, maka kami tak bisa menjawabnya secara pasti. Kami kesulitan mendata karena agama Kong Hu Cu belum ditulis dalam KTP. Sebagai “bungsu” yang baru diakui pemerintah sejak era Presiden Gus Dur pada tahun 2002 lalu, para pemeluk Kong Hu Cu belum mendapatkan hak-hak semestinya. Baru Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar yang mencantumkan agama Kong Hu Cu dalam KTP-nya.” (Wawancara, 29 Januari 2011).

Ironisnya Pemerintah Kota sampai kini memasukkan pemeluk Kong Hu Cu sebagai agama Buddha. Lebih jauh, pengurus Makin Jawa Barat ini mengatakan,

“Tanpa memiliki bukti sah semisal KTP dengan identitas agama Kong Hu Cu membuat Makin Jabar terhambat apabila mengajukan

izin pendirian rumah ibadah. Peraturan Bersama Mendagri dan Menag mensyaratkan pendirian rumah ibadah harus mencantumkan KTP penggunanya minimal 90 orang. Akibat kebijakan Orde Baru yang tidak membolehkan agama Kong Hu Cu sehingga rumah-rumah ibadahnya diambil alih agama lain. Ada sekitar 12 wihara milik Kong Hu Cu yang kini sudah diambil alih agama lain. Kami tak ingin memperbesar masalah, namun meminta agar wihara-wihara yang sudah diambil alih masih bisa dimanfaatkan oleh kami.” (Wawancara, 29 Januari 2011).

Tanpa adanya KTP dengan pencantuman agama Kong Hu Chu, membuat keinginan Makin Jawa Barat membuat rumah ibadah baru belum dapat direalisasikan.

Tindakan intoleransi lain yang terjadi adalah saat LSM Setara yang dipimpin Hendardi hendak mengadakan pertemuan dengan korban aksi intoleransi beragama di hotel Amoroso Bandung, Kamis, 6 Januari 2011. Polisi beralasan acara pertemuan itu tidak memiliki izin. Seorang aktivis Setara Institute mengatakan, bahwa acara pertemuan yang diselenggarakannya tidak melanggar hukum. Menurutnya,

“Polisi beralasan kami melanggar hukum. Menurut kami tidak ada satu pun hukum yang dilanggar, karena kami bukan demonstrasi. Kalau demonstrasi kita terikat dengan Undang-undang. Saya menduga, tindakan polisi membubarkan acara karena adanya tekanan dari pihak lain.” (Wawancara, 21 Februari 2011).

Sebelumnya FPI mengancam akan membubarkan acara yang digelar Setara apabila polisi tidak menghentikan acara itu. Pihak Setara Institute mengaku sempat menelepon Kapolda Jawa Barat dan mendapat jaminan acara tetap bisa terselenggara. Setara Institute mengatakan, ormas yang mengatasnamakan agama di Bandung melarang acara pertemuan dengan korban intoleransi beragama. Acara yang digelar Setara Institute menghadirkan perwakilan dari kelompok Ahmadiyah serta jemaat gereja HKBP. Acara Setara Institute yang seharusnya selesai jam 5 sore dipercepat menjadi jam 3 sore atas permintaan dari polisi. Namun, Kepolisian Bandung membantah telah melarang acara yang dilakukan Setara Institute tersebut.

D. Intoleransi sebagai Penghambat Toleransi

Dari temuan di lapangan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penghambat terwujudnya toleransi beragama di tengah-tengah masyarakat. Beragam faktor ini pada gilirannya akan berubah menjadi sikap dan tindakan intoleransi yang justru hendak dicegah agar toleransi dapat terwujud. Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat toleransi beragama terdiri atas dua hambatan, yaitu (1) hambatan internal, dan (2) hambatan eksternal. Hambatan internal berupa: fanatisme agama yang berlebihan, etnosentrisme dan prasangka sosial, sedangkan hambatan eksternal yaitu, munculnya isu penyebaran agama dan adanya provokator dari luar.

Salah satu faktor penghambat yang paling menonjol bagi terwujudnya toleransi beragama adalah adanya prasangka keagamaan, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya demonstrasi menentang pemutaran film “?” di Kota Bandung. Secara ideologis, agama merupakan salah satu cara yang paling kuat untuk meneguhkan identitas, membentuk kutub-kutub pengelompokan, “kami” dan “mereka.” Dikotomi ini mengimplikasikan adanya jarak yang cukup jauh. Ritual keagamaan, sebagai salah satu unsur dari agama, juga semakin memperkuat identitas dan kesatuan kelompok tersebut, sekaligus secara bersamaan mempertahankan batas-batas kelompok keagamaan tertentu. Kelompok keagamaan, menurut Mary Douglas, tidak hanya melindungi dari batas-batas eksternalnya, tetapi juga cenderung memperkuat batas-batas internalnya (McGuire, 1981: 162).

Dikotomi “kami” dan “mereka” sesungguhnya adalah kerangka berpikir kognitif sekaligus struktural yang pada gilirannya melahirkan cara pandang yang sangat partikularistik, fanatis, stereotip, hitam putih. McGuire (1981: 162) mengistilahkan dengan *our way is totally right, theirs is totally wrong*. Cara pandang demikian akan menggiring kepada pemahaman bahwa agamanyalah yang paling sah (Glock dan Stark, 1966: 20).

Pandangan partikularistik seperti ini bisa ditemukan dalam berbagai bentuk. Secara sosiologis, karena berada dalam sebuah komunitas yang mempunyai kesamaan ciri dan karakter yang menjadi identitas yang harus dipegang teguh. Sedangkan secara keagamaan dibentuk oleh berbagai

dogma kebenaran yang secara inheren melekat kuat (*truth claim*) dalam setiap agama bahwa agama yang dimiliki adalah agama yang paling absah di hadapan Tuhan. Sementara pemeluk agama lain adalah berada pada jalan yang salah.

Hal inilah yang menjadikan seseorang menjadi mudah sekali mempunyai prasangka negatif atau curiga (*prejudice*). Ketika kecurigaan ini telah menguasai *mindset* seseorang, maka kekhawatiran-kekhawatiran terhadap berbagai perilaku kelompok lain yang akan dapat mengakibatkan memudarnya identitas kelompoknya yang selama ini telah terbangun dengan sangat solid akan sangat mudah mengemuka.

Untuk membangun toleransi beragama, prasangka negatif tidak seharusnya dikedepankan, melainkan kesiapan menerima perbedaan yang seharusnya ditonjolkan. Jika prasangka negatif atau kecurigaan yang dikedepankan maka mudah sekali memunculkan adanya reaksi spontan karena merasa keberadaan agamanya terancam. Setiap aktivitas yang dilakukan kelompok agama lain dianggap sebagai sebuah gerakan pengagamaan yang mengancam eksistensinya, sehingga perlu direaksi dengan keras.

Alhasil, hambatan internal berupa fanatisme beragama, etnosentrisme dan prasangka sosial dan intimidasi merupakan sikap negatif yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok umat beragama tertentu yang diarahkan kepada individu atau kelompok agama lain. Sikap ini sebagai cerminan ketidaksukaan seseorang kepada orang lain, karena perbedaan sistem dogma, sistem nilai dan perbedaan kepentingan. Apabila sikap negatif tersebut, diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan muncul tindakan yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Kemudian tindakan tersebut, akan direspons balik menjadi tindakan lain yang lebih tidak menyenangkan.

Tahun 2010 tercatat sebagai tahun yang sarat dengan praktik intoleransi beragama dan berkeyakinan, baik di level nasional maupun lokal. Salah satu kasus intoleransi yang menyita perhatian publik beberapa tahun terakhir ini, di antaranya, berulangnya kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah di berbagai tempat, tragedi yang menimpa warga Gereja HKBP di Ciketing, Bekasi. Di penghujung tahun 2010, praktik intoleransi juga terjadi terhadap warga HKBP Bethania, Rancaekek, Bandung.

Sementara di Kota Bandung sendiri, terdapat sejumlah praktik intoleransi di berbagai tempat. Seperti unjuk rasa terhadap pembangunan rumah ibadah (gereja) di kelurahan Karasak Kota Bandung, intimidasi terhadap kelompok yang mengusung tema-tema toleransi dan pluralisme agama seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Iqro di Kampung Lio Cipamokolan, Bandung, serta kecurigaan terhadap film “?” yang dianggap mengampanyakan pluralisme agama. Masalahnya kemudian apa makna di balik masih terjadinya praktik intoleransi sepanjang tahun 2010. Mengapa praktik intoleransi beragama dan berkeyakinan masih terjadi padahal konstitusi justru menjamin toleransi atau kemerdekaan beragama.

Dari hasil penelitian Setara Institute (2010) tentang perilaku kerukunan beragama, diketahui telah terjadi peningkatan tindakan pelanggaran kebebasan beragama selama 2007 hingga 2009. Pada 2007, Setara Institute mencatat terjadi 185 jenis tindakan dalam 135 peristiwa. Setahun berikutnya, terjadi peningkatan signifikan yaitu 367 tindakan pada 265 peristiwa. Sementara pada 2009 tercatat 291 tindakan pada 200 peristiwa. Pelanggaran dan ketegangan sosial yang diakibatkannya itu, sebagian besar terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Jakarta.

Namun demikian, pandangan intoleran yang ditunjukkan itu belum mengarah ke tahap fundamentalis, karena warga Jabodetabek masih tidak setuju dengan cara kekerasan untuk memperjuangkan agama. Meskipun cenderung intoleran, survei ini menunjukkan bahwa warga Jabodetabek tidak radikal atau fundamentalis, apalagi mendukung tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Terdapat indikasi bahwa hubungan antarumat beragama terutama hubungan Islam dan Kristen mengalami penurunan, karena toleransi tidak lagi menjadi pandangan hidup (*way of life*) umat beragama. Penurunan toleransi terkait dengan perubahan budaya masyarakat dari model gotong royong ke model kompetisi. Dari kota sampai ke desa, semua orang terindividualisasi, terkotak dalam mayoritas-minoritas.

Sekarang, orang atau kelompok hidup dalam prasangka, curiga terhadap orang lain atau kelompok lain. Dulu, toleransi umat beragama menjadi *way of life*, sekarang tidak. Namun, dilihat dari segi jalinan komunikasi antartokoh umat beragama, kondisinya jauh lebih baik sekarang. Tokoh Kristen bisa berkomunikasi dan saling mengunjungi

dengan tokoh NU, Muhammadiyah. Mereka secara bersama-sama bisa pergi ke pesantren, ke sekolah Muhammadiyah, dan sebaliknya tokoh Islam bisa berkunjung ke lembaga Kristen. Akan tetapi, suasana kompetisi mengubah tabiat pemeluk agama, masuk pada perangkap prasangka dan curiga dengan pemeluk agama lain. Umat beragama juga tidak tulus dalam membangun komunikasi antarumat beragama. Salah satu *crisis center* mengeluarkan hasil penelitian, yang mengungkapkan agresivitas kelompok Islam dan Kristen tertentu meningkat. Orang Islam takut setengah mati dengan Kristenisasi, orang Kristen takut dengan Islamisasi. Sikap saling curiga sesungguhnya tidak perlu separah itu, kalau sesama pemeluk agama membangun komunikasi yang tulus.

Tampaknya, penurunan toleransi beragama terkait model pendidikan agama. Agama Islam dan Kristen sebenarnya mengenal pluralitas dalam bermuamalah. Fitrah demikian, kurang ditanamkan baik oleh Islam maupun Kristen. Masalah politik menjadi krusial yang memicu ketegangan antarumat beragama.

Pada saat kerukunan mulai terusik, para tokoh beragama sering merujuk kepada kerukunan yang tercipta di masa lalu. Sebab, kerukunan memang tak mudah tercipta, tanpa toleransi di antara para pemeluk agama itu. Pada kenyataannya, kultur setiap daerah, khususnya Kota Bandung, cenderung menjunjung tinggi toleransi di antara para pemeluk agama. Bahkan, satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain saling membantu secara gotong royong.



BAGIAN 8

DINAMIKA AKOMODASI

A. Forum Kerukunan Umat Beragama

Akomodasi adalah salah satu strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan toleransi beragama. Dalam salah satu bentuknya, akomodasi dilakukan dalam bentuk deklarasi. Deklarasi, sebagai sebuah media sosial tempat berkumpulnya berbagai tokoh lintas agama, di satu sisi, telah menjadi alat untuk menyikapi sekaligus mengantisipasi berbagai hal yang dianggap dapat mengancam keselamatan kehidupan beragama. Sementara, di sisi lain, deklarasi juga telah menjadi strategi akomodasi terhadap berbagai kepentingan yang disuarakan oleh berbagai kelompok keagamaan.

Perbedaan keyakinan dan kepentingan adalah kenyataan yang tidak dapat ditawar. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi umat yang berbeda agama dan kepentingan untuk hidup secara bersama-sama. Dalam konteks itulah pemilihan strategi yang tepat dalam mengelola kontestasi yang terjadi di kalangan antarumat beragama menjadi sesuatu yang penting. Berikut adalah beberapa langkah dalam mewujudkan toleransi beragama ada di Kota Bandung.

Upaya mewujudkan toleransi beragama di Kota Bandung berlangsung dalam situasi yang tidak selalu sama, melainkan dalam suasana yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Keberagaman yang ada

di masyarakat Kota Bandung bukan penghalang untuk terciptanya toleransi beragama. Justru, keberagaman itu adalah kekayaan dan keindahan yang harus diakomodasi. Dalam hal ini, keberadaan FKUB punya posisi penting untuk menjadi salah satu pilar dalam menumbuhkan toleransi dan merekatkan kerukunan hidup umat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah untuk membangun kerukunan dan kebersamaan di antara umat beragama di tiap-tiap daerah termasuk di Kota Bandung.

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dikenal sebagai kota yang sangat plural, baik dari sisi etnik maupun keyakinan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah media yang dapat menjembatani sekaligus mengakomodasi berbagai perbedaan dan keragaman itu. Sehingga, keragaman yang ada dapat menjadi modal sosial yang kuat bagi terjadinya kohesivitas sosial di antara masyarakat Kota Bandung, dan bukan sebaliknya malah menjadi faktor yang rentan dan rawan bagi terjadinya disintegrasi sosial. Dalam konteks inilah, keberadaan FKUB di Kota Bandung menjadi sangat penting.

Secara normatif, fungsi dan tugas pokok dari FKUB adalah: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di Kota Bandung, menampung aspirasi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan aspirasi masyarakat Kota Bandung, menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan aspirasi masyarakat di Kota Bandung dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Bandung, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Tugas pokok tersebut merupakan tanggungjawab FKUB untuk merealisasikannya dalam konteks kehidupan beragama di Kota Bandung. Sejumlah agenda yang disusun FKUB Kota Bandung, dalam konteks pembinaan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama, meliputi: pertemuan rutin sebulan sekali antarpemuka agama di Pendopo Kota Bandung sebagai sekretariat FKUB, melakukan pertemuan pada momen-momen mendesak, melakukan dialog keagamaan melalui seminar, mengunjungi upacara-upacara keagamaan, mengadakan kegiatan sosial

bersama, melakukan sosialisasi perundang-undangan, serta merekomendasikan pendirian rumah ibadah.

Melalui berbagai agenda tadi, FKUB terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Bandung. Hal pertama yang dilakukan adalah menciptakan suasana komunikasi sosial yang rileks dan cair di antara para tokoh lintas agama. Asumsinya sederhana, apabila komunikasi di tingkat tokoh agamanya baik, maka komunikasi di level akar rumput pun akan baik dengan sendirinya. Begitu juga sebaliknya. Ketua FKUB Kota Bandung mengatakan,

“Sejauh ini, komunikasi yang terjalin di antara tokoh lintas agama terjalin dengan sangat baik, bahkan sangat baik. Para tokoh agama di Bandung bisa saling mengunjungi. Saya berkali-kali datang ke tempat Uskup Bandung, yang bahkan para Pastor pun tidak sesering saya. Dengan pendeta Dr. Jopi Rattu, kami juga menjalin komunikasi dengan baik. Kami berkomunikasi untuk mendiskusikan berbagai hal. Bagaimanapun, dinamika kehidupan beragama di Kota Bandung tidak selamanya berjalan mulus. Di situlah FKUB memandang pentingnya menjalin komunikasi di antara para tokoh agama di Kota Bandung. Dengan adanya deteksi dini ini, potensi persoalan sekecil apa pun bisa diatasi secepatnya. Begitu juga dengan tokoh dan umat agama lain seperti Budha, Hindu dan Kong Hu Chu, kami juga menjalin komunikasi dengan baik. “ (Wawancara, 21 Februari 2011).

Ketika terjadi persoalan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, seperti yang terjadi di Kelurahan Karasak, kecamatan Astanaanyar, FKUB bersama-sama dengan semua elemen terkait berdiskusi dan memusyawarahkan jalan keluar atas persoalan yang ada. Ketika ada peringatan Kong Zi (Muludan), para tokoh agama lintas agama yang tergabung dalam FKUB datang berkunjung. Begitu juga dalam peringatan-peringatan hari besar agama lainnya. Termasuk dalam perayaan Natal pada 25 Desember 2010 lalu. Bersama jajaran pemerintah daerah, baik Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, FKUB datang mengunjungi para jamaah gereja Katedral yang sedang mengadakan kebaktian.

Saat umat Kristiani dan Katolik merayakan Natal, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wakil Walikota Bandung, melakukan silaturahmi ke Gereja Katedral Santo Petrus di Jalan Jawa Kota Bandung, 25 Desember 2010. Uskup Bandung mengatakan bahwa perayaan Natal menjadi perayaan bersama dan menegaskan kerukunan antarumat beragama di Kota Bandung.

Pada kesempatan itu, Wakil Walikota Bandung menegaskan, sebagai Kota agamais, Bandung bukan hanya milik satu golongan saja, melainkan juga untuk semua golongan. Ini untuk semua kelompok, miniatur Indonesia, dan saya berharap toleransi yang luar biasa ini bisa terus terjaga demi terciptanya suasana yang kondusif. Sementara itu, Ketua Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung, mengatakan bahwa meski Bandung 89 persen warganya adalah muslim, namun kerukunannya tak perlu diragukan lagi. Sebagai penghargaan, FKUB memberikan sebetuk plakat dalam bentuk sebuah ensiklopedia kepada Uskup Bandung. Tak hanya itu, secara bersama-sama Para pemimpin agama dan pemerintahan tersebut menyanyikan lagu 'Garuda di Dadaku' dan 'Bagimu Negeri'.

Saat ini, FKUB sedang memikirkan dan merumuskan bagaimana menjalin komunikasi dan relasi yang harmonis tidak hanya di kalangan pimpinan agama, tetapi juga sampai pada umat di tingkat akar rumput. Dalam hal ini, secara perlahan-lahan, FKUB terus mengadakan komunikasi dan sosialisasi kepada pimpinan-pimpinan ormas, tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang pihak FKUB sedang menjalankan sosialisasi dengan guru-guru agama, guru-guru BP, bagaimana pentingnya hidup rukun antarumat beragama. Bagaimanapun kehidupan ini tidak dibangun oleh hanya satu golongan saja, melainkan oleh seluruh golongan dan agama. Dan di situlah pentingnya menjalin relasi dan komunikasi antarumat beragama.

Berkenaan dengan sosialisasi regulasi yang mengatur kehidupan umat beragama kepada masyarakat luas, bersama kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, FKUB mengundang para guru agama dan guru BP di setiap sekolah. Dalam acara sosialisasi itu, ada tiga pihak yang menyampaikan materi, yaitu dari FKUB sendiri, Kantor Kementerian

Agama Kota Bandung, serta dari kepolisian. Biasanya dari kepolisian menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan cara mendeteksi persoalan yang mungkin muncul di lingkungan masyarakat. Pihak FKUB juga bekerja sama dengan sangat dengan kalangan pers. Karena, bagi FKUB, pers memegang peran yang sangat besar dan vital. Itulah kenapa FKUB merasa sangat perlu untuk menjalin komunikasi dengan pihak pers.

Kegiatan sosialisasi ini, biasanya dilakukan pada setiap bulan Desember. Para guru agama dan BP dikumpulkan untuk diberi pengarahan tentang hidup toleran dan rukun. Tahun 2010 lalu, sosialisasi dilangsungkan di gedung KORPRI, jalan Turangga Bandung. Selain itu, pihak FKUB juga menggandeng Kantor BPLH untuk memberi pencerahan kepada umat beragama tentang pentingnya menjaga lingkungan. Khususnya, pada para dai dan perwakilan MUI se Kota Bandung. Selain melalui kegiatan-kegiatan formal yang telah terjadwal, FKUB juga berkeliling untuk mendatangi sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya hidup rukun dan toleran di tengah begitu banyaknya perbedaan. Lebih jauh, Ketua FKUB mengatakan,

“FKUB berusaha terus untuk menciptakan toleransi dengan cara mengadakan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Juga tokoh-tokoh karang taruna. Sehingga berbagai elemen masyarakat dapat disatukan. Kami mengadakan sosialisasi ke sebanyak mungkin elemen masyarakat. Sampai saat ini, FKUB sudah mendistribusikan lebih dari 7000 eksemplar buku tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006. Diharapkan, semakin banyak elemen masyarakat yang memahami aturan main dalam kehidupan beragama, semakin baik pula kualitas kehidupan keagamaan yang tercipta. FKUB sedang mengusahakan agar sosialisasikan sampai ke tingkat RW. Tentu saja, ini memerlukan waktu.” (Wawancara, 21 Februari 2011).

Keberadaan FKUB ini juga sangat dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Kota Bandung. Kabag Kesra Kota Bandung mengakui peran dan keberadaan FKUB Kota Bandung dengan mengatakan,

“Beruntung Kota Bandung memiliki FKUB yang dapat menjadi media berkumpulnya para tokoh lintas agama untuk mendiskusikan berbagai hal. Misalnya, pembangunan gereja. Segala sesuatunya

dibicarakan, dan dikembalikan kepada aturan main yang ada. Dan tidak ada masalah. Mereka semua mengerti. Dan yang sangat patut diapresiasi adalah adanya kesadaran dan kebersamaan dari semua tokoh lintas agama untuk secara bersama-sama mengawal dan menjaga Bandung menjadi kota yang damai, rukun, toleran dan menjadi rumah bagi semua kalangan.” (Wawancara, 22 Februari 2011).

Dalam hal sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006, FKUB mengambil porsi peran yang sangat besar dengan menginisiasi berbagai forum dan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, seperti rapat-rapat dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), rapat kalangan camat dan lurah, OKP (Organisasi Kepemudaan), Ormas Islam, Parpol, Guru BP/ Guru Agama, MUI Kota, MUI Kecamatan, dan KUA, di mana ketua FKUB Kota Bandung diberi kesempatan untuk secara langsung menyampaikan sosialisasi ini.

Untuk mempererat jalinan komunikasi di antara para pengurus, satu bulan sekali, FKUB mengadakan pertemuan rutin di Pendopo Kota Bandung yang sekaligus menjadi kantor sekretariat FKUB. Pertemuan biasanya dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, atau Sabtu. Hari Senin dan Kamis dihindari karena banyak tokoh agama yang melakukan ibadah puasa. Hari Minggu juga dihindari, karena pada hari itu banyak tokoh yang memimpin peribadatan umatnya masing-masing. Dalam pertemuan semacam itu, mereka mendiskusikan berbagai hal yang berkenaan dengan bagaimana membangun kehidupan keagamaan yang baik di Kota Bandung. Hasil dari diskusi semacam itu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk rekomendasi.

Ketika terjadi gesekan akibat adanya pembangunan rumah ibadah di Kelurahan Karasak, tahun 2010 lalu, FKUB bertindak cepat dengan melakukan pertemuan dengan berbagai elemen terkait di kantor Kecamatan Astanaanyar, termasuk dengan pihak-pihak yang bersengketa. Mereka yang menolak pembangunan rumah ibadah meminta agar warga yang memberikan tanda tangan harus dikonfirmasi dan diklarifikasi. Apakah betul-betul murni atau tidak. Menanggapi permintaan itu, FKUB, Kementerian Agama Kota Bandung, dan dari pihak Kecamatan Astanaanyar membentuk sebuah tim untuk mengklarifikasi kepada

memasyarakat penanda tangan. Ternyata, hasilnya adalah murni itu tandangan mereka. Jika ada demo-demo kecil, itu sebenarnya lebih kepada kesalahpahaman dan miskomunikasi. Setelah ditangani, semua dapat berjalan dengan baik, tidak ada masalah.

Dalam hal kompetisi dan persaingan antaragama, di Kota Bandung hal itu tidak banyak terdengar. Yang sering muncul ke permukaan malah yang terjadi di kabupaten Bandung. Di Kota Bandung sendiri, keadaan relatif baik. Hal itu terjadi karena Kota Bandung sudah punya alat deteksi dini, hal mana setiap lingkungan masyarakat sudah mengetahui bagaimana caranya mendeteksi berbagai potensi persoalan yang mungkin saja bisa muncul ke permukaan. Polsek, Babinsa, kepala KUA dan MUI kecamatan menjadi pihak pertama yang mendeteksi adanya persoalan di suatu kawasan.

Dalam konteks Kota Bandung, sinyalemen bahwa saat ini tengah terjadi pergeseran orientasi hidup beragama dari toleransi ke kompetisi, tidak terbukti. Bahkan, merujuk pada pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat pada saat kunjungan malam Natal ke Gereja Katedral, kehidupan keagamaan di Kota Bandung bisa dikatakan sebagai yang paling baik dan paling kondusif di Jawa Barat.

Sementara itu, dalam hal kerja sama antarumat beragama, sejauh ini masih lebih banyak terjadi di kalangan pimpinan. Dan belum sepenuhnya dilakukan oleh umat di akar rumput. Berbagai dialog lintas agama sering dilakukan, termasuk yang dimotori oleh para tokoh lintas agama dari kalangan Protestan. Meskipun tidak ada masalah krusial yang harus didialogkan, FKUB tetap mengadakan dialog untuk lebih saling mendekatkan. Bahkan, FKUB pernah mengadakan dialog di Aula Katedral, dengan pembicara dari FKUB, kemudian tokoh politik Tjetje Padmadilaga, serta seorang lagi mantan tokoh DI-TII. Topiknya bagaimana membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang lebih mengedepankan kerukunan dan toleransi.

Dalam kaitannya dengan relasi di antara tokoh agama dengan pihak Pemerintah Kota Bandung, sejauh ini berlangsung baik dan relatif nirkonflik. Antara para tokoh lintas agama dan pimpinan Pemerintah Kota telah terjalin kesepahaman yang baik, sehingga tidak ada program pemerintah yang mandek, karena mendapat dukungan penuh dari para

tokoh agama. Setiap ada pertemuan di kalangan tokoh agama dan pemerintah: yang diutamakan adalah untuk saling tersenyum, ya senyum muka, ya senyum hati. Sehingga semuanya terasa enak kalau tersenyum.

Sejauh ini, pertemuan yang terjalin adalah pihak pemerintah bertindak sebagai yang mengundang. Biasanya dalam momentum-momentum khusus, seperti peringatan hari-hari bersejarah atau pada saat Pemerintah Kota Bandung akan meluncurkan sebuah program pembangunan. Di situlah para tokoh lintas agama dikumpulkan dan diminta masukannya untuk program yang akan diluncurkan itu. Termasuk ketika ada program penghijauan, para tokoh agama menyumbang pohon untuk ditanam. Terlebih dengan adanya Program Bandung Agamais, pemerintah merasa dirangkul, para tokoh umat lintas agama juga merasa dirangkul. Semua pihak bisa saling mengapresiasi dan memberi kontribusi. Program Bandung Kota Agamais telah memberikan warna yang sangat jelas dalam menciptakan kehidupan beragama yang rukun dan toleran di Kota Bandung. Sebelum ada program Bandung Agamais, sering terdengar ada yang suka ‘membagikan sesuatu dengan tujuan tertentu’. Sekarang, hal itu sudah tidak pernah terdengar lagi.

Sebagaimana diketahui, umat beragama di Indonesia, pada tanggal 21 Maret 2006 mendapatkan regulasi baru tentang kehidupan beragama. Regulasi baru itu bernama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006 dan No 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Banyak yang berharap ini adalah regulasi bagi keteraturan beragama, tapi tak sedikit yang memandang sinis dan khawatir, kado itu adalah bom waktu masa depan. Ancaman toleransi semu pun membayang.

Setidaknya ada dua hal besar yang termaktub dalam regulasi tersebut. *Pertama*, dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat kabupaten/kota. Forum ini mempunyai tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas sebagai bahan kebijakan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan

pemberdayaan masyarakat (pasal 9 ayat 1). Dan untuk FKUB kabupaten/kota ditambah dengan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat (pasal 9 ayat 2). Keanggotaan FKUB didasarkan pada perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota (pasal 10 ayat 3).

Ujung dari dibentuknya FKUB tersebut adalah terciptanya keteraturan dan keharmonisan keberagamaan. Sayangnya, FKUB ini mengidap problem akut yang potensial menjadi kontraproduktif dari tujuan semula. Menilik rekam jejak tokoh-tokoh agama yang masih dibalut dengan fanatisme keberagamaan yang cukup ekstrem, sangat potensial terjadi subordinasi dan marginalisasi kaum minoritas secara konstitusional. Sehingga yang terbentuk bukan 'kerukunan' dan 'ketenteraman' melainkan, 'dipaksa rukun' dan 'terpaksa tenteram'. Sebuah realitas keberagamaan yang tentu jauh dari aroma kebersamaan dan keharmonisan sejati.

Kedua, regulasi mendirikan tempat ibadah. Ketentuan dalam hal ini disebutkan bahwa untuk mendirikan tempat ibadah harus memenuhi persyaratan adanya daftar nama paling sedikit 90 orang dan didukung 60 orang masyarakat setempat, dan rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama dan FKUB kabupaten dan kota. Bisa dibayangkan, betapa sulitnya bagi kaum minoritas untuk mendirikan tempat ibadah dengan regulasi ini. Sehingga dapat ditebak, ancaman kembalinya tindak anarki massa bukanlah isu kosong.

Melihat realitas tersebut, ada beberapa hal yang bisa dijadikan alternatif solusi. *Pertama*, memahami ulang tanggung jawab negara. Tugas negara dalam konteks kehidupan beragama adalah menjamin kebebasan beragama warganya. Artinya, semangat yang melandasi dan harus muncul dari Peraturan Bersama ini adalah semangat perlindungan kebebasan beragama. Ekspresi keberagamaan pun dijamin sepenuhnya oleh negara beserta tempat aktualisasinya. Dan mempermudah mendirikan tempat ibadah adalah salah satu bentuk kecil dari implementasi tanggung jawab pemerintah. Tampaknya, semangat melindungi kebebasan beragama dalam Peraturan Bersama telah tereduksi. Ini terlihat dari panjangnya mekanisme birokrasi yang dilalui dalam mendirikan tempat ibadah.

Kepada penulis, Wakil Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Gereja Katedral Kuskupan Bandung mengatakan, “Kesulitan yang sering muncul di Kota Bandung adalah mendapatkan ijin mendirikan rumah ibadah (gereja)” (Wawancara, 19 Februari 2011).

Kedua, menerapkan strategi *bottom-up*. Ada kesan, bahwa strategi yang diterapkan pemerintah dalam mengelola keberagaman warganya cenderung instan dan *top down*. Padahal, membentuk semangat toleransi warga negara tidak bisa secara instan dan *top down*. Solusi alternatif lain, yakni strategi *bottom-up*. Strategi ini membutuhkan prasyarat, yakni pemahaman toleransi yang mendalam pada hati umat beragama. Tugas ini sangat berat, melihat realitas keberagaman saat ini yang cenderung intoleran.

Strategi ini bisa dimulai dari aspek yang paling mendasar berupa dekonstruksi paradigma pendidikan agama. Saat ini, pendidikan agama cenderung doktrinal dan mengarah pada fanatisme yang berlebihan. Akibatnya, penghargaan kepada *the others* agak sukar ditemui. Aroma menguasai dan dikuasai pun begitu kentara. Yang muncul pada akhirnya adalah saling curiga dan mencurigai. Pada tataran ini, minoritas selalu menjadi bulan-bulanan.

Dengan demikian, tidak ada hal lain dalam mewujudkan toleransi keberagaman sejati selain mengubah paradigma pendidikan agama. Menyajikan materi pendidikan agama yang toleran adalah pekerjaan rumah bagi setiap umat beragama. Menghargai 'yang lain' harus ditanamkan sejak dini. Sehingga pada tataran yang lebih sempit, FKUB masa depan dapat diisi oleh agamawan yang moderat, bukan agamawan yang penuh dengan nalar kecurigaan dan fanatisme agama yang berlebihan.

Strategi ini juga bisa dimulai dengan mencoba memaknai ulang 'rumah ibadat' dan fungsinya. Agaknya, desakralisasi terhadap makna dan fungsi rumah ibadat sangat diperlukan. Rumah ibadat, saat ini hanya bertautan dengan fungsi spiritual. Sehingga umat Islam enggan dan merasa 'jijik' masuk ke gereja, orang Kristen sungkan masuk masjid, dan demikian pula dengan umat Hindu atau pun Budha.

Dalam konteks inilah, perubahan fungsi rumah ibadat menemukan tempatnya. Perubahan fungsi ini diarahkan pada fungsi sosial menyangkut

kesejahteraan masyarakat secara umum, tidak hanya bagi umat beragama masing-masing. Sangat indah terlihat, jika segenap elemen masyarakat yang berbeda-beda agama memfungsikan rumah ibadat yang terdapat di daerah tersebut pada fungsi sosial demi kesejahteraan bersama. Jika ini terwujud, dengan sendirinya toleransi keberagaman sejati akan terwujud, tidak perlu 'dipaksakan'. Dalam konteks Kota Bandung, pergeseran –atau, tepatnya, perluasan—fungsi rumah ibadah dari fungsi spiritual ke fungsi sosial, sebenarnya sudah mulai dilakukan. Hanya saja, sifatnya yang masih sangat insidental.

B. Dialog dan Kerja Sama Lintas Agama

Ketika terjadi friksi dan tindakan intoleransi di antara umat beragama, strategi dan jalan keluar yang dipandang paling tepat adalah dengan membawanya ke ruang dialog. Dialog diyakini tidak hanya akan memberikan jalan keluar atas berbagai persoalan yang muncul, ia juga dipandang dapat menjadi strategi yang tepat untuk menumbuhkan sikap toleran dan saling memahami di antara umat lintas agama. Bahkan, dialog juga dapat menjadi jembatan bagi terjadinya berbagai bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh umat lintas agama.

Keberadaan dan peran Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS) terus diupayakan sebagai bagian dari media sosial sekaligus jembatan komunikasi di antara para tokoh umat lintas agama yang ada di Kota Bandung. Sejak kelahirannya yang digagas pada 10 Nopember 2007 lalu, FLADS terus mencoba memfasilitasi komunikasi dan dialog lintas agama tentang masalah-masalah kemanusiaan, kesejahteraan dan keadilan. Intensitas pertemuan terus bergulir dengan menginisiasi kerja sama lintas agama untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Kegiatan yang sudah dan akan dilakukan menjadi bola salju yang bergulir dan membesar secara simultan sehingga ada manfaatnya untuk masyarakat luas, khususnya yang ada di Kota Bandung. Berbagai pertemuan, dialog, juga aksi kepedulian digelar melalui Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang ini.

Sebagai contoh, pada 28 Januari 2011 lalu, para aktivis lintas agama yang tergabung dalam Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang datang berkunjung untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan jajaran redaksi

Pikiran Rakyat. Hadir dalam pertemuan itu, para pengurus FLADS, seperti KH Maftuh Kholil (PCNU), Ojong (WALUBI), Yosep Sunaryo (Gereja Hok Im Tong), Samuel Api (GKI Cibunut), Romo Agustinus (Keuskupana Bandung), dan Indra Wijaya (Walubi). Pada kesempatan itu, FLADS juga menyerahkan uang sebesar 25 juta kepada Dompot Bencana PR untuk korban letusan gunung Merapi, tsunami Mentawai, dan longsor Wasior. Dana itu terkumpul dalam acara ulang tahun ketiga FLADS sebagai bentuk kepedulian sosial umat lintas agama yang ada di Kota Bandung.

Dalam konteks yang lebih jauh, keberadaan FLADS tidak terjebak pada kekakuan struktural, tetapi lebih pada bagaimana bersosialisasi dan membangun jaringan. Sementara dalam hal bagaimana melakukan kerja sama juga lebih ditekankan pada substansinya, bukan membesarkan seremoninya.

Pada perkembangan berikutnya, FLADS telah memunculkan dirinya menjadi media tempat berdiskusi memecahkan berbagai persoalan, termasuk merespons isu-isu aktual yang tidak hanya berskala lokal Bandung, tetapi juga yang berskala global tetapi memiliki implikasi dapat mengganggu suasana kehidupan beragama pada skala lokal. Sebagai contoh, pada hari Senin (6 September 2010) bertempat di GKI Maulana Yusup, Jln. Maulana Yusuf Kota Bandung, para tokoh yang berhimpun dalam FLADS mengeluarkan pernyataan bersama atas sebuah isu rencana pembakaran al-Quran, yang (jika itu jadi dilakukan) diperkirakan akan memicu pergolakan hubungan antarumat beragama, tidak hanya di Kota Bandung tetapi di seluruh dunia.

Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS) mengemukakan keras dan melayangkan protes atas rencana The Dove World Outreach Center (DWOC) pimpinan Pastor Terry Jones dan Sylvia yang akan membakar Al Quran pada 11 September sebagai peringatan tragedi 11 September, atau yang mereka sebut dengan International Burn a Koran Day. Rencana itu dinilai telah menodai kebebasan beragama yang berarti melanggar Deklarasi Internasional tentang hak Asasi Manusia.

Dalam konteks itu, FLADS meminta DWOC menarik pernyataannya dan menghentikan rencana aksi yang tidak terpuji dan melecehkan Islam. FLADS juga mendesak pemerintah di seluruh dunia, terutama Amerika Serikat segera menghentikan rencana aksi tidak beradab

yang memicu ketegangan dan konflik antarumat beragama di seluruh dunia. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk mengambil langkah-langkah diplomatik dalam rangka penghentian rencana aksi tersebut. FLADS menyerukan kepada seluruh umat beragama di Indonesia tidak mengikuti imbauan DWOC dan tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan anarkis dari kelompok sektarian yang berpikiran sempit yang anti perdamaian.

Dalam hal ini, seorang tokoh perwakilan dari Gereja Katolik Keuskupan Bandung menyampaikan sikapnya dengan mengatakan,

“Tuhan adalah sumber yang menyatukan segalanya. Kita tidak boleh dicerai-beraikan sehingga saling berkelahi antara satu dan lainnya. Setiap agama pasti mempunyai kebenaran universal. Saya yakin Islam tidak mengajarkan terorisme. Menentang terorisme bukan begitu caranya. Semoga Indonesia tidak menjadi bangsa yang bisa dipecahbelah. Tuhan adalah sumber yang menyatukan segalanya.” (Wawancara, 15 Februari 2011).

Sementara itu, seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, mengatakan bahwa rencana aksi tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak yang luas di masyarakat Indonesia seperti yang sudah-sudah. Misalnya, saja dampak atas pembuatan kartun Nabi di Denmark. Rencana ini pun dikhawatirkan menimbulkan ketegangan antarumat beragama. Karena itu, harus disikapi dengan lebih dewasa. Dengan cara saling menghormati dan menghargai kitab suci masing-masing agama.

Penggagas pernyataan sikap ini, seorang Pendeta yang juga Pengurus PGI (Persatuan Gereja Indonesia) mengatakan, bahwa pernyataan sikap ini selanjutnya akan disebarluaskan seluas-luasnya. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga ke luar negeri. Pernyataan sikap ini akan disampaikan ke Kedutaan Amerika dan berbagai jaringan internasional. Melalui jaringan gereja dan semua komunitas internasional untuk mencegah aksi ini.

Tampaknya, pencegahan ini cukup sulit dilakukan sebab adanya perbedaan konstitusi di Indonesia dan Amerika. Di Amerika, aksi-aksi semacam ini bagian dari pernyataan sikap yang tidak bisa dihentikan kecuali melibatkan aksi fisik. Sehingga pemerintah Amerika sendiri tidak

bisa menghentikannya selama tidak ada menyentuh ke fisik. Tetapi setidaknya apa yang ingin mereka capai, yaitu memecah belah umat beragama tidak akan terwujud. Sebab aksi itu hanya akan membuat umat beragama semakin kuat.

Sebelumnya, pada hari Senin, 5 Januari 2010, Forum Lintas Agama juga mengeluarkan sikap bersama berkenaan dengan aksi militer Israel terhadap Palestina. FLADS sepakat mengutuk agresi militer Israel sebagai tindakan kriminal. Pernyataan sikap itu ditandatangani bersama oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan NU Kota Bandung, diikuti pula Walubi (Wali Umat Budha Indonesia), Majelis Agama Khonghucu, dan beberapa perhimpunan gereja, kalangan seniman dan Kaum Muda Lintas Agama sepakat mengajak masyarakat Indonesia.

Menurut FLADS, konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik politik dan ekonomi, bukan konflik antaragama. Pada kesempatan itu, mereka juga menggalang dana untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina yang sedang berjuang membebaskan dirinya dari pendudukan tentara Israel.

Ketua Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang mengatakan, bahwa salah satu pernyataan sikap itu adalah menghimbau pemerintah Indonesia untuk bersikap pro-aktif dan mengambil peranan menciptakan perdamaian Palestina-Israel. FLADS juga menghimbau kepada PBB, Liga Arab, OKI, pemerintah Amerika, Uni Eropa dan yang berkepentingan segera mengambil peranan yang menentukan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Sikap Forum Lintas Agama ini akan disampaikan ke Kedutaan Palestina, Pemerintah Indonesia, dan PBB.

Tampaknya, menjaga hubungan baik antarumat beragama dengan saling menghargai dan tidak saling mencaci serta mengadakan dialog yang membangun dan bermanfaat merupakan langkah yang sekarang sedang dirintis oleh FLADS. Membina saling pengertian yang baik dengan umat agama lain dengan meningkatkan frekuensi dialog konstruktif untuk menjelaskan posisi masing-masing dan memahami posisi pihak lain.

Untuk itu, paling tidak, dewasa ini para ahli memetakan ada tiga sikap dalam dialog agama atau teologi agama-agama. *Pertama*, sikap yang “eksklusif “ dalam melihat agama lain. Agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi para pengikutnya. *Kedua*, sikap

“Inklusif” yang melihat agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita. *Ketiga*, sikap pluralis yang bisa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya: “agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama”, “agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah”, atau “setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran”.

Dalam pelaksanaannya, dialog lintas agama ini tidak pernah sepi dari tantangan. Salah satunya datang dari kelompok-kelompok kecil yang antidualog. Mereka adalah kelompok yang, misalnya, khusus ingin menutup gereja, terus ada kelompok yang secara khusus mengampanyekan anti pemurtadan, gerakan anti Kristenisasi, yang dipicu oleh beberapa tokoh yang tidak banyak jumlahnya, tapi mereka berhasil mendirikan itu semua.

Tantangan kedua, adalah karena konstelasi berubah lalu muncul kelompok-kelompok antidualog, atau bahkan memusuhi dialog, di saat yang sama pemerintah sendiri tidak tegas. Ketika terjadi kasus-kasus yang mengganggu hubungan antaragama, misalnya perusakan tempat ibadah, atau serangan terhadap kelompok lain, pemerintah seperti kurang mempunyai visi yang tegas untuk mencegah itu. Bahkan kadang-kadang memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada tindakan-tindakan anarkis semacam itu. Itulah yang membuat para aktivis dialog di berbagai daerah itu agak bingung. Karena tugas melindungi tidak mungkin aktivis dialog ini menangani masalah keamanan. Jadi sebetulnya, umat beragama bergantung kepada pemerintah, kepada negara untuk menegakkan proteksi terhadap keharmonisan hubungan antaragama.

Berkenaan dengan budaya dialog yang hendak dibangun di kalangan lintas agama, maka perlu dimiliki sejumlah modal. Modal utama yang harus dijaga terus-menerus dan jangan sampai mengalami defisit, adalah modal intelektual kultural. Modal intelektual itu artinya sudah punya orang seperti Gus Dur, yang dikenal orang yang tanpa lelah bekerja untuk melindungi kaum minoritas, mengembangkan dialog antaragama. Itu jangan sampai habis, harus dirawat. Kedua, modal kultural. Artinya, sekarang ini sudah terjadi hubungan di antara sejumlah kelompok dalam Islam, dengan kalangan di luar Islam. Itu adalah modal awal yang jangan sampai hilang. Modal berikutnya yang penting adalah modal politik.

sekarang sudah ada yang masuk di sektor partai politik. Mereka diperlukan untuk menjamin melalui parlemen, entah parlemen nasional maupun daerah yang betul-betul menjamin kehidupan dialog antaragama. Jadi kalau misalnya ada pembahasan undang-undang yang kebetulan menyangkut masalah hubungan antaragama begini, umat beragama butuh mereka.

Berkenaan dengan keberlangsungan dialog lintas agama masih menemui sejumlah tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah, misalnya, munculnya radikalisme dan pemerintahan yang masih serba canggung mengatasi masalah ini. Memang harus dipikirkan juga begini: mungkin para aktivis yang bekerja pada wilayah dialog antaragama ini perlu sekali-kali menyambangi polisi dalam konteks memberi pengertian kepada mereka, bahwa cara menghadapi kelompok-kelompok radikal ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum yang anarkis itu adalah begini. Dan tindakan yang sesuai dengan HAM, dengan koridor demokrasi, tapi tanpa mencederai keinginan untuk membangun dialog antaragama.

Jika dialog lintas agama dianggap sebagai sesuatu hal yang penting dalam menjaga hubungan baik antaragama, pada level apa sajakah dialog itu bias dilakukan? Menurut Ulil, setidaknya dialog lintas agama dapat dilakukan pada tiga level. *Pertama*, dialog dalam level yang sifatnya sehari-hari, dalam kehidupan sosial, pertemuan atau perjumpaan antara orang-orang dari berbagai agama di kantor, di tempat kerja, di perumahan, dan sebagainya. Tapi ini dialog yang terjadi secara alamiah, spontan yang masih dianggap tidak cukup.

Kedua, dialog pada level kerja sama untuk isu-isu kemanusiaan: gempa bumi, banjir, kemiskinan dan seterusnya. Misalnya, gereja pada bulan puasa mengadakan buka puasa untuk masyarakat Islam. Itu *gesture* atau isyarat yang bagus sekali. Kemudian pada saat Natal Kelompok Islam melakukan yang sama. Jadi, intinya pada masyarakat itu harus ada tindakan yang sifatnya resiprokal, yang sana berbuat A yang sini berbuat A, jadi saling menghargai.

Ketiga, dialog pada level teologi, yaitu pada level yang jauh lebih tinggi. Dialog pada level ini kadang-kadang terjebak menjadi lebih elitis, tapi itu penting juga dilakukan. Jadi elite-elite agama yang kebetulan

bekerja pada wilayah pemikiran teologi, perlu berdialog dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Merefleksikan sejumlah kendala-kendala pemikiran yang menghalangi dialog. Mengatasi sejumlah salah paham mengenai doktrin agama yang lain. Tidak semua orang kompeten bisa diajak dialog pada level ini. Dan yang kompeten harus juga melakukan secara pelan-pelan menerjemahkan hasil dialog itu secara populer untuk masyarakat umum.

C. Deklarasi “Al-Ukhuwah”

Menyusul terjadinya tragedi penyerangan yang dilakukan sekelompok orang terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten pada 6 Februari 2011, jemaah Ahmadiyah yang berada di Kota Bandung dilanda kekhawatiran akan terjadinya hal serupa terhadap mereka. Khawatir insiden itu terulang, para jemaah Ahmadiyah yang ada di Kota Bandung, khususnya yang terkonsentrasi di Jalan Pahlawan, Cibeunying Kaler dan Astanaanyar, langsung melakukan konsolidasi dengan aparat kepolisian serta ormas-ormas Islam yang ada di Bandung. Dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung diperoleh data, bahwa jumlah jemaah Ahmadiyah yang ada di Kota Bandung sekira 600 orang, dengan rincian 400 orang berada di daerah Kecamatan Cibeunying Kaler, dan 200 orang berada di kawasan Astanaanyar.

Menurut Wali Kota Bandung, tidak akan ada kerusakan aset milik Ahmadiyah yang ada di Kota Bandung menyusul terjadinya peristiwa di Banten itu. Ia juga menegaskan bahwa perselisihan agama dan etnik di Bandung sejauh ini tidak terjadi. “Kami menjamin bahwa aksi perusakan, pembakaran, penganiayaan dan perusakan aset, itu tidak terjadi di Bandung. Buktinya hari ini saja masih aman, dan saya berharap selanjutnya tetap kondusif.” Dada menjelaskan, sejauh ini perselisihan antarumat beragama dan etnik tidak terjadi di Kota Bandung karena semua pihak mulai dari kepolisian, tokoh masyarakat, dan ormas Islam melakukan konsolidasi dengan baik.

Sementara itu, menyikapi insiden kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan perusakan rumah ibadah di Temanggung, Jawa Tengah, para pemuka agama di Kota Bandung membuat deklarasi untuk mengukuhkan kembali nilai-nilai

toleransi antarumat beragama. Kekerasan keagamaan yang terjadi beruntun di Cikeusik, Banten dan Temanggung, Jawa Tengah, telah menimbulkan rasa keprihatinan dan sekaligus kewaspadaan bersama. Untuk mencegah konflik horizontal yang mungkin bisa menular ke kota lain, khususnya ke Kota Bandung, Forum Silaturrahi Ormas Islam (FSOI) Kota Bandung melakukan deklarasi damai yang digelar Rabu, 9 Februari 2011, di halaman Masjid Al Ukhuwwah, Kota Bandung.

Sejumlah organisasi massa Islam yang berada di Kota Bandung, yang tergabung dalam wadah FSOI (Forum Silaturrahi Ormas Islam), bertempat di Masjid Al-Ukhuwwah, Wastukencana, Rabu (9 Februari 2011) membuat deklarasi atau pernyataan bersama yang pesan utamanya adalah ajakan untuk mempererat hubungan di antara umat lintas agama, sambil pada saat bersamaan mengajak untuk waspada terhadap berbagai provokasi yang dapat mengancam kehidupan beragama yang rukun dan toleran. Forum Silaturrahi Ormas Islam ini terdiri atas setidaknya 14 Ormas Islam yang ada di Kota Bandung, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah, Matlaul Anwar, Al Jamiyatul Wasliyah, Sarikat Islam (SI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Persatuan Umat Islam (PUI), Front Pembela Islam (FPI), Al Irsad, dan Parmusi.

Sekretaris FSOI mengatakan, bahwa deklarasi ini digelar untuk menjaga Kota Bandung tetap kondusif dan bermartabat. Menurutnya, Kota Bandung sebagai Kota Agamais harus menjadi contoh kota lainnya di Jawa Barat bahkan di Indonesia dalam hal menjaga dan memelihara suasana hidup beragama yang rukun dan toleran. Sementara itu, Ketua Nahdlatul Ulama, Maftuh Kholil, mengharapkan dengan adanya deklarasi damai tidak ada kerusuhan lagi seperti di Cikeusik, Temanggung atau kota lainnya di Indonesia.

Adapun isi dari deklarasi damai FSOI Kota Bandung ini, terdiri atas tiga poin, yaitu:

1. Kami sebagai warga masyarakat Kota Bandung akan saling menghormati antarpemeluk dan keyakinan masing-masing umat.
2. Kami pimpinan ormas keagamaan senantiasa akan melakukan komunikasi dan koordinasi baik antarpimpinan ormas maupun

aparatus keamanan demi menjaga ketertiban, keamanan dan kondusivitas Kota Bandung.

3. Kami mengimbau kepada segenap lapisan warga kota untuk waspada, tidak mudah terprovokasi oleh pihak tertentu dan melakukan komunikasi dengan pimpinan ormas masing-masing serta aparat keamanan apabila ditengarai ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada tindakan anarkis karena kami menginginkan Kota Bandung sebagai Kota Agamais yang bermartabat tetap damai.

Sementara terkait keberadaan Ahmadiyah, FSOI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, karena persoalan Ahmadiyah tidak lagi menjadi persoalan lokal namun sudah menjadi masalah nasional. Meskipun demikian, salah seorang anggota FSOI, menyatakan bahwa sebaiknya Ahmadiyah menjadi agama baru saja dan tidak lagi menggunakan atribut Islam. Lebih jauh, Anwaruddin menyatakan, bahwa “Kalau Ahmadiyah mau menjadi agama baru, silakan tapi jangan lagi memakai istilah atau simbol-simbol Islam, seperti masjid maupun Al Quran.” (Wawancara, 15 Februari 2011).

Kepala Sub-Bintal Pemerintah Kota Bandung, mengatakan bahwa meskipun ada kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah di daerah lain, di Kota Bandung sendiri mereka tetap aman. Lebih jauh, Kepala Sub-Bintal Pemerintah Kota Bandung mengatakan,

“Soal Ahmadiyah, tidak saling mengusik, tidak saling mengganggu. Saling memahami. Ini yang terjadi. Dan ini sesuatu yang patut disyukuri. Tidak ada penyerangan atau intimidasi terhadap mereka. Hal ini menunjukkan bahwa suasana kerukunan dan saling menghargai di antara umat beragama di Kota Bandung terjaga dengan sangat baik.” (Wawancara, 17 Februari 2011).

Adapun MUI Kota Bandung sendiri tetap pada keputusannya yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Fatwa tersebut berdasarkan rekomendasi dari sejumlah ormas Islam yang masuk ke MUI. Sebab tidak sesuai dengan akidah Islam. Misalnya saja, menyatakan adanya nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Mengenai opsi yang menyatakan langkah terbaik adalah menyatakan Ahmadiyah sebagai agama baru, menurut Ketua MUI Kota Bandung, Miftah Faridl, hal itu bisa saja dilakukan. Jemaah Ahmadiyah tetapi tidak lagi menggunakan atribut maupun label

keislaman. Misalnya jika beribadah, tidak lagi gunakan nama masjid hingga kitab Alquran.

Terkait klaim sesat kelompok tertentu terhadap kelompok lain yang berbeda ini, Ketua PCNU yang juga anggota MUI Kota Bandung, memiliki ilustrasi yang unik. Lalu dikutipnya sabda Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa “yang baru itu bidah, yang bidah itu sesat dan yang sesat itu neraka.” Ahmadiyah dikatakan sesat, umpamanya, berarti sama dengan neraka. Bagaimana dengan orang yang merusak rumah milik pribadi dan masjid milik Jemaah Ahmadiyah, apakah mereka mendapat petunjuk Allah Swt. atau sesat? Menurut Ketua PCNU, Islam tidak pernah menghendaki anarkisme. Sehingga, orang yang merusak properti milik pribadi orang Ahmadiyah juga sesat.

Sebagai ilustrasi, heterogenitas dan pluralitas warga Madinah, yang terdiri dari beberapa suku, etnik, kepercayaan dan agama. Ada Nasrani (Najran dll), Yahudi (Bani Nadhir, Bani Quraidhah dan Bani Qainuqa), agama nenek moyang bangsa Arab (Aus dan Khazraj) dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Realitas inilah yang mengharuskan Nabi Muhammad saw. meletakkan prinsip-prinsip dasar bermasyarakat tanpa didasari ajaran agama apa pun, termasuk Islam. Prinsip-prinsip itu adalah *al-musawa* (*equality*) dan *al-ikha'* (*brotherhood*), *al-hurriyyah* (*freedom*), saling melindungi, saling tolong-menolong dan berbuat baik, *al-ishlah* (*peace*), dan *al-tasamuh* (toleran). Jadi urusan agama itu masing-masing. Agamaku adalah agamaku, yang benar menurutku dan agamamu adalah agamamu yang benar menurutmu. Maka selesailah perkara. Urusan agama, kalau diperdebatkan terus-menerus tidak akan selesai. Agama itu untuk diamalkan norma-norma yang terdapat di dalamnya.

D. Deklarasi “Gedung Sate”

Menyikapi hal yang sama, dua hari berikutnya, yakni pada Senin (14 Februari 2011) bertempat di Aula Gedung Sate, diadakan pula deklarasi damai yang dihadiri para tokoh lintas agama Pernyataan Para Pemuka Agama di Jawa Barat itu ditandatangani oleh Ketua MUI Jawa Barat KH.A. Hafiz Utsman, Uskup Bandung MGR. Ignatius Suharya, Ketua PGIW Jawa Barat Pdt. Krisna Ludya Suryadi, Ketua Walubi Jawa Barat, Handoyo Oyong, Ketua Parisadha Hindu Dharma Putu Sulatra, dan Ketua

Matakin Jawa Barat Bambang Sukoco. Penandatanganan Deklarasi disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat, Panglima Kodam III/Siliwangi, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Hadir dalam acara deklarasi damai atau penandatanganan Pernyataan Bersama Para Pemuka Agama di Jawa Barat tersebut unsur Muspida Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, para pemuka agama kabupaten dan kota se-Jawa Barat dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Deklarasi tersebut dilakukan untuk mencegah gesekan antarumat beragama dan terjadinya kekerasan berlatar belakang agama di Jawa Barat, menyusul terjadinya peristiwa penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik dan perusakan gereja di temanggung Jawa Tengah. Deklarasi itu berisi tentang tekad para pemimpin agama di Jawa Barat untuk membina toleransi dan kerukunan antarumat beragama dan menyelesaikan setiap masalah dengan forum dialog tanpa kekerasan dari pihak mana pun. Ketua MUI Jawa Barat, memimpin deklarasi bersama yang berisi empat poin berisi penyikapan terhadap permasalahan keberagamaan serta kekerasan dalam masyarakat yang sering dilakukan atas nama agama. Keempat pernyataan yang dimaksud adalah:

1. Prihatin atas terjadinya konflik antara jemaat Ahmadiyah dengan kelompok masyarakat di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan konflik masyarakat yang mengakibatkan rusaknya tempat ibadah di Temanggung, Jawa Tengah.
2. Bertekad membina kerukunan antarumat beragama, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Jabar serta mendukung upaya pemerintah dalam usaha penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Bertekad untuk mengupayakan penyelesaian masalah antar umat beragama, melalui forum dialog dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Senantiasa melakukan koordinasi dan melaporkan secepatnya kepada instansi yang berwenang apabila melihat adanya indikasi

terjadinya konflik sosial dan tindakan melawan hukum, serta mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar senantiasa menaati ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya suasana yang kondusif dan damai di wilayah Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jabar mengingatkan jika terjadi sesuatu di suatu daerah, jangan ada pihak yang memanfaatkan situasi. Hal itu terkait insiden di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah. Menurut Gubernur Jawa Barat, kalau terjadi sesuatu di pojokan, jangan sampai ada yang melakukan tendangan pojok.

Dalam perkembangan berikutnya, untuk menyikapi keberadaan Ahmadiyah di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kamis, 3 Maret 2011, secara resmi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Keputusan tersebut dibacakan langsung oleh Gubernur Jawa Barat di ruang kerjanya, di Gedung Sate Bandung, yang didampingi oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jabar, Panglima Daerah Militer (Pangdam) III Siliwangi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Barat.

Menurut Gubernur Jawa Barat, bahwa dikeluarkannya Pergub tersebut diawali oleh risalah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Selasa malam (2 Maret 2011) yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat bersama Ketua DPRD Jawa Barat, Kapolda Jabar Irjen, Pangdam III Siliwangi, Kajati Jabar, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.

Menurut Gubernur Jawa Barat, sebagai tahap awal sosialisasi Pergub itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan kegiatan sosialisasi, seperti pengajian di seluruh masjid-masjid Ahmadiyah di Jawa Barat. Dengan adanya Pergub tersebut, maka seluruh penganut, anggota dan pengurus Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apa pun, sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran yang menyimpang di provinsi Jabar.

Adapun aktivitas yang dilarang sesuai ketentuan Peraturan Gubernur tersebut adalah: *pertama*, larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah secara

tulisan, lisan, ataupun melalui media elektronik. *Kedua*, larangan pemasangan papan nama organisasi jamaah Ahmadiyah di tempat umum, larangan pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan atribut jamaah Ahmadiyah. *Ketiga*, melarang anggota masyarakat melakukan tindakan anarkis dan atau perbuatan yang melawan hukum terhadap jamaah Ahmadiyah.

E. Deklarasi “Forum Bandung Plural”

Selain menghasilkan “Deklarasi Al-Ukhuwah” dan “Deklarasi Gedung Sate”, tragedi penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik Banten (6 Februari 2011) lalu juga mengundang sejumlah aktivis keagamaan yang ada di Kota Bandung untuk mendeklarasikan apa yang mereka sebut sebagai “Forum Bandung Plural”. Pada hari Selasa (8 Februari 2011) sekitar 30 orang menghadiri dan memaklumkan berdirinya Forum Bandung Plural di Gedung Akuarium Kampus Universitas Islam Bandung. Dalam forum yang juga dihadiri oleh Pemuda Ahmadiyah tersebut, mereka menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi di Cikeusik Pandeglang adalah sebagai kejahatan HAM sekaligus merupakan puncak intoleransi.

Peserta Forum Bandung Plural ini terdiri dari berbagai organisasi, LSM, dan perseorangan. Dalam deklarasi tersebut, juga dihadiri oleh perwakilan pemuda Ahmadiyah Bandung dan Humas Jamaah Ahmadiyah Kota Bandung. Hampir seluruh peserta yang hadir mengungkapkan keprihatinan dan mengecam keras adanya tindak kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. Menurut Koordinator Forum Bandung Plural, dibentuknya forum tersebut ialah bagian dari rasa kepedulian mereka terhadap insiden penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, serta bagian dari gerakan menentang dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap atas nama apa pun.

Dalam pernyataannya, forum ini menyatakan bahwa masyarakat Kota Bandung menolak secara tegas dan keras tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap jamaah Ahmadiyah. Menurut Koordinator Forum Bandung Plural, setiap satu minggu sekali forum tersebut menyelenggarakan pertemuan dengan anggota guna membahas dan mendiskusikan hal-hal kekinian yang berkaitan dengan pluralisme dan

toleransi beragama. Ia mengatakan, tujuan dibentuknya forum tersebut ialah untuk menanamkan rasa toleransi agar bisa menghargai perbedaan yang ada. Hidup bergandengan di tengah keberagaman itu sebuah keharusan. Lebih jauh, Koordinator Forum Bandung Plural mengatakan bahwa sejak dulu Bandung dikenal dengan dinamisme perbedaannya yang kemudian menghasilkan semua harmonisasi. Tujuan forum ini ialah bagaimana kita semua bisa menghargai semua perbedaan yang ada. Forum ini menjadi awal mula gerakan kultural, kami ingin membahasakan pluralisme sebagai sesuatu yang biasa. Forum ini juga akan jadi agenda rutin untuk menanggapi berbagai isu yang berkaitan dengan perbedaan agama, ras, dan suku yang terjadi.

Dalam acara deklarasi pembentukan Forum Bandung Plural tersebut juga dilaksanakan doa bersama bagi warga yang menjadi korban penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik. Di akhir forum tersebut, Koordinator Bandung Plural membacakan pernyataan sikap 'Dari Bandung untuk Pluralisme Indonesia'. Dalam pernyataan sikapnya itu, disebutkan:

1. Bahwa penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang pada 6 Februari lalu merupakan puncak dari euforia tindakan kekerasan dan intoleransi atas nama agama, yang mulai menguat sejak tahun 2005.
2. Bahwa, sepanjang sejarah, tindakan kekerasan dan intoleransi atas nama agama berlangsung, belum ada upaya konkret terhadap perlindungan dan penegakkan HAM. Hal ini jadi bukti bahwa negara gagal melindungi warganya.
3. Meminta agar pemerintah mengambil tindakan guna menghindari tindak kekerasan yang lebih luas demi tegaknya NKRI yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*.
4. Meminta polisi untuk serius mengusut tuntas pelaku tindak kekerasan. Serta untuk para tokoh agama, diharapkan menghentikan berbagai tindakan yang dapat memprovokasi masyarakat untuk melakukan kekerasan.

Menanggapi pernyataan sikap tersebut, salah seorang Pemuda Ahmadiyah, mengungkapkan rasa terima kasih atas kepedulian dari peserta forum. Ia berharap bahwa Forum Bandung Plural ini dapat menekan dan

membentuk opini masyarakat dan pemerintah atas Ahmadiyah. Sementara itu, anggota jemaat Ahmadiyah lainnya, mengungkapkan selama 86 tahun keberadaan Ahmadiyah, baru pertama kalinya terjadi pembantaian hingga mengakibatkan hilangnya nyawa saudara mereka. Dalam forum tersebut, dibawa pula selembor spanduk bertuliskan 'Kekerasan Terhadap Ahmadiyah adalah Kejahatan.'

Berkaitan dengan tragedi Cikeusik itu, Aliansi Kerukunan Antar Umat Beragama (AKUR) Kota Bandung meminta seluruh masyarakat di wilayah Jawa Barat jangan terprovokasi terkait insiden di Cikeusik, Banten. Masyarakat pun diimbau tidak melakukan aksi anarkis dalam menghadapi perbedaan. Menurut juru bicara AKUR, semua elemen masyarakat di Jawa Barat diharapkan agar tak terprovokasi. Selain itu, pihak-pihak yang selama ini keberatan dengan keberadaan Ahmadiyah, bisa menahan diri dan menjaga kondusifitas. Menurutnya, di wilayah Jawa Barat khususnya Kota Bandung, upaya menumbuhkan toleransi antaragama terbilang bagus, dan suasana kondusif pun akhirnya bisa terlaksana karena adanya sikap toleransi di antara umat beragama.

Secara sosiologis, munculnya berbagai forum deklarasi, baik deklarasi yang dilakukan FSOI di Mesjid Al-Ukhuwah, deklarasi Gedung Sate, maupun deklarasi Forum Bandung Plural, dapat dilihat sebagai penciptaan ruang dan media sosial untuk mengembangkan sikap toleransi, tenggang rasa dan saling menghormati di antara umat lintas agama yang ada di Kota Bandung, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui kerja sama untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Komitmen ini dideklarasikan sebagai penguatan umat lintas agama terhadap itikad untuk mendorong pembangunan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah-tengah masyarakat yang beragam secara keyakinan. Deklarasi memungkinkan hadirnya ruang dialog untuk menggumulkan dan menyikapi masalah-masalah bersama, sekaligus menjadi media akomodasi berbagai kepentingan umat lintas agama.

Deklarasi ini juga dapat dimaknai sebagai penciptaan ruang yang memungkinkan terbangunnya hubungan personal dan institusional antarumat lintas agama. Deklarasi ini menunjukkan adanya perluasan relasi antara umat yang sebelumnya tidak saling mengenal, apalagi saling peduli. Ada pertumbuhan relasi yang signifikan melalui upaya sengaja

saling mengenal, saling memahami, dan saling menghargai sebagai sesama warga kota. Deklarasi ini juga telah memungkinkan terciptanya ruang baru untuk terjadinya kerja sama yang lebih realistis yang dapat dilakukan oleh umat lintas agama. Munculnya berbagai deklarasi yang diilhami oleh Deklarasi Sancang ini memberikan semangat baru yang mendorong relasi dan kerja sama umat lintas agama dalam mengupayakan kehidupan yang toleran dan damai, bukan hanya bagi warga masyarakat Kota Bandung, tetapi juga bagi seluruh warga Indonesia.

Dalam perspektif teori pertukaran sosial, fenomena deklarasi damai umat lintas agama ini dapat dipahami dalam tiga cara. *Pertama*, memahami deklarasi sebagai sebuah peristiwa, ketika para tokoh lintas agama saling bertemu dan mengikrarkan tekad bersama untuk membangun hidup yang lebih toleran dan damai. *Kedua*, memahami deklarasi sebagai sebuah proses, ketika para tokoh lintas agama secara sengaja berupaya untuk saling berinteraksi, saling mengenal, saling memahami, saling menghargai eksistensi masing-masing dan berupaya saling bertukar wawasan dan pemahaman tentang bagaimana menjalin hidup bersama yang lebih toleran dan damai. *Ketiga*, memahami deklarasi sebagai sebuah metode untuk membangun kehidupan beragama yang lebih toleran dan terbuka. Sebagai sebuah metode, deklarasi merupakan salah satu cara untuk menghimpun dan membangun kohesivitas sosial di antara umat lintas agama yang ada di Kota Bandung.

F. Kembali ke Regulasi

Sejumlah tindakan intoleransi yang terjadi di Kota Bandung, khususnya berkenaan dengan pendirian rumah ibadah, seperti yang terjadi di Kelurahan Karasak, Kecamatan Astananyar, menunjukkan, aturan memang dibutuhkan untuk meminimalkan potensi konflik yang mungkin terjadi. Peraturan yang bertujuan untuk memelihara toleransi dan menjaga kerukunan umat beragama tersebut memang sudah dimiliki Indonesia sejak masa Orde Baru, yakni surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluknya, terutama dalam hal izin pendirian rumah ibadah.

Pada 2006, SKB ini direvisi menjadi surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8/2006 dan No. 9/2006. Penandatanganan aturan soal rumah ibadah ini dianggap perlu karena dapat menjadi medium untuk menghindari konflik antarumat beragama. Oleh karena itu, jika ada sejumlah pihak yang ingin mengeliminasi SKB tersebut, hal itu berpotensi mengganggu kerukunan hidup beragama yang ada saat ini. Ketua FKUB Kota Bandung mengingatkan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9/2006 dan No. 8/2006 yang mengatur pendirian tempat peribadatan itu, dibuat untuk semua agama yang ada di Indonesia, bukan ditujukan untuk agama tertentu saja. Oleh karena itu, peraturan tersebut sudah mengakomodasi kepentingan umat beragama di Indonesia.

Menurut penulis, Peraturan Bersama yang sekarang sudah cukup ideal dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Aturan ini juga menjadi pedoman gubernur, bupati, camat, dan kepala desa dalam pemeliharaan toleransi beragama dan pengaturan rumah ibadah. Peraturan itu dibuat bukan untuk kelompok agama tertentu, tetapi untuk semuanya. Saat implementasi di lapangan, kadangkala terjadi friksi, tetapi itu bukan karena Peraturan Bersama. Justru keberadaan Peraturan Bersama itu penting karena bertujuan menjaga kerukunan umat beragama di negeri ini. Banyak warga yang masih tidak tahu isi Peraturan Bersama, sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya sejumlah ketegangan belakangan ini.

Timbulnya sejumlah konflik dan tindakan intoleran, bukan disebabkan oleh Peraturan Bersama, melainkan akibat kurangnya sosialisasi Peraturan Bersama tersebut. Sosialisasi SKB menjadi bagian yang sangat penting karena dalam tahapan ini, umat beragama menjadi tahu batasan yang ada terkait dengan pendirian rumah ibadah. Untuk Kota Bandung, sosialisasi ini, berjalan cukup baik sehingga kerukunan umat beragama di Kota Bandung berlangsung dengan sangat kondusif. Tentang upaya yang dilakukan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, ketua FKUB Kota Bandung mengatakan,

“Alhamdulillah, kerukunan umat beragama di Kota Bandung berjalan kondusif. Ini ada kaitannya dengan upaya sosialisasi yang terus dilakukan, baik oleh FKUB, Pemkot dan kalangan lainnya. Saat ini pun, sosialisasi masih terus berlanjut yakni ditujukan pada

para guru SD dan TK. Diharapkan, melalui sosialisasi Peraturan Bersama kepada para tenaga pendidik tersebut, keberadaan peraturan tersebut semakin menyebar ke seluruh penjuru masyarakat.” (Wawancara, 16 Februari 2011).

Dia menegaskan, sosialisasi Peraturan Bersama harus mencakup semua pihak, dari atas ke bawah. Namun, pada kenyataannya, di banyak daerah lain, tahapan sosialisasi yang ada buruk sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antarwarga yang akhirnya memicu ketegangan di kalangan umat beragama.

Berkenaan dengan sosialisasi regulasi yang mengatur kehidupan umat beragama kepada masyarakat luas, bersama kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, FKUB mengundang para guru agama dan guru BP di setiap sekolah, kami undang. Dalam acara sosialisasi itu, ada tiga pihak yang menyampaikan materi, yaitu dari FKUB sendiri, Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, serta dari kepolisian. Biasanya dari kepolisian menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan cara mendeteksi persoalan yang mungkin muncul di lingkungan masyarakat. Pihak FKUB juga bekerja sama dengan kalangan pers. Karena, bagi FKUB, pers memegang peran yang sangat besar dan vital. Itulah kenapa FKUB merasa sangat perlu untuk menjalin komunikasi dengan pihak Pers (media).

Kegiatan sosialisasi ini, biasanya dilakukan pada setiap bulan Desember. Para guru agama dan BP dikumpulkan untuk diberi pengarahan tentang hidup toleran dan rukun. Tahun 2010 lalu, sosialisasi dilangsungkan di gedung KORPRI, jalan Turangga Bandung. Selain itu, pihak FKUB juga menggandeng Kantor BPLH untuk memberi pencerahan kepada umat beragama tentang pentingnya menjaga lingkungan. Khususnya, pada para dai dan perwakilan MUI se Kota Bandung. Selain melalui kegiatan-kegiatan formal yang telah terjadwal, FKUB juga berkeliling untuk mendatangi sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk menyosialiskan pentingnya hidup rukun dan toleran di tengah begitu banyaknya perbedaan. Lebih jauh, Ketua FKUB Kota Bandung mengatakan, bahwa FKUB berusaha terus untuk menciptakan toleransi dengan cara mengadakan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Juga tokoh-tokoh karang taruna. Sehingga berbagai elemen masyarakat dapat disatukan. Kami mengadakan sosialisasi ke sebanyak mungkin elemen masyarakat. Sampai saat ini, FKUB sudah

mendistribusikan lebih dari 7000 eksemplar buku tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006. Diharapkan, semakin banyak elemen masyarakat yang memahami aturan main dalam kehidupan beragama, semakin baik pula kualitas kehidupan keagamaan yang tercipta. FKUB sedang mengusahakan agar sosialisasikan sampai ke tingkat RW. Tentu saja, ini memerlukan waktu.

Keberadaan FKUB ini juga sangat dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Kota Bandung. Kasubbag Bina Mental Pemerintah Kota Bandung, mengakui peran dan keberadaan FKUB Kota Bandung dengan mengatakan, bahwa beruntung Kota Bandung memiliki FKUB yang dapat menjadi media berkumpulnya para tokoh lintas agama untuk mendiskusikan berbagai hal.

Dalam hal sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006, FKUB mengambil porsi peran yang sangat besar dengan menginisiasi berbagai forum dan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, seperti rapat-rapat dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), rapat kalangan camat dan lurah, OKP (Organisasi Kepemudaan), Ormas Islam, Parpol, Guru BP/ Guru Agama, MUI Kota, MUI Kecamatan, dan KUA, di mana ketua FKUB Kota Bandung diberi kesempatan untuk secara langsung menyampaikan sosialisasi ini.

Meskipun Peraturan Bersama yang ada saat ini sudah cukup baik, masih ada sejumlah pasal yang menimbulkan interpretasi beragam sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu dilakukan sejumlah revisi, yakni dengan menambahkan penjelasan terhadap sejumlah pasal yang dapat menimbulkan multitafsir, yang ujung-ujungnya menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Sebagai contoh, Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat, khususnya Pasal 14, disebutkan di antaranya syarat pendirian rumah ibadah yang meliputi daftar nama dan KTP penggunaan rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat. Selain itu, perlu ada dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah atau kepala desa.

Pasal ini butuh penjelasan lebih lanjut. Dalam hal ini, harus diterangkan bahwa 60 orang yang dimaksud bukan bagian dari kelompok

yang seagama dengan warga yang berencana mendirikan rumah ibadah. Dia mencontohkan, suatu kelompok agama X berencana mendirikan rumah ibadah, selain dibutuhkan daftar nama dan KTP penggunaan rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat, juga harus ada dukungan dari minimal 60 warga setempat, yang bukan seagama dengan kelompok yang mengajukan pendirian rumah ibadah tersebut.

Dalam Peraturan Bersama, soal ini tidak dijelaskan, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Selain itu, untuk *manage* konflik yang mungkin terjadi di antara kalangan umat beragama, perlu juga dibuat peraturan daerah yang semangatnya selaras dengan Peraturan Bersama yang sudah ada. Tujuannya, agar sosialisasi Peraturan Bersama menjadi lebih dalam di semua kalangan masyarakat.

Bagaimanapun, aturan seperti Peraturan Bersama sangat penting dalam menjaga kerukunan umat beragama sehingga ke depan, menurut dia, status aturan ini perlu untuk ditingkatkan menjadi undang-undang. Status Peraturan Bersama tersebut perlu untuk ditingkatkan menjadi undang-undang. Ini akan menjadi lebih baik dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Pentingnya keberadaan Peraturan Bersama dalam menciptakan toleransi dan menjaga kerukunan umat beragama juga diungkapkan perwakilan Majelis Tinggi Agama Kong Hu Chu Indonesia (Matakin). Sebab, keberadaan Peraturan Bersama yang ada saat ini sangat esensial sehingga tidak boleh dihilangkan. Lebih jauh, ia mengatakan,

“Jika ada pihak yang tidak puas dengan Peraturan Bersama itu masih wajar. Memang ada yang puas dan ada yang tidak puas. Namun, semua harus dapat menerima itu dengan lapang hati. Di mana pun tidak semua keinginan dapat diakomodasikan seratus persen.” (Wawancara, 12 Februari 2011).

Menurut dia, warga negara jangan hanya menuntut hak, tetapi juga harus melakukan kewajiban. Menurutnya lagi, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan minta hak tetapi kewajiban diabaikan. Akibat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban itulah timbul persoalan yang menjurus pada terganggunya kehidupan antarumat beragama di Indonesia. Aturan yang ada sudah baik dan itu pun dibuat oleh semua pihak yang mewakili kelompok umat beragama di negara ini. Jadi, Peraturan Bersama dibuat dengan mengakomodasi semua kelompok umat beragama di sini.



BAGIAN 9

DARI KONTESTASI, MELALUI AKOMODASI, MENUJU HARMONI

Pada dasarnya, terjadinya kontestasi dan kompetisi antarkelompok keagamaan atau konflik yang bernuansa agama merupakan sifat dasar manusia. Apalagi kompetisi yang terjadi di kalangan pemeluk agama yang berkarakter misionaris, seperti Kristen dan Islam. Secara alamiah, manusia sejak kelahirannya sampai dewasa memiliki potensi konflik, baik konflik antara anak dengan orang tua, konflik antara suami dengan istri, konflik antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, konflik antaretnik dan konflik antarumat beragama. Konflik-konflik itu berlangsung ada yang muncul secara spontanitas dan ada pula yang direkayasa karena berbagai kepentingan. Persaingan kepentingan antarkelompok keagamaan terletak pada empat hal, yakni persaingan dalam penyebaran agama, persaingan dalam bidang pendidikan, politik dan ekonomi (Saefullah, 2010).

Masalah penyebaran agama merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh agama-agama di Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Penyebaran agama di Kota Bandung umumnya dilakukan oleh penganut agama misi (Islam dan Kristen), dan tidak oleh penganut agama yang lebih berorientasi kepada moralitas dan tradisi (Hindu, Budha dan Kong Hu Chu).

Kompetisi antarkelompok keagamaan terjadi juga dalam bidang pendidikan, politik dan ekonomi. Pada ketiga ranah kehidupan itulah, kompetisi antarkelompok keagamaan terjadi. Sekalipun dilakukan dan terjadi secara sangat halus dan tersembunyi, tetapi adanya kompetisi di tiga wilayah kehidupan itu dirasakan keberadaannya. Terlebih dalam bidang ekonomi, yang menjadi masalah mendasar bagi kehidupan manusia, karena masalah ekonomi merupakan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu setiap orang berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang berani berkorban, baik pikiran, tenaga, waktu, maupun jiwa raganya. Artinya setiap orang siap mempertaruhkan segalanya demi kepentingan perutnya. Memenuhi kepentingan perutnya, tidaklah mudah tetapi selalu mengalami gesekan-gesekan antarkelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Karena persaingan ekonomi antarkelompok sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Dalam konteks ini, Dahrendorf (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 153) berpendirian bahwa masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus. Teoretisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoretisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, tidak akan ada konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Sebaliknya, konflik dapat menimbulkan konsensus dan integrasi. Umat beragama di Kota Bandung sudah sejak lama hidup berdampingan satu sama lain, walaupun kadangkala diselingi berbagai konflik kepentingan. Jadi benar, antara konflik dan konsensus sebagaimana yang diteorikan Dahrendorf, saling berkaitan secara dialektik.

Munculnya konflik antarkelompok masyarakat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang terjadi antarumat beragama di Kota Bandung adalah masalah kepentingan penyebaran agama, kepentingan untuk memajukan pendidikan, kepentingan meningkatkan kesejahteraan umat, dan kepentingan dalam mengakses dunia politik. Selama perbedaan kepentingan itu belum ditemukan titik temu, selama itu pula konflik akan tetap berlangsung. Walaupun konflik antarumat beragama di Kota Bandung tidak muncul ke permukaan,

sehingga tidak menimbulkan kerusuhan sosial, tetapi masih berada pada tataran wajar dan tersembunyi, baru pada tahap perang dingin antarkelompok keagamaan.

Tugas dan wewenang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok keagamaan ada pada Pemerintah Kota Bandung sendiri. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Bandung melakukan tiga langkah penting untuk mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok keagamaan, yaitu (1) mendorong umat beragama taat asas hukum, (2) menampung aspirasi kepentingan kelompok keagamaan, dan (3) memperlakukan semua kelompok keagamaan secara egaliter dan proporsional melalui penerapan program Bandung Kota Agamais.

Mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok keagamaan oleh Pemerintah Kota Bandung dilakukan sebagai solusi untuk meredam kompetisi antarkelompok keagamaan. Titik berat akomodasi, menurut Garna (1996: 53) ialah proses kerja sama dan toleransi yang memperlihatkan warga masyarakat tidak atau belum kehilangan identitas masing-masing kelompok. Menurut Howard Giles (1996: 112), akomodasi menjadi penting dalam komunikasi dan interaksi. Ia dapat membawa kepada identitas sosial dan dapat mengikat ketidaksetujuan dan jarak sosial dalam masyarakat.

Oleh karena itu, akomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi antarkelompok keagamaan dilakukan untuk meredakan suatu pertentangan antarumat beragama. Akomodasi kepentingan kelompok keagamaan tersebut, salah satunya, dilakukan dengan mendorong umat beragama untuk taat aturan, khususnya yang mengatur kehidupan beragama, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Aspirasi kepentingan kelompok keagamaan menjadi sangat penting untuk diakomodasi karena setiap umat beragama memiliki aspirasi masing-masing demi keberlangsungan dan memajukan kelompok agamanya masing-masing. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan pertentangan antarindividu dan anta kelompok keagamaan, perlakuan adil

terhadap semua kelompok etnik dan agama sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh pemerintah kota yang kebetulan dipimpin oleh umat Islam.

Kelompok keagamaan di Kota Bandung yang terdiri atas Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu menghendaki adanya pengayoman yang adil dan proporsional dalam menjalankan kehidupan beragamanya. Pengayoman dan pelayanan Pemerintah Kota Bandung terhadap umat beragama selama ini dipandang cukup bagus. Pemerintah kota telah melakukan pembinaan yang optimal di setiap acara pemerintahan dan keagamaan, agar semua umat beragama saling menghargai dan saling menghormati. Demikian pula Pemerintah Kota Bandung menekankan kepada semua umat beragama untuk dapat bekerja sama dalam kegiatan sosial dan pembangunan, menjaga ketertiban dan keamanan bersama dalam setiap acara-acara keagamaan. Sudah menjadi komitmen pemerintah kota bahwa setiap menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri, Pawai Akbar pada Tahun Baru Hijriah, Hari Natal dan Tahun Baru, serta Tahun Baru Imlek dan Pawai Cap Go Meh, jauh-jauh hari sebelumnya, mengundang pihak kepolisian, TNI, pemuka-pemuka agama dan komponen masyarakat lainnya untuk menciptakan suasana kondusif dan menjaga keamanan bersama. Hal ini dimaksudkan agar setiap acara hari besar keagamaan berjalan lancar dan damai. Tiap-tiap penganut agama dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan tenteram, tanpa sedikitpun merasa takut. Menarik untuk diamati adalah ketika umat Kristiani merayakan Hari Natal, dan umat Budha mengadakan peringatan Tahun Baru Imlek, para pemuda muslim yang tergabung dalam Barisan Serbaguna NU bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan gereja dan wihara. Begitu pula ketika umat Islam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru Islam, umat agama lain juga terlibat menjaga keamanan bersama.

Kemudian, setiap hari-hari besar keagamaan berlangsung, pejabat pemerintah kota, dalam hal ini Walikota bersama rombongan selalu hadir untuk memberikan apresiasi, paling tidak memberikan ucapan selamat dan memberi sambutan pada acara-acara tersebut. Termasuk ketika diadakan perayaan hari kelahiran Nabi Kong Zie oleh kalangan Kong Hu Chu di kota Bandung. Setiap memberi sambutan pada acara-acara keagamaan Walikota selalu menghimbau seluruh umat beragama untuk toleran, saling

menghormati dan menghargai perbedaan, dan mengajak semua umat beragama untuk bekerja sama dalam membangun Kota Bandung, dengan menjadikan spirit Bandung Kota Agamais sebagai landasan bersama.

Dengan kehadiran Walikota dalam acara hari-hari besar keagamaan, termasuk dalam peringatan hari ulang tahun Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS) membuat semua pemuka agama dan umat beragama, merasa senang dan bahagia karena eksistensinya merasa dihargai dan diakui. Apabila pemuka-pemuka dan umat beragama merasa senang, maka hubungan antara umat beragama dengan pemerintah berjalan dengan harmonis. Sehingga hambatan-hambatan psikologis antara umat beragama dengan pemerintah akan menjadi cair. Tidak ada lagi prasangka sosial negatif dari umat minoritas terhadap pemerintah. Paling tidak bentuk pelayanan dan perhatian moral dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yang telah dijelaskan di atas, sudah sangat mencair. Walaupun dalam hal-hal tertentu masih menjadi pembicaraan kelompok minoritas, seperti perhatian dalam hal bantuan untuk pendidikan dan sarana keagamaan bagi kaum minoritas.

Dengan demikian, di satu sisi dari segi moral pemerintah kota telah memberikan perhatian penuh terhadap umat beragama dan umat beragama telah merasa mendapatkan perlakuan yang adil dan bijaksana. Namun di sisi lain, secara jujur masih terdapat ketimpangan dan perlakuan tidak adil, terutama dalam hal akses terhadap politik, birokrasi, pendidikan, serta bantuan sarana dan prasarana keagamaan untuk komunitas agama minoritas. Kalau mereka merasa diperlakukan tidak adil, maka akan muncul prasangka sosial di antara mereka. Karena lahirnya sikap prasangka sosial akan menjadi sumber yang potensial meledaknya konflik sosial.

Oleh karena itu, kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk menyalurkan aspirasi kelompok minoritas. Keluhan dan aspirasi kelompok minoritas dapat dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan di masa yang akan datang. Agar semua umat beragama merasakan pengayoman dan perlakuan yang adil dari pemerintah daerah. Sehingga semua kelompok agama merasa dihargai dan dihormati keberadaannya. Kalau kondisi ini berlangsung secara konsisten, maka harmonisasi dan integrasi antarumat beragama akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi jarak sosial di antara

mereka, semua kelompok agama cenderung lebih adaptif, fleksibel dan bersikap terbuka terhadap umat yang berbeda agama. Pada gilirannya toleransi beragama akan terwujud dengan baik. Apabila toleransi beragama terwujud dengan baik, maka suasana Kota Bandung yang aman, tenteram dan damai akan terlihat indah.

Salah satu bentuk pengayoman tertinggi yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Bandung terhadap pemeluk agama yang berbeda-bada adalah dengan melahirkan program “Bandung Kota Agamais”. Melalui program yang inklusif ini, seluruh umat beragama yang ada di Kota Bandung merasa diayomi, dirangkul dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kota Bandung. Perlakuan yang setara terhadap semua agama ini menimbulkan suatu sikap yang terbuka, apresiatif dan respektif dari kalangan umat beragama yang pada gilirannya akan menjadi modal sosial dalam membangun kehidupan beragama di Kota Bandung yang lebih toleran dan terbuka.

Program ini dilatarbelakangi oleh mayoritas masyarakat Kota Bandung yang berbasis keyakinan dan kepatuhan beragama yang cukup kental, sehingga potensi agama, dapat dijadikan salah satu kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang dimiliki oleh kota Bandung yang memungkinkan untuk dikembangkan, digali, dan dijadikan sebagai sarana untuk membangun Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat kota untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsa dalam rangka pembangunan daerahnya, melalui Jaring Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Agama, atau Jasmara Agama.

Kota Bandung yang agamais meniscayakan semua pendirian dari semua pemeluk agama, tidak terkotak-kotak. Secara umum, potret keberagamaan di Kota Bandung kini relatif baik. Keberadaan agama telah memfasilitasi masyarakat dalam pemenuhan ilmu dan praktik keagamaan, sekaligus mendorong peran masyarakat dalam memajukan kehidupan.

Dalam hal ini, lahirnya program Bandung Kota Agamais setidaknya dapat dilihat dalam tiga perspektif. *Pertama*, dalam konteks hubungan antaragama, ada sebagian peraturan itu yang dimaksudkan untuk melakukan “upaya akomodasi” terhadap perselisihan antarumat beragama, terutama yang menyangkut penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah.

Semua itu diorientasikan pada usaha untuk menjaga toleransi, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. *Kedua*, dalam konteks hubungan agama dan pemerintah, lahirnya program Bandung Kota Agamais dapat dimaknai sebagai bentuk “intervensi” pemerintah terhadap komunitas beragama. Meski demikian, hal ini bisa dipahami karena salah satu fungsi adanya pemerintah adalah mengakomodasi sekaligus menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat. *Ketiga*, hal itu juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk memasukan beberapa aspek ajaran agama, khususnya nilai-nilai moral agama, untuk menjadi panduan bersama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih terbuka dan menjunjung tinggi toleransi.

Pada salah satu maknanya, toleransi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, yang disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan. Dari beberapa fakta dan data yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, dapat dipetakan bahwa dalam membangun toleransi beragama di Kota Bandung, paling tidak digunakan dua pendekatan atau perspektif, yaitu perspektif sistem sosial dan sistem budaya. Perspektif sistem sosial, yaitu melalui *inter-group relation*, yang dimaksudkan sebagai hubungan antara anggota-anggota dari berbagai kelompok. Makin intensif hubungan antarkelompok, makin tinggi pula tingkat integrasi di antara mereka. Dengan adanya *inter-group relation* ini dapat pula menetralsir konflik di antara kelompok, karena setiap anggota kelompok tidak akan memiliki loyalitas tunggal dalam suatu kelompok tertentu, namun sebaliknya loyalitas mereka ganda berdasarkan kelompok-kelompok yang mereka masuki. Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya fanatisme sempit, sentimen-sentimen primordial juga akan dapat dinetralsir karena kegandaan loyalitas yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok.

Pendekatan ini dapat dilihat dengan berdirinya forum Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS) yang digagas oleh para tokoh lintas agama di Kota Bandung. Secara faktual, forum ini dapat menjadi media sosial yang dapat mewadahi sekaligus mengakomodasi kepentingan

beragam kelompok keagamaan. Forum ini memiliki ciri khas, yaitu, *pertama*, forum ini dibatasi pada pemimpin umat yang memiliki basis komunitas di lapangan seperti kiai, pendeta, pastor, dan bhiku bersama umatnya masing-masing, tidak pada tataran kaum intelektual dan aktivis kampus atau LSM. *Kedua*, forum ini lebih bersifat *sharing* pengalaman tentang dinamika hubungan antaragama di tempat masing-masing, dan berefleksi bersama tentang pengalaman-pengalaman tersebut dalam bentuk komunikasi-dialogis, doa bersama, dan membentuk jaringan. *Ketiga*, forum ini dilakukan di pusat-pusat komunitas umat masing-masing, baik gereja, pesantren, wihara, pura, maupun kelenteng, secara bergantian. Dialog yang terjadi ditingkat elite agama tidak mandek, namun terus mengalir dan dipancarkan pada umat mereka masing-masing yang berada di akar rumput.

Sementara, dalam perspektif sistem budaya, masyarakat multikultural seperti Kota Bandung dapat bersatu melalui penganutan nilai-nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Nilai-nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat ini sebagai perekat bagi kelompok dalam masyarakat. Semakin kuat nilai-nilai umum itu berlaku bagi kelompok dalam masyarakat, akan semakin kuat pula perekat bagi mereka. Nilai-nilai umum itu bersumber pada budaya dominan masyarakat multietnik yang menjadi acuan perilaku yang terpola. Dalam konteks merealisasikan Bandung sebagai Kota Agamais, nilai-nilai umum dominan (Sunda) yang dapat dijadikan acuan itu, di antaranya, adalah *akur jeung dulur nu saagama, teu parasea jeung batur nu beda agama* (toleransi intraumat beragama dan antarumat yang berbeda agama). Bila ini sudah tercapai maka komunitas warga Bandung hidup rukun, *rame gawe* (gotong royong), *tibra sare* (tenang tidak ada rasa takut).

Dalam konteks upaya membangun toleransi beragama, program “Bandung Kota Agamais” telah menjadi semacam benang homogen atau *common platform* (atau *kalimatun sawa*’ dalam terminologi Islam) yang mengikat berbagai pemeluk agama yang berbeda untuk berintegrasi secara sosial. Dalam konteks masyarakat beragama, integrasi sosial yang dimaksud mencakup segala proses penyatuan kelompok beragama dalam kapasitas sosialnya, bukan keyakinannya, ke dalam kesatuan sosial lebih dari sikap mengedepankan simbol atau identitas golongan tertentu.



KORPUS PENUTUP: TOLERANSI TERJADI, HARMONI TERBELI

Dinamika kehidupan beragama di Kota Bandung mengalami fase pasang terutama pasca diluncurkannya program “Bandung Kota Agamais” oleh Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Walikota Dada Rosada. Sejak kurun 2004 sampai tulisan ini dibuat, intensitas interaksi antarumat beragama mengalami kenaikan yang signifikan. Sekalipun baru berlangsung pada level elite agama di Kota Bandung, interaksi dan komunikasi yang lebih cair dan terbuka semakin sering dilakukan. Program “Bandung Agamais” telah menjadi jalan bagi berlangsungnya suasana interaksi sosial yang lebih terbuka dan dinamis di kalangan tokoh lintas agama. Berbagai momen peringatan hari besar agama, termasuk acara buka puasa bersama, kini telah berubah menjadi media sosial tempat para tokoh lintas agama berkumpul dan berinteraksi. Kelahiran Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS) pada 10 Nopember 2007 lalu, telah menjadi pilar sangat penting bagi tumbuhnya suasana kehidupan keagamaan yang lebih toleran dan damai di Kota Bandung.

Boleh jadi, Program “Bandung Kota Agamais” telah menjadi bentuk akomodasi tersendiri yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Bandung terhadap pemeluk agama yang berbeda-beda. Melalui program yang inklusif ini, seluruh umat beragama yang ada di Kota Bandung merasa diayomi, dirangkul dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kemunculan program “Bandung Kota Agamais” menunjukkan bahwa untuk mewujudkan toleransi beragama di tengah-tengah masyarakat tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan pihak pemerintah. Lahirnya program “Bandung Kota Agamais” yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Bandung telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi munculnya suasana kehidupan beragama yang lebih dinamis, toleran, terbuka, dan damai. Kohesivitas sosial di antara pemeluk agama yang berbeda di Kota Bandung terjalin lebih baik dengan semakin terbukanya berbagai media komunikasi sosial, yang mewujud dalam bentuk peringatan hari besar keagamaan, yang dapat dihadiri secara bersama-sama oleh umat lintas agama.

Agaknya, hal ini sejalan dengan pandangan Jose Casanova, dalam *Public Religions in Modern World* (1994), yang menyatakan bahwa agama dapat melakukan transformasi sosial di dunia modern. Caranya, menurut Casanova, adalah dengan melakukan deprivatisasi agama, yakni proses di mana agama meninggalkan tempat yang sudah diperuntukkan untuknya, yakni ruang privat, dan memasuki ruang publik guna mengambil peran dan memainkan fungsi kritisnya dalam menyikapi persoalan-persoalan modernitas, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan, diskriminasi minoritas, dan sebagainya. Dengan demikian, agama muncul tidak hanya menjadi modal spiritual di tengah masyarakat, tetapi menjadi modal sosial untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik, sebagaimana yang ditunjukkan oleh program “Bandung Kota Agamais”.

Tampaknya, kehadiran program “Bandung Agamais”, dengan seluruh kekurangan yang dimilikinya, sementara ini relatif merupakan solusi terbaik dalam mengikat keragaman asal-usul, etnis, budaya, dan agama. Setidaknya, upaya ini mampu memperpendek jarak antara satu komunitas dengan komunitas lain, karena mereka memiliki persepsi serupa, bahwa Kota Bandung adalah tempat tinggal bersama yang harus dijaga bersama-sama pula.

Itu pula sebabnya agenda program “Bandung Agamais” adalah bagaimana memantapkan pluralisme bermartabat dengan membuang jauh perbedaan perlakuan antarsesama. Diskriminasi, apa pun bentuknya, adalah kegagalan sosial yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlawanan terhadap tindakan tersebut, tidak selamanya harus dengan

kekerasan tetapi melalui program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat yang majemuk.

Sampai batas tertentu, dalam konteks membangun toleransi beragama, kehadiran program “Bandung Agamais” telah menjadi semacam benang homogen atau *common platform* (atau *kalimatun sawa*’ dalam terminologi Islam) yang mengikat berbagai pemeluk agama yang berbeda untuk berintegrasi secara sosial. Dalam konteks masyarakat beragama, integrasi sosial yang dimaksud mencakup segala proses penyatuan kelompok beragama dalam kapasitas sosialnya (bukan keyakinannya) ke dalam kesatuan sosial lebih dari sikap mengedepankan simbol atau identitas golongan tertentu.

Dinamika sosial yang terjadi di kalangan umat lintas agama terjadi karena adanya tarik-menarik antara keinginan menghadirkan toleransi beragama pada satu pihak dengan hadirnya kecenderungan perilaku intoleransi beragama pada sisi lain. Dinamika yang terjadi menjadi positif ketika umat beragama yang berbeda lebih mengedepankan sikap toleransi beragama. Pada kenyataannya, ikhtiar mewujudkan toleransi beragama tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan peran Negara. Kehadiran program Bandung Agamais yang digagas oleh pemerintah kota Bandung mengindikasikan bahwa agama tidak semata-mata modal spiritual tetapi juga bahkan dapat menjadi modal sosial dalam membangun kehidupan bersama antarpemeluk agama yang berbeda. Temuan ini relevan dengan pandangan Casanova yang menyebutkan bahwa agama dapat berperan dalam kehidupan masyarakat modern dengan melakukan proses deprivatisasi agama, yaitu proses ketika agama meninggalkan ruang privat untuk memasuki ruang publik untuk memainkan fungsi sosialnya.

Praktik toleransi beragama tersumbat karena masih adanya dikotomi “kami” dan “mereka”, “mayoritas” dan “minoritas”, dalam relasi umat lintas agama. Praktik intoleransi beragama mewujud dalam bentuk kecurigaan, kebencian, dan diskriminasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Saefullah (2010), bahwa praktik intoleransi beragama terjadi karena adanya pemahaman keagamaan yang cenderung eksklusif, fanatisme keagamaan yang berlebihan, etnosentrisme, dan prasangka sosial yang kemudian mewujud dalam bentuk kecurigaan, diskriminasi dan kebencian. Secara sosiologis, cara pandang ini lahir karena mereka berada

dalam sebuah komunitas yang mempunyai kesamaan ciri dan karakter yang menjadi identitas yang harus dipegang teguh.

Munculnya ketegangan atau konflik antarumat beragama merupakan watak alamiah manusia. Mengakomodasi kepentingan berbagai pemeluk agama dilakukan sebagai wadah sekaligus jembatan yang dapat menghubungkan sekaligus meredakan ketegangan atau konflik yang timbul di antara mereka. Hadirnya program Bandung Agamais dipandang sebagai strategi yang relatif efektif dalam mengikat perbedaan agama, etnik, asal-usul serta budaya. Dalam konteks membangun kehidupan agama yang toleran, keberadaan program Bandung Agamais dapat menjadi semacam benang homogen yang secara fungsional dapat mengintegrasikan pemeluk agama yang berbeda ke dalam satu kehidupan sosial yang kohesif dan integratif.

Berdasarkan paparan sebelumnya, buku ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, Studi tentang dinamika toleransi beragama dari sudut ilmu sosial diharapkan dapat memperkaya khazanah dan memberi kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya sosiologi agama. Studi tentang format toleransi beragama harus lebih dilandaskan pada kesediaan mengakui dan menghargai autentisitas masing-masing ajaran agama, dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesalahpahaman yang selama ini menorehkan goresan hitam yang merusak keharmonisan hidup umat lintas agama.

Kedua, Studi tentang toleransi beragama selalu memunculkan fenomena yang baru dan menarik. Karena hubungan umat lintas agama dari zaman ke zaman tidak menetap dalam satu keadaan yang sama. Dengan demikian, riset yang serupa harus terus dilakukan tidak hanya melalui pendekatan studi kasus, tetapi bisa juga melalui pendekatan antropologi, fenomenologi, etnografi dan etnometodologi. Pendekatan-pendekatan ini sebagai upaya memperkaya khazanah sosiologi dari berbagai perspektif, sehingga perkembangan ilmu sosial tetap terbuka dan dinamis.

Ketiga, Fenomena toleransi beragama merupakan fenomena yang unik dan menarik. Unik karena realitas kerukunan hidup antarumat beragama berlangsung secara fluktuatif, kadang-kadang rukun, tenteram dan damai, dan kadang-kadang pula mencekam, menegangkan dan

menakutkan. Menarik karena variabel yang ditemukan lapangan dari waktu ke waktu terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan tidak hanya menyangkut toleransi beragama, tetapi juga diperlukan penelitian yang lebih spesifik, misalnya penelitian tentang perkembangan agama-agama baru yang belum diakui, seperti agama Bahai dan Sikh, serta penelitian khusus tentang dinamika peran ormas-ormas keagamaan yang banyak bermunculan dalam membangun kehidupan beragama yang lebih produktif. Sehingga, pada gilirannya penelitian-penelitian tersebut dapat memperkaya kajian sosiologi, khususnya sosiologi agama.

Keempat, lahirnya Program Bandung Agamais memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap perkembangan dinamika relasi antarumat beragama di Kota Bandung. Kepada Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat merancang program aksi yang lebih mendorong terjadinya kerja sama produktif yang melibatkan sebanyak mungkin umat lintas agama dalam kerangka pelaksanaan program besar Bandung Kota Agamais, tidak hanya di kalangan elite masing-masing agama saja.

Kelima, dinamika relasi antarumat beragama dari waktu ke waktu berlangsung secara pasang surut, kadang-kadang berlangsung begitu toleran dan damai, tetapi dalam kesempatan yang lain terjadi disharmoni, saling curiga, berprasangka negatif dan diskriminatif. Oleh karena itu, para tokoh agama dituntut untuk terus memperluas cara pandang yang mempunyai semangat toleransi dan keterbukaan. Perluasan dan pengayaan tafsir seperti ini dipercaya mampu mencerahkan kehidupan umat beragama secara keseluruhan. Sehingga agama tampil secara lebih fungsional, bahkan mampu mengkreasikan kedamaian, toleransi dan nilai-nilai luhur kehidupan lainnya dalam bermasyarakat.

Keenam, penting ditanamkan kesadaran bahwa kerja sama positif antarumat lintas agama perlu ditingkatkan dengan menanggalkan sikap eksklusif dan menggantinya dengan sikap inklusif. Pada zaman interspiritual seperti sekarang, tidak ada satu pun penganut agama yang dapat menghindarkan diri dari interelasi dengan penganut agama lain, baik pada level teologis, sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Perbedaan tradisi agama dan budaya tidak boleh menjadi penghalang untuk menjalin hubungan dan kerja sama lintas agama. Interdependensi merupakan karakteristik dasar dari kehidupan umat beragama saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2008. "Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik", dalam *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulsami, Humaidy dan Masnun Tahir. 2007. *Islam dan Hubungan Antaragama*, LKis, Yogyakarta.
- Abu-Nimer, Mohammed. 2003. *Nonviolence and Peacebuilding in Islam: Theory and Practice*. Gainesville, Florida: University Press of Florida.
- Achmad, Nur. 2001. *Pluralisme Agama; Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Adimihardja, Kusnaka. 1983. *Kerangka Studi Antropologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- _____. 1999. *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Al-Faruqi, Ismail Raji (ed.). 1994. *Dialog Tiga Agama Besar: Yahudi, Kristen, Islam*, alih bahasa Joko Susilo Kahhar dan Supriyanto Abdullah, Cet. I. Surabaya: Pustaka Progressif.
- A'la, Abdul. 2002. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Kompas.
- Ali-Fauzi, Ihsan. 2009. "Toleransi Kembar di Dua Negara: Agama dan Konsolidasi Demokrasi di Spanyol dan Italia" dalam Taher, Elza Peldi (ed.). *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Kompas dan ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).
- Ali, Mukti. 1970. "Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems" dalam *Al-Jami'ah*, No. 4 Th. XI Djuli

- _____. 1992. "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi", dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: INIS.
- Al-Jamri, Mansoor dan Abdul Wahab el-Affendi. 2007. *Islamisme, Pluralisme dan Civil Society*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Almunawar, Said Agil Husein. 2005. *Fikih Hubungan Antaragama*. Jakarta: Ciputat Press.
- Andito (ed.). 1998. *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Antoni, Raja Juli Antoni (ed.). 2002. *Living Together in Plural Societies; Pengalaman Indonesia Inggris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Appleby, Scott. 2000. *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. Lanham, MD: Roman and Littlefield Publishers, Inc.
- Al Qurtubi, Sumanto. 2009. "Pluralisme, Dialog, dan Peacebuilding Berbasis Agama di Indonesia" dalam Taher, Elza Peldi (ed.). *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Kompas dan ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).
- Arkoun, Mohammed. 2001. *Islam Kontemporer: Menuju Dialog antar Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aspinall, Edward dan Greg Fealy. 2003. *Local Power and Politic in Indonesia; Decentralisation and Democratisation*, Singapore: ISEAS.
- Ayoub, Mahmud Mustafa. 2007. *Mengurai Konflik Muslim-Kristen*, Fajar Pustaka, Yogyakarta.
- Aziz, Abdul. 2006. *Esai-esai Sosiologi Agama*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Islam Subtantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan.
- _____. 2009. "Toleransi Agama dalam Masyarakat Majemuk Perspektif Muslim Indonesia" dalam Taher, Elza Peldi (ed.). *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Kompas dan ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).

- Baidhawy, Zakiyuddin. 2002. *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan*. Yogyakarta: LESFI.
- _____. 2006. *Kredo Kebebasan Beragama*. Jakarta: PSAP.
- Bailey, Kenneth D. 1982. *Methods of Social Research*. New York: the Free Press.
- Banawiratma, JB. 2010. *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Banchoff, Thomas. 2008. *Religious Pluralism, Globalization, and World Politics*. New York, NY: Oxford University Press.
- Baowolo, Robert B. 2010. *Menggugat Tanggung Jawab Agama-agama Abrahamic bagi Perdamaian Dunia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Barton, Greg. 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effeni, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Paramadina.
- Basuki, Singgih A. (1999). "Kesatuan dan Keragaman Agama dalam Pandangan Hazrat Inayat Khan", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Nomor 21, TH. VIII Januari-April.
- Berger, Peter L. 2003. *The Other Side of God: Polaritas dalam Agama-agama Dunia*. Yogyakarta: Qirtas.
- _____. 1991. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, Penerjemah: Hartono, Jakarta: LP3ES.
- Berliner, Michael S. dan Gary Hull. 1998. *Diversity and Multiculturalism: The New Racisms*. Marina del Ray, California: Ayn Rand Institute.
- Boase, Roger, ed. 2005. *Islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace*. United Kingdom: Ashgate Publishing.
- Bush, Robin. 2008. "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Simptom?" dalam Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Canberra: Australian National University.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Cassanova, Jose. 1994. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: Univesity of Chicago Pres.

- Christopher, Daniel L. Smith (ed.). 2005. *Lebih Tajam Dari Pedang-Refleksi Agama-Agama Tentang Paradoks Kekerasan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cohen, Mark Nathan. 1998. *Culture of Intolerance: Chauvinism, Class, and Racism in the United States*. New Haven and London: Yale University Press.
- Coward, Harold, and Gordon S. Smith, eds. 2004. *Religion and Peacebuilding*. Albany, NY: SUNY Press.
- Da'i, Athian Ali M. 2008. "Dakwah Struktural dalam Mewujudkan Bandung Kota Agamais". Makalah [transkripsi] disampaikan dalam Semiloka Pemantapan Bandung Agamais, Hotel Horison Bandung, 19-20 Nopember.
- Dibyorini, MC dan Candra Rusmala. 2005. "Solidaritas Sosial dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia", Artikel dalam Jurnal *Ilmu Sosial Alternatif*, Volume VI, Nomor 12, Desember 2005, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
- Eck, Diana L. 2003. *Encountering God: A Spiritual Journey from Bozeman to Benaras*. Boston, MA: Beacon Press.
- Ekadjati, Edi Suhardi, Sobana Hardjasaputra, Itje Mardiana. 1985. *Sejarah Kota Bandung, 1945-1979*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Effendi, Djohan. 1978. "Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?", dalam *Majalah Prisma nomor 5*, Edisi Juni.
- Effendy, Bachtiar. 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press.
- Eisenstadt, S. N. 2000. "The Resurgence of Religious Movements in Processes of Globalization — Beyond End of History or Clash of Civilizations". *Journal on Multicultural Societies, Vol. 2 No. 1*. UNESCO.
- Esack, Farid. 2000. *Qur'an, Liberation, and Pluralism*, diterjemahkan oleh Watung A. Budiman, Bandung: Mizan.
- Evans, Peter. ed. 1997. *State-Society Synergy: Government and Social Capital in Development*. Berkeley, CA: University of California.

- Faridl, Miftah. 2008. "Bandung Kota Agamais: Membangun *Civil Society* yang Religius." makalah disampaikan dalam Semiloka Pemantapan Bandung Agamais, Hotel Horison Bandung, 19-20 Nopember.
- Fawcett, Liz. 2000. *Religion, Ethnicity and Social Change*. Great Britain: Macmillan Press Ltd.
- Festinger, Leon. 1989. *Extending Psychological Frontiers*.
- Fukuyama, Francis. 2002. *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial*. Yogyakarta: Qalam.
- Garna, Judistira K. 1996. *Ilmu-ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: PPS Unpad.
- _____. 2008. *Dasar dan Proses Penelitian Sosial*. Bandung: Primaco Akademika and Judistira Garna Foundation.
- _____. 2011. "Sosiologi dan Sosiometri: Memahami Hubungan – Perilaku dan Struktur." Makalah untuk Kuliah pada Program Pascasarjana FISP Universitas Brawidjaja Malang.
- Ghazali, Abd. Moqshith. 2009. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran*. Depok: KataKita.
- Gibson, Margaret A. 1988. *Accommodation Without Assimilation*. Cornell University.
- Giles, Howard, Justine Coupland, Nikolas Coupland. 1991. *Contexts of accommodation*. Cambridge University Press.
- Glock, Charles dan Rodney Stark. 1966. *Christian Belief and Anti Semitism*. New York: Harper and Row.
- Gort, Jerald D, Hendrick M Vroom, Rein Fernhout, Anton Wisles (ed). 1992. *On Sharing Religious Experience Possibilities of Interfaith Mutuality*, Edmans Publisher, Amsterdam.
- Haniah. 2001. *Agama Pragmatis: Telaah Atas Konsepsi Agama John Dewey*. Magelang: Indonesia Tera.
- Hardjasaputra, Sobana. 2000. *Sejarah Kota Bandung 1906-1945*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Haryadi, Edi. 2007. *Strategi Pembangunan Kota Menuju Bandung Bermartabat*. Bandung: Bagian Kesra Pemerintah Kota Bandung.
- Hasyim, Umar. Tt. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Hendardi. 2010. *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute.
- Heryanto, Asep Budi. 2008. *Wagiman dan Bandung Bermartabat*. Bandung: CV Delapan Nama.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF (ed.). 1998. *Passing Over: Melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, Komaruddin. 2008. "Pembangunan Kota Bandung yang Berwawasan Agama". Makalah [transkripsi] disampaikan dalam Semiloka Pemantapan Bandung Agamais, Hotel Horison Bandung, 19-20 Nopember.
- Hilmy, Masdar. 2008. *Islam Profetik, Substansiasi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Impulse-Kanisius.
- Huntington, Samuel P. 1993. "Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol.IV.
- Hutchison, William R. 2004. *Religious Pluralism in America: the Contentious History of a Founding Ideal*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Husaini, Adian. 2005. *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Husein, Fatimah. 2005. *Muslim-Christian Relations in The New Order Indonesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslims Perspective*. Bandung: Mizan
- Ibrahim, Gufran Ali. 2004. *Mengelola Pluralisme*. Jakarta: Grasindo.
- Ihsan, A. Bakir. 2009. *Menebar Toleransi Menyemai Harmoni*. Bandung: Rosdakarya.
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Juergensmeyer, Mark. 2003. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Kahmad, Dadang. 2003. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. *Islam dan Modernisasi: Periaku Keagamaan Pengikut TQN di Masyarakat Perkotaan, Khususnya di Kota Bandung*. Bandung: PPS Unpad, 1999.
- _____. 2000. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia.

- Kamaruzzaman. 2001. *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesia Tera.
- Kantor Litbang Kota Bandung. 2007. *Profil Kota Bandung Menuju Kota Jasa yang Bermartabat*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Khaldun, Ibnu. 1986. *Muqaddimah* (Penerjemah: Ahmadie Thaha). Jakarta: Firdaus
- Kimball, Charles. 2003. *Kala Agama Jadi Bencana*. Bandung: Mizan.
- Koentjoroningrat. 1986. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Kung, Hans. 1986. *Christianity and the World Religions: Paths of Dialogue with Islam, Hinduism, and Buddhism*. Garden City, NY: Doubleday.
- Kurnia, Ganjar. 2008. “Merumuskan Indikator Bandung Agamais”. Makalah [transkripsi] disampaikan dalam Semiloka Pemantapan Bandung Agamais, Hotel Horison Bandung, 19-20 Nopember.
- Lan, Thung Ju. 2010. *Klaim, Kontestasi dan Konflik Identitas*. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia.
- Larana, Enrique, Hank Jonhston, Joseph Gusfield. 1994. *New Social Movement; From Ideology to Identity*, Philadelphia; Temple University Press.
- Lederach, John Paul. 1996. *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LkiS
- Lindhom, Tore (editor in-chief). 2010. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*. Yogyakarta: Kanisius.
- Little, David (ed.) 2007. *Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution*. New York City: Cambridge University Press.
- Lohanda, Mona. 2002. *Antara Prasangka dan Reality*, Jakarta: Pustaka Inspirasi.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. “Masa Depan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia” dalam Taher, Elza Peldi (ed.). 2009. *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun*

- Djohan Effendi*. Jakarta: Kompas dan ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).
- Madjid, Nurcholish. “Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang”. *Jurnal Ulumul Quran Vol. IV, No. 1*, Jakarta: LSAF, 1992.
- _____. 1990. “Hubungan Antar Umat Beragama: Antara Ajaran dan Kenyataan”, dalam W.A.L. Stokhof (red.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)*. Jakarta: INIS.
- McGuire. 1981. *Religion: The Social Context*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Maliki, Zainuddin. 2000. *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Galang.
- _____. 2004. *Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Miles, Matthew B dan A Michel Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (terjemah Tjetjep Rohendi). Jakarta: UI Press.
- Millie, Julian dan Agus Ahmad Safei. 2010. “Religious Bandung”, dalam *Inside Indonesia: a Quarterly Magazine on Indonesia*, Volume 100 April-June, Australia.
- Misrawi, Zuhairi. 2007. *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah.
- _____. 2010. *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*. Jakarta: Kompas.
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mouw, Richard J and Griffon, Sander. 1993. *Pluralism and Horizon*, Grand Rapids: William B. Erdmans Publishing Company.
- Muhammad, Afif. 2008. “Agama Sebagai Sumber Tata Nilai, Inspirasi, Motivasi dan Pembentukan Karakter dalam Pembangunan Kota Bandung”, makalah [transkripsi] disampaikan dalam Semiloka Pemantapan Bandung Agamais, Hotel Horison, 19-20 Nopember.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosdakarya.
- Murata, Sachiko dan William C. Chittick. 2005. *The Vision of Islam*. Yogyakarta: Suluh Press.

- Nelson, Brent. 1987. *Assimilation: the Ideal and the Reality*. American Immigration Control Foundation.
- O'Dea, Thomas F. 1985. *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Padmaatmadja, Tjepte Hidajat. 2008. *Kang Dada Pengabdian Tanpa Jeda*. Bandung: CV Natrat.
- _____. 2010. *Setahun Pengabdian Dada Rosada Bersama Ayi Vivananada*. Bandung: Natrat.
- Pitoyo. 2010. *Dada Rosada: Hidup Adalah Pilihan dan Proses*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Poloma, Margareth M. 1987. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali.
- Qodir, Zuly. 2009. "Kaum Minoritas dan Kebebasan Beragama di Indonesia" dalam Taher, Elza Peldi (ed.). *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Kompas dan ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).
- Rachman, Budhy Munawar. 2001. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina.
- _____. 2010. *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*. Jakarta: Grasindo.
- Rahardjo, M. Dawam. 2010. *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2006. *Islam dan Pluralisme; Akhlak al-Quran Menyikapi Perbedaan*, Jakarta: Penerbit Serambi.
- Ritzer, George dan Douglas Goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Robertson, Roland (ed). 1986. *Sosiologi Agama*, Alih Bahasa: Paul Rosyidi, tt, Aksara Persada.
- _____. 1993. *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: Rajawali.
- Roberts, Tyler T. 2002. *Spiritualitas Posreligius*. Yogyakarta: Qalam.
- Rumadi dan Ahmad Suaedy (ed). 2007. *Politisasi Agama dan Konflik Komunal; Beberapa Isu Penting di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.

- Ruvidah, Eva. 2003. "Perkembangan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Muslim Perkotaan Bandung." Yogyakarta: PPS UGM, Tesis.
- Sachedina, Abdulaziz. 2001. *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford: Oxford University Press.
- Saefullah, Ujang. 2010. "Dinamika Komunikasi dalam Mewujudkan Kerukunan Hidup Antarumat Berbeda Agama: Studi Kasus tentang Sikap, Perilaku dan Komunikasi Antarumat Berbeda Agama di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat". Bandung: Universitas Padjadjaran, Disertasi.
- Safei, Agus Ahmad. 2002. *Wasiat Pengembara: Ensiklopedi Pemikiran Emha Ainun Nadjib*. Yogyakarta: Tinta (Gup Kalam).
- _____. 2002. *Negeri yang Malang: Ensiklopedi Pemikiran Emha Ainun Nadjib*. Yogyakarta: Tinta (Gup Kalam).
- _____. 2002. *Hijah Menuju Cahaya: Riwayat Hidup K.H. Jujun Junaedi*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2003. *Memimpin dengan Hati yang Selesai: Jejak Langkah dan Pemikiran Baru Dakwah KH Syukriadi Sambas M.Si*. Bandung: Pustaka Setia.
- Safei, Agus Ahmad & Julian Millie. Religious Bandung II: The champion arrive. *Inside Indonesia a Quarterly Magazine on Indonesia*, No. 124, April-June.
- Saifudin, Ahmad Fedyani. 1986. *Konflik dan Integrasi: Pendekatan Faham dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Samosir, Leonardus. 2009. *Agama dengan Dua Wajah*. Jakarta: Obor.
- Scharf, Betty R. 2004. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Kencana.
- Seligman, Adam B., ed. 2003. *Essays on the Religious Roots of Tolerance*. Syracuse: Syracuse Univ. Press.
- Sealy, John, (1985), *Religious Education Philosophical Perspective*. London: George Allen & Unwin.
- Shaleh, Abdul Kodir. 2003. "Agama" Kekerasan. Yogyakarta: Prisma Sophi.
- Sidel, John T. 2006. *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Cornell: Cornell University Press.

- Smith, W. C. 1981. *Toward Theology: Faith and the Comparative History of Religion*, London & Basingstoke: The Macmillan Press.
- Smock, David, (ed.) 2002. *Interfaith Dialogue and Peacebuilding*, Washington DC: United States Institute of Peace.
- Soekanto, Soerjono.1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.
- Soetari, Endang. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Keagamaan dalam Lingkup Otonomi Daerah di Bandung*. Bandung: PPS Unpad, 2003.
- Suaedy, Ahmad dan Abidin Wakano. 2009. *Agama dan Pergeseran Representasi: Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Subkhan, Imam. 2007. *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sucipto, Herry. 2007. “Meruwat Pluralisme untuk Membangun Hubungan Harmonis Antar Umat Beragama”, dalam *Islam Mazhab Tengah*. Jakarta: Grafindo.
- Suganda, Her. 2007. *Jendela Bandung: Pengalaman Bersama Kompas*, Penerbit Buku Kompas.
- Suherman, Ahmad. 2010. “Universalisasi Nilai-nilai Komunikasi Bahasa dalam Kerukunan Umat Beragama.” Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Disertasi.
- _____. 2010. *Ensiklopedi Bandung Agamais*. Bandung: Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung.
- _____. 2008. “Implementasi Hasil Jasmara Agama dalam Mewujudkan Bandung Sebagai Kota Agama”. Makalah disampaikan dalam Semiloka Pemantapan Bandung Agamais, Hotel Horison Bandung, 19-20 Nopember.
- _____. 2009. *Bandung Agamais: Landasan, Pendekatan, Indikasi, dan Program Aksi*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Suherman, S.A. 2009. *Made in Bandung*. Bandung: DAR! Mizan.
- Sumartana. 2001, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarthana, (ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Kanisius.

- Suroso, Ako Maulana Ali. 2008. *Energi Agama dalam Kuasa*. Bandung: Mutara Press.
- Sururin (ed.). 2005. *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam*. Bandung: Nuansa.
- Swator, William Jr. 1993. *A Future for Religion*. London: Sage Publication.
- Syaefullah, Asep. 2007. *Merukunkan Umat Beragama*. Jakarta: Grafindo.
- Syam, Nur. 2010. *Agama Pelacur*. Yogyakarta: LKiS.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Taher, Elza Peldi (ed.). 2009. *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Kompas dan ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).
- Taher, Tarmizi. 2007. *Berislam Secara Moderat*. Jakarta: Grafindo.
- Tajrid, Amir. 2009. "Menjadikan Pluralitas Agama Sebagai Media Integrasi Sosial", makalah terbatas pada "The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)", Surakarta, 2-5 November.
- Tamara, M. Nasir dan Elza Pelda Taher (ed.). 1996. *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Tanja, Victor I. 1998. *Pluralisme Agama dan Problema Sosial*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Thoha, Anis Malik. 2006. *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis*, Jakarta: Penerbit GIP.
- Tibi, Bassam. 1994. *Krisis Peradaban Islam Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tim Impuls. 2010. *Mencungkil Sumbatan Toleransi*. Yogyakarta: Kanisius dan Impuls.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Tocqueville, Alexis De. 2007. *Democracy in America*. New York, NY: HarperCollins Publishers.
- Turner, Bryan S. 1983. *Religion and Social Theory*. New Jersey: Humanities Press.
- Wahid, Abdurrahman dan Daisaku Ikeda. 2010. *Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian*. Jakarta: Gramedia.
- Walzer, Michael. 1997. *On Toleration*. New Haven: Yale Univesity.

- West, Richard dan Lynn Turner. 2007. *Introduction Communication Theory*. Jakarta: Salemba.
- Wilson, Chris. 2008. *Ethno-Religious Violence in Indonesia*. London: Routledge.
- Yakub, Ali Musthafa. 2008. *Toleransi Antar Umat Beragama*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yewangoe, Andreas A. 2009. "Regulasi Toleransi dan Pluralisme Agama di Indonesia" dalam Taher, Elza Peldi (ed.). *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Kompas dan ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).
- _____. 2006. *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

DOKUMEN LAPORAN

- Center for Religious and Cross-Cultural Studies. 2009. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Program Pascasarjana UGM).
- _____. 2010. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Program Pascasarjana UGM).
- Moderate Muslim Society. 2009. *Laporan Akhir Tahun Toleransi dan Intoleransi*. Jakarta: Moderate Muslim Society.
- _____. 2010. *Laporan Akhir Tahun Toleransi dan Intoleransi, Ketika Negara Membiarkan Aksi Intoleransi*. Jakarta: Moderate Muslim Society.
- Setara Institute. 2008. *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute.
- _____. 2009. *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute.
- The Wahid Institute. 2008. *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- _____. 2009. *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: The Wahid Institute.

The Wahid Institute. 2010. *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: The Wahid Institute.

The Wahid Institute. 2010. *Laporan Penelitian Peta Gerakan Pro-Pluralisme di Indonesia; Pola Transformasi dan Penggunaan Pengetahuan*. Jakarta: The Wahid Institute.

WEBSITE

1. www.itb.ac.id
2. www.bandung.detik.com
3. www.infoanda.com
4. www.lintasberita.com
5. www.metrotvnews.com
6. www.antaraneews.com
7. www.pambdg.co.id
8. www.museum-indonesia.net
9. www.bandungtourism.com
10. www.pikiran-rakyat.com
11. www.klik-galamedia.com
12. www.tribunjabar.co.id
13. radarbandung.co.id
14. bandungekspres.com
15. www.bandung.go.id

KORAN

“Toleransi Versus Intoleransi”, *Kompas*, 16 Juni 2006

“Toleransi sebagai Kuasa Nilai”, *Kompas*, 24 Mei 2008

“Peradaban Dialog dan Toleransi”, *Kompas*, 16 nopember 2007

“Multiekspresi Keberagamaan”, *Kompas*, 21 September 2007

“NU dan Toleransi Kebangsaan”, *Kompas*, 28 Juli 2006

“Perlunya Fikih Lintas Agama”, *Kompas*, 16 Januari 2004



DAFTAR SINGKATAN

ABJAD	SINGKATAN	KETERANGAN
A	AGAP AKUR API APIUKUB	Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan Aliansi Kerukunan Antarumat Beragama Aliansi Pergerakan Islam Aliansi Pemuda Islam Untuk Kerukunan Umat Beragama
B	BA BANSER BBM BERMARTABAT BKPRMI BMW	Bandung Agamais Barisan Serbaguna Bandung Bebas Maksiat Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Bandung Maksiat Watch
C	CMB CRCS CSRSD	Corps Mubaligh Bandung Center for Religious and Cross Cultural Studies Center for Religious and Social Cultureal Diversity
D	DC DGI DMI	Dialogue Center Dewan Gereja-Gereja Indonesia Dewan Masjid Indonesia
F	FBP FKUB FKPP FKWMK FLADS FPI FSUB FSOI FUI FUUI	Forum Bandung Plural Forum Kerukunan Umat Beragama Forum Komunikasi Pondok Pesantren Forum Komunikasi Warga Muslim Karasak Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang Front Pembela Islam Forum Silaturahmi Umat Beragama Forum Silaturahmi Ormas Islam Front Umat Islam Forum Ulama Umat Islam
G	GARIS GERAM GKI GMNI	Gerakan Reformis Islam Gerakan Anti Maksiat Gereja Kristen Indonesia Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
H	HMI	Himpunan Mahasiswa Islam
I	ICRS ICRP IMM INCRES IPNU	Institute for Cultural and Religious Studies Indonesian Conference on Religion and Peace Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Institute for Culture and Religion Studies Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama

ABJAD	SINGKATAN	KETERANGAN
	IPSPG IRM ISKA	Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa Ikatan Remaja Muhammadiyah Ikatan Sarjana Katolik Indonesia
J	JAKATARUB JIL	Jaringan Kerja Antarumat Beragama Jaringan Islam Liberal
K	KCBI KMA KMLA -KB KWI	Keluarga Cendekiawan Budhis Indonesia Keputusan Menteri Agama Kaum Muda Lintas Agama Kota Bandung Konferensi Wali Gereja Indonesia
L	LA LDII LM LPI LS	Laskar Ababil Lembaga Dakwah Islam Indonesia Laskar Mujahidin Laskar Pembela Islam Laskar Sabilillah
M	MA MADIA MAKIN MAWI MDI MMS MUI MATAKIN	Mathlaul Anwar Masyarakat Dialog Antaragama Majelis Agama Kong Hu Chu Indonesia Majelis Agung Waligereja Indonesia Majelis Dakwah Islamiyah Moderate Muslim Society Majelis Ulama Indonesia Majelis Tinggi Agama Kong Hu Chu Indonesia
N	NU	Nahdhatul Ulama
O	ORMAS	Organisasi Masyarakat
P	PAKUAN PARMUSI PBM PERDA PERSIS PERTI PGI PHDI PIKI PKUB PMII PMKRI PUI PSAA PSAP	Paguyuban Aksi untuk Agama, Adat dan Kepercayaan Persaudaraan Muslimin Indonesia Peraturan Bersama Menteri Peraturan Daerah Persatuan Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah Persekutuan Gereja-gereja Seluruh Indonesia Parisada Hindu Darma Indonesia Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Pusat Kerukunan Umat Beragama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Persatuan Umat Islam Pusat Studi Agama-Agama Pusat Studi Agama dan Peradaban
R	RAPERDA	Rancangan Peraturan Daerah
S	SEMMI SEPILIS SKB SI	Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme Surat Keputusan Bersama Syarikat Islam
U	UIN	Universitas Islam Negeri
W	WALUBI WCRP WI	Perwalian Umat Budha Indonesia World Conference on Religious and Peace The Wahid Institute



TENTANG PENULIS



Dr. H. Agus Ahmad Safei, M.Ag. memperoleh gelar Doktor Sosiologi-Antropologi dari Universitas Padjadjaran. Sejak mahasiswa, ia menulis banyak artikel yang tersebar di berbagai media, baik koran, tabloid, majalah, maupun jurnal, baik yang terbit di dalam maupun luar negeri, seperti *Inside Indonesia: A Quarterly Magazine on Indonesia*, *The International Journal of Social Sciences*, *American Journal of Applied Sciences*, *Man in India*, *Journal of Critical Reviews*, *International Journal of Advanced Science and Technology*, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, dan lain-lain. Sampai saat ini, sudah puluhan judul buku yang ditulisnya. Tahun 2009, memperoleh beasiswa Sandwich-Like menjadi visiting Ph.D student di Monash University, Melbourne, Australia. Tahun 2010, mendapat beasiswa menjadi visiting scholar melalui program Academic Writing and Cross-Cultural Studies di Institut für Arabistik und Islamwissenschaft, Gottingen University, Republik Federal Jerman. Pada tahun yang sama, ia juga belajar tentang metodologi riset sosial di lembaga riset Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Jerman. Tahun 2015 mendapat beasiswa International Seminar for Islamic Higher Education di Ryerson University, Toronto, Kanada. Tahun 2017, mendapat skema riset internasional di Australia tentang kontribusi dakwah komunitas muslim Indonesia di Australia. Sebagai akademisi, ia juga aktif mengikuti berbagai seminar, *workshop*, diskusi, dan konferensi, baik di dalam maupun luar negeri. Seperti pada 2012, ia mengikuti *the 6th Annual International Conference on Sociology* di Athena, Yunani, Canada. Pada tahun 2016, ia juga mengikuti *International Conference for Academic*

Disciplines di Universitas Autonom de Barcelona, Spanyol. Pada tahun yang sama, ia mengikuti *International Seminar on The Role of Mosque in Building Civilization* di Beirut, Lebanon. Sejak tahun 1997 sampai sekarang, aktif menjadi fasilitator berbagai kegiatan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di Biro Yanbangsos, termasuk menjadi fasilitator program English for Ulama. Pada momen peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun 2015, ia mendapat kehormatan sejarah dengan menjadi pembawa acara momen salat Jumat bersama para kepala negara dan delegasi KAA. Akhir tahun 2015, ia juga terpilih menjadi salah seorang nomine dosen teladan tingkat nasional di lingkungan Kementerian Agama RI kategori dosen sosial humaniora. Sebagai dosen jalanan (dosen yang hobinya jalan-jalan), ia juga banyak melakukan perjalanan lintas budaya ke berbagai negara yang tersebar di benua Asia, Afrika, Australia, Eropa, dan Amerika. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: agus.safei@uinsgd.ac.id.



SOSIOLOGI TOLERANSI

**Kontestasi, Akomodasi,
Harmoni**

Setiap buku punya riwayatnya sendiri. Tak kecuali buku ini. Pada awalnya, buku ini merupakan naskah disertasi ketika penulis menyelesaikan program Doktor Sosiologi di Universitas Padjadjaran. Pemilihan topik utama kajian buku ini yakni dinamika toleransi beragama yang dilakukan di tengah merebaknya gejala kemunduran atas rasa dan semangat toleransi yang sedang dibangun. Berbagai tindakan kekerasan dan intoleransi atas nama agama terjadi di berbagai tempat dalam rentang waktu yang bersamaan dengan penggarapan buku ini.

Pada konteks ini benar kata sebuah ungkapan bahwa jika toleransi mati maka kekerasan terbeli. Tindakan kekerasan dan intoleransi yang terjadi di masyarakat merupakan akibat matinya toleransi. Padahal, toleransi hadir untuk saling menghargai agar realitas tetap eksis dengan segala warna-warninya. Begitupun eksistensi sebuah bangsa yang hadir di atas keragaman ras, suku, budaya, dan agama. Ia akan semakin kokoh ketika keragaman itu bersinergi dalam rangkaian interaksi untuk saling mengisi dan melengkapi. Harmoni bukan hegemoni yang menafikan kompetensi. Ia justru menjadi ajang bagi terjadinya kontestasi beragama kebaikan (*fastabiqul khairat*) yang dihadirkan oleh para pemeluk agama yang berbeda. Inilah substansi dari buku ini, bagaimana dinamika toleransi yang terjadi dibedah dari sudut pandang sosiologi.

Ikhtiar menghadirkan agama sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Salah satu yang bisa dikerjakan adalah dengan menghadirkan kesadaran toleransi beragama. Sebab, toleransi merupakan fundamen dalam beragama. Pada titik inilah, menurut hemat penulis topik dinamika toleransi beragama di Kota Bandung sangat penting untuk diangkat ke permukaan. Lebih penting lagi, buku ini menunjukkan bahwa masih ada wilayah di negara ini yakni di Kota Bandung, di mana toleransi beragama masih dapat dipelihara dengan baik.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku_deepublish
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Sosiologi

ISBN 978-623-02-1395-3



9 786230 213953